

MEMPERKOKOH FONDASI SEBAGAI PREFERENSI UTAMA AKSESIBILITAS FINANSIAL UMKM

STRENGTHENING THE FOUNDATION AS THE PREFERRED
FINANCIAL ACCESSIBILITY FOR MSMEs



PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION



MEMPERKOKOH FONDASI SEBAGAI PREFERENSI UTAMA AKSESIBILITAS FINANSIAL UMKM

STRENGTHENING THE FOUNDATION AS THE PREFERRED FINANCIAL ACCESSIBILITY FOR MSMEs

Tema ini mencerminkan komitmen PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo dalam memperkuat peran strategisnya sebagai penyedia akses finansial yang inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui layanan penjaminan yang adaptif, terjangkau, dan menjangkau seluruh lapisan usaha, Jamkrindo berupaya menjadi preferensi utama dalam menjembatani UMKM yang memiliki prospek usaha tetapi belum sepenuhnya memenuhi kriteria perbankan. Penguatan fondasi organisasi diwujudkan melalui transformasi digital, perbaikan tata kelola, serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi layanan penjaminan.

Selain itu, Jamkrindo senantiasa mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap strategi bisnis dan operasionalnya. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai inisiatif sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui pengembangan program tanggung jawab sosial yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Jamkrindo tidak hanya memperluas dampak sosial dari layanan penjaminan, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan yang tangguh dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

This theme reflects PT Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo's commitment to strengthening its strategic role as a provider of inclusive financial access for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Through adaptive, affordable, and comprehensive guarantee services, Jamkrindo strives to be the main preference in bridging MSMEs that have business prospects but have not fully met the banking criteria. The strengthening of organizational foundations is achieved through digital transformation, improved governance, and enhanced synergy with various stakeholders to expand the reach and improve the efficiency of guarantee services.

Additionally, Jamkrindo consistently integrates sustainability principles into every business and operational strategy. This commitment is reflected in various social and environmental initiatives aimed at improving community welfare and strengthening national economic resilience. Through the development of social responsibility programs aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), Jamkrindo not only expands the social impact of its guarantee services but also builds a resilient and competitive institutional foundation to support the sustainable growth of SMEs.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT



3	PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION		
4	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENT		
6	IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN OVERVIEW OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE		
8	PENJELASAN DIREKSI [OJK D.1][GRI 2-22] REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS [OJK D.1][GRI 2-22]		
20	TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT		
28	Informasi Umum Perusahaan General Information of the Company		
30	Sekilas tentang Jamkrindo Jamkrindo at a Glance		
34	VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN [OJK C.1] VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE [OJK C.1]		
		36	Bidang Usaha Serta Produk dan Jasa [OJK C.4][GRI 2-6] Line of Business, Products, and Services [OJK C.4][GRI 2-6]
		41	STRUKTUR ORGANISASI [GRI 2-9] ORGANIZATIONAL STRUCTURE [GRI 2-9]
		44	Struktur Pemegang Saham [GRI 2-1][OJK C.3] Shareholders Structure [GRI 2-1][OJK C.3]
		46	Struktur Grup dan Kelompok Usaha Group and Business Group Structure
		47	Informasi Entitas Anak Perusahaan [GRI 2-2] Subsidiary Entity Information [GRI 2-2]
		48	Wilayah Operasional [GRI 2-6] [OJK C.3] Operational Area [GRI 2-6] [OJK C.3]
		54	Skala Perusahaan [GRI 2-6] [OJK C.3] Company Scale [GRI 2-6] [OJK C.3]



55	Informasi tentang Karyawan [GRI 2-7][OJK C.3] Information about Employees [GRI 2-7][OJK C.3]	190	LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2] FEEDBACK SHEET [OJK G.2]
66	TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE	192	TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [OJK G.3] RESPONSE TO FEEDBACK ON THE PREVIOUS YEAR'S REPORT [OJK G.3]
108	KINERJA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE	193	DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI POJK 51/ POJK.03/2017 [OJK G.4] LIST OF DISCLOSURES ACCORDING TO POJK 51/ POJK.03/2017 [OJK G.4]
110	KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY ECONOMIC PERFORMANCE	196	INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2021 THE 2021 GRI CONTENT INDEX STANDARD
126	KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY ENVIRONMENTAL PERFORMANCE	202	INDEKS GRI G4 PENGUNGKAPAN SEKTOR LAYANAN KEUANGAN 2013 INDEX GRI G4 DISCLOSURE OF FINANCIAL SERVICES SECTOR 2013
142	KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE		
189	VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1] WRITTEN VERIFICATION BY AN INDEPENDENT PARTY [OJK G.1]		

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

OVERVIEW OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Deskripsi Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Kinerja Ekonomi [OJK B.1] Economic Performance [OJK B.1]				
Kuantitas Produk dan Jasa Quantity of Product and Services	Kategori Produk/Jasa Products/Services Categories	Jasa Penjaminan Kredit Credit Guarantee Services	Jasa Penjaminan Kredit Credit Guarantee Services	Jasa Penjaminan Kredit Credit Guarantee Services
Produk ramah lingkungan*) Eco-friendly products*)	Unit produk Product Unit	-	-	-
Imbal jasa penjaminan bersih Net Guarantee fee	Jutaan Rupiah IDR Million	6.922.049	6.354.728	5.275.810
Labar/(Rugi) bersih Net Profit (Loss)	Jutaan Rupiah IDR Million	1.161.494	1.436.849	1.280.157
Pelibatan pemasok lokal (barang dan jasa) Involvement of local suppliers (goods and services)	Perusahaan/Mitra Companies/Partners	276	308	236
Kinerja Sosial [OJK B.3] Social Performance [OJK B.3]				
Jumlah total pegawai tetap Total number of Permanent Employee	Orang People	1.150	1.075	1.025
Jumlah pegawai tetap wanita Number of Female Permanent Employee	Orang People	500	465*	428
Tingkat perputaran pegawai Rate of Employee Turnover	Persen Percentage	2,26	1,86	3,90
Rata-rata pelatihan karyawan Average of Employee Trainings	Jam per karyawan per tahun Hours by employee per year	56,04	190,38	334,19
Biaya pendidikan dan pelatihan pegawai Employee's Training and Education Costs	Miliar Rupiah IDR Billion	36,6	29,5	23,3
Jumlah dana penyaluran dana TJSI BUMN Number of TJSI BUMN's Fund Distribution	Miliar Rupiah IDR Billion	10,94	8,15	16,69

Deskripsi Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Kepuasan pelanggan Customer satisfaction	Nilai Score	89,64	88,85	88,39
Kinerja Lingkungan [OJK B.2] Environmental Performance [OJK B.2]				
Penggunaan kertas Paper Consumption	Rim Reams	1.026	1.088	837
Penggunaan energi (listrik dan BBM) Energy Consumption (Electricity and Fuel)	Gigajoule Gigajoule	5.323	5.274,15	5.257,05
Penggunaan air Water Consumption	Meter kubik	12.849	10.376	12.133
Penambahan (Pengurangan) Emisi Cakupan 1 dari Penggunaan BBM 1st Coverage Emission Addition (Reduction) of use of Fuel	KgCO2eq	3.465	12.610	175.102
Penambahan (Pengurangan) Emisi Cakupan 2 dari Penggunaan Listrik 2nd Coverage Emission Addition (Reduction) of Use of Electricity	KgCO2eq	110,22	43	121
Penambahan (Pengurangan) Limbah dan Efluen **) Addition (Reduction) of Waste and Effluent **)	Ton Tonnes	-	-	-
Pelestarian Keanekaragaman Hayati/Biaya Penanaman Pohon Conservation of Biodiversity/Costs of Tree Planting	Rp juta IDR Million	155,27	52,09	507,67

PENJELASAN DIREKSI [OJK D.1][GRI 2-22]

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS [OJK D.1][GRI 2-22]

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatatkan kinerja yang optimal di tengah perekonomian nasional yang penuh tantangan di sepanjang tahun 2024. Pendapatan penjaminan bersih, pendapatan komisi, serta pendapatan investasi bersih mencatatkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, bertambahnya beban penjaminan, terkhusus beban klaim bruto, menyebabkan pendapatan penjaminan bersih dan laba bersih tahun berjalan tahun 2024 terkoreksi dibandingkan tahun 2023.

Jamkrindo menyadari sepenuhnya tantangan pasar yang dihadapi dan telah mengambil langkah dan upaya terbaik untuk merespons situasi tersebut. Langkah dan upaya strategis yang telah dan akan terus dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja antara lain melakukan inovasi bisnis model, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta. Ditopang pengelolaan risiko yang *prudent*, inovasi produk dan layanan yang berkesinambungan, serta mengukuhkan efisiensi, kami meyakini berbagai langkah dan upaya yang diambil Perseroan tersebut akan memperkuat kinerja Jamkrindo dalam jangka panjang.

Melalui Laporan Keberlanjutan inilah, kami menyampaikan pencapaian kinerja atas rencana, strategi, dan implementasi kebijakan beserta berbagai langkah dan upaya yang dilakukan Jamkrindo sepanjang tahun 2024. Selain kinerja aspek ekonomi, selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan, laporan ini juga menyampaikan secara komprehensif raihan kinerja aspek lingkungan dan sosial.

Sekilas Ekonomi Global dan Nasional

Pada tahun 2024, perekonomian global mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia berada pada level 3,2%, sedikit lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 3,3%. Penurunan ini dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain ketegangan geopolitik yang terus berlanjut seperti konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina serta kebijakan moneter ketat yang masih diberlakukan di negara-negara maju. Meskipun demikian, tekanan inflasi global mulai mereda, dengan tingkat inflasi yang diperkirakan turun menjadi 5,7% dari sebelumnya 6,7% pada tahun 2023.

Dear Shareholders and Stakeholders

We extend our highest gratitude to the Almighty God for His abundant grace, which has enabled PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) recorded commendable performance amidst the challenging national economy throughout 2024. Net guarantee income, commission income, and net investment income recorded an increase compared to the previous year. However, the increase in guarantee expenses, particularly the gross claim expenses, resulted in a downward adjustment of both net guarantee income and net profit for the current year of 2024 when compared to 2023.

Jamkrindo is fully cognizant of the market challenges faced and has undertaken its best efforts and strategic responses to navigate the situation. The strategic measures that have been implemented and will continue to be pursued by the Company to enhance performance include innovating business models, technology leadership, increasing investment, and developing talent. Supported by prudent risk management, continuous innovation in product and service, and a firm commitment to operational efficiency, we are confident that these initiatives will fortify Jamkrindo's long-term performance and sustainability.

Through this Sustainability Report, we present the performance achievements of plans, strategies, and implementation of policies along with the various initiatives and efforts undertaken by Jamkrindo throughout 2024. In addition to economic performance, in line with the principles of sustainable finance, this report also comprehensively discloses the achievements in the environmental and social performance.

Overview of the Global and National Economy

In 2024, the global economy experienced a deceleration compared to the previous year. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth at 3.2%, slightly below the 2023 achievement of 3.3%. This decline was triggered by a number of factors, including ongoing geopolitical tensions most notably the Russia-Ukraine and Israel-Palestine conflicts as well as the continued implementation of tight monetary policies across advanced economies. However, global inflationary pressures began to ease, with the inflation rate forecasted to fall to 5.7% from 6.7% in 2023.

Di tengah pelemahan perekonomian global, beberapa mitra dagang utama Indonesia mencatatkan kinerja ekonomi yang cukup solid. Singapura mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,0%, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,1%. Malaysia juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%, lebih tinggi dari 3,6% pada tahun 2023. Di sisi lain, Tiongkok justru mencatatkan perlambatan, meskipun tetap tumbuh positif dari 5,4% pada tahun 2023 menjadi 5,0% pada tahun 2024. Perlambatan juga terjadi pada ekonomi Amerika Serikat, meskipun turun tipis, yaitu dari 2,9% pada tahun 2023 menjadi 2,8% pada 2024.

Sejalan dengan itu, tren perlambatan juga terjadi pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang 2024, sedikit di bawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%, dan belum mencapai target pertumbuhan dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar 5,2%. Kendati demikian, capaian ini masih berada dalam kisaran proyeksi berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan Asian Development Bank (ADB), yang memperkirakan pertumbuhan Indonesia berada di kisaran 5,0%. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1% dan Kementerian Keuangan memperkirakan berada dalam rentang 5,0%–5,2%.

BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 ditopang oleh bertumbuhnya semua lapangan usaha, termasuk jasa keuangan. Walau demikian, pertumbuhan lapangan usaha ini sedikit melambat dari 4,77% pada tahun 2023 menjadi 4,74% pada tahun 2024. Secara spesifik, berkaitan dengan kinerja sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor ini terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Namun demikian, khusus untuk perusahaan penjaminan, per 31 Desember 2024, nilai aset terkontraksi 0,04% yoy dengan nilai Rp46,39 triliun. Adapun outstanding penjaminan per Desember 2024 tercatat terkontraksi 0,71% yoy menjadi Rp419,90 triliun.

Dukungan Jamkrindo terhadap Keuangan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi antara lain Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selaras dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan

Amid the global economy slowdown, several of Indonesia's main trading partners demonstrated relatively strong economic performance. Singapore recorded growth of 4.0%, up sharply compared to the previous year which was only 1.1%. Malaysia also experienced an increase with economic growth reaching 5.1%, higher than 3.6% in 2023. Conversely, China experienced a modest slowdown, although it maintained positive growth, decelerating from 5.4% in 2023 to 5.0% in 2024. A slowdown also occurred in the United States economy, although it fell slightly, namely from 2.9% in 2023 to 2.8% in 2024.

In parallel, Indonesia's economic growth exhibited a slight deceleration. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy grew by 5.03% throughout 2024, slightly below the previous year's realization of 5.05%, and has not reached the growth target in the 2024 State Budget which was set at 5.2%. However, this achievement remained within the range of projections from various international institutions, such as the World Bank, IMF, and Asian Development Bank (ADB), which projected Indonesia's growth at around 5.0%. Meanwhile, Bank Indonesia projected growth at 5.1% and the Ministry of Finance forecasted a range of 5.0%–5.2%.

Statistics Indonesia said that Indonesia's economic growth in 2024 was supported by the growth of all business sectors, including financial services. However, the growth of this business sector slowed slightly from 4.77% in 2023 to 4.74% in 2024. Regarding the performance of the financial services sector, in particular, the Financial Services Authority (OJK) assessed that the stability of this sector was stable amid the dynamics of the global and domestic economy. However, specifically for guarantee companies, as of December 31, 2024, the value of assets contracted by 0.04% yoy with a value of IDR 46.39 trillion. The outstanding guarantee as of December 2024 was recorded to have contracted 0.71% yoy to IDR 419.90 trillion..

Jamkrindo's Support for Sustainable Finance

The Indonesian government continues to demonstrate its commitment to realizing sustainable development as mandated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for the period 2020–2024. Sustainable development is defined as a deliberate and structured effort to integrate environmental, social, and economic aspects into development strategies, with the overarching objective of preserving ecological integrity while ensuring the safety, welfare, and quality of life of both present and future generations.

As part of efforts to realize sustainable development, the government has issued a number of regulations, including Presidential Regulation Number 111 of 2022 concerning the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). In alignment with these national priorities, the Financial Services Authority (OJK) has issued POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning

Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Secara resmi, sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo baru dikenai kewajiban untuk menerapkan POJK tersebut sejak 1 Januari 2024. Namun demikian, Perseroan telah mengambil langkah proaktif dengan mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan lebih awal, sebagai bagian dari komitmen kuat terhadap keberlanjutan.

Bagi Jamkrindo, keberlanjutan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan nilai dasar dalam menjalankan usaha. Perseroan meyakini bahwa peran perusahaan tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Komitmen ini diwujudkan melalui pengalokasian dana untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *corporate social responsibility* (CSR), serta pengelolaan investasi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, Jamkrindo juga berupaya menerapkan operasional kantor yang ramah lingkungan melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan Jamkrindo untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Jamkrindo menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan pada tahun 2024, terutama di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Untuk merespons tantangan tersebut, Perseroan telah menetapkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan volume penjaminan dengan target mencapai Rp 414 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja keuangan, tetapi juga untuk memperkuat kontribusi Perseroan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Dalam upaya mencapai target tersebut, Jamkrindo mengimplementasikan inovasi teknologi dan digitalisasi layanan melalui *platform* Jamkrindo Online Suretyship. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga Perseroan dapat merespons kebutuhan mitra penjaminan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang *robust* menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras Jamkrindo dengan prinsip keberlanjutan dan dapat mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul dalam proses penjaminan.

Selaras dengan itu, Jamkrindo juga berkomitmen untuk mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Program yang dikemas untuk membantu mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut diimplementasikan secara merata di

the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies or POJK Sustainable Finance. While Jamkrindo, as a credit guarantee institution, became formally subject to this regulation as of January 1, 2024. However, the Company has taken proactive initiatives by implementing sustainable finance principles earlier, as part of a strong commitment to sustainability.

For Jamkrindo, sustainability is not just a regulatory obligation, but also a foundational corporate value that underpins its business operations. The Company believes that the role of a company is not only limited to achieving financial profit, but also includes environmental and social responsibility. This commitment is realized through the allocation of funds for the social and environmental responsibility (TJSL) or corporate social responsibility (CSR) program, as well as investment management that is in line with the principles of sustainability. In addition, Jamkrindo also strives to implement environmentally friendly office operations through the 3R principle (*Reduce, Reuse, Recycle*) as a real contribution to supporting sustainable development.

Jamkrindo's Policy Response to the Challenges in Executing Its Sustainability Strategy

In 2024, Jamkrindo encountered significant challenges in executing its sustainability strategy, especially amidst the ever-changing economic dynamics. In response, the Company has established a policy that focuses on increasing the volume of guarantees with a target of reaching IDR 414 trillion, an increase compared to the previous year. This policy is not only aimed at encouraging financial performance growth, but also to strengthen the Company's contribution to the national economy, especially in supporting the micro, small and medium enterprises (MSMEs) sector which is the backbone of the Indonesian economy.

In an effort to achieve this target, Jamkrindo implemented technological innovation and service digitalization through the Jamkrindo Online Suretyship platform. This initiative is expected to accelerate business processes and improve operational efficiency, enabling the Company to respond to customer needs more quickly and effectively. In addition, the implementation of robust risk management is a priority to ensure that every action undertaken by Jamkrindo is in line with the principles of sustainability and that potential risks inherent in the guarantee process are adequately mitigated.

In parallel, Jamkrindo is also committed to supporting the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs). The program, which is packaged to help realize economic equality and improve community welfare, is implemented evenly in various regions in Indonesia. In every TJSL program, the aspect of sustainable

berbagai daerah di Indonesia. Dalam setiap program TJSI, aspek tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama Jamkrindo. Hal tersebut selaras dengan arahan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu program pemberdayaan yang dijalankan perusahaan sejalan dengan prinsip penciptaan *creating shared value* (CSV) yang menempatkan penciptaan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersama-sama yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Melalui berbagai kebijakan dan program tersebut, Jamkrindo optimis dapat mengatasi tantangan yang ada dan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan meyakini kombinasi antara inovasi teknologi, manajemen risiko yang baik, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan akan memperkuat posisi Jamkrindo di industri penjaminan kredit serta memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Konsistensi Jamkrindo menjalankan bisnis dan strategi keberlanjutan mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal berupa penghargaan. Pada tahun 2024, Perseroan meraih penghargaan antara lain *IMACO 2024 Outstanding Financial Accessibility Expansion through Strategic Collaboration*; *Indonesia Most Reputable Company 2024 Category of Guarantee Company*; *GRC & Performance Excellence Award 2024 The Best GRC for Risk Management 2024*; *GRC & Performance Excellence Award 2024 The Best GRC for Corporate Finance 2024*; *BCOMSS 2024 Kategori Sustainability Community Involvement and Development (CID) Kesehatan*; *Marketeers Editor's Choice Award 2024 Digital Program for SME of the Year (JADE)*; *PPM Manajemen Award 2024 The Most Committed In Organizational Development 2024*; serta *7 Most Popular Brand of the Year 2024 Kategori Keuangan – Jasa Keuangan Non Perbankan*.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024

Manajemen Jamkrindo dengan dukungan segenap karyawan telah melaksanakan operasional bisnis dan strategi keberlanjutan dengan menyelaraskan antara pencapaian kinerja aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dengan hasil sebagai berikut:

Kinerja Aspek Ekonomi

Per 31 Desember 2024, jumlah kredit yang dijamin Jamkrindo tercatat sebesar Rp325,555 triliun, atau 86,04% jika dibandingkan dengan tahun 2023, yang mencapai Rp378,37 triliun dan sebesar 91,96% dari target RKAP 2024 yaitu sebesar Rp354,01 triliun. Dengan peningkatan penjaminan tersebut, imbal jasa penjaminan yang diperoleh Jamkrindo meningkat 14,76% menjadi Rp7,73 triliun dari sebelumnya sebesar Rp6,74 triliun. Perolehan imbal jasa penjaminan tersebut di bawah target RKAP 2024 yaitu sebesar Rp8,14 triliun.

development goals is Jamkrindo's main focus. This is in line with the direction of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), namely the empowerment program run by the company in line with the principle of creating shared value (CSV) which places the creation of economic value and social value together that can be felt by the community.

Through these policies and programs, Jamkrindo is optimistic that it can overcome existing challenges and continue to contribute to sustainable economic growth. The Company believes that the combination of technological innovation, good risk management, and commitment to social and environmental responsibility will strengthen Jamkrindo's position in the credit guarantee industry and provide long-term benefits for all stakeholders.

Jamkrindo's consistency in running its business and sustainability strategies has received appreciation from external institutions in the form of multiple accolades in 2024 including *IMACO 2024 Outstanding Financial Accessibility Expansion through Strategic Collaboration*; *Indonesia Most Reputable Company 2024 Category of Guarantee Company*; *GRC & Performance Excellence Award 2024 The Best GRC for Risk Management 2024*; *GRC & Performance Excellence Award 2024 The Best GRC for Corporate Finance 2024*; *BCOMSS 2024 Category of Sustainability Community Involvement and Development (CID) Health*; *Marketeers Editor's Choice Award 2024 Digital Program for SME of the Year (JADE)*; *PPM Management Award 2024 The Most Committed In Organizational Development 2024*; and *7 Most Popular Brand of the Year 2024 in the Finance Category - Non-Banking Financial Services*.

Implementation of Sustainable Finance in 2024

Jamkrindo Management with the support of all employees has implemented business operations and sustainability strategies by aligning the achievement of economic, environmental, and social aspects of performance with the following results:

Economic Aspect Performance

As of December 31, 2024, the total of credit guaranteed by Jamkrindo was recorded at IDR 325.555 trillion, or 86.04% compared to 2023, which reached IDR 378.37 trillion. It is equivalent to 91.96% of the 2024 RKAP target of IDR 354.01 trillion. As a result of the growth in guarantee volume, Jamkrindo recorded an increase in guarantee fees by 14.76%, reaching IDR 7.73 trillion, up from IDR 6.74 trillion in the previous year. The guarantee fee obtained was below the 2024 RKAP target of IDR8.14 trillion.

Di sisi lain, jumlah pendapatan penjaminan bersih tercatat sebesar Rp6,92 triliun atau 98,70% dari target RKAP 2024 sebesar Rp7,01 triliun, naik dibanding raihan tahun 2023 yaitu sebesar Rp6,35 triliun. Setelah dikurangi beban penjaminan bersih, Perseroan membukukan pendapatan penjaminan bersih sebesar Rp1,90 triliun atau 88,48% dari target sebesar Rp2,15 triliun. Pencapaian tersebut mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp2,78 triliun. Lebih lanjut, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan pada tahun 2024 sebesar Rp1,16 triliun atau 86,24% dari target sebesar Rp1,35 triliun. Laba bersih tersebut turun dibandingkan perolehan tahun 2023 yang mencapai Rp1,44 triliun. Penurunan laba bersih antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya beban penjaminan bersih dari Rp3,58 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp5,02 triliun pada tahun pelaporan.

Selanjutnya, per 31 Desember 2024, Jamkrindo mencatatkan kenaikan aset dari Rp32,23 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp32,36 triliun. Sedangkan ekuitas tercatat mengalami penurunan dari Rp13,35 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp13,34 triliun pada tahun pelaporan. Adapun liabilitas hingga akhir tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp18,88 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp19,01 triliun pada tahun 2024.

Kinerja Aspek Lingkungan

Pemenuhan tanggung jawab terhadap kinerja aspek lingkungan direalisasikan Jamkrindo melalui kepatuhan terhadap berbagai regulasi lingkungan saat membangun dan menjalankan operasional kantor, serta dalam pengelolaan dana investasi. Implementasi nyata dalam pengoperasian kantor yang ramah lingkungan dilakukan melalui pengelolaan material kertas, energi, emisi, air, air limbah, limbah, dan sebagainya dengan berpedoman pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse & Recycle*).

Penerapan prinsip 3R antara lain ditandai dengan turunnya penggunaan kertas dari 1.088 rim pada tahun 2023 menjadi 1.026 rim pada tahun 2024. Penurunan ditopang antara lain oleh pemanfaatan *E-Office (Snapjam)* untuk pengiriman surat/memorandum internal, serta penggunaan teknologi informasi (*e-mail*) dalam menyampaikan informasi. Di sisi lain, jika dalam laporan ini terdapat kenaikan penggunaan air, juga listrik dan BBM yang berdampak langsung pada kenaikan emisi gas rumah kaca, hal itu bukan karena kegagalan penerapan 3R, tetapi lebih dipengaruhi oleh adanya penambahan karyawan dan kegiatan operasional perusahaan.

Komitmen Jamkrindo terhadap aspek lingkungan juga diwujudkan dengan mengalokasikan biaya lingkungan sebesar Rp788,14 juta, naik signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp445,35 juta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program prolingkungan seperti biaya *sewage treatment plant*, biaya *sanitact ladybin*, biaya perawatan taman, serta biaya pekerjaan *landscape* Gedung Jamkrindo

On the other hand, the amount of net guarantee income was recorded at IDR 6.92 trillion or 98.70% of the 2024 RKAP target of IDR7.01 trillion, an increase compared to the 2023 achievement of IDR 6.35 trillion. After deducting the net guarantee expense, the Company recorded net guarantee income of IDR 1.90 trillion or 88.48% of the target of IDR 2.15 trillion. This achievement experienced a contraction compared to 2023 figure of IDR 2.78 trillion. Furthermore, the Company recorded a profit for the year in 2024 of IDR 1.16 trillion or 86.24% of the target of IDR1.35 trillion. The net profit decreased compared to the 2023 achievement which reached IDR1.44 trillion. The decrease in net profit was influenced by, among others, the increase in the net guarantee expenses from IDR3.58 trillion in 2023 to IDR5.02 trillion in the reporting year.

Furthermore, as of December 31, 2024, Jamkrindo recorded an increase in assets from IDR32.23 trillion in 2023 to IDR32.36 trillion. Meanwhile, equity was recorded to have decreased from IDR13.35 trillion in 2023 to IDR13.34 trillion in the reporting year. Meanwhile, liabilities until the end of 2024 increased from IDR18.88 trillion in 2023 to IDR19.01 trillion in 2024.

Environmental Aspect Performance

Jamkrindo's commitment to environmental responsibility is demonstrated through full compliance with prevailing environmental regulations in both the construction and operation of its office facilities, as well as in the management of its investment funds. Practical implementation in operating an environmentally friendly office is carried out through the management of paper materials, energy, emissions, water, wastewater, solid waste, and so on by adhering to the 3R principle (*Reduce, Reuse & Recycle*).

The implementation of the 3R principle is reflected in the reduction of paper usage from 1,088 reams in 2023 to 1,026 reams in 2024. The decline is supported by, among others, the use of *E-Office (Snapjam)* for internal correspondence and memoranda, as well as the use of information technology (*e-mail*) for information dissemination. Conversely, any increase noted in this report in the use of water, electricity, and fuel—resulting in a corresponding rise in greenhouse gas emissions—is not indicative of a failure in the application of 3R principles but is rather attributable to the addition of employees and company operations.

Jamkrindo's commitment to environmental aspects is also realized by allocating environmental costs of IDR788.14 million, a significant increase compared to 2023 which reached IDR445.35 million. The funds are used to finance various pro-environmental programs such as sewage treatment plant costs, sanitact ladybin costs, garden maintenance costs, and landscape work costs for the Jamkrindo Building

Kinerja Aspek Sosial

Jamkrindo menjalankan tanggung jawab kinerja aspek sosial dengan merilis berbagai program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan. Untuk karyawan dan manajemen, Perseroan menjaga hubungan industrial yang harmonis tanpa adanya sengketa perburuhan maupun pelanggaran hak normatif seperti diskriminasi, kerja paksa, atau pelanggaran upah minimum. Selain menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, Jamkrindo juga fokus pada pengembangan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pelatihan sebanyak 272 kali, yang diikuti oleh 7.766 karyawan.

Perseroan berupaya memberikan informasi produk dan layanan secara lengkap, didukung oleh SDM yang andal, serta terus melakukan inovasi guna memenuhi harapan segenap mitranya. Lebih dari itu, Jamkrindo juga menyiapkan kanal pengaduan serta responsif dan memberikan solusi terbaik atas keluhan/pengaduan yang masuk. Komitmen Perseroan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap mitra penjaminan membuahkan hasil dengan raihan kepuasan pelanggan sebesar 89,64%.

Selanjutnya, pemenuhan tanggung jawab kepada Pemerintah, Jamkrindo merealisasikan pembayaran beban pajak final sebesar Rp167,87 miliar dan pajak penghasilan sebesar Rp125,56 miliar. Adapun kepada pemasok, Jamkrindo memperlakukan semua pemasok secara setara, termasuk untuk mendapatkan informasi tender barang dan jasa, serta Perseroan mengutamakan pemasok lokal/nasional. Terkhusus untuk masyarakat, Jamkrindo secara konsisten memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program TJSL dengan biaya sebesar Rp18,56 miliar, yang sekaligus merupakan upaya nyata dan dukungan konkret Perseroan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Dana TJSL disalurkan melalui Program TJSL Non PUMK (CID), Program TJSL Non PUMK (Non CID), Pendanaan UMK Mandiri dan Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi.

Strategi Pencapaian Target

Pencapaian kinerja Jamkrindo turut ditentukan oleh ketepatan inisiatif dan kebijakan strategis yang disampaikan dalam RKAP Tahun 2024 dan diimplementasikan di sepanjang tahun pelaporan. Selain strategi pencapaian aspek ekonomi, di dalam RKAP, Perseroan juga menyampaikan berbagai rencana dan kegiatan untuk aspek lingkungan dan sosial melalui program TJSL sebagai satu kesatuan.

Adapun strategi pencapaian target bidang ekonomi sebagaimana disampaikan dalam RKAP 2024 adalah

1. Memperkuat portofolio produk existing, baru, dan kolaborasi Holding dan BUMN berorientasi pada profitabilitas
2. Memperkuat portofolio usaha dan investasi
3. Memperkuat & mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar
4. Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo
5. Meningkatkan loyalitas pelanggan & mitra melalui CRM
6. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI

Social Aspect Performance

Jamkrindo carries out its social aspect performance responsibilities by releasing various programs and activities that address the specific needs of stakeholders. With respect to employees and management, the Company maintains harmonious industrial relations without recorded any labor disputes or violations of normative rights such as discrimination, forced labor, or violations of minimum wages. In addition to creating a healthy and safe work environment, Jamkrindo also focuses on developing HR competencies through the implementation of training with a total of 272 training sessions conducted and attended by 7,766 employees.

For customers/consumers, the Company strives to provide comprehensive product and service information, supported by competent human resources, and continuous innovation to meet customer expectations. Moreover, Jamkrindo has also set up a responsive complaint channel and provides the best solutions to complaints/reports received. The Company's commitment to fulfilling its responsibilities to customers' satisfaction resulted in a customer satisfaction index of 89.64%.

Furthermore, in fulfilling its responsibilities to the Government, Jamkrindo reported final tax payments amounting to IDR167.87 billion and income tax payments of IDR125.56 billion. Regarding suppliers, Jamkrindo treats all suppliers equally, including to obtain information on tenders for goods and services, with a preference of engaging local/national suppliers. Specifically for the community, Jamkrindo consistently empowers the community through the implementation of various TJSL programs with total expenditures of IDR18.56 billion. These initiatives serve as tangible actions and concrete support for the Sustainable Development Goals (SDGs). TJSL funds were distributed through the Non-PUMK TJSL Program (CID), Non-PUMK TJSL Program (Non CID), Independent UMK Funding and Collaborative UMK Funding Distribution.

Target Achievement Strategy

Jamkrindo's performance achievements were significantly influenced by the precision of strategic initiatives and policies, as outlined in the 2024 RKAP and consistently implemented throughout the reporting year. In addition to the strategy aimed at achieving economic aspects, the RKAP also encompasses various plans and activities related to environmental and social aspects, integrated comprehensively through the implementation of TJSL program.

The strategy approaches for achieving economic targets as conveyed in the 2024 RKAP, include

1. Strengthen existing, new, and collaborative product portfolios of the Holding Company and state-owned enterprises with a focus on profitability
2. Strengthen business and investment portfolios
3. Strengthen and develop partnership networks for market penetration and expansion
4. Increase customer preference for Jamkrindo products
5. Increase customer and partner loyalty through CRM
6. Improve the quality and coverage of IT-based customer services

Seiring dengan itu, untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan TJSL, Jamkrindo telah menetapkan strategi mitigasi risiko meliputi sasaran kinerja, kategori risiko, peristiwa risiko, penyebab risiko, level nilai risiko dan mitigasi risiko.

Untuk mengawal agar target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP berjalan sesuai rencana, Perseroan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat Direksi maupun rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris. Selain mengetahui realisasi dan pencapaian target, monitoring dan evaluasi sekaligus menjadi medium bagi Jamkrindo untuk menetapkan solusi jika terjadi hambatan atau tantangan dalam merealisasikan kebijakan dan inisiatif strategis di sepanjang tahun pelaporan.

Prospek dan Peluang

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook*, Januari 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% untuk tahun 2025 dan 2026. Dalam laporan yang sama, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,1%. Proyeksi tersebut sama dengan Bank Dunia sebagaimana disampaikan dalam laporan *Global Economic Prospects*, Januari 2025. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata global, didukung oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, dan investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, tantangan eksternal seperti pelemahan ekonomi di negara mitra dagang utama dan ketegangan geopolitik global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Sejalan dengan itu, prospek industri penjaminan kredit pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan industri ini dapat meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Peta jalan tersebut dibangun di atas 4 (empat) pilar utama yaitu Penguatan Ketahanan dan Daya Saing, Pengembangan Elemen-elemen dalam Ekosistem, Akselerasi dan Transformasi Digital, serta Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan.

Berdasarkan proyeksi dan prospek di atas, Jamkrindo telah menetapkan berbagai target dalam RKAP Tahun 2025, khusus pada aspek ekonomi, antara lain volume kredit yang dijamin yaitu sebesar Rp310,12 triliun dibandingkan realisasi tahun 2024; sedangkan jumlah pendapatan penjaminan bersih lebih tinggi 4,24% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Sementara itu, dengan menimbang risiko meningkatnya klaim, target pendapatan penjaminan tahun 2025 lebih rendah 43,18% dibandingkan tahun 2024, dan laba bersih tahun berjalan lebih rendah 51,60% dibandingkan tahun sebelumnya.

Concurrently, to achieve optimal results in the implementation of TJSL, Jamkrindo has established a risk mitigation strategy covering performance targets, risk categories, risk events, risk causes, risk value levels, and risk mitigation measures

To ensure that the targets set in the RKAP are implemented in accordance with the plan, the Company periodically conducts monitoring and evaluation through Board of Directors meetings or joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners. In addition to tracking the realization and achievement of targets, these monitoring and evaluation forums also serve as a platform for Jamkrindo to determine solutions if obstacles or challenges occur in realizing strategic policies and initiatives throughout the reporting year.

Prospects and Opportunities

The International Monetary Fund (IMF) in its *World Economic Outlook* report published in January 2025, global economic growth is projected to reach 3.3% for 2025 and 2026. In the same report, the IMF projects Indonesia's economic growth in 2025 at 5.1%. This projection is aligned with that of the World Bank, as cited stated in its *Global Economic Prospects* report, January 2025. The projection shows that the Indonesian economy is expected to grow faster than the global average, supported by policy reforms, adoption of digitalization, and investment in strategic sectors. However, external challenges including economic slowdown in major trading partner countries and global geopolitical tensions remain factors that need to be monitored to sustain this growth momentum.

In line with this, the prospects for the credit guarantee industry in 2025 are expected to experience significant growth, in line with the Government's efforts to strengthen access to capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The launch of the Roadmap for the Development and Strengthening of the Indonesian Guarantee Industry 2024-2028 by the Financial Services Authority (OJK) is expected to enhance industry's competitiveness and its contribution to the national economy. The roadmap is built on 4 (four) foundational pillars, namely Strengthening Resilience and Competitiveness, Development of Elements in the Ecosystem, Digital Acceleration and Transformation, and Strengthening Regulation, Supervision and Licensing.

Based on the projections and prospects above, Jamkrindo has set various performance targets in the 2025 RKAP, specifically in the economic aspect, including the targeted increase in the guaranteed credit volume by IDR 310.12 trillion compared to the realization in 2024; whereas net guarantee income was 4.24% higher than the previous year's achievement. At the same time, considering the increased risk of claims, the 2025 guarantee income target is 43.18% lower than that of 2024, and net profit for the current year is 51.60% lower than the previous year.

Sejalan dengan penetapan target tersebut, Perseroan telah pula menetapkan kebijakan dan inisiatif strategis untuk mencapai target dan sasaran tersebut. Didukung komitmen yang tinggi dari segenap manajemen dan karyawan, Jamkrindo optimistis dapat meraih target dan sasaran RAKP 2025, sekaligus mengukuhkan bisnis yang berkelanjutan di industri penjaminan kredit.

Penutup

Keberhasilan Jamkrindo membukukan kinerja positif pada tahun 2024 tak lepas dari dukungan dan kepercayaan yang diberikan segenap pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan pengawasan dan memberikan arahan sehingga Direksi dapat menjalankan strategi bisnis dengan baik. Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola Jamkrindo selama tahun pelaporan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang menjadi pilar utama layanan dan operasional Jamkrindo. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pelanggan, mitra, regulator, dan masyarakat yang senantiasa menjadi bagian dari perjalanan Jamkrindo. Kami berharap dukungan dan kolaborasi tersebut terus diberikan guna memperkuat peran Jamkrindo dalam menjawab harapan para pemangku kepentingan dan pemegang saham, sekaligus mewujudkan visi: Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

In line with the determination of these targets, the Company has also established strategic policies and initiatives to achieve these targets and objectives. Supported by a high commitment from all management and employees, Jamkrindo is optimistic that it can achieve the targets and goals of RAKP 2025, while at the same time strengthening sustainable business in the credit guarantee industry.

Closing

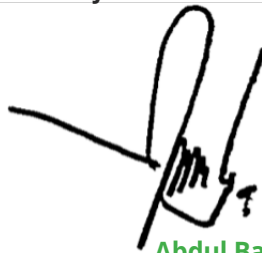
Jamkrindo's successful achievement of positive performance in 2024 would not have been possible without the unwavering support and trust extended by all stakeholders, both internal and external. In this regard, we would like to extend our sincere appreciation to the Board of Commissioners for their diligent oversight and strategic guidance, which have enabled the Board of Directors to implement the Company's business strategies effectively. We also express our gratitude to the shareholders for the trust and confidence placed in us to manage Jamkrindo throughout the reporting year.

Our heartfelt thanks go as well to all employees whose dedication, hard work, and loyalty have been the main pillars of Jamkrindo's services and operations. We also appreciate the continued support from customers, partners, regulators, and the community, all of whom play an integral role in Jamkrindo's ongoing journey. We remain hopeful that this support and collaboration will continue to be provided in order to strengthen Jamkrindo's role in fulfilling the expectations of stakeholders and shareholders, while realizing our vision: To be the preferred partner for businesses in credit guarantee services to support the growth and equality of the national economy.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29, 2025

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

PT Jaminan Kredit Indonesia



Abdul Bari
Plt. Direktur Utama
Act. President Director

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT





TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam penerapan prinsip keberlanjutan dengan menyelaraskan kinerja aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebagai realisasi atas komitmen tersebut, Perseroan secara konsisten menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun, yang menjadi bagian integral dari Laporan Tahunan Perseroan.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) is committed to improve the transparency in implementing the principle of sustainability by harmonizing the performance of economic, environmental, and social aspects in running a business. As a realization of this commitment, the Company consistently publishes a Sustainability Report every year as an integral part of the the Company's Annual Report.



Laporan Keberlanjutan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2024 berisi kebijakan, tantangan, pencapaian kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan beserta dampaknya selama periode 1 Januari 2024-31 Desember 2024, tidak termasuk Anak Perusahaan, terkecuali yang terkait dengan laporan keuangan di mana laporan ini merujuk pada laporan keuangan konsolidasian. Pelaporan tentang ketiga aspek kinerja sekaligus merupakan upaya Perseroan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs), yang telah diadopsi Indonesia menjadi SDGs Indonesia. Laporan sebelumnya terbit pada 25 Juni 2024. [GRI 2-2, 2-3]

The 2024 Sustainability Report of PT Jaminan Kredit Indonesia presents the Company's policies, challenges, and performance achievements in the economic, social, and environmental aspects, along with their respective impacts during the reporting period from 1 January 2024 to 31 December 2024. This report does not include the performance of Subsidiaries, except where related to financial reporting, in which case the report refers to the financial statements. Reporting on the three performance aspects is also the Company's effort to support the achievement of global development goals, namely the Sustainable Development Goals (SDGs), which have been adopted in Indonesia as SDGs Indonesia. The previous report was published on June 25, 2024. [GRI 2-2, 2-3]

Data keuangan dalam laporan ini disajikan dalam mata uang Rupiah. Khusus kinerja ekonomi, data merujuk pada laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan ini disusun dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Data kuantitatif dalam laporan ini disajikan dengan menerapkan prinsip daya banding (*comparability*) tiga tahun sehingga memungkinkan pengguna laporan untuk melakukan analisis tren terhadap kinerja Perseroan. Selain versi cetak, laporan yang sama juga dapat diakses melalui situs resmi perusahaan di www.jamkrindo.co.id.

Prinsip Pelaporan

Laporan kami disusun dengan merujuk pada delapan prinsip pelaporan sebagaimana ditentukan dalam GRI 1: Landasan 2021 sebagai berikut:

1. Akurasi:
Perseroan melaporkan informasi yang benar dan cukup terperinci agar dapat dilakukan penilaian dampak organisasi.
2. Keseimbangan:
Perseroan melaporkan informasi dengan cara netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi.
3. Kejelasan:
Perseroan menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami.
4. Keterbandingan:
Perseroan memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten agar mereka dapat melakukan analisis mengenai perubahan dalam dampak organisasi seiring waktu dan analisis dampak ini yang berkaitan dengan dampak organisasi lain.
5. Kelengkapan
Perseroan menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan.
6. Konteks keberlanjutan:
Perseroan melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan.
7. Ketepatan waktu:
Perseroan melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan.
8. Keterverifikasian:
Perseroan mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya.

Rujukan Laporan dan Pernyataan Penggunaan

Laporan ini disusun berdasarkan GRI Universal Standards 2021 (Standar GRI) yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Selain itu, laporan juga merujuk pada Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten,

Financial data in this report is presented in Rupiah currency. Specifically for economic performance, data refers to consolidated financial statements that has been audited by a Public Accounting Firm. This report is made in two languages, namely Indonesian and English. Quantitative data in this report is presented by implementing the principle of comparability for three consecutive years, thereby enabling users of the report to perform trend analysis of the Company's performance. In addition to the printed version, the same report is also accessible via the Company's official website at www.jamkrindo.co.id.

Reporting Principles

Our report was prepared by referring to the eight reporting principles as specified in GRI 1: 2021 Foundation as follows:

1. Accuracy:
Company reports information that is correct and detailed enough to allow for an organizational impact assessment.
2. Balance:
Company reports information in a neutral manner and provide a balanced picture of the organization's negative and positive impacts.
3. Clarity:
The Company presents information in an accessible and understandable manner.
4. Comparability:
Company selects, compiles, and reports information consistently so they can conduct analyzes of changes in organizational impacts over time and analyzes of these impacts in relation to the impacts of other organizations.
5. Completeness
The Company provides sufficient information to enable an organizational impact assessment during the reporting period.
6. Context of sustainability:
Company reports information about their impact in the broader context of sustainable development.
7. Timeliness:
The Company reports information regularly and provides the information in a timely manner for information users to make decisions.
8. Verifiability:
Company collects, records, organizes, and analyzes information in such a way that the information can be scrutinized to determine its quality.

Report Reference and Statement of Use

This report was prepared based on the 2021 GRI Universal Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) – an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards. Apart from that, the report also refers to OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial

dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Sebagai perusahaan penjaminan kredit, secara resmi, Jamkrindo terkena kewajiban untuk menerapkan peraturan tersebut per 1 Januari 2024. Namun demikian, sebelum peraturan tersebut berlaku, Perseroan telah menjadikan POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai rujukan dalam penyusunan laporan karena spirit keberlanjutan merupakan salah satu *concern* Jamkrindo dalam menjalankan usaha.

Untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang sesuai dengan rujukan, kami menyertakan penanda khusus dengan mencantumkan pengungkapan Standar GRI di belakang kalimat atau alinea yang relevan, atau berupa huruf dan angka sebagaimana diatur dalam Lampiran II POJK No.51/2017. Data lengkap kecocokan isi laporan dengan kedua rujukan disajikan di bagian belakang laporan ini.

Selanjutnya, sesuai dengan pernyataan penggunaan yang disediakan GRI, Jamkrindo telah melaporkan informasi yang dikutip pada indeks konten GRI untuk periode dari 1 Januari 2024-31 Desember 2024 sesuai dengan Standar GRI. [GRI 2-3]

Perubahan Terkait Laporan

Pada Laporan Keberlanjutan 2024 tidak terdapat perubahan terkait topik material dibanding tahun sebelumnya. Penetapan tersebut dilakukan setelah Perusahaan melakukan peninjauan terhadap topik material tahun 2023 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sesuai panduan GRI Standards Universal Tahun 2021 pada Kamis, 16 Januari 2025. Melalui peninjauan tersebut, selain mengidentifikasi dan menilai dampak secara berkesinambungan, sekaligus Perseroan dapat memastikan bahwa topik material dalam laporan ini mewakili dampak paling signifikan selama tahun pelaporan.

[GRI 3-1]

Services Institutions, Issuers and Public Companies or POJK on Sustainable Finance. As a credit guarantee company, Jamkrindo is officially obliged to implement these regulations as of January 1, 2024. However, the Company took the initiative to make the POJK on Sustainable Finance as an early reference because the spirit of sustainability is one of Jamkrindo's concerns in running its business.

To make it easier for readers to find information that matches the reference, we include a special marker by including the GRI Standards disclosure at the back of the relevant sentence or paragraph, or in the form of letters and numbers as regulated in Appendix II of POJK 51/POJK.03/2017. Complete data on the suitability of the contents of the report with the two references is presented at the back of this report.

Furthermore, in accordance with the statement of use provided by GRI, Jamkrindo has reported the information cited in the GRI content index for the period from January 1, 2024-December 31, 2024 in accordance with GRI Standards. [GRI 2-3]

Changes Related Reports

In 2024 Sustainability Report, there were no changes to the material topics compared to the previous year. This decision was made after the Company conducted a review of material topics for 2023 by involving internal and external stakeholders in accordance with the 2021 Universal GRI Standards guidelines on Thursday, 16 January 2025. Through this review, the Company not only identified and assessed impacts in a continuous manner, but also ensured that the material topics disclosed in this report reflect the most significant impacts throughout the reporting year the reporting year. [GRI 3-1]

Proses untuk menentukan topik material Process for determining material topics



Berdasarkan kesepakatan di atas, maka topik material tahun 2024 adalah sama dengan tahun 2023, yaitu terdiri atas 13 topik. Selanjutnya, daftar tersebut telah disetujui oleh Direksi. Daftar topik material Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 selengkapnya adalah sebagai berikut: [GRI 3-2, 2-14]

Based on the agreement above, the material topics for 2024 are the same as 2023, i.e. consisting of 13 topics. Furthermore, the list has been approved by the Board of Directors. The complete list of material topics for the 2024 Sustainability Report is as follows: [GRI 3-2, 2-14]

Daftar Topik Material dan Boundary Tahun 2024

List of Material Topics and Boundaries in 2024

Topik Material Material Topics	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic is Material	Nomor Pengungkapan Disclosure Number	Boundary (Batasan Topik)	
			Di dalam Jamkrindo In Jamkrindo	Di luar Jamkrindo Outside Jamkrindo
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPICS				
Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perseroan selama tahun pelaporan Describe Company's achievement and performance during the reporting year	201-1 201-2 201-3 201-4	√	
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perseroan bagi masyarakat Describe benefits of Company's existence for the community	203-1 203-2	√	√
Anti-Korupsi Anti-Corruption	Menggambarkan komitmen Perseroan untuk menyelenggarakan usaha secara bersih dan transparan Describe Company's commitment to conduct a clean and transparent business	205-1 205-2 205-3	√	√
Bersaing Sehat Healthy Competition	Menggambarkan komitmen Perseroan menjalankan usaha secara sehat, anti-monopoli/anti-trust Describe the Company's commitment in conducting a healthy, anti-monopoly/anti-trust business	206-1	√	√
TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL TOPICS				
Material/Bahan Baku Raw Materials	Menggambarkan komitmen Perseroan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan material/bahan baku, Describe the Company's commitment to conduct efficiency in the use of raw materials	301-1 301-2 301-3	√	√
Energi Energy	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan energi yang ketersediannya kian terbatas Describe the Company's commitment to energy management in response to increasingly limited energy availability	302-1 302-2 302-3 302-4 302-5	√	√
Air dan Efluen Water and Effluent	Menggambarkan kepedulian Perseroan dalam mengelola air bersih yang pasokannya kian terbatas Describe Company's commitment to clean water management in response to increasingly limited clean water availability	303-1 303-2 303-3 303-4 303-5	√	√
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPICS				
Kepegawaian Staffing	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam pengelolaan pegawai seperti rekrutmen, turnover, tunjangan, dan lain-lain Describe the Company's commitment to employees management, including recruitment, turnover, allowances, and others	401-1 401-2 401-3	√	
Hubungan Ketenagakerjaan Employment Relationship	Menggambarkan mekanisme Perseroan dalam mengomunikasikan perubahan signifikan dalam operasional usaha Describe the Company's mechanism in communicating significant changes in business operations	402-1	√	

Daftar Topik Material dan Boundary Tahun 2024

List of Material Topics and Boundaries in 2024

Topik Material Material Topics	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic is Material	Nomor Pengungkapan Disclosure Number	Boundary (Batasan Topik)	
			Di dalam Jamkrindo In Jamkrindo	Di luar Jamkrindo Outside Jamkrindo
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman Describe Company's commitment in providing a safe and comfortable working spaces	403-1 403-2 403-3 403-4 403-5 403-6 403-7 403-8 403-9 403-10	√	
Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas karyawan Describe the Company's commitment in increasing the employee's competency and capacity	404-1 404-2 404-3	√	
Masyarakat lokal Local Community	Menggambarkan komitmen Perseroan terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, termasuk menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat Describe the Company's commitment on the importance of involvement of local community, including providing complaint channel for the community	413-1 413-2	√	√
Pemasaran dan Pelabelan Marketing and Labelling	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam memasarkan produk/layanan, serta penyajian informasi yang lengkap atas produk/layanan yang ditawarkan. Describe the Company's commitment in marketing products/services, as well as providing complete information on the products/services offered to the customers/consumers	417-1 417-2 417-3	√	√

Pernyataan Ulang Informasi

Untuk mendukung validitas isi laporan, apabila terdapat pernyataan ulang informasi yang disampaikan dalam laporan sebelumnya, misalnya karena perbedaan metodologi atau cara penghitungan, kami memberi tanda *disajikan kembali. [GRI 2-4]

Verifikasi oleh Pihak Independen

Laporan ini belum dilakukan verifikasi oleh pihak ketiga yang independen (*external assurance*). Namun demikian, Jamkrindo menjamin keabsahan dan kebenaran seluruh pengungkapan informasi dalam laporan ini. [GRI 2-5]

Restatement of Information

To support the validity of the contents of the report, any restatement of information disclosed in previous reports—such as those resulting from changes in methodology or calculation methods—is marked with an asterisk (*restated). [GRI 2-4]

Verification by an Independent Party

This report has not undergone verification by an independent third party (*external assurance*). However, Jamkrindo guarantees the validity and accuracy of all information disclosed in this report. [GRI 2-5]

Akses Informasi Atas Laporan Keberlanjutan

Laporan ini disusun sebagai sarana bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menilai kinerja PT Jamkrindo, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial di sepanjang tahun pelaporan. Melalui laporan ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kontribusi Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Perseroan menyediakan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan terkait laporan ini dengan menghubungi: [GRI 2-3]

Sekretaris Perusahaan

PT Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon : +62 21 6540335
Faksimile : +62 21 6540344, 6540348
Email : info@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

Access to Information on Sustainability Reports

This report is prepared as a tool for all stakeholders to assess the performance of PT Jamkrindo, particularly in fulfilling its responsibilities towards the sustainability of economic, environmental and social aspects during the reporting year. Through this report, the stakeholders are expected to conduct a comprehensive evaluation of the Company in supporting sustainability development. As a demonstration of transparency and accountability, the Company provides extensive access to information for all stakeholders regarding this report by contacting: [GRI 2-3]

Corporate Secretary

PT Jaminan Kredit Indonesia

Jamkrindo Building
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Central Jakarta 10610, Indonesia
Telephone : +62 21 6540335
Fax : +62 21 6540344, 6540348
Email : info@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE





INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY



Nama Perusahaan [GRI 2-1]
Company Name [GRI 2-1]

PT Jaminan Kredit Indonesia, atau disingkat PT Jamkrindo
PT Jaminan Kredit Indonesia, or abbreviated as PT Jamkrindo



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

1 Juli 1970
July 1, 1970

Bentuk dan Status
Badan Usaha [GRI 2-1]
Form and Status of
Business Entity [GRI 2-1]

Perseroan Terbatas (PT)
Limited Liability Company



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis for Establishment

Akta Pendirian No. 25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat serta telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 No. AHU-0066418.AH.01.11.TAHUN 2020.

Deed of Establishment No. 25 dated February 24, 2020, as most currently was amended by the Deed of Restatement of Resolution of the Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia regarding the Amendment to the Articles of Association No. 2 dated April 9, 2020, drawn up before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary in Central Jakarta, and has obtained the Legal Entity Establishment Approval of the Limited Liability Company from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 9, 2020, No. AHU-0066418.AH.01.11.TAHUN 2020.

Bidang Usaha [GRI 2-6]
Line of Business [GRI 2-6]

Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.
Guarantees for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEC), Guarantees for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other Guarantees.

Negara Tempat
Beroperasi [GRI 2-1]
Countries of Operation [GRI 2-1]

Indonesia



Jaringan Usaha [GRI 2-6]
Business Network [GRI 2-6]

1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 53 Kantor Cabang (termasuk 1 Kantor Cabang Khusus), dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) dan 9 Digital Business Unit (DBU) yang tersebar di seluruh Indonesia
1 Head Office, 9 Regional Offices, 53 Branch Offices (including 1 Special Branch Office), and 16 Service Unit Offices (KUP) and 9 Digital Business Units (DBU) spread throughout Indonesia.

Kepemilikan [GRI 2-1]
Ownership [GRI 2-1]

- Saham Seri A Dwiwarna
Pemerintah Republik Indonesia (0,000009%)
- Saham Seri B
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99,999991%)
- Series A Dwiwarna Shares
The Government of the Republic of Indonesia (0.000009%)
- Series B Shares
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99.999991%)



Penyertaan Modal Negara
State Capital Participation

Rp10.638.733.000.000
(sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
Rp10,638,733,000,000
(ten trillion six hundred thirty-eight billion seven hundred thirty-three million rupiah)



Jumlah Karyawan Tetap
Number of Permanent
Employees

1.150 orang di tahun 2024
1,150 employees in 2024



Alamat Kantor Pusat
[GRI 2-1][OJK C.2]
Head Office Address
[GRI 2-1][OJK C.2]

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon: +62 21 6540335
Faksimile: +62 21 6540344, 6540348
Email: contact@jamkrindo.co.id
Situs Web: www.jamkrindo.co.id

Jamkrindo Building
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kemayoran, Bandar Kemayoran
Central 10610, Indonesia
Phone: +62 21 6540335
Fax: +62 21 6540344, 6540364
Email: contact@jamkrindo.co.id
Website: www.jamkrindo.co.id



Media Sosial
Social Media

Twitter @pt_jamkrindo
Instagram @pt_jamkrindo
Facebook Jamkrindo
YouTube PT Jamkrindo

Twitter @pt_jamkrindo
Instagram @pt_jamkrindo
Facebook Jamkrindo
YouTube PT Jamkrindo

SEKILAS TENTANG JAMKRINDO

JAMKRINDO AT A GLANCE



PT Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut juga dengan Jamkrindo atau Perusahaan, merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha penjaminan guna mendukung kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM).

PT Jaminan Kredit Indonesia, hereinafter also referred to as Jamkrindo or the Company, is the only State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the credit guarantee business to support the development of Micro, Small, Medium Enterprises as well as Cooperatives (MSMEs).

Keberadaan Perusahaan diawali dengan berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 99/Kpts/MENTRANSKOP/1970 tertanggal 1 Juli 1970 untuk mendukung perkembangan koperasi di Indonesia melalui penjaminan kredit yang disalurkan oleh koperasi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 tentang Pendirian Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), pemerintah melebur dan menggabungkan LJKK ke dalam Perum PKK. Dalam perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000, tanggal 7 November 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, maka Perum PKK berganti nama menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU). [GRI 2-1]

The Company's establishment began with the founding of the Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK) based on the Decree of the Minister of Transmigration and Cooperatives No. 99/Kpts/MENTRANSKOP/1970 dated July 1, 1970, aimed at supporting the growth of cooperatives in Indonesia through credit guarantees provided by cooperatives.

Subsequently, based on Government Regulation Number 51 of 1981 dated December 23, 1981, concerning the Establishment of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), the government merged LJKK into Perum PKK. In its development, in accordance with Government Regulation Number 95 of 2000 dated November 7, 2000, concerning Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, Perum PKK changed its name to Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU). [GRI 2-1]

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, maka Perum Sarana Pengembangan Usaha diubah namanya menjadi Perum Jamkrindo. Perubahan nama tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK.

Pada tahun 2008 pula Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Dalam perkembangannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta yang telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 7 tanggal 7 Oktober 2022 yang telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia mengubah status badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan.

Perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN *Holding* Perasuransian dan Penjaminan tersebut adalah:

1. Anggota *Holding* Pasar Modal dan Jasa Keuangan;
2. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), bergerak

Furthermore, under Government Regulation Number 41 of 2008 dated May 19, 2008, concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, then Perum Sarana Pengembangan Usaha changed its name to Perum Jamkrindo. The name change was made in connection with the Company's business transformation, which no longer involves the direct provision of financing to MSMEs through a profit-sharing scheme, but is now solely focused on the credit guarantee business for MSMEs.

In 2008, the Government of Indonesia also issued Presidential Regulation No. 2 dated January 26, 2008, concerning Guarantee Institutions. To implement this regulation, the Ministry of Finance issued Regulation of the Minister of Finance No. 222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008, on Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. Based on this regulation, Perum Jamkrindo was required to obtain a business license as a Credit Guarantee Company. In response, the Minister of Finance issued Decree No. KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009, officially granting Perum Jamkrindo its license to operate as a Credit Guarantee Company.

In its further development, President Joko Widodo formally changed the legal status of the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia or Perum Jamkrindo into a Limited Liability Company through Government Regulation No. 11 of 2020 dated February 14, 2020, concerning the Transformation of Legal Entity of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia into Perusahaan Perseroan (Persero), which was enacted on February 17, 2020. This decision was confirmed by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 of 2020 concerning the Legalization of the Establishment of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment for Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia was signed at the Ministry of State-Owned Enterprises building in Jakarta which has been last amended through the Deed of Statement of Circular Decree of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia Number 7 dated October 7, 2022 which has been received notification of amendments to the Articles of Association by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter Number AHU-0075624.AH.01.02. Year 2022 dated October 19, 2022.

Subsequently, based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Additional Capital Participation of State of the Republic of Indonesia in the Share Capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, the legal status of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was changed to PT Jamkrindo and it officially became a subsidiary of the State-Owned Enterprises (SOE) Insurance and Guarantee Holding.

The companies under the SOEs' Insurance and Guarantee Holding include:

1. Members of the Capital Market and Financial Services Holding;
2. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), engaged

- di bidang manajemen investasi;
- 3. PT Bahana Sekuritas, bergerak dibidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek;
- 4. PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia;
- 5. PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*);
- 6. PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung;
- 7. Anggota *Holding* Asuransi Umum dan Penjaminan;
- 8. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askindo") yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum;
- 9. PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank;
- 10. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja") bergerak dibidang asuransi sosial;
- 11. PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") bergerak di bidang asuransi umum;
- 12. Anggota *Holding* Asuransi Jiwa dan Kesehatan;
- 13. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Riwayat Perubahan Nama Perusahaan

Sejak berdiri pada tahun 1970 hingga saat ini, Jamkrindo telah mengalami beberapa kali perubahan nama sebagai berikut: Pada awalnya, Perusahaan didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981, yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985; Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000; Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008.

Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0011484.AH.01.01. Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 yang telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 7 tanggal 7 Oktober 2022 yang telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang

in investment management;

- 3. PT Bahana Sekuritas, engaged in securities underwriting and securities brokerage;
- 4. PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia;
- 5. PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), engaged in investment and financial advisory services;
- 6. PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), engaged in building ownership, management, and leasing;
- 7. Members of the General Insurance and Guarantee Holding;
- 8. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askindo"), operating in the field of credit insurance and general insurance services;
- 9. PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo"), providing credit guarantee services, both directly and indirectly, to banks and non-bank institutions;
- 10. PT Asuransi Kerugian jasa Raharja ("Jasa Raharja"), operating in the field of social insurance;
- 11. PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), operating in general insurance services;
- 12. Member of the Life and Health Insurance Holding;
- 13. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), engaged in life insurance services.

History of Changes to the Company's Name

Since its establishment in 1970, Jamkrindo has undergone several name changes as follows:

Initially, the Company was established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981, as a merger of the Cooperative Kredit Guarantee Institution (LJKK), which was founded in 1970. This regulation was later refined through Government Regulation No. 27 of 1985; The company's name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000; The company's name was later changed again to Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) through Government Regulation No. 41 of 2008.

In line with the transformation of Perum Jamkrindo's legal status from a Public Corporation (Perum) to a Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No. 11/2020, which was enacted on February 17, 2020. To comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was Deed of Establishment of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Number 25 dated February 24, 2020 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree Number AHU-0011484.AH.01.01. Year 2020 dated February 24, 2020 which has been last amended through the Deed of Statement of the Circular Resolution of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia Number 7 dated October 7, 2022 which has received notification of changes to the Articles of Association by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter Number AHU-0075624.AH.01.02. Year 2022 dated October 19, 2022.

Based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028854.AH.01.02. Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.

the Additional Capital Participation of State of the Republic of Indonesia in the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), and Deed of Amendment to the Articles of Association No. 2 dated April 9, 2020-ratified through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0028854.AH.01.02 of 2020-PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee Holding under the name PT Jaminan Kredit Indonesia, abbreviated as PT Jamkrindo.

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk.
Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit.

1970-1981

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT.
Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Dairy Cows Credit, Padi Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT.

1981-2000

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah.
Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product.

2000-2008

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah, antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond*, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.
Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and *Surety Bond*, and guarantee in order to synergy of SOEs.

2008-2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Perubahan status Perum Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo (Persero) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Februari 2020 dan diundangkan pada 17 Februari 2020
The change of Perum Jamkrindo's status to PT Jamkrindo (Persero) was stipulated through Government Regulation Number 11 of 2020 signed by President Joko Widodo on February 14, 2020 and promulgated on February 17, 2020

2020

PT Jamkrindo

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) resmi menjadi anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) pada 16 Maret 2020, ketika pemerintah membentuk holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi dengan menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai induk Holding
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) officially became a member of the Indonesia Financial Group (IFG) holding on March 16, 2020, when the government formed a holding of SOEs in the fields of insurance, guarantee and investment by appointing PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as the holding company

2020-Sekarang
2020-Present



VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN [OJK C.1]

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE [OJK C.1]

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Risalah Rapat No. B.002/EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to ensure the implementation of professional business activities based on the Minutes of Meeting No. B.002/EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 concerning the Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP) from 2020 to 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors shall determine the Vision, Mission, and Corporate Culture as follows:



Visi Vision

Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

To become the main choice of business actors in guarantee services to support growth and equity of the national economy.



Misi

Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Improving the financial accessibility of MSMEs and Cooperatives through the provision of innovative, competitive guarantees with continuous professional, effective and efficient services.

Kredo Perusahaan

Kredo perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan;
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis;
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan;
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan;
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan.

Budaya Perusahaan

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 6 (enam) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "AKHLAK".

Company Credo

There are five points in the Credo of Jamkrindo, which are:

1. Trusted in carrying out guarantee business;
2. Responsive to changes in the business environment;
3. Excellent and Professional in service;
4. Sound corporate governance;
5. Leading in providing customer satisfaction.

Corporate Culture

In accordance with the direction of the Minister of SOEs to all state-owned enterprises, Jamkrindo's corporate culture consists of 6 (six) items of cultural values embraced by the Company, namely the culture of "AKHLAK".

AKHLAK

Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

Trusted

Uphold the given trust

Competent

Continuously learn and develop capabilities

Harmonious

Care to each other and respect differences

Loyal

Prioritize dedication for Nation and Country

Adaptive

Continuously innovate to respond and make change

Collaborative

Build strategic alliance

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA [OJK C.4][GRI 2-6]

LINE OF BUSINESS, PRODUCTS, AND SERVICES [OJK C.4][GRI 2-6]

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber dana Perseroan berdasarkan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan dan Kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar Perusahaan

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan:

Business Activities Based on the Articles of Association

Based on Deed No. 10 dated March 8, 2021, concerning Amendments to the Articles of Association, in article 3 it states that the Purpose and Objectives and Business Activities are to carry out guarantee business activities for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives, guarantee for State-Owned Enterprises, guarantee for Warehouse Receipt Systems, and other guarantees, as well as optimizing the utilization of the Company's funding sources based on the principles of good corporate governance.

Business Activities Carried Out and Compliance with the Company's Articles of Association

In an effort to achieve these aims and objectives, the Company may carry out several business activities and business development policies to support financing. Presented in the following are the implementation of business activities and business development policies that have been carried out:

No. No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Carried Out	Keterangan Description
1.	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Credit guarantees, funding or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Penjaminan Program PEN Available in the products of General Credit Guarantee, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee, PEN Program Guarantee
2.	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya Loan guarantees distributed by savings and loan cooperatives or cooperatives that have savings and loan business units to their members	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK Available in the KKLK Multipurpose Credit Guarantee products
3.	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan Credit guarantees and/or partnership programs loans disbursed by state-owned enterprises within the framework of the partnership and community development program	√	Penyaluran program kemitraan Partnership program distribution
4.	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantees for debt securities to Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives	x	Belum/Tidak dijalankan Not/Has not been implemented
5.	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantees for the purchase of goods in installments made to Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO Available in OTO Credit Guarantee products
6.	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantees for debt securities to Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives	n/a	Tidak ada None

No	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Carried Out	Keterangan Description
7.	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee for purchases of goods in installments made to Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO Available in OTO Credit Guarantee products
8.	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee for trade transactions made to Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives	√	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang Available in the Goods Distribution Guarantee product
9.	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa <i>surety bond</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of goods and/or services of surety bonds for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk <i>Surety Bond</i> , <i>Surety Bond Co-Guarantee</i> , Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Available in Surety Bond products, Surety Bond Co Guarantee, Construction Credit Guarantee and Procurement of Goods/Services.
10.	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Counter Bank Guarantees made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi <i>Co-Guarantee</i> Available in Counter Bank Guarantee Credit Guarantee products, Counter Bank Guarantee Credit Co-Guarantee products
11.	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Domestic document guarantee for letters of credit made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	x	Belum dijalankan has not been carried out
12.	Penjaminan <i>letter of credit</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Letter of credit guarantees made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	x	Belum dijalankan has not been carried out
13.	Penjaminan kepabeanan (<i>Custom bond</i>) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Custom bonds made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat pada <i>Customs Bond</i> Available in Customs Bond
14.	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Excise guarantee made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk <i>Customs Bond</i> Available in Customs Bonds products
15.	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (<i>start up business</i>) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of financing for start-up businesses that meet the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro Available in General Credit Guarantee and Micro Credit Guarantee products
16.	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of information technology-based money lending services provided to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro Available in Micro Credit Guarantee products
17.	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perseroan dengan badan usaha milik negara lain Guarantees in the context of synergy between the Company and state-owned enterprises from other countries	√	Terdapat dalam produk <i>Surety Bond</i> , Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan <i>Invoice</i> Available in the Surety Bond, Joint KUR Guarantee, Invoice Guarantee products
18.	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Credit guarantees or financing based on Sharia principles for individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company	x	Tidak dijalankan karena dialihkan seluruhnya kepada PT Jamsyar. Not implemented because the entire operation has been transferred to PT Jamsyar
19.	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Provision of management consulting services related to guarantee activities	√	Terdapat di Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II Available in the Institutional Business Relations Division II

No No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Carried Out	Keterangan Description
20.	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi Rating, management consulting, management services, mentoring/empowerment, and other related services for Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives	√	Terdapat di Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II Available in the Institutional Business Relations Division II
21.	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority	n/a	Tidak ada None

Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan Bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama dalam hal Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan dan Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

The Company's main business activities may be carried out in the form of Co-Guarantee, except for main business activities related to the provision of management consulting services associated with guarantee activities, as well as rating services, management consulting, management services, mentoring/empowerment, and other services for Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives.

Produk dan Jasa yang Dijalankan Perusahaan

Products and Services Operated by the Company

Berikut disampaikan produk dan jasa yang dijalankan Perusahaan per 31 Desember 2024:

The following are the products and services provided by the Company as of December 31, 2024:

Jenis Produk Product Type	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) People's Business Credit (KUR) Guarantee	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. Working Capital Credit/Financing and/or investment provided to MSMEs in productive and viable business sectors but not yet bankable, guaranteed by the a Guarantee Company. The distribution of KUR is expected to support the growth of productive businesses.
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP Guarantee for KPR Sejahtera under FLPP.	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Guarantee for the distribution of home ownership loans, which is a collaborative program between banks and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic Indonesia, offering low interest rates, light installments, and fixed terms throughout the loan period, targeting low-income communities.
Penjamin Sistem Resi Gudang Warehouse Receipt System Guarantee	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas Kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas. Provision of guarantees to warehouse managers for their obligations to farmers in storing agricultural commodity goods.
Penjaminan Kredit Umum General Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) Guarantee for credit/financing provided to the Guaranteed Recipients for the purpose of additional working capital and/or investment in the framework of increasing and developing of the Guaranteed Business (The guarantee process is carried out on a case-by-case basis.)
Penjaminan Kredit Mikro Micro Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah <i>plafond</i> kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>) Guarantee for credit/financing provided to the Guaranteed Recipient, Micro and Small business owners, for working capital needs and/or investment in the context of enhancing and developing the Guaranteed Business. The financing follows specific micro credit regulations and is carried out automatically under Conditional Automatic Cover (CAC).
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Construction and Procurement of Goods/Services Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bowheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. Guarantee for credit/financing provided to the Guaranteed Recipient for working capital in construction and goods/services procurement under a contract between the Guaranteed Business and the project owner (Bowheer), with funding sources from the State Budget (APBN), Regional Budget (APBD), State-Owned Enterprises (BUMN), or private national companies.

Jenis Produk Product Type	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Multiguna Multipurpose Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non-Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. Guarantee for credit/financing provided by the Guarantor for other Financial Institutions (Non-Bank) to the Guaranteed, individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whether the distribution is made directly or through other institutions, whose source of return is by deducting the Guaranteed salary and the guarantee submission process is carried out collectively.
Penjaminan Distribusi Barang Good Distribution Guarantee	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrika (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan case by case) Guarantee for credit/financing provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is carried out on a case-by-case basis).
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi Guarantee for Bank Guarantee/Counter Guarantee	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi. A guarantee provided by the Guarantor (Perum Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank), which is unconditional in nature, whereby the Guarantor shall compensate the Guarantee Recipient for any claims on the Bank Guarantee (BG) made by the <i>Obligee</i> in the event of a default by the Guaranteed Party.
<i>Surety Bond</i>	Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut A third-party agreement in which the Guarantor, based on confidence in the Guaranteed Party, jointly commits to the <i>Obligee</i> that if the Guaranteed Party, for any reason, defaults or fails to perform the work as agreed with the <i>Obligee</i>, then the Guarantor shall be responsible to the <i>Obligee</i> for fulfilling the Guaranteed Party's obligations.
<i>Payment Bond</i>	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan. A guarantee issued by the Guarantor to ensure that the Guaranteed Party makes payments to the Guarantee Recipient for the bridging fund facility provided by the Guarantee Recipient, whether sourced from the Guarantee Recipient itself or from other financing sources appointed by the Guarantee Recipient.
<i>Customs Bond</i>	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & impor dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada <i>Obligee</i> (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya. A guarantee for customs facilities for suspension/exemption of goods & import duty and collection of other goods import duties to the <i>Obligee</i> (Directorate General of Customs and Excise) in the event that the Guaranteed Party (importer/exporter manufacturer) fails to fulfill their obligations.
Penjaminan Keagenan Kargo Cargo Agency Guarantee	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>. A guarantee provided to the Guarantee Recipient/<i>Obligee</i> (Transportation Service Provider Company) for the obligation of the Guaranteed Party/<i>Principal</i> (Cargo Agent) to pay the freight charges to the Guarantee Recipient/<i>Obligee</i>.
Penjaminan Invoice Financing Invoice Financing Guarantee	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh penerima jaminan. A guarantee to secure the payment obligation of the guaranteed party based on the invoice issued by the guarantee recipient.
Penjaminan Supply Chain Financing Supply Chain Financing Guarantee	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK <i>pre Financing</i>, KMK <i>Post Financing</i> dan KMK Distributor. The guarantee for the credit provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed Party in the framework of project workmanship/completion, acquisition of receivables/bills, the procurement of goods and/or services, the purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from a certain PRINCIPAL COMPANY in the form of KMK pre-Financing, KMK Post-Financing, and KMK Distributor.
Penjaminan Kemaritiman/Jaring Maritim/Net Guarantee	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan. Guarantee for financing for working capital and investment used for activities in the field of Maritime Affairs and Fisheries.
Penjaminan Pembiayaan Otomotif Automotive Financing Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna. Guarantee for credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose.
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang Warehouse Receipt Subsidy Scheme Credit Guarantee	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya. The activity of providing guarantees to guaranteed party (Farmers, Farmer Groups, Association of Farmer Groups, and Cooperatives) for the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facility distributed by the guarantee recipient (Implementing Bank/Non-Bank Financial Institutions Channeling SSRG Credit) with warehouse receipt collateral issued through the System Warehouse Receipt (SRG) according to Law no. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments.

Jenis Produk Product Type	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Resi Gudang Warehouse Receipt Credit Guarantee	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/CMA</i>). Guarantee provided to the Guaranteed Party for the Warehouse Receipt Credit distributed by the Beneficiary of the Collateral with the warehouse receipt collateral issued: Through the Warehouse Receipt System (WRS) in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments; or by the Collateral Manager through a collateral management cooperation agreement between the Guaranteed Party, Guarantee Recipient and Warehouse Manager (<i>Collateral Management Agreement/CMA</i>).
Penjaminan Fintech Fintech Guarantee	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada borrower. Guarantee for information technology-based money lending and borrowing services distributed by lenders through organizers (<i>peer to peer lending</i>) to borrowers.
Penjaminan KPR KPR guarantee	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (<i>Non Bank</i>) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko. Guarantee for distributors of Home Ownership Loans provided by Guarantee Recipients of Other Financial Institutions (<i>Non-Bank</i>) to Guaranteed Party whose financing facilities are used to buy houses, flats/apartments, office houses, shop houses or for other consumptive needs with guarantee/collateral in the form of houses, flats/apartments, office houses, shop houses.
Penjaminan Capital Management Guarantee (CMG) Capital Management Guarantee (CMG)	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. Guarantee for the credit portfolio in 1 (one) guarantee coverage as a form of Bank Credit Risk Mitigation (MRK).

Kompetensi Inti

Untuk mencapai tujuan perusahaan, tidak hanya dibutuhkan strategi yang baik tetapi juga diperlukan metode untuk mengoptimalkan kemampuan Perusahaan agar memiliki lebih dari kompetitornya. Hal inilah yang disebut dengan kompetensi inti (*core competency*). Dengan mengoptimalkan *core competency*, Perusahaan mampu menghubungkan nilai-nilai dari inti bisnis dengan kompetensi utama bisnisnya sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

Core Competencies

To achieve the Company's goals, not only a good strategy is needed but also a method to optimize the Company's ability to have more than its competitors. This is what is called core competency. By optimizing core competencies, the Company is able to link the values from its core business with its main business competencies, so that the Company can have a competitive advantage and is ready to face business challenges in the future.

Kriteria Identifikasi Identification Criteria	Accessibility	Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi Holding Expansion of the market through SOE collaboration and increasing efficiency through Holding collaboration
	Unik/Langka Unique/Rare	Satu-satunya BUMN yang bergerak dibidang penjaminan khusus untuk UMKM The only SOE engaged in the field of guarantees, especially for MSMEs
	Value Creation	Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan untuk membentuk <i>brand preference</i> di mata pelanggan Optimizing the trusted reputation and image as a member of the SOE's Insurance and Guarantee Holding to form a brand preference in the eyes of customers
Risiko Risks	1. Target bisnis tidak tercapai; 2. Kualitas layanan yang dinilai kurang baik oleh pelanggan/mitra seperti layanan penjaminan dan klaim yang melebihi SLA; 3. Pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak efisien; 4. Implementasi IT kurang sesuai dengan persyaratan <i>best practice</i> IT yang berlaku. 1. Business targets are not achieved 2. Quality of service that is considered poor by customers/partners, such as guarantee services and claims that exceed the SLA; 3. Implementation of inefficient operational activities; 4. IT implementation is not in accordance with the applicable IT best practice requirements.	
Kendala Problems	5. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM Terjamin; 6. Keterbatasan ekspansi produk-produk yang profitable sebagai dampak dari pandemi COVID-19; 7. Persaingan usaha yang semakin ketat. 1. The impact of the COVID-19 Pandemic on the business continuity of Guaranteed MSME debtors; 2. Limited expansion of profitable products as a result of the COVID-19 pandemic; 3. Business competition is getting tougher.	

Sesuai dengan kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, maka kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Penjaminan terbesar di Indonesia;
2. Kapasitas penjaminan untuk UMKM sangat besar;
3. Jamkrindo lebih memahami UMKM;
4. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidang penjaminan kredit UMKMK, kecepatan pembayaran klaim jaminan kredit, dan Melayani produk sesuai kebutuhan mitra (*customized product*);
5. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari pemerintah;
6. Sistem informasi yang terintegrasi secara internal dan eksternal dengan mitra bisnis;
7. Memperkuat model bisnis dengan bergabung dalam Asuransi dan Penjaminan Holding.

In accordance with the identification criteria above, and the results of the Company's business model development, the Company's core competencies are as follows:

1. The biggest guarantee company in Indonesia;
2. The guarantee capacity for MSMEs is very large;
3. Jamkrindo understands MSME better;
4. Has good expertise and reputation in the field of MSMEC credit guarantees, speed of payment of credit guarantee claims, and Serving products according to partner needs customized product);
5. Has large capital and great support from the government;
6. Information systems that are internally and externally integrated with business partners;
7. Strengthen the business model by joining the Insurance and Guarantee Holding.

STRUKTUR ORGANISASI [GRI 2-9]

ORGANIZATIONAL STRUCTURE [GRI 2-9]

Setiap organisasi selalu menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan tersebut diperlukan pengelolaan organisasi yang efektif.

Berkaitan dengan hal ini, struktur organisasi serta tata laksana organisasi sangat menentukan efektivitas pengelolaan suatu organisasi.

Untuk merespons perubahan-perubahan lingkungan Perusahaan dan pencapaian arah bisnis jangka panjang, maka pada tahun 2024, Jamkrindo telah melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perusahaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 01/KD/5/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, sebagai berikut:

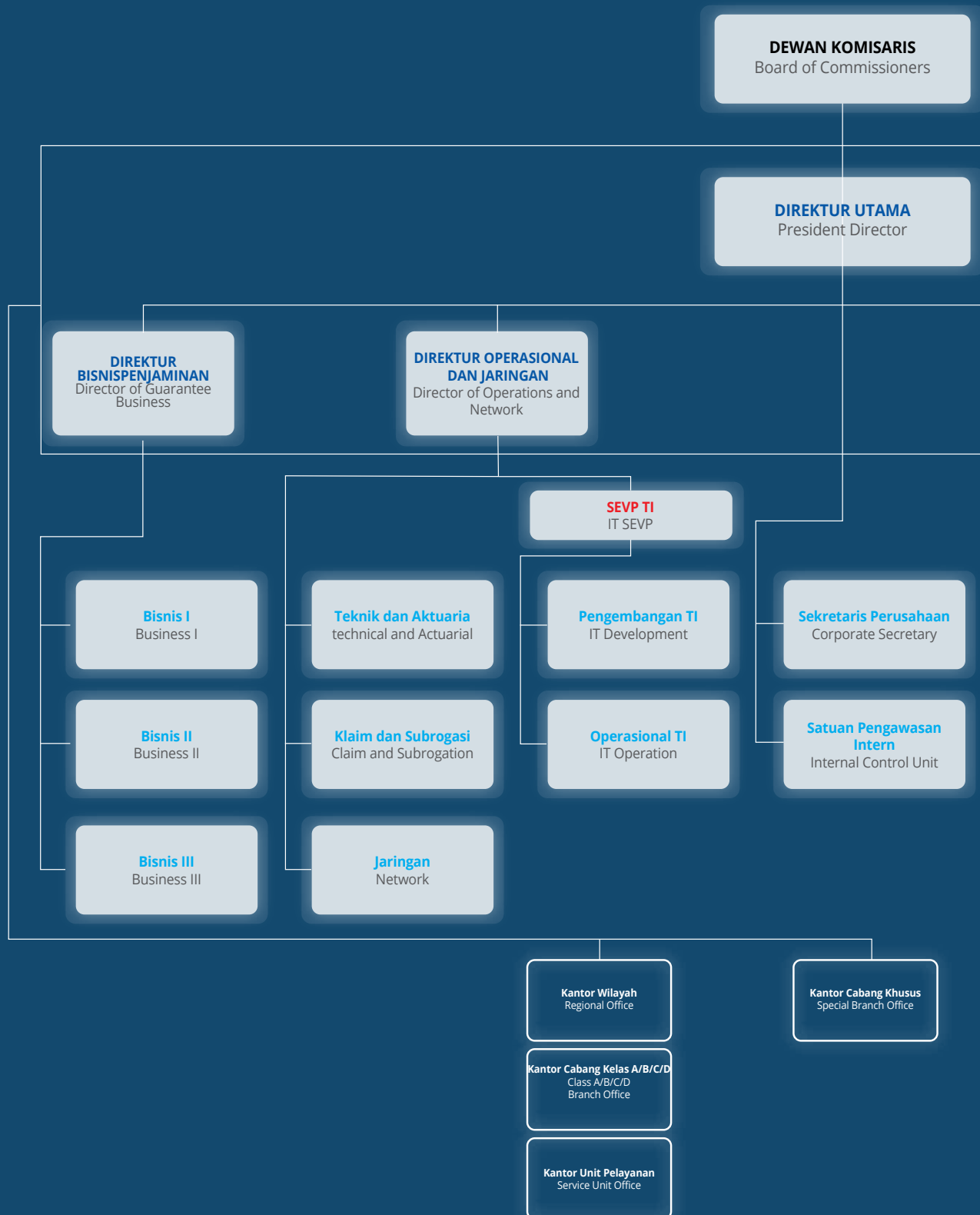
Every organization always faces the dynamics of environmental change, both internal and external. To face the dynamics of environmental change, effective organizational management is required.

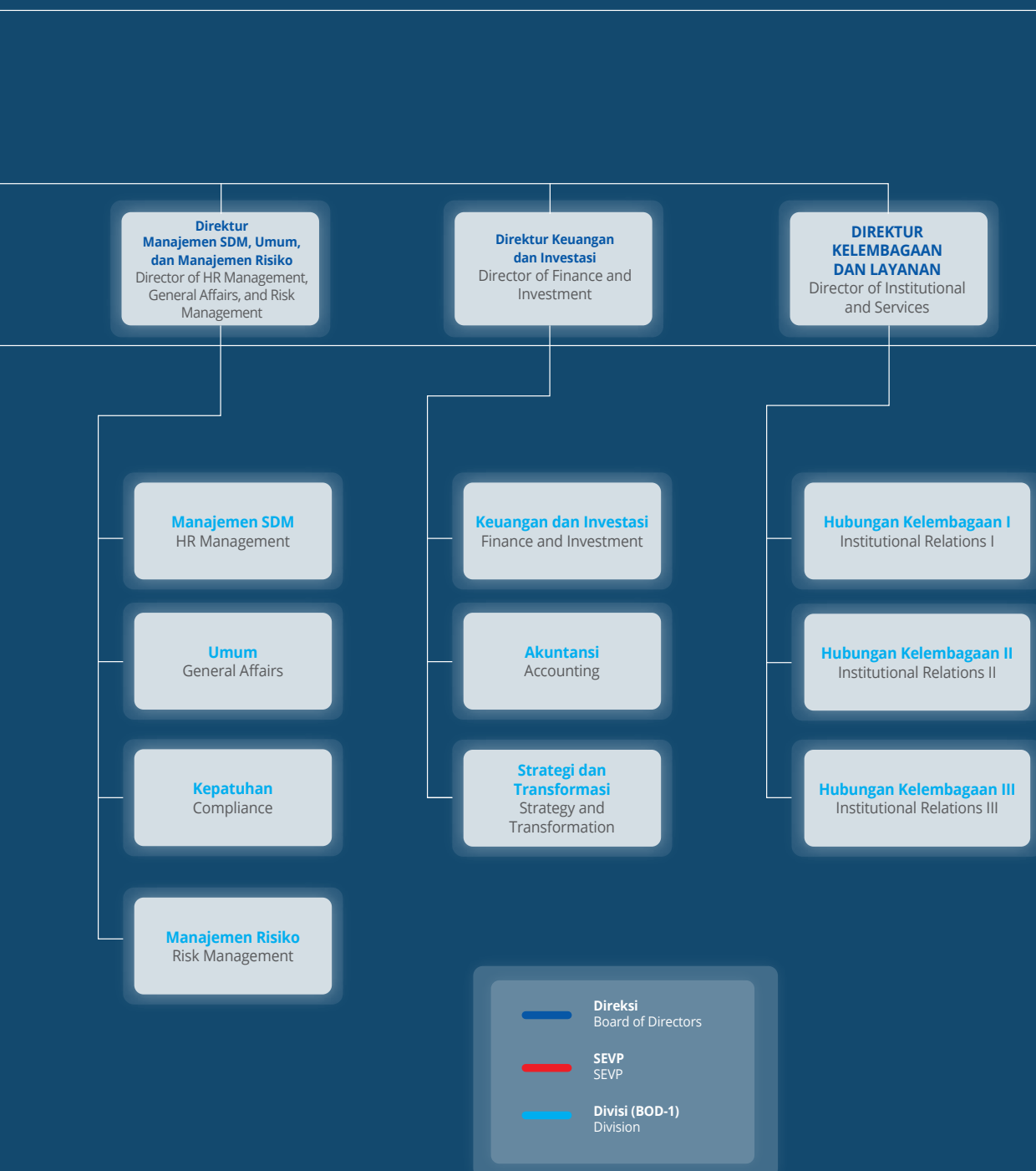
In this regard, the organizational structure and governance procedures play a critical role in determining the effectiveness of organizational management.

To respond to changes in the Company's environment and achieve long-term business direction, in 2024, PT Jamkrindo made adjustments to the Company's Organizational Structure as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 01/KD/5/II/2024 dated January 10, 2024 as follows:

Struktur Organisasi per 31 Desember 2024

Organizational Structure as of December 31, 2024





STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

[GRI 2-1][OJK C.3]

SHAREHOLDERS STRUCTURE

[GRI 2-1][OJK C.3]

Berdasarkan Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tanggal 19 Oktober 2022, dijelaskan pemegang saham Jamkrindo sebagai berikut:

1. Saham Seri A sebanyak 1 (satu) lembar milik Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B sebanyak 10.638.732 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Based on the Deed of Notary Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N number 07 dated 07 October 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated 19 October 2022, the shareholders of Jamkrindo are explained as follows:

1. 1 (one) Series A share owned by the Republic of Indonesia; and
2. Series B shares totaling 10,638,732 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred thirty two) shares belonging to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Kepemilikan Saham Jamkrindo per 31 Desember 2024

Share Ownership of Jamkrindo as of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (lembar/sheet)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Deposited Capital (Rp/IDR)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic of Indonesia	1	1.365.160	0,000012832%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia*	10.638.732	10.638.732.000.000	99,99998717%
Jumlah Total	10.638.733	10.638.733.000.000	100,00%

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

Information About Majority/Controlling Shareholders Until the Ultimate Owner Entities

“Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas pemilik akhir dari Jamkrindo dengan kepemilikan sebesar 100%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 0,000012832% dan sisanya sebanyak 99,99998717% kepemilikan tidak langsung melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)”

“The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner of Jamkrindo with 100% ownership, consisting of direct ownership of 0.000012832% and the remaining 99.99998717% indirect ownership through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).”

Seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, serta Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022 mengenai perubahan anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tertanggal 19 Oktober 2022, Jamkrindo secara resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Dengan demikian, BPUI bertindak sebagai entitas induk Jamkrindo.

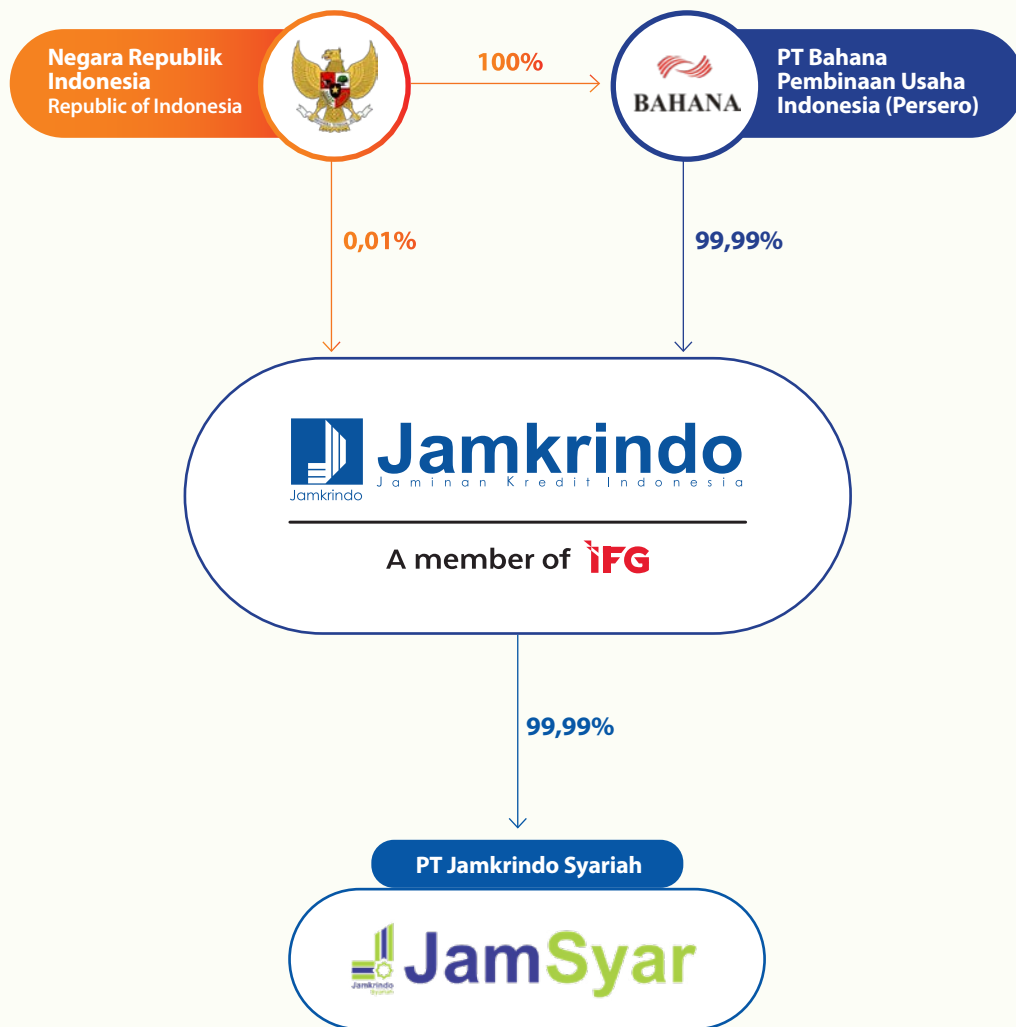
Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas pemilik akhir Jamkrindo.

As explained above, based on Government Regulation no. 20 of 2020 dated March 16 2020 concerning the Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and Deed of Amendment to the Articles of Association No. 07 On October 7, 2022 concerning the amendment to the articles of association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated October 19, 2022, Jamkrindo officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Thus, BPUI acts as Jamkrindo's parent entity.

In accordance with Government Regulation no. 41 of 2003 concerning Delegation of the Position, Duties and Authority of the Minister of Finance over State-Owned Limited Liability Companies (Persero), Public Corporations (PERUM), and Service Companies (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises to the Minister of State for State-Owned Enterprises and Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and the State Gazette of the Republic of Indonesia; The authority of the Main Shareholder/Controller of the Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). Thus, the Ministry of SOEs as the authorized shareholder of the Indonesian Government acts as the main/controller shareholder as well as the final owner entity of Jamkrindo.

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA

GROUP AND BUSINESS GROUP STRUCTURE



Entitas Pemilik Akhir Ultimate Entity

Entitas Induk Parent Entity

Entitas Anak Subsidiaries Entity

INFORMASI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN [GRI 2-2]

SUBSIDIARY ENTITY INFORMATION [GRI 2-2]

Per 31 Desember 2024, Jamkrindo memiliki satu entitas anak perusahaan, yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), yang bergerak di bidang Jasa Penjaminan Syariah.

As of December 31, 2024, Jamkrindo has one subsidiary entity, namely PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), which operates in the Sharia Guarantee Services sector.

Entitas Anak Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham (%) Share Ownership (%)			Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (IDR-million)			Status Operasi Operation Status
					2024	2023	2022	2024	2023	2022	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Business	Jakarta	2014	2014	99,929	99,929%	99,929%	2.408.935	2.452.095	2.449.452	Beroperasi Operating

Profil PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar) Profile



PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung tagline "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif".

Perusahaan memiliki 99,929% saham Jamsyar, sementara sisanya sebesar 0,0710% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained an operational permit on November 7, 2014. Jamsyar was established through Notarial Deed No.68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No.AHU-26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014, it received an operation permit from the Financial Services Authority (OJK) through the OJK letter No. KEP-134/d.05/2014 November 7, 2014 concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No.S-34/nB.223/2015 January 15, 2015 concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

The Company owns 99.929% of Jamsyar shares, while the remaining 0.0710% is owned by Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

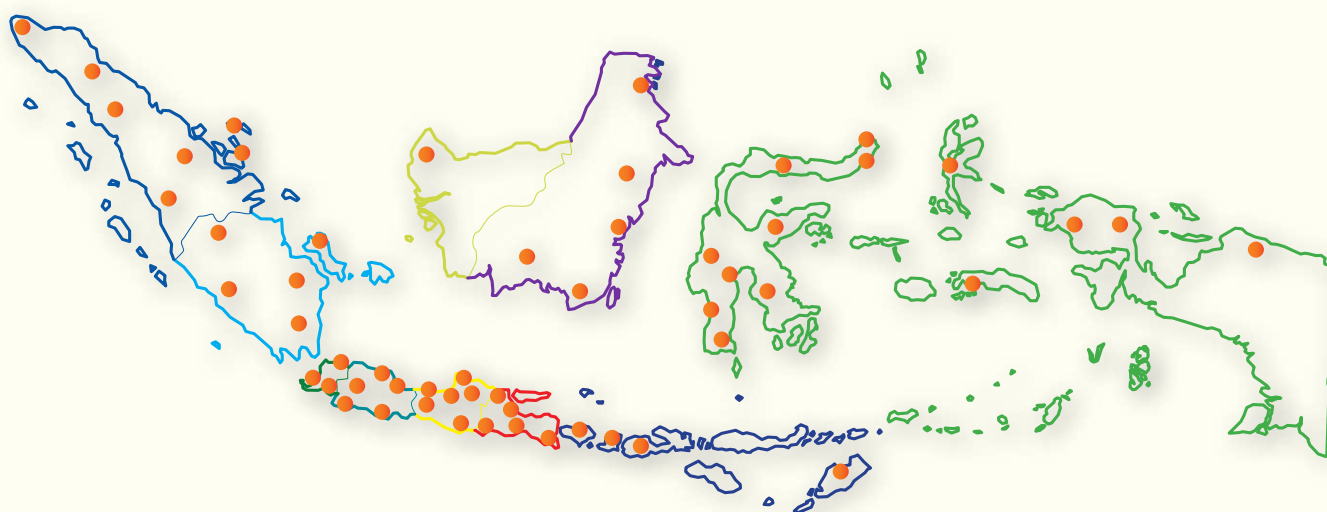
WILAYAH OPERASIONAL [GRI 2-6] [OJK C.3]

OPERATIONAL AREA [GRI 2-6] [OJK C.3]

Per 31 Desember 2024, Jamkrindo hanya beroperasi di Indonesia. Wilayah operasional Perusahaan terbagi dalam 9 Kantor Wilayah, 53 Kantor Cabang (termasuk 1 Kantor Cabang Khusus), dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) dan 9 Digital Business Unit (DBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

As of December 31, 2024, Jamkrindo only operates in Indonesia. The Company's operational area is divided into 9 Regional Offices, 53 Branch Offices (including 1 Special Branch Office), and 16 Service Unit Offices (KUP) and 9 Digital Business Units (DBU) spread throughout Indonesia.

Peta Wilayah Operasional Tahun 2024
Operational Area Map 2024



 Kantor Cabang
Branch Offices

 Kanwil I Medan
Reg. Offices I Medan

 Kanwil II Palembang
Reg. Offices II Palembang

 Kanwil III Jakarta
Reg. Offices III Jakarta

 Kanwil IV Bandung
Reg. Offices IV Bandung

 Kanwil V Semarang
Reg. Offices V Semarang

 Kanwil VI Surabaya
Reg. Offices VI Surabaya

 Kanwil VII Denpasar
Reg. Offices VII Denpasar

 Kanwil VIII Banjarmasin
Reg. Offices VIII Banjarmasin

 Kanwil IX Makassar
Reg. Offices IX Makassar

Kantor Pusat PT Jamkrindo [GRI 2-1][OJK C.2] PT Jamkrindo Head Office [GRI 2-1][OJK C.2]	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Tel: +62 21 6540335 Faks: +62 21 6540344, 6540348 Situs Web: www.jamkrindo.co.id Surel: contact@jamkrindo.com	Jamkrindo Building Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Central Jakarta 10610, Indonesia Phone: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Website: www.jamkrindo.co.id Email: contact@jamkrindo.com
---	--	---

Entitas Anak Subsidiary

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Gedung Jamsyar Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 10510 Telp: +62 21 6540386 Faks: +62 21 6540389 Situs Web: www.jamkrindosyariah.com Surel: info@jamkrindosyariah.com	Gedung Jamsyar Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4 Cempaka Putih Timur Central Jakarta 10510 Phone: +62 21 6540386 Fax: +62 21 6540389 Website: www.jamkrindosyariah.com Email: info@jamkrindosyariah.com
--	---	---

Kantor Wilayah Regional Office

Kanwil Regional Office	Alamat Address
I Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192 Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Phone: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT) Kec. Kemuning Palembang 30127; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589 Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT) Kec. Kemuning Palembang 30127; Phone: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp (021) 6540335 Fax (021) 6540387 Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Central Jakarta 10610, DKI Jakarta; Phone (021) 6540335 Fax (021) 6540387
IV Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung. Telp : (022) 7815088 Fax: (022) 7800891 Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung. Phone: (022) 7815088 Fax: (022) 7800891
V Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024) 7614138 Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Phone: (024) 7601797; Fax: (024) 7614138
VI Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568 Jamkrindo Building, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Phone: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar -80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267 Dewata Square Shops Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar -80232; Phone: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435 Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - South Kalimantan; Phone: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Telp: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005 Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Phone: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Khusus Jakarta Jakarta Special Branch Office	Gedung Lippo Kuningan Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan Jakarta Selatan 12920 Lippo Kuningan Building, Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan South Jakarta 12920

Kantor Cabang Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827/4155767 Fax: (061) 4156775 Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, North Sumatera; Phone: (061) 4152827/4155767 Fax: (061) 4156775
	2 Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp: 0761-854311, 854870 Fax: 0761-848801 L. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Phone: 0761-854311, 854870 Fax: 0761-848801
	3 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165 Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Padang, West Sumatera; Phone: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165

Kantor Cabang Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
	4 Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji NO. 6 Telp: (0771) 316919 Pamedan Shophouse Complex Jl. Raja Ali Haji NO. 6 Phone: (0771) 31691
	5 Batam	Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9 Jl Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center, Batam Telp (0778) 7495993 Fax (0778)469019 Mahkota Raya Shophouse Complex Blok G No.9 Jl Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center, Batam Phone (0778) 7495993 Fax (0778)469019
	6 Balige	Jl. Sisingamangaraja No.87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 Sumatera Utara Telp/Fax: (0632) 21501/(0632) 21722 Jl. Sisingamangaraja No.87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 North Sumatera Phone/Fax: (0632) 21501/(0632) 21722
II	7 Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak No.188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398 Jl. Residen Abdul Rozak No.188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang; Phone: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398
	8 Jambi	Jl. Soemantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115 Jl. Soemantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Jambi City, Phone: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115
	9 Bengkulu	Jl. Ahmad Yani Rt. 004/Rw 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249 Jl. Ahmad Yani Rt. 004/Rw 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu City-38119; Phone: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
	10 Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513 Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Phone: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
	11 Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816 Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang – 33136; Phone: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816
III	12 Jakarta	Gedung JAMKRINDO Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610 Telp: (021) 6540409 JAMKRINDO Building Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Central Jakarta - 10610 Phone: (021) 6540409
	13 Pontianak	Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468 Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, South Pontianak, West Kalimantan 78121 Phone: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468
	14 Serang	Ruko Cipare Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No. 34, Serang, Banten - 42117, Telp/Fax: (0254) 228999/(0254) 229247 Cipare Shophouse Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No. 34, Serang, Banten - 42117, Phone/Fax: (0254) 228999/(0254) 229247
	15 Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322 Golden Boulevard Shophouse Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322
IV	16 Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung Telp: (022) 7816267 Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung Phone: (022) 7816267
	17 Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No. 10 B RT.004 RW.005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850 Jl. Dr Sudarsono No. 10 B RT.004 RW.005, Kesambi- Cirebon City, West Java; Phone: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	18 Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002 Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta West Javat; Phone: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	19 Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868 Bounty Shophouse Complex Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Sukabumi City 43113; Phone: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	20 Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya Telp: (0265) 314169 Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Shophouse No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya Phone: (0265) 314169

Kantor Cabang
Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
V	21 Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136/7610129 Fax: (024) 7614138 Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Phone: (024) 7614136/7610129 Fax: (024) 7614138
	22 Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288/5012323 Fax: (0274) 5012545 Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Yogyakarta City - 55244; Phone: (0274) 5012288/5012323 Fax: (0274) 5012545
	23 Solo	Jl. Honggowongso No.141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Telp: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030 Jl. Honggowongso No.141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Phone: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030
	24 Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755 Centrum Shophouse Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Central Java; Phone: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	25 Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah - 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758 Jl. Jend. Sudirman Sudirman Shophouse Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Central Java - 59312; Phone: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	26 Pekalongan	Komplek Ruko Diponegoro Jl. Diponegoro No.38, Dukuh, Pekalongan Utara. Pekalongan - 51146; Telp: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777 Diponegoro Shophouse Complex Jl. Diponegoro No.38, Dukuh, North Pekalongan. Pekalongan - 51146; Phone: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777
VI	27 Surabaya	Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya, Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592 Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya, Phone: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592
	28 Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881 Jl. Kilisuci No.85 Kediri City; Phone: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881
	29 Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi - 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804 Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi - 68419; Phone: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	30 Malang	Jl. Semeru No.66, Kel. Oro-oro Dowo, Kec Klojen. Kota Malang 65112 Tlp (0341) 3018571 Fax (0341) 3019116 Jl. Semeru No.66, Kel. Oro-oro Dowo, Kec Klojen. Malang City 65112 Phone (0341) 3018571 Fax (0341) 3019116
	31 Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun - 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249 Jl. Thamrin No. 38, Madiun - 63117; Phone: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249
VII	32 Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Telp: (0361) 286854 Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Phone: (0361) 286854
	33 Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Telp: (0370) 644573/644747 Fax: (0370) 644572 Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Phone: (0370) 644573/644747 Fax: (0370) 644572
	34 Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp: 0371-2629239 Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Phone: 0371-2629239
	35 Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088 Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kupang City-NTT 85111; Phone: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088

Kantor Cabang Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
VIII	36 Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578 Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, East Kalimantan 75117; Phone: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	37 Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435 Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Phone: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	38 Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No. 6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112 Telp/fax: (0536) 4264269/ (0536) 3242394 Jl. Yos Sudarso No. 6 Palangkaraya City Central Kalimantan Province 73112 Phone/fax: (0536) 4264269/(0536) 3242394
	39 Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT.04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494 Jl. Jend Sudirman RT.04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Phone: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
	40 Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033 Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Phone: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033
IX	41 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Telp: (0411)873031 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Phone: (0411)873031
	42 Gorontalo	Jl. HB Jassin No.218, Kel. Libuo, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo Telp (0435) 828003 Fax: (0435) 828002 Jl. HB Jassin No.218, Kel. Libuo, Kec. Dungingi, Gorontalo City Phone (0435) 828003 Fax: (0435) 828002
	43 Mamuju	Jl. Marthadinata No.11 Telp: (0426)2324878 Jl. Marthadinata No.11 Phone: (0426)2324878
	44 Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770 Jl Philip Latumahina No.16 Shophouse 1 Ambon 97126; Phone: (0911) 351770
	45 Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Telp: (0921)3122739 Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Phone: (0921)3122739
	46 Jayapura	Jl. Raya Kelapa Dua Enterop No. 2 (Depan Kantor Distrik Jayapura Selatan) Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Telp/Fax: (0967) 524424/(0967) 524423 Jl. Raya Kelapa Dua Enterop No. 2 (Front of South Jayapura District Office) Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Phone/Fax: (0967) 524424/(0967) 524423
	47 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari Papua Barat Telp: (0986)214184 Jl. Trikora, Wosi, Manokwari West Papua Phone: (0986)214184
	48 Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Sulteng 94121 Telp : (0451) 4131812 Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Central Sulawesi 94121 Phone : (0451) 4131812
	49 Kendari	Jl. La Ode Hadi No 56 B Kendari - 93118 Telp: (0401)3196780 Jl. La Ode Hadi No 56 B Kendari - 93118 Phone: (0401)3196780
	50 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43 Manado (62-431) 865194/865198
	51 Pare-pare	Jl. Andi mappatola no 30 c parepare, sulawesi selatan Telp: 0421-2914592 Jl. Andi mappatola no 30 c parepare, south sulawesi Phone: 0421-2914592
	52 Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Palopo City. South Sulawesi Province - 91911; Phone: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	53 Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong (Samping BLKI) - Papua Barat Telp: (0951)329081 Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong (Samping BLKI) - West Papua Phone: (0951)329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP)
Service Unit Offices (KUP)

Kanwil Regional Office	KUP Service Unit Offices	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl Jendral Sudirman No.391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037 Jl Jendral Sudirman No.391 Dumai City Phone: (0765) 439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No.04 Rantau Prapat Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222 Jl. MH Thamrin No.04 Rantau Prapat North Sumatera; Phone: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3 Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774 Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Phone: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4 Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan Telp: 0733 3281182 Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, South Sumatra Phone: 0733 3281182
III	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Telp: (0251) 7564211 Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Phone: (0251) 7564211
	6 Cibinong	Ruko Cibinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29 Cibinong Kab Bogor Telp: (021) 29335250 Ruko Cibinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29 Cibinong Kab Bogor Phone: (021) 29335250
	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A No. 7Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi Telp: (021) 82691292 Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Shophouse Complex Blok A No. 7Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi Phone: (021) 82691292
IV	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi Telp/Fax: (022) 20661506/(022) 20661522 Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Central Cimahi, Cimahi Phone/Fax: (022) 20661506/(022) 20661522
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah; Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770 Metro Square Shophouse - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Central Java; Phone: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	10 Cilacap	Jl Jend. Sudirman No 17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/532010 Fax: (0282) 531115 Jl Jend. Sudirman No 17, Cilacap, Phone: (0282) 531194/532010 Fax: (0282) 531115
VI	11 Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir H. Soekarno No.360 B, Surabaya Telp (031) 87858114 Fax (031) 87858114 Jl. Dr. Ir H. Soekarno No.360 B, Surabaya Phone (031) 87858114 Fax (031) 87858114
	12 Pamekasan	Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Telp: 0324 - 3510118 Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Phone: 0324 - 3510118
	13 Jember	Jl. KH Wahid Hasyim No. 12B, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur Kode pos 68137 Telp & Fax: 0331-4431044 Jl. KH Wahid Hasyim No. 12B, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember East Java Kode pos 68137 Phone & Fax: 0331-4431044
	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525 Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Phone: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
VIII	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113 Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Central Kalimantan 74113
IX	16 Watampone	Jalan Ahmad Yani No 29 B Kel. Macanang, Kec. Tanete. Provinsi Sulawesi Selatan Telp :0481 2921375 Jalan Ahmad Yani No 29 B Kel. Macanang, Kec. Tanete. South Sulawesi Province Phone :0481 2921375

SKALA PERUSAHAAN [GRI 2-6] [OJK C.3]

COMPANY SCALE [GRI 2-6] [OJK C.3]

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Jumlah karyawan tetap Number of permanent employees	Orang People	1.150	1.075	1.025
Total operasi Number of operations	Unit Kantor Office Unit	9 Kantor Wilayah, 53 Kantor Cabang (Termasuk 1 KCK), 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) dan 9 Digital Business Unit (DBU) yang tersebar di seluruh Indonesia 9 Regional Offices, 53 Branch Offices (including 1 Special Branch Office), and 16 Service Unit Offices (KUP) and 9 Digital Business Units (DBU) spread throughout Indonesia.	9 Kantor Wilayah, 54 Kantor Cabang (Termasuk 1 Kantor Cabang Khusus) dan 17 Kantor Unit Pelayanan (KUP) dan 12 Digital Business Unit (DBU) yang tersebar di seluruh Indonesia 9 Regional Offices, 54 Branch Offices (including 1 Special Branch Office), and 17 Service Unit Offices (KUP) and 12 Digital Business Units spread throughout Indonesia	9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia 9 Regional Offices, 55 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia
Aset Asset	Jutaan Rupiah Million IDR	32.358.328	32.231.220	28.009.567
Liabilitas Liability	Jutaan Rupiah Million IDR	32.358.328	18.877.198	15.190.034
Ekuitas Equity	Jutaan Rupiah Million IDR	32.358.328	13.354.022	12.819.533
Jumlah pendapatan penjaminan Total underwriting income	Jutaan Rupiah Million IDR	6.922.049	6.354.728	5.275.810
Laba (Rugi) tahun berjalan Profit (loss) for current year	Jutaan Rupiah Million IDR	1.161.494	1.436.849	1.280.157
Produk dan jasa yang disediakan Products and services provided	Jenis produk Product types	18	18*	18*
*disajikan Kembali *restated				

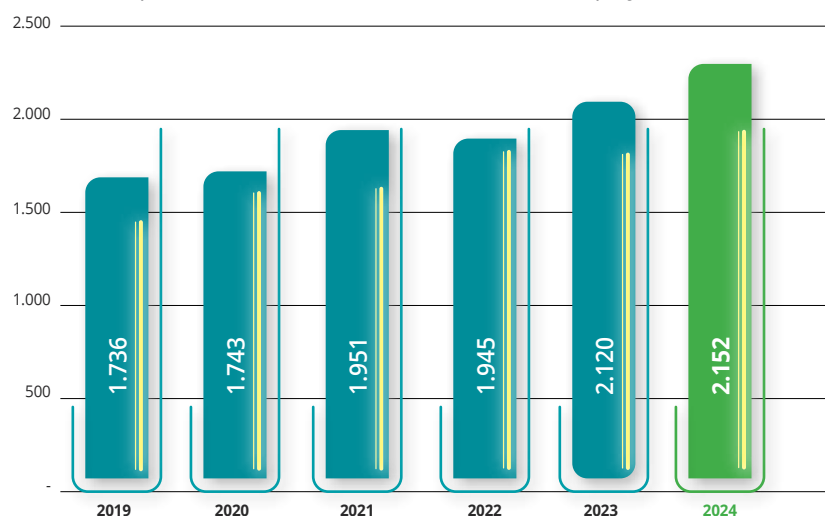
INFORMASI TENTANG KARYAWAN [GRI 2-7][OJK C.3]

INFORMATION ABOUT EMPLOYEES [GRI 2-7][OJK C.3]

Karyawan dengan budaya kerja unggul merupakan aset paling berharga bagi Jamkrindo dalam memberikan produk dan layanan jasa penjaminan kredit. Per 31 Desember 2024, Jamkrindo memiliki 1.150 karyawan tetap, mengalami kenaikan sebesar 6,98% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.075 orang. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pengangkatan karyawan tetap dari karyawan tidak tetap.

Employees with a superior work culture are the most valuable assets for Jamkrindo in providing credit guarantee products and services. As of December 31, 2024, Jamkrindo had 1,150 permanent employees, an increase of 6.98% compared to 2023 which reached 1,075 people. The increase was due to the appointment of permanent employees from non-permanent employees.

Grafik Pergerakan Jumlah Keseluruhan Karyawan 2019-2024
Graph of Movement of the Total Number of Employees 2019-



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi dan Jenis Kelamin (orang)
Demographic of Permanent Employees by Organization Level and Gender (people)

Level Organisasi Organization Level	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
Senior Executive Vice President	1	0	1	0,09	1	0	1	0,09%	1	0	1	0,10%	0	0,00
Kepala Divisi Division Head	11	7	18	1,57	11	7	18	1,67%	10	7	17	1,66%	0	0,00
Wakil Kepala Divisi Deputy Division Head	1	1	2	0,17	1	0	1	0,09%	1	1	2	0,20%	1	100,00
Kepala Kantor Wilayah Regional Office Head	9	0	9	0,78	9	0	9	0,84%	9	0	9	0,88%	0	0,00
Wakil Kepala Kantor Wilayah Regional Office Deputy	2	0	2	0,17	2	0	2	0,19%	1	0	1	0,10%	0	0,00
Kepala Kantor Cabang Branch Office Head	50	4	54	4,70	48	6	54	5,02%	49	6	55	5,37%	0	0,00
Kepala Bagian Unit Head	191	66	257	22,35	179	65	244	22,70%	175	59	234	22,83%	13	5,33
Kepala Seksi & Kepala KUP Section Head & KUP Head	17	0	17	1,48	16	0	16	1,49%	15	1	16	1,56%	1	6,25

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi dan Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Permanent Employees by Organization Level and Gender (people)

Level Organisasi Organization Level	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
Fungsional Functional	39	22	61	5,30	41	22	63	5,86%	22	10	32	3,12%	(2)	(3,17)
Staf Staff	252	307	559	48,61	195	221	416	38,70%	204	205	409	39,90%	18	3,33
Calon Karyawan Prospective Employee	77	93	170	14,78	256*	285*	541*	50,33*	274*	270*	544*	53,07*	44	34,92
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00	610	465	1.075	100%	597	428	1.025	100%	75	6,98

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female*) Disajikan kembali
*)Restrated

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Permanent Employees by Education Level & Gender (people)

Jenjang Pendidikan Education Level	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(2/12)
Strata-3 (S3) Doctorate Degree (S3)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00
Strata-2 (S2) Master Degree (S2)	55	33	88	7,65	50	27	77	7,16%	45	24	69	6,73%	11	14,29
Strata-1 (S1)/Diploma-4 (D4) Bachelor Degree/ Diploma-4 (D4)	534	401	935	81,30	495	376	871	81,02%	475	336	811	79,12%	64	7,35
Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3) Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3)	43	60	103	8,96	45	56	101	9,40%	53	60	113	11,02%	2	1,98
SLTA Sederajat High School/equivalent	14	6	20	1,74	16	6	22	2,05%	20	8	28	2,73%	(2)	(9,09)
SLTP Sederajat Junior High School/ equivalent	4	0	4	0,35	4	0	4	0,37%	4	0	4	0,39%	0	0,00
SD Elementary School	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00	610	465	1.075	100,00%	597	428	1.025	100,00%	75	6,98

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Employees by Employee Status & Gender (people)

Status Kepegawaian Employee Status	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
Tetap Permanent														
Permanen (PKWTT) Permanent (PKWTT)	644	497	1.141	53,02	603	462	1.065	50,24%	592	426	1.018	52,34%	76	7,14
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah Assignment to a subsidiary, PT Jamkrindo Syariah	5	2	7	0,33	6	2	8	0,38%	4	1	5	0,26%	(1)	(12,50)
Penugasan PT LSPP Assignment to PT LSPP	1	1	2	0,09	1	1	2	0,09%	1	1	2	0,10%	0	0,00
Sub Jumlah Tetap Sub total permanent	650	500	1.150	53,44	610	465	1.075	50,71%	597	428	1.025	52,70%	75	6,98

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Employees by Employee Status & Gender (people)

Status Kepegawaian Employee Status	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
Tidak Tetap Non-Permanent														
Kontrak Outsourcing Outsourced Contract	585	246	831	38,62	585	246	831	39,20%	471	160	631	32,44%	0	0,00
Magang Bersertifikasi Certified Apprentice	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	8	25	33	1,70%	0	0,00
Prohire	13	7	20	0,93	15	5	20	0,94%	11	3	14	0,72%	0	0,00
KKWT	81	70	151	7,02	97	97	194	9,15%	120	122	242	12,44%	(43)	(22,16)
Sub Jumlah Tidak Tetap Sub-total non-permanent	679	323	1.002	46,56	697	348	1.045	49,29%	610	310	920	47,30%	(43)	(4,11)
Jumlah Total	1.329	823	2.152	100,00	1.307	813	2.120	100,00%	1.207	738	1.945	100,00%	32	1,51

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Permanent Employees by Placement/Operating Area & Gender (people)

Penempatan/ Wilayah Kerja Placement/ Operating Area	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
Kantor Pusat Head Office	174	150	324	28,17	161	145	306	28,47%	150	133	283	27,61%	18	5,88
Kantor Wilayah/ Cabang Regional/Branch Office	440	325	765	66,52	413	298	711	66,14%	408	274	682	66,54%	54	7,59
KUP	30	22	52	4,52	29	19	48	4,47%	34	19	53	5,17%	4	8,33
Penugasan Jamsyar Assigned at Jamsyar	5	2	7	0,61	6	2	8	0,74%	4	1	5	0,49%	(1)	(12,50)
Penugasan PT LSPP Assigned at PT LSPP	1	1	2	0,17	1	1	2	0,19%	1	1	2	0,20%	0	0,00
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00	610	465	1.075	100,00%	597	428	1.025	100,00%	75	6,98

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Demographic of Permanent Employees by Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
≥ 56 tahun ≥ 56 years old	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00
46-55 tahun 46-55 years old	66	35	101	8,78	61	34	95	8,84%	62	32	94	9,33%	6	6,32
36-45 tahun 36-45 years old	241	109	350	30,43	198	100	298	27,72%	170	89	259	21,44%	52	17,45
26-35 tahun 26-35 years old	320	313	633	55,04	329	268	597	55,53%	337	249	586	61,74%	36	6,03
≤ 25 tahun ≤ 25 years old	23	43	66	5,74	22	63	85	7,91%	28	58	86	7,49%	(19)	(22,35)
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00	610	465	1.075	100,00%	597	428	1.025	100,00%	75	6,98

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja dan Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Permanent Employees by Serving Period & Gender (people)

Masa Kerja Serving Period	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
≥ 30 tahun ≥ 30 years	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00
21-30 tahun 21-30 years	35	28	63	5,48	30	22	52	4,84%	33	22	55	5,37%	11	21,15
11-20 tahun 11-20 years	156	94	250	21,74	86	59	145	13,49%	87	59	146	14,24%	105	72,41
2-10 tahun 2-10 years	387	291	678	58,96	437	284	721	67,07%	428	263	691	67,41%	(43)	(5,96)
≤ 1 tahun ≤ 1 years	72	87	159	13,83	57	100	157	14,60%	49	84	133	12,98%	2	1,27
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00	610	465	1.075	100,00%	597	428	1.025	100,00%	75	6,98

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Permanent Employees by Gender (people)

Gender	2024		2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3)		(4=1-2)	(1/2)
Laki-laki Male	650	56,52	610	56,74%	597	58,24%	40	6,56
Perempuan Female	500	43,48	465	43,26%	428	41,76%	35	7,53
Jumlah Total	1.150	100,00	1.075	100,00%	1.025	100,00%	75	6,98

Pekerja yang Bukan Pekerja Langsung

Selain membagi tenaga kerja dengan kategorisasi di atas, Perusahaan juga memiliki pekerja yang bukan pekerja langsung, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan untuk Jamkrindo tetapi tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan Jamkrindo. Tenaga kerja yang masuk kategori ini antara lain pekerja alih daya yang bekerja di bagian support administrasi, keamanan, office boy, management building, driver, dan housekeeping. Selain itu, pekerja magang juga termasuk kategori ini. Informasi tentang pekerja yang bukan pekerja langsung disajikan dalam tabel berikut:

Komposisi Pekerja yang Bukan Pekerja Langsung Tahun 2022-2024
Composition of Employees who are not Direct Employees Years 2022-2024

Masa Kerja Serving Period	2024				2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)				(3)		(4=1-2)	(1/2)
Pekerja alih daya Outsourcing worker	585	246	831	100	585	246	831	100%	471	160	631	32,44%	0	0,00%
Pekerja magang Intern	0	0	0	0	0	0	0	0%	8	25	33	1,70%	0	0,00%
Sub-jumlah Sub-total	585	246	831	100	585	246	831	100%	479	185	664	100,00%	0	0,00%
Jumlah Total			831	100%			831	100%			664	100,00%	0	0,00

Ketercakupan dalam Perjanjian Kerja Bersama [GRI 2-30]

Karyawan Jamkrindo memiliki wadah untuk berserikat dan berkumpul berupa Serikat Pekerja bernama "Sekarya" (Serikat Karyawan). Anggota serikat pekerja saat ini berjumlah 1.150 orang, yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan penugasan PT. Jamkrindo Syariah. Seluruh anggota Serikat Pekerja (100%) tercakup dan terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan manajemen Jamkrindo.

Jumlah Karyawan yang menjadi anggota Serikat Pekerja dan terikat PKB
Number of Employees becoming the Labor Unions and bound by PKB

Tahun Year	Jumlah Karyawan dalam Serikat Pekerja Number of Employees in the Labor Union
2024	1.150
2023	1.075
2022	1.025

Rantai Pasokan [GRI 2-6]

Pengelolaan rantai pasokan serta pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi keberhasilan bisnis Jamkrindo karena berperan dalam mengoptimalkan biaya serta meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai anggota BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan, pengadaan barang dan jasa di Jamkrindo mengikuti regulasi/ketentuan dari Kementerian

Employees who are not Direct Employees

Besides dividing the workforce according to the categorization above, the Company also has workers who are not direct workers, namely those who work for Jamkrindo but do not have a direct working relationship with Jamkrindo. Workers who fall into this category include outsourced workers who work in the administrative support, security, office boy, management building, driver, and housekeeping departments. In addition, interns are also included in this category. Information about workers who are not direct workers is presented in the following table:

Coverage in Collective Bargaining Agreements [GRI 2-30]

Jamkrindo employees have a forum for association and gathering in the form of a Labor Union called "Sekarya" (Employees' Union). The current number of the Labor Union members is 1,150 people, consisting of permanent employees and employees assigned to PT. Jamkrindo Syariah. All members of the Labor Union (100%) are covered and bound by the Collective Labor Agreement (PKB) which regulates the rights and obligations of Jamkrindo employees and management.

Supply Chain [GRI 2-6]

Supply chain management and the procurement of goods and services are crucial to the success of Jamkrindo's business, as they play a role in optimizing costs and improving operational efficiency. As a member of the SOE's Insurance and Guarantee Holding, Jamkrindo's procurement of goods and services follows regulations/provisions from the Ministry of State-

Badan Usaha Milik Negara di antaranya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa di Jamkrindo antara lain mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa di Jamkrindo antara lain penyedia barang (kendaraan, penyedia jasa konsultan hukum, konsultan akuntan publik, dan kontraktor renovasi gedung.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang/jasa Jamkrindo dilakukan melalui media elektronik melalui eProc: <https://eproc.jamkrindo.co.id/>

Dalam pengadaan barang dan jasa, Perusahaan memegang prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka dan akuntabel. Adapun tujuan pengadaan barang dan jasa di Jamkrindo di antaranya menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; mendukung penciptaan nilai tambah bagi BUMN; meningkatkan efisiensi; meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; meningkatkan peran pelaku usaha nasional termasuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; serta meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Sebagai implementasi atas regulasi di atas, dalam pengadaan barang dan jasa, Jamkrindo mengutamakan dan memberdayakan pemasok nasional, yaitu pemasok yang lokasi usahanya secara geografis berada di Indonesia, yang terdiri dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, swasta maupun pelaku UMKM. Melalui pemberdayaan serupa itu, maka pemasok nasional akan semakin maju dan berkembang, yang pada gilirannya akan membuat perekonomian mereka semakin kuat. Selain pemasok nasional, Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pemasok internasional, yakni pemasok yang lokasi usahanya secara geografis di luar Indonesia. Kerja sama dengan pemasok internasional dilakukan apabila barang dan jasa yang diperlukan Jamkrindo tidak dapat dipenuhi oleh pemasok nasional atau dengan pertimbangan tertentu.

Selain regulasi secara umum di atas, Jamkrindo telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa internal yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo Nomor 16/Per-Dir/4/VII/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 10 Juli 2019. Kemudian terdapat pembaharuan Perdir PBJ No.03/Per-Dir/4/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan pedoman tersebut, berkaitan dengan etika yang harus ditegakkan oleh insan Jamkrindo dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut:

Owned Enterprises, including Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Partners in the procurement of goods and services at Jamkrindo include suppliers of goods (vehicles, legal consultants, public accountants, and building renovation contractors).

To increase efficiency, effectiveness, quality, and transparency in the procurement of goods and services, Jamkrindo's procurement system is carried out electronically through eProc: <https://eproc.jamkrindo.co.id/>

In procuring goods and services, the Company adheres to the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness and reasonableness, openness, and accountability. The objectives of procuring goods and services at Jamkrindo include producing goods and services of the right quality, quantity, time, cost, location, and provider; supporting the creation of added value for SOE; increasing efficiency; increasing the use of domestic production; increasing the role of national business actors including Micro and Small Business; as well as improving synergy between SOE, SOE Subsidiaries, and/or SOE Affiliated Companies.

As an implementation of the above regulations, in the procurement of goods and services, Jamkrindo prioritizes and empowers national suppliers, namely suppliers whose business location is geographically in Indonesia, consisting of SOE, SOE Subsidiaries, and/or SOE Affiliated Companies, private companies, and MSME actors. Through such empowerment, national suppliers will progress and develop, which in turn will make their economy stronger. Apart from national suppliers, the Company also collaborates with international suppliers is carried out if the goods and services required by Jamkrindo cannot be fulfilled by national suppliers or with certain considerations.

In addition to the general regulations above, Jamkrindo has internal Goods and Services Procurement Policy Guidelines which have been ratified through Jamkrindo Public Company Directors (Perum) Regulations Number 16/Per-Dir/4/VII/2019 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services for Public Companies (Perum) Indonesian Credit Guarantee dated 10 July 2019. Then there was an update to Board of Directors Regulation on Procurement of Goods and Services (PBJ) No. 03/Per-Dir/4/III/2020 dated 11 March 2020 concerning Policy Guidelines for Procurement of Goods and Services.

Based on these guidelines, the ethics that must be upheld by Jamkrindo personnel in the procurement process are as follows:

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pedoman dan kategorisasi di atas, jumlah pemasok dan nilai kontrak selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

1. The company treats providers of goods or services including the procurement process in accordance with healthy, open, and impartial business principles based on applicable regulations.
2. Companies must carry out procurement processes in a transparent and accountable manner based on applicable regulations referring to the principles of effectiveness, efficiency, and economics.
3. The company uses goods and service providers based on written documents.
4. Companies must maintain the confidentiality of information and documents for the procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations.
5. The company does not engage in corruption, collusion, and nepotism in procurement of goods and services.

Based on the guidelines and categorization above, the total number of suppliers and contract values are presented in the following table:

Tabel Pemasok Barang dan Jasa serta Nilai Kontrak Tahun 2022-2024
Table of Suppliers of Goods and Services and Contract Value in 2022-2024

Pemasok Supplier	Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Service Procurement			Nilai Kontrak (Juta Rupiah) Contract Value (Million Indonesian Rupiah)		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Nasional National	275	308	236	260.799,807	268.836,257	136.006,324
Internasional International	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	275	308	236	260.799,807	268.836,257	136.006,324

Sesuai tabel di atas, proporsi pemasok nasional tercatat sebesar 100% dari total pemasok.

As shown in the table above, national suppliers accounted for 100% of the total suppliers.

Perubahan Signifikan selama Periode Pelaporan [GRI 2-6] [OJK C.6]

Selama periode pelaporan, terdapat perubahan signifikan pada Perusahaan di antaranya berkurangnya jumlah Kantor Cabang dari 54 unit menjadi 53 unit, Kantor Unit Pelayanan dari 17 unit menjadi 16 unit, dan Digital Business Unit dari 12 unit menjadi 9 unit.

Adapun pada rantai pasokan terjadi perubahan berupa berkurangnya jumlah pemasok barang dan jasa, yaitu dari total 308 pemasok pada tahun 2023 menjadi 275 pada tahun 2024. Pengurangan tersebut berdampak dengan berkurangnya nilai kontrak dari Rp268,83 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp255,80 miliar pada tahun 2024.

Significant Changes during the Reporting Period [GRI 2-6] [OJK C.6]

During the reporting period, there were significant changes in the Company, including a decrease in the number of branch offices from 54 units to 53 units, service units from 17 units to 16 units, and digital business units from 12 units to 9 units.

In the supply chain, there was a change in the number of suppliers of goods and services, decreasing from a total of 308 suppliers in 2023 to 275 in 2024. This reduction resulted in a decrease in contract value from IDR268.83 billion in 2023 to IDR255.80 billion in 2024.

Pendekatan atau Prinsip Pencegahan [GRI 2-23]

Dalam menjalankan operasional usaha, Jamkrindo menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat kinerja dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Untuk meminimalkan

Prevention Approach or Principles [GRI 2-23]

In carrying out business operations, Jamkrindo faces various risks that have the potential to hamper performance and achievement of targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). To minimize the impacts arising from these

dampak yang timbul dari berbagai risiko tersebut, Perusahaan mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko, baik oleh Divisi Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko (KMR) maupun Unit Audit Internal. Dalam mengimplementasikan manajemen risiko, Jamkrindo berkomitmen menjalankan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Inisiatif Eksternal

Jamkrindo berkomitmen untuk mematuhi ketentuan Pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di semua bidang usaha, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Komitmen itu antara lain direalisasikan dengan mengadopsi standar sistem mutu dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Atas komitmen itu, selama tahun 2024, Perusahaan mendapat sejumlah penghargaan sebagai bukti apresiasi dari pihak eksternal terhadap keberhasilan dalam menjalankan usaha, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Sertifikasi

Nama dan Deskripsi Name and Description	Masa Berlaku Valid		Pemberi Sertifikasi Awarding Institution
	Dari From	Sampai dengan Until	
Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001 : 2013 Information Security Management System SNI ISO 27001: 2013	29 April 2019 April 29, 2019	28 April 2025 April 28, 2025	BSI (British Standards Institution)
Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001 : 2013 Information Security Management System SNI ISO 27001: 2013	28 Januari 2023 January 28, 2023	27 Januari 2026 January 27, 2026	BSI (British Standards Institution)
Buisness Continuity Management System SNI ISO 22301	1 November 2023 November 1, 2023	1 November 2024 November 1, 2024	BSI Group
Quality Management Systems Requirements ISO 9001:2015	10 Juni 2024 June 10, 2024	01 Mei 2027 May 01, 2027	SUCOFINDO
Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System SNI ISO 37001:2016	5 Agustus 2020 Agustus 5, 2020	4 Agustus 2027 Agustus 4 2027	

Penghargaan

various risks, the Company optimizes the implementation of Risk Management, both by the Risk Management Division, Risk Management Committee (KMR) and the Internal Audit Unit. In implementing risk management, Jamkrindo is committed to implementing risk management, Jamkrindo is committed to implementing the Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

External Initiatives

Jamkrindo is committed to complying with Government regulations and implementing standard standards that apply in all business fields, both in the field of governance and in general business practices. This commitment is realized, among other things, by adopting quality management standards and certifications recognized both nationally and internationally. Due to this commitment, during 2024, the Company received a number of awards as proof of appreciation from external parties for its success in running the business, both related to economic, environmental, and social aspects.

Certifications

Awards

No.	Penghargaan Award	Pemberi Awarding Institution	Tanggal Penerimaan Date of Receipt
1	BCOMMS 2024 : Kategori Sustainability Community Involvement and Development (CID) Kesehatan BCOMMS 2024 : Category of Sustainability Community for Healthcare Involvement and Development (CID)	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	7 Maret 2024 March 7, 2024
2	IMACO 2024 : Outstanding Financial Accessibility Expansion through Strategic Collaboration kategori Credit Guarantee IMACO 2024 : Outstanding Financial Accessibility Expansion through Strategic Collaboration, category of Credit Guarantee	Warta Ekonomi	31 Juli 2024 July 31, 2024
3	GRC & Performance Excellence Award 2024: The Best GRC for Corporate Finance 2024 (Guarantee Services)	Businessnews	30 Agustus 2024 August 30, 2024

No.	Penghargaan Award	Pemberi Awarding Institution	Tanggal Penerimaan Date of Receipt
4	GRC & Performance Excellence Award 2024: The Best GRC for Corporate Risk Management 2024 (Guarantee Services)	Businessnews	30 Agustus 2024 August 30, 2024
5	Jawa Pos 7 Most Popular Brand of the Year 2024: Kategori Keuangan - Jasa Keuangan Lainnya non Perbankan Jawa Pos 7 Most Popular Brand of the Year 2024: Finance Category - Other Non-Banking Financial Services	Jawa Pos	03 September 2024 September 3, 2024
6	Marketeers Editor's Choice Award 2024: Digital Guarantee Program for SME of the Year (J@de)	Marketeers	12 September 2024 September 12, 2024
7	Markplus Institute Learning Excellence Award: Excellence in Learning Experience	MarkPlus Institute	06 November 2024 November 6, 2024
8	Indonesia Most Reputable Companies 2024: kategori Guarantee Company dengan predikat Very Good Indonesia Most Reputable Companies 2024: Category of Guarantee Company , obtaining a predicate of Very Good	Majalah SWA SWA Magazine	19 November 2024 November 19, 2024

Keanggotaan dalam Asosiasi [GRI 2-28] [OJK C.5]

Jamkrindo bergabung dan berperan aktif dalam asosiasi yang relevan dengan bidang usaha yang dijalankan Perusahaan. Dengan bergabung dalam asosiasi, Perusahaan dapat memperluas jaringan bisnis, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama pelaku industri, serta mendapatkan akses ke pengembangan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, keterlibatan dalam asosiasi juga memungkinkan Jamkrindo untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di bidang penjaminan, menyuarakan kepentingan bersama, dan meningkatkan standar layanan penjaminan sesuai dengan praktik terbaik di industri. Hal ini bermuara dengan penguatan posisi Jamkrindo sebagai pemain utama dalam industri penjaminan kredit di Indonesia.

Per 31 Desember 2204, Jamkrindo bergabung di asosiasi berikut:

Nama Asosiasi/Perhimpunan Name of Association	Skala (Nasional/Internasional) Scale (National/International)	Posisi di Asosiasi (Pengurus/ Anggota) Position in Associations (Committee/Members)	Iuran Tahunan Annual Fee
ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) ASIPPINDO (Association of Indonesian Guarantee Companies)	Nasional National	Ketua Asosiasi dan Wakil Ketua Association Chairperson and Vice Chairperson	100.000.000 100.000.000

Membership in Association [GRI 2-28] [OJK C.5]

Jamkrindo joins and actively participates in associations relevant to the Company's line of business. By joining these associations, the Company can expand its business network, share knowledge and experiences with industry peers, and gain access to human resource capacity development through various training programs and certifications. In addition, involvement in associations also enables Jamkrindo to participate in the formulation of policies in the guarantee sector, advocate for shared interests, and improve guarantee service standards in line with industry best practices. This ultimately strengthens Jamkrindo's position as a key player in the credit guarantee industry in Indonesia.

As of December 31, 2024, Jamkrindo is a member of the following associations:

TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE





TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Jamkrindo sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasional perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjaminan, Jamkrindo dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Dengan GCG yang baik, perusahaan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, mencegah korupsi, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis selalu didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penerapan GCG juga berfungsi sebagai alat untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh Jamkrindo dalam operasionalnya. Dalam industri pembiayaan, risiko kredit dan operasional menjadi perhatian utama. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik dan praktik tata kelola yang transparan, Jamkrindo dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan dan memastikan bahwa layanan penjaminan yang diberikan tetap berkualitas tinggi dan dapat diandalkan.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is essential for Jamkrindo to ensure transparency, accountability, and integrity in every aspect of the company's operations. As a company engaged in the guarantee business, Jamkrindo is expected to uphold public trust and that of other stakeholders by consistently applying GCG principles. The sound GCG enables the company to mitigate the potential risk of abuse of power, prevent corruption, and ensure that strategic decisions are always made objectively and in a manner that serves the best interests of all parties involved.

In addition, the implementation of GCG also serves as an instrument for risk management within Jamkrindo's operational activities. In the financial services industry, credit and operational risks are significant concerns. Through the establishment of robust oversight system and the adoption of transparent governance practices, Jamkrindo can identify potential risks at an early stage and undertake necessary mitigation measures. These efforts are essential to maintaining the company's financial stability and ensuring that its guarantee services remain of high-quality and reliable for customers.

Lebih lanjut, implementasi GCG di Jamkrindo sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional. Dengan menjadi perusahaan penjaminan yang beretika dan profesional, Jamkrindo berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Penerapan GCG yang konsisten tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang menjadi fokus layanan penjaminan yang ditawarkan Jamkrindo. Dengan demikian, penerapan GCG merupakan langkah strategis untuk mencapai visi perusahaan sebagai lembaga penjaminan terdepan di Indonesia.

Dalam upaya meraih hasil terbaik, prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan dan diterapkan Jamkrindo mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Selain menjadi fondasi dalam menjalankan operasional perusahaan, penerapan GCG oleh Perseroan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara di Indonesia juga bertujuan untuk:

1. Melindungi hak dan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan;
2. Mendorong Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan nilai Perusahaan.

Prinsip dan Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan GCG di Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No.47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi, mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Selanjutnya, sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara, penerapan GCG di Jamkrindo juga mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan.

Moreover, the implementation of GCG at Jamkrindo aligns with the company's commitment to supporting national economic development. By upholding ethical and professional standards as guarantee institution, Jamkrindo contributes to the creation of a healthy and sustainable business environment. The consistent application of GCG not only benefits the company but generates positive impacts for the wider community, including Micro, Small, Medium, Enterprises, and Cooperatives (MSMEs), which are the primary focus of Jamkrindo's guarantee services. Accordingly, the implementation of GCG serves as a strategic step toward achieving the company's vision of becoming the leading guarantee institution in Indonesia.

In the pursuit of optimal outcomes, the GCG principles developed and implemented by Jamkrindo are guided by the Law on Limited Liability Companies, the General Guidelines for GCG in Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), as well as the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

In addition to serving as the foundation in running the company's operations, the implementation of GCG by the Company as part of a State-Owned Enterprise in Indonesia also aims to:

1. Protect the rights and interests of Shareholders and stakeholders;
2. Encourage the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees to make decisions and take actions based on high moral values and in compliance with applicable laws and regulations; and
3. Increase the value of the Company.

Principles and Objectives of Governance Implementation

The implementation of GCG at Jamkrindo refers to several laws and regulations including Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) and Law No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies. These laws provide a comprehensive foundation for organizational management aspects, covering matters such as the rights and obligations of shareholders, the duties and authorities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's relationship with both internal and external stakeholders.

Furthermore, as part of a State-Owned Enterprise, the implementation of GCG at Jamkrindo also refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises where it defines GCG as the principles that underlie the process and mechanism of corporate management based on legislation and business ethics. The application of GCG principles which include transparency, accountability, responsibility, independency and fairness, serves as a solid foundation for the sustainability of the Company's business activities.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN adalah:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Secara khusus, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, penerapan GCG bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi Pemangku Kepentingan;
2. Meningkatkan pengelolaan Lembaga Penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ Lembaga Penjamin dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Lembaga Penjamin terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin dalam perekonomian nasional.

Selain berbagai regulasi di atas, implementasi GCG di Jamkrindo mengacu pada Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No:01/SKB/1/XII/2020, KEP-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercantum dalam

Selaras dengan komitmen untuk mengadopsi pembaruan, Jamkrindo juga menerapkan prinsip-prinsip baru yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui penerbitan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) di mana prinsip-prinsip di dalamnya dijiwai

In accordance with the aforementioned Minister of SOEs Regulation, the objectives of implementing GCG principles in SOEs business entities are:

1. Optimizing the value of SOEs in order to enhance the company's competitiveness, both domestically and internationally;
2. Encouraging professional, efficient, and effective SOEs management, while empowering corporate organs and enhancing their independence;
3. Encouraging company organs to make decisions and take actions based on high moral values and in compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOEs social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the SOEs;
4. Increasing the contribution of SOEs in the national economy;
5. Improving conducive climate for the development of national investment.

In particular, as stipulated in POJK No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, the implementation of GCG aims to:

1. Optimizing the value of the Guarantee Institution for Stakeholders;
2. Improving the management of Guarantee Institutions in a professional, effective and efficient manner;
3. Improving the compliance of the Guarantee Institution organs and their subordinates so that they make decisions and carry out actions based on high ethics, compliance with laws and regulations, and awareness of the Guarantee Institution's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability;
4. Creating a Guarantee Institution that is healthier, more reliable, trustworthy, and competitive; and
5. Increasing the contribution of the Guarantee Institution in the national economy.

In addition to the aforementioned regulations, the implementation of GCG at Jamkrindo also refers to the Joint Decree of the Commissioners and Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No: 01/SKB/1/XII/2020, KEP-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for the implementation of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in all Company Organs, both Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors as listed in.

In line with its commitment in adopting updates, Jamkrindo also implements new principles issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the issuance of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) in which the principles are imbued with the four pillars of

oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, yang pertama kali diperkenalkan dalam PUGKI 2021. PUG-KI merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2019. Keempat prinsip dasar PUG-KI 2021 selengkapnya adalah sebagai berikut:

- **Perilaku Beretika**

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- **Akuntabilitas**

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

- **Transparansi**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Keberlanjutan**

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan

corporate governance, namely: ethical conduct, accountability, transparency, and sustainability, which were first introduced in PUGKI 2021. PUG-KI is a progression in line with the latest developments of the TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness) core values, which were last used in PUGKI 2019. The four basic principles of PUG-KI 2021 are as follows:

- **Ethical Behavior**

In carrying out its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. The corporation upholds the interests of shareholders and other stakeholders based on the principle of fairness and is managed independently so that each organ of the Company does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.

- **Accountability**

Corporations can account for their performance in a transparent and equitable manner. For this reason, corporations must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite needed to achieve sustainable performance.

- **Transparency**

To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understandable to stakeholders. Corporations take the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also important matters for decision making by shareholders, creditors and other stakeholders.

- **Sustainability**

The corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out responsibility towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is aligned with business interests and the sustainable development agenda.

Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Jamkrindo mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Legal Foundation

The implementation of GCG within Jamkrindo refers to several regulations/legislation that apply in Indonesia, including:

1. Law of the Republic of Indonesia
 - a. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
 - b. Law of the Republic of Indonesia No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003;
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
 3. Peraturan Menteri BUMN
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN;
- c. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantee;
 - d. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on the Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption;
 - e. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
 - f. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003;
 - g. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
 - h. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
2. Government Regulation
 - a. Government Regulation No. 35 of 2018 concerning the Indonesian Credit Guarantee Corporation (Perum);
 - b. Government Regulation No. 38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation No. 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property;
 - c. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs.
 3. Regulation of the Minister of SOEs
 - a. State Minister of SOEs' Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
 - b. SOEs Minister Regulation Number PER-01/MBU/06/2017 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
 - c. State Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises;
 - d. SOEs Minister Regulation No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendments to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
 - e. SOEs Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
 - f. SOEs Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organ of the Board of Commissioners/ Board of Commissioners of State-Owned Enterprises;
 - g. SOEs Minister Regulation No. PER-10/MBU/2013 dated February 18, 2013 concerning Guidelines for the Preparation of SOE Information Technology Management;

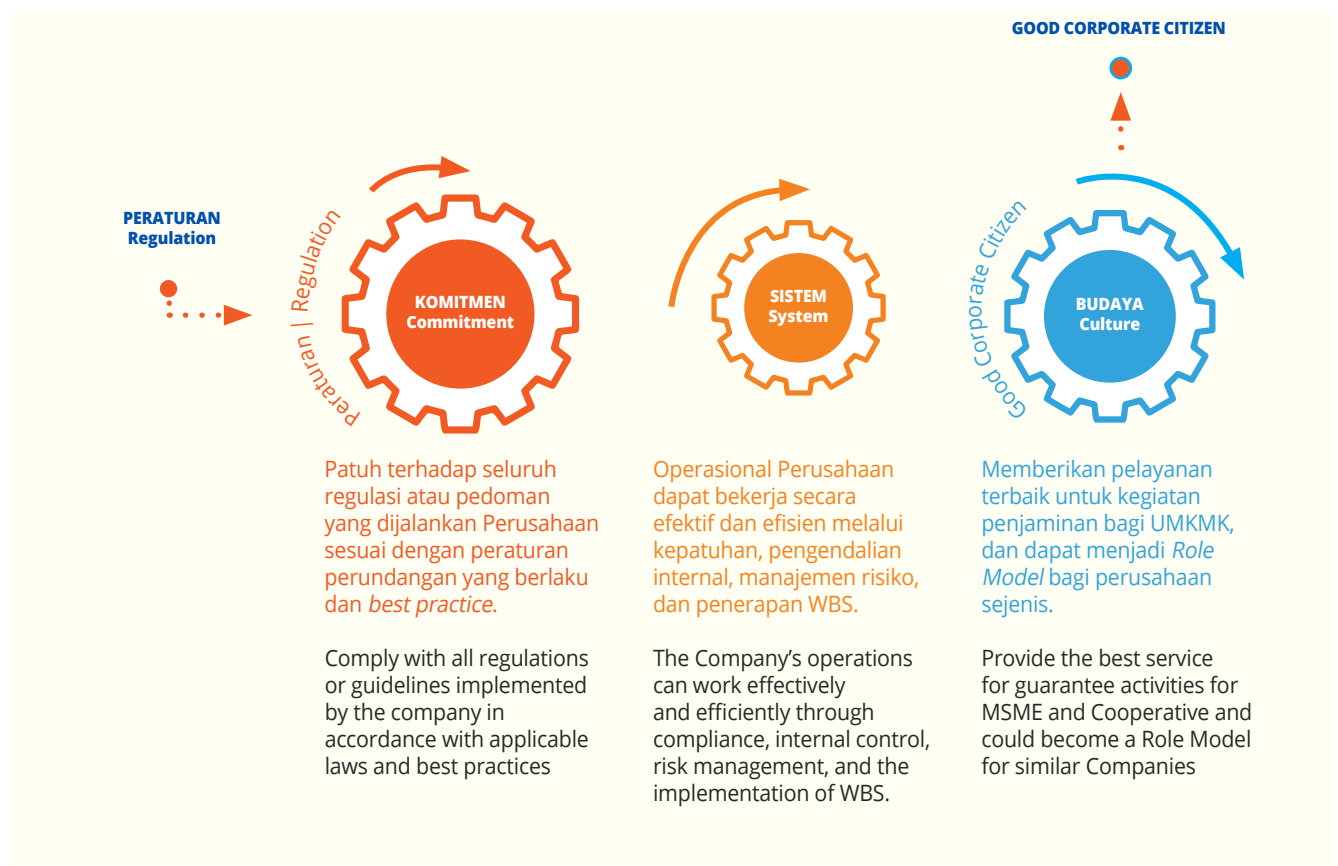
- h. Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara;
- i. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - a. Peraturan OJK No.3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
5. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 7 tanggal 7 Oktober 2022 yang telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022.
6. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- h. SOEs Minister Regulation No. PER-10/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- i. SOEs Minister Regulation No. PER-05/MBU/2006 on the Audit Committee for SOEs.
4. Financial Services Authority (OJK) Regulation
 - a. OJK Regulation No. 3/POJK/05/2017 dated January 11, 2017 regarding Good Corporate Governance for Guarantor Institutions.
5. Articles of Association of the Company as last amended in Deed of Statement of Circular Decree of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia Number 7 dated October 7, 2022 which has received notification of amendments to the Articles of Association by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter Number AHU-0075624.AH.01.02. Year 2022 dated October 19, 2022.
6. Indonesian GCG General Guidelines by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Jamkrindo telah menyusun *roadmap* untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini: (didesain

Corporate Governance Roadmap

Jamkrindo has formulated a roadmap to implement GCG principles in order to achieve Good Corporate Citizen status through the following mechanism: (redesigned)



1. Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

2. Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

3. Budaya

Nilai-nilai budaya Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Jamkrindo, maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Jamkrindo adalah untuk mendukung visi Jamkrindo, yaitu menjadi "Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional". Selain itu juga, implementasi GCG yang dilakukan Perusahaan untuk mendukung misi Jamkrindo, yaitu Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Dengan demikian Perusahaan dapat memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dan membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Commitment

In implementing these GCG principles, all Jamkrindo personnel are committed to submitting to and complying with all applicable laws and regulations, as well as those that are generally accepted. Management support plays a major role in determining the direction and objectives of GCG implementation at Jamkrindo. In practice, Jamkrindo Management serves as an example for employees to continue to be committed to implementing sustainable GCG. Jamkrindo will implement GCG principles in every business process and make improvements to GCG supporting tools.

2. System

In supporting the ongoing GCG commitment at Jamkrindo, it is necessary to have a Company operational system that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, an adequate internal control system an good risk management and the implementation of an effective violation reporting system.

3. Culture

Jamkrindo's cultural values are the foundation for Company personnel in working to be clearer and more structured. In the context of implementing Jamkrindo's GCG, all Jamkrindo personnel are committed to implementing corporate cultural values that are aligned with GCG principles.

The objective of Jamkrindo's GCG implementation is to support Jamkrindo's vision, namely to become a "Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development". In addition, the implementation of GCG is carried out by the Company to support Jamkrindo's mission, namely increasing the financial accessibility of UMKMK through the provision of innovative, competitive guarantees with professional, effective, and efficient services in a sustainable manner.

Therefore, the Company can provide value to stakeholders and build a good corporate image (*brand image*) and corporate reputation as well as a *benchmark* for other similar companies as explained below:



Perkembangan Penerapan GCG Tahun 2024

Jamkrindo secara konsisten meningkatkan penerapan GCG di semua lini antara lain melalui monitoring dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkungan Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2024, upaya pengawasan dan penguatan praktik GCG di Jamkrindo dilakukan melalui kebijakan berikut:

1. Pembentukan Komite Audit:
2. Pengungkapan Transaksi Afiliasi
3. Implementasi Whistleblowing System
4. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Progress of GCG Implementation in 2024

Jamkrindo consistently enhances the implementation of GCG across all levels, including through monitoring by the SPI and the HRM Division on the implementation of the Code of Conduct (CoC). In the event of any conflict of interest or abuse of position leading to fraudulent activities be identified within the Company environment, it will be resolved and followed up in accordance with prevailing regulations. Throughout 2024, oversight and reinforcement of GCG practices at Jamkrindo were carried out through the following policies:

1. Establishment of an Audit Committee:
2. Disclosure of Related Party Transactions
3. Implementation of a Whistleblowing System
4. Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors

Struktur Tata Kelola Perusahaan [GRI 2-9]

Struktur Tata Kelola Perusahaan di Jamkrindo merujuk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan Pemegang Saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

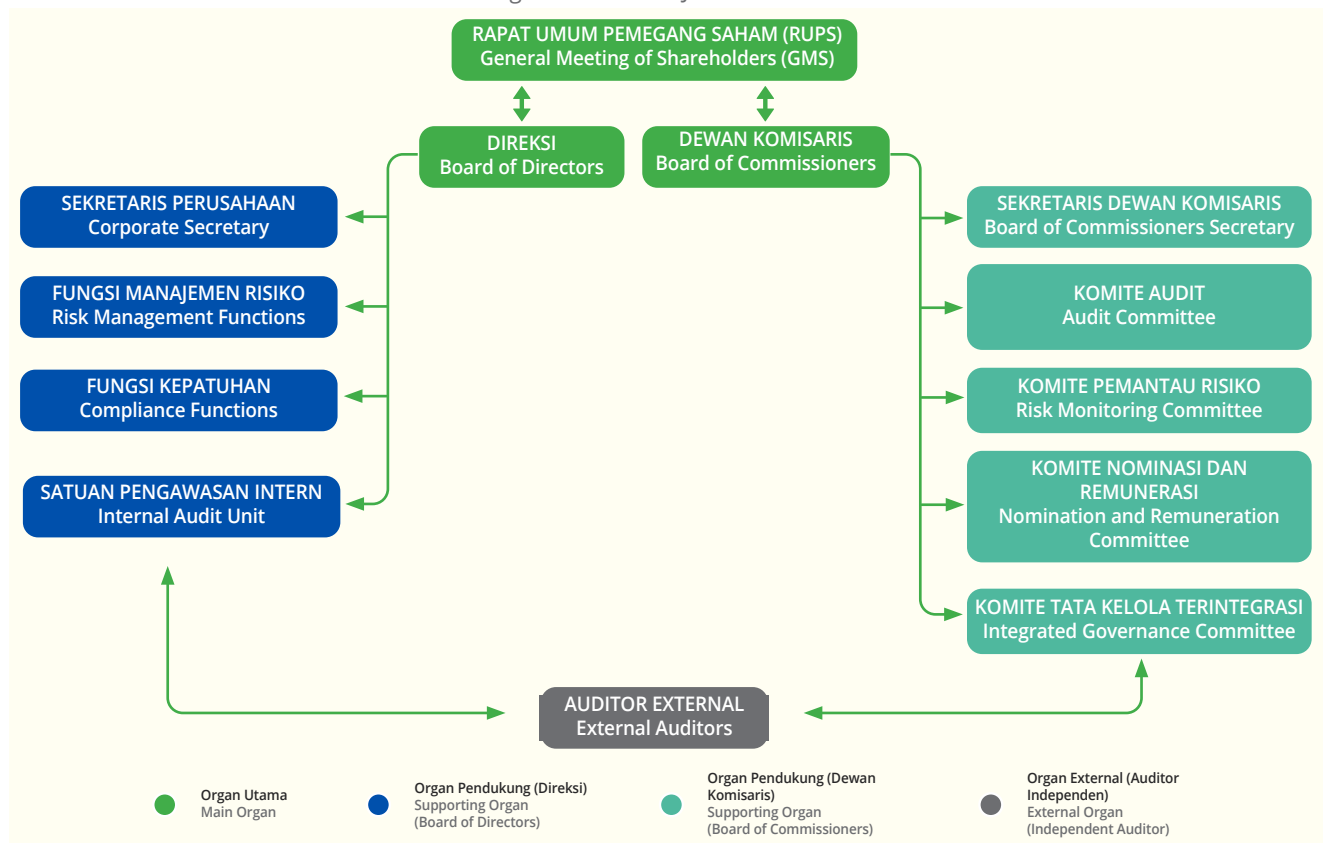
Perusahaan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai inti serta budaya Perusahaan. Di samping itu, terdapat organ-organ pendukung mencakup Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan. Di Jamkrindo, Direksi sekaligus merupakan eksekutif senior yang dipilih langsung oleh pemegang saham dan memikul tanggung jawab terhadap jalannya perusahaan secara keseluruhan. [GRI 2-11]

Corporate Governance Structure [GRI 2-9]

The Corporate Governance Structure at Jamkrindo refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, wherein the organizational infrastructure of a Limited Liability Company encompasses the interests of Shareholders as expressed through the General Meeting of Shareholders (GMS); the Board of Directors with its duty to manage; and the Board of Commissioners whose function is to supervise. The management system of a Limited Liability Company adheres to a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear authorities and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the laws and regulations and the Articles of Association.

The Company has all three main organs, the GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners and Board of Directors have the responsibility to maintain long-term business continuity. The Board of Commissioners and Board of Directors must have the same perception of the Company's vision, mission, core values and culture. In addition, there are supporting organs including Internal Audit and Corporate Secretary. In Jamkrindo, the Board of Directors is also the senior executive directly elected by the shareholders and bears the responsibility for the overall running of the Company. [GRI 2-11]

Struktur Organ GCG Jamkrindo
Organ Structure of Jamkrindo's GCG



Salah satu aspek GCG yang diimplementasikan oleh Perseroan adalah aspek Tata Kelola Keberlanjutan. Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program keberlanjutan di lingkup Perusahaan, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Divisi/Unit dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program yang mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial. Per 31 Desember 2024, Jamkrindo belum memiliki organ khusus yang mengelola isu keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) secara keseluruhan. Keberlanjutan merupakan tanggung jawab Direktur Utama. [GRI 2-9]

Sementara itu, berkaitan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan, Jamkrindo sebagai lembaga perusahaan penjaminan wajib menerapkan peraturan ini per 1 Januari 2024. Lampiran II Peraturan ini antara lain mengatur tentang perlunya penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan di perusahaan penjaminan. Namun demikian, pada tahun pelaporan, Jamkrindo belum menetapkan secara definitif penanggung jawab tersebut. Untuk itu, fungsi tersebut melekat pada Divisi Strategi dan Transformasi. [OJK E.1] [GRI 2-13]

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ Perusahaan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi tata kelola, dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. Wewenang yang dimiliki oleh RUPS antara lain adalah meminta pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait kinerja perusahaan, memberhentikan Direksi dan/atau Komisaris, mengubah Anggaran Dasar, dan lain-lain.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Wewenang RUPS sebagai organ tertinggi Perusahaan dibatasi oleh Undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham, maka pelaksanaan RUPS adalah hal yang esensial. Sebagai organ GCG yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

One of the aspects of GCG implemented by the Company is the aspect of Sustainability Governance. To be able to carry out the entire Sustainability program within the scope of the Company, the implementation of this entire program is divided into several Divisions/Units with responsibilities according to the program category referring to ISO 26000 concerning the Guidelines for Social Responsibility. As of December 31, 2024, Jamkrindo has not established a special organ that manages overall (economic, social and environmental) sustainability issues. Sustainability is the responsibility of the President Director. [GRI 2-9]

Meanwhile, in relation to the issuance of Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies or POJK Sustainable Finance, Jamkrindo as a guarantee company is subject to the obligation to implement this regulation as of January 1, 2024. Appendix II of this Regulation regulates the need for a person in charge of implementing sustainable finance in the guarantee company. However, in the reporting year, Jamkrindo has not yet definitively assigned the person in charge. Therefore, the function is integrated into the Strategy and Transformation Division. [OJK E.1] [GRI 2-13]

General Meeting of Shareholders

The GMS is the organ of the Company that holds the highest authority in the governance organizational structure, with authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners. As a forum for shareholders to make important decisions, the Company has an obligation to hold a GMS, so that the decisions taken are in accordance with the provisions of the articles of association and laws and regulations based on the business interests of the Company. The authority possessed by the GMS, among others, is to ask for accountability from the Board of Commissioners and Directors regarding Company performance, dismiss Directors and/or Commissioners, and amend the Articles of Association, and others.

The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and powers of the Board of Commissioners and the Board of Directors without diminishing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. The authority of the GMS as the highest organ of the Company is limited by law as stated in Article 75 Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

By prioritizing GCG principles within the framework of the main mechanism for the protection and implementation of shareholder rights, the implementation of the GMS is essential. As a GCG organ that serves as a forum for shareholders to make decisions, the GMS has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners. Nevertheless, the GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Jenis RUPS

Types of GMS

RUPS Tahunan yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Annual GMS held to discuss the Company's annual report and annual calculations and carried out no later than 6 (six) months after the fiscal year.	RUPS Lainnya/Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan. Other/Extraordinary GMS which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine matters that are not carried out at the Annual GMS
---	--

Selain kedua RUPS tersebut di atas, pemegang saham juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap pengelolaan Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2024

Di sepanjang tahun 2024, Perusahaan menyelenggarakan 2 kali RUPS, yaitu:

1. RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Rapat dilaksanakan pada Selasa, 30 Januari 2024, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, RT.5/RW 3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Keputusan yang diambil dalam RUPS telah tercantum dalam Risalah Rapat No. 01/RUPS/DIR/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil melalui musyawarah mufakat.

2. RUPS Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

Rapat dilaksanakan pada Senin, 8 Juli 2024, di Gedung Jamkrindo Lantai 10 Jl. Angkasa Blok B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta. Keputusan yang diambil dalam RUPS telah tercantum dalam Risalah Rapat No. 02/RUPS/DIR/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil melalui musyawarah mufakat.

In addition to the two GMS mentioned above, shareholders also have a Circular Decision mechanism, namely decision making by shareholders outside the GMS mechanism. The Circular Decisions have the same legal force as GMS Resolutions, provided that all shareholders provide written approval of the proposals to be decided in terms of Circular Decisions. This is in accordance with Article 91 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Both the Annual GMS and Other GMS have the highest authority in the Corporate Governance structure as well as being a forum for shareholders to exercise their rights and authority over the management of the Company.

Implementation of The 2024 GMS

Throughout 2024, the Company held 2 GMS, namely:

1. GMS to ratify the Company's Work Plan and Budget GMS.

The meeting was held on Tuesday, January 30, 2024, at Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru District, South Jakarta, 12190. The resolutions adopted at the GMS have been recorded in the Minutes of the Meeting No. 01/RUPS/DIR/I/2024 dated Januari 30, 2024, concerning the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2024. All resolutions adopted in the GMS are made by consensus.

2. GMS Regarding the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2023.

The meeting was held on Monday, July 8, 2024, at the 10th Floor of the Jamkrindo Building, Jl. Angkasa Blok B9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta. The resolutions adopted at the GMS are recorded in the Minutes of the Meeting No. 02/RUPS/DIR/VII/2024 dated July 8, 2024, concerning the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2023. All resolutions at the Meeting were adopted through deliberation.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Tugas Dewan Komisaris selengkapnya diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Jamkrindo Tahun 2024.

[GRI 2-12]

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tanggal 19 Oktober 2022, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tanggal 19 Oktober 2022 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban;
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris;
4. Pengawas tidak boleh berubah menjadi pelaksana tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal seluruh jabatan Direksi Perusahaan lowong dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Pemegang Saham belum mengisi lowong jabatan Direksi tersebut maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup seluruh aspek bisnis dan operasional Perusahaan;
6. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir tercantum dalam Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 Pasal 14 ayat 11 disebutkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun,

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed by the Shareholders to provide oversight over the management of the Company by the Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Commissioners is stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The duties of the Board of Commissioners are described in the Corporate Governance Chapter of Jamkrindo's 2024 Annual Report. [GRI 2-12]

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a Company Organ whose duties are to carry out general and/or special supervision in accordance with Notarial Deed of Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N number 07 dated October 07, 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated October 19, 2022, and provide advice to the Board of Directors.

Monitoring and advisory activities by the Board of Commissioners are carried out with the following principles:

1. In carrying out supervision, the Board of Commissioners will always comply with the Notarial Deed of Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N number 07 dated October 07, 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated October 19, 2022 and provisions of laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
2. Supervision is carried out by the Board of Commissioners on the management of the Company by the Board of Directors;
3. In conducting supervision, the Board of Commissioners acts as a panel and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners;
4. Supervisors may not change to executors of executive duties, except in the event that all positions for the Board of Directors of the Company are vacant and within 30 (thirty) days the Shareholders have not filled the vacant positions for the Board of Directors. When that happens, then, the Company is temporarily managed by the Board of Commissioners;
5. Supervision is carried out not only by simply approving or disapproving actions that require the approval of the Board of Commissioners, but supervision is carried out pro-actively, covering all aspects of the Company's business and operations;
6. The Board of Commissioners may use independent professional services and/or form a Committee to assist the duties of the Board of Commissioners.

Terms of Term of Office

Based on the Company's Articles of Association which have been amended several times and most recently stated in the Notarial Deed of Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N number 07 dated October 07, 2022 Article 14 paragraph 11, states that the term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of

anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya sebagaimana disebutkan pada Ayat 12.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2024

office. However, members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a resolution of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons as stated in Paragraph 12.

Composition and Structure of The Board of Commissioners for 2024

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2024
Composition of the Board of Commissioners of Jamkrindo as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-243/MBU/10/2022 dan No. 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT BPUI (Persero) as Shareholders of PT Jamkrindo No. SK-243/MBU/10/2022 and No. 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 dated October 27, 2022	27 Oktober 2022 s.d. 27 Oktober 2027 October 27, 2022 to October 27, 2027	Ke-1 1st
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	- Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A (d/h Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal) No. SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 - Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A (d/h Wakil Pemerintah untuk Pendirian Perusahaan Perseroan) No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Holder of Series A Shares (formerly the Government Representative as the Capital Owner) No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder (formerly Government Representative for the Establishment of a Limited Liability Company) No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	3 Januari 2019 s.d. 3 Januari 2024 January 3, 2019 to January 3, 2024	Ke-1 1st
		- Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham No. SK-35/MBU/02/2024 dan No. 3/KepSir-PS/BPUI/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT BPUI (Persero) as Shareholders No. SK-35/MBU/02/2024 and No. 3/KepSir-PS/BPUI/II/2024 dated February 7, 2024	7 Februari 2024 s.d. 7 Februari 2029 February 7, 2024 to February 7, 2029	Ke-2 2nd
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham No. SK-182/MBU/06/2021 dan No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT BPUI (Persero) as Shareholders No. SK-182/MBU/06/2021 and No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 dated June 2, 2021	2 Juni 2021 s.d. 2 Juni 2026 June 2, 2021 to June 2, 2026	Ke-1 1st
Angger P Yuwono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham No. SK-217/MBU/07/2023 dan No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT BPUI (Persero) as Shareholders No. SK-217/MBU/07/2023 and No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2028 July 31, 2023 to July 31, 2028	Ke-1 1st

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2024
Composition of the Board of Commissioners of Jamkrindo as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A (d/h Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal) No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 - Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A (d/h Wakil Pemerintah untuk Pendirian Perusahaan Perseroan) No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder (formerly Government Representative as Capital Owner) No. SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder (formerly Government Representative for the Establishment of the Company) No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	17 Oktober 2019 s.d. 17 Oktober 2024 October 17, 2019 to October 17, 2024	Ke-1 1st
		- Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham No. SK-227/MBU/10/2024 dan No. 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT BPUI (Persero) as Shareholders No. SK-227/MBU/10/2024 and No. 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 dated October 18, 2024	18 Oktober 2024 s.d. 18 Oktober 2029 October 18, 2024 to October 18, 2029	Ke-2 2nd
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham No. SK-19/MBU/01/2021 dan No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT BPUI (Persero) as Shareholders No. SK-19/MBU/01/2021 and No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 dated January 18, 2021	18 Januari 2021 s.d. 18 Januari 2026 January 18, 2021 to January 18, 2026	Ke-1 1st

Direksi

Direksi adalah organ di bawah RUPS yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional perusahaan. Secara lebih rinci, Direksi bertugas menjalankan visi misi Perusahaan, merancang strategi bisnis, mengelola sumber daya Perusahaan, serta mengendalikan kegiatan operasi agar dapat menghasilkan kinerja keuangan dan non-keuangan yang optimal. Direksi juga menjadi representasi Perusahaan baik secara internal maupun eksternal, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan Perusahaan berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas Direksi selengkapnya diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Jamkrindo Tahun 2024.

[GRI 2-12]

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo No. nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut
2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
3. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan

Tanggung Jawab:

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan
2. Secara bersama-sama atau individual, bertanggung jawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan
3. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap
4. Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan Masa Jabatan

Masa Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Board of Directors

The Board of Directors is an organ under the GMS that is fully responsible for the implementation of the Company's operations. In more detail, the Board of Directors is tasked with carrying out the Company's vision and missions, designing business strategies, managing Company resources, and controlling operational activities in order to produce optimal financial and non-financial performance. The Board of Directors also represents the Company both internally and externally, who has the responsibility to ensure that all Company management activities run efficiently and effectively and are in accordance with GCG principles. The complete duties of the Board of Directors are described in the Corporate Governance Chapter of Jamkrindo's 2024 Annual Report. [GRI 2-12]

Duties and Responsibilities

Referring to the Articles of Association of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, or abbreviated as PT Jamkrindo, No. 07 dated October 7, 2022, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

Main Duties:

1. Carry out management of the Company for the interests and objectives of the Company and act as Leaders in such management
2. Represent the Company in and out of court
3. Maintain and manage the Company's assets

Responsibilities:

1. The Board of Directors is responsible for implementing regulations and managing the Company, as well as taking legal action for and on behalf of the Company and representing Jamkrindo in and out of court
2. Together or individually, be responsible for any losses arising from the Company's assets due to the actions of the Board of Directors who violated or neglected their duties and/or obligations as stipulated in Company Regulations and Legislation
3. Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and complete manner
4. Other responsibilities according to the provisions of the Company and the applicable laws and regulations

Term of Office

The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) more term of office.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2024

Composition and Structure of The Board of Directors in 2024

Susunan Direksi Jamkrindo per 31 Desember 2024

Composition of Board of Directors of Jamkrindo as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
Akhmad Purwakajaya*	Direktur Utama President Director	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/ BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028 July 31, 2023 - July 31, 2028	Ke-1 1 st
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir- PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1 st
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of HR Management, General Affairs, and Risk Management	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir- PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1 st
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan & Layanan Director of Institutional Relations & Services	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir- PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1 st
Suwarnito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/ BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023 – 21 Maret 2026 July 31, 2023 - March 21, 2026	Ke-1 1 st
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/ BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028 July 31, 2023 - July 31, 2028	Ke-1 1 st

*)menjabat hingga 24 Maret 2025
served until March 24, 2025

Peran Badan Tata Kelola Tertinggi Dalam Pelaporan Keberlanjutan [GRI 2-14]

Pelaporan keberlanjutan Jamkrindo disampaikan melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersama dengan Laporan Tahunan Perusahaan. Berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, selain memberikan persetujuan atas topik material terpilih dengan mempertimbangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta aspek lingkungan, sosial-ekonomi dan tata kelola (*Environmental Social and Governance/ESG*), Direksi sebagai badan tata kelola tertinggi, senantiasa mendorong agar laporan keberlanjutan yang diterbitkan Jamkrindo terus ditingkatkan kualitas dan kelengkapan kontennya agar memenuhi panduan penyusunan laporan yaitu POJK Keuangan Berkelanjutan dan GRI Universal Standards 2021. Dengan memenuhi kedua panduan, maka topik-topik material dalam Laporan Keberlanjutan telah mencakup penerapan aspek ESG yang sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi [GRI 2-19, 2-20, 2-21]

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The Highest Governance Body's Role in Sustainability Reporting [GRI 2-14]

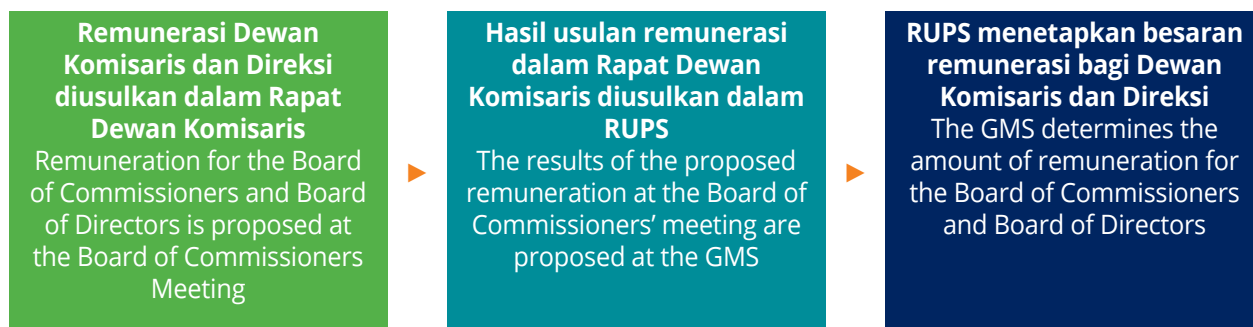
Jamkrindo's sustainability reporting is delivered through the Sustainability Report published together with the Company's Annual Report. In relation to sustainability reporting, in addition to approving selected material topics by considering the Sustainable Development Goals (SDGs) as well as environmental, socio-economic and governance (ESG) aspects, the Board of Directors as the highest governance body, always encourages that the sustainability report published by Jamkrindo continues to improve the quality and completeness of its content in order to meet the guidelines for the preparation of reports, namely POJK Sustainable Finance and GRI Universal Standards 2021. By fulfilling both guidelines, the material topics in the Sustainability Report have covered the implementation of ESG aspects in line with the expectations of stakeholders, both internal and external.

Proposal Procedure and Mechanism up to Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors [GRI 2-19, 2-20, 2-21]

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RUPS.

The remuneration of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is proposed at the Board of Commissioners Meeting, by discussing the consideration of the proposal, the results of surveys with similar industries and other sectors. The Board of Commissioners and the Board of Directors propose to the Shareholders through the GMS, with due observance of Ministerial Regulations and the capability of the Company, to then be determined at the GMS.



Faktor perhitungan atas usulan besaran remunerasi:

- Pertimbangan usulan yang ada
- Hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya
- Kemampuan Perusahaan

Calculation factors for the proposed amount of remuneration:

- Consideration of existing proposals
- Survey results with similar industries and other sectors
- Company Capabilities

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan. Informasi selengkapnya tentang remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023. Pada tahun 2024, total kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp52,06 miliar, sedangkan total kompensasi karyawan adalah sebesar Rp646,72 miliar. Dengan demikian, rasio total kompensasi adalah 1:12,42.

Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out on the basis of a formula determined by the Shareholders and has been reviewed by the Board of Commissioners through in-depth study conducted by the Shareholders. The decision to determine the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through the Annual GMS. Further information on the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is presented in the Company's Annual Report 2023. In 2024, the total compensation of the Board of Commissioners and Board of Directors is IDR52.06 billion, while the total compensation of employees is IDR646.72 billion. Thus, the total compensation ratio is 1:12.24.

Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan

Selama tahun 2024, anggota Dewan Komisaris, Direksi Jamkrindo sebagai penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan di Jamkrindo telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, termasuk yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan sebagai berikut: [OJK E.2][GRI 2-17]

Competency Development Related to Sustainable Finance

Throughout 2024, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors of Jamkrindo as the designated official responsible for the implementation of sustainable finance at Jamkrindo, participated in various competency development activities, including those related to the implementation of sustainable finance, as follows: [OJK E.2][GRI 2-17]

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date			
			Dari From	Sampai To	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS						
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	Hard Skill (HS)	19 Januari 2024 19 January 2024	19 Januari 2024 19 January 2024	Workshop Kementerian BUMN - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability Workshop of the Ministry of SOEs - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	KBUMN
		Hard Skill (HS)	14 Mei 2024 14 May 2024	15 Mei 2024 15 May 2024	The International Conference on Neuromanagement and Leadership	IARF Conference
		Hard Skill (HS)	26 Juli 2024 26 July 2024	26 Juli 2024 26 July 2024	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment for Top Level Management Program	LPPI
		Hard Skill (HS)	13 September 2024	13 September 2024	Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)	LPPI
Achmad Ivan S. Soeparno	Direktur MSDM, Umum dan Manajemen Risiko Director of HRM , General Affairs, and Risk Management	Hard Skill (HS)	19 Januari 2024 19 January 2024	19 Januari 2024 19 January 2024	Workshop Kementerian BUMN - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability Workshop of the Ministry of SOEs - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	KBUMN
		Hard Skill (HS)	23 Februari 2024 23 February 2024	03 Maret 2024 03 March 2024	Executive Risk Management Refresher Program Batch 5 ESG & Business Sustainability	LPPI
		Hard Skill (HS)	26 Juli 2024 26 July 2024	26 Juli 2024 26 July 2024	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment for Top Level Management Program	LPPI
		Hard Skill (HS)	13 September 2024	13 September 2024	Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)	LPPI
		Hard Skill (HS)	22 Agustus 2024 22 August 2024	23 Agustus 2024 23 August 2024	Seminar & Masterclass GRC Summit: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs	GRC Summit
		Hard Skill (HS)	13 November 2024	15 November 2024	Indonesia Human Capital Beyond Summit 2024	IHCBS
		Hard Skill (HS)	12 Januari 2024 12 January 2024	14 Januari 2024 14 January 2024	Onboarding Directorship Program Angkatan 7 Tahun 2024	BUMN school of Excellence
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Hard Skill (HS)	18 Juli 2024 18 July 2024	20 Juli 2024 20 July 2024	Global Executive CWM & CPD Program 2024	CWMA
		Hard Skill (HS)	26 Juli 2024 26 July 2024	26 Juli 2024 26 July 2024	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment for Top Level Management Program	LPPI
		Hard Skill (HS)	22 September 2024	29 September 2024	International Benchmarking and Master Class on ESGRC	CRMS

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date			
			Dari From	Sampai To	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Hard Skill (HS)	14 Mei 2024 14 May 2024	15 Mei 2024 15 May 2024	The International Conference on Neuromanagement and Leadership	IARF Conference
		Hard Skill (HS)	29 Mei 2024 29 May 2024	29 Mei 2024 29 May 2024	CTO Masterclass Modern AI - How Can Indonesia Compete with Leveraging AI?	BUMN School of Excellence
		Hard Skill (HS)	27 Juni 2024 27 June 2024	27 Juni 2024 27 June 2024	Seminar Indonesia Cyber Risk 2024 : "Mitigating Cyber Risk and Building a Trust" Seminar of Indonesia Cyber Risk 2024 : "Mitigating Cyber Risk and Building a Trust"	LPPI
		Hard Skill (HS)	26 Juli 2024 26 July 2024	26 Juli 2024 26 July 2024	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment for Top Level Management Program	LPPI
		Soft Skill (SS)	05 September 2024	06 September 2024	Expansive Leadership Program	CLDI MSE
		Soft Skill (SS)	04 Desember 2024 04 December 2024	04 Desember 2024 04 December 2024	Master Class - Resilient Leadership	CRMS
		Hard Skill (HS)	05 Desember 2024 05 December 2024	06 Desember 2024 06 December 2024	Risk Beyond 2024 - Sustainable Symphony: Echoes of Change	CRMS
		Hard Skill (HS)	29 November 2024	29 November 2024	Program Business Essential Batch IV Tahun 2024 Business Essential Batch IV Program in 2024	KBUMN Ministry of State-Owned Enterprises
		Sertifikasi Certification	20 Desember 2024 20 December 2024	20 Desember 2024 20 December 2024	Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Direktur Bisnis Business Director Scheme Competency Certification	LSP Penjaminan
		Hard Skill (HS)	29 November 2024	29 November 2024	Business Essential Batch IV	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional Affairs and Services	Hard Skill (HS)	26 Juli 2024 26 July 2024	26 Juli 2024 26 July 2024	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment for Top Level Management Program	LPPI
		Hard Skill (HS)	22 Agustus 2024 22 August 2024	23 Agustus 2024 23 August 2024	Seminar & Masterclass GRC Summit: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs	GRC Summit
		Hard Skill (HS)	13 September 2024	13 September 2024	Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)	LPPI
		Hard Skill (HS)	03 Oktober 2024 03 October 2024	03 Oktober 2024 03 October 2024	Business Essential Batch III - Managing Organization Transformation	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date			
			Dari From	Sampai To	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
		Hard Skill (HS)	09 Oktober 2024 09 October 2024	10 Oktober 2024 10 October 2024	GRC World Forums #RISK London	GRC World Forums
		Soft Skill (SS)	04 Desember 2024 04 December 2024	04 Desember 2024 04 December 2024	Master Class - Resilient Leadership	CRMS
		Hard Skill (HS)	05 Desember 2024 05 December 2024	06 Desember 2024 06 December 2024	Risk Beyond 2024 - Sustainable Symphony: Echoes of Change	CRMS
		Sertifikasi Certification	10 Desember 2024 10 December 2024	10 Desember 2024 10 December 2024	Sertifikasi QRG QRGP Certification	CRMS
		Hard Skill (HS)	12 Desember 2024 12 December 2024	14 Desember 2024 14 December 2024	CSR Leader Bootcamp 2024 Smart Village 4.0 Platform	Sentul Innovation Centre
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Hard Skill (HS)	26 Juli 2024 26 July 2024	26 Juli 2024 26 July 2024	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment for Top Level Management Program	LPPI
		Hard Skill (HS)	22 Agustus 2024 22 August 2024	23 Agustus 2024 23 August 2024	Seminar & Masterclass GRC Summit: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs	GRC Summit
		Soft Skill (SS)	05 September 2024	06 September 2024	Expansive Leadership Program	CLDI MSE
		Hard Skill (HS)	21 Oktober 2024 21 October 2024	24 Oktober 2024 24 October 2024	Swift International Banker's Operation Seminar (SIBOS) 2024	Swift
Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM Dan Umum Director of Finance, Human Capital, and General Affairs	Hard Skill (HS)	13 September 2024	13 September 2024	Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)	LPPI
Loesdarwanto	Direktur Operasional Director of Operations	Hard Skill (HS)	13 September 2024	13 September 2024	Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)	LPPI
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners						
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Seminar	06 Maret 2024 March 6, 2024	06 Maret 2024 March 6, 2024	Seminar Nasional Bertumbuh Dalam Pengaturan UU P2SK National Seminar on Growing in the Arrangement of the P2SK Law	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Finance Company Association (APPI)

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date			
			Dari From	Sampai To	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
		Webinar/ Seminar Online	13 Maret 2024	13 Maret 2024	Riskhub International Webinar: ESG Integration in Risk Management: A Practical Exploration	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
		Webinar/ Online Seminar	March 13, 2024	March 13, 2024		
		Webinar/ Seminar Online	16 Mei 2024	16 Mei 2024	Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN	Universitas Jenderal Soedirman
		Webinar/ Online Seminar	May 16, 2024	May 16, 2024	Synergy between the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia to Optimize the Management of SOEs	Jenderal Soedirman University
		Webinar/ Seminar Online	12 Juni 2024	12 Juni 2024	Riskhub International Webinar: Based on ISO 23894 & ISO 42001: Proactive Approaches for Sustainable Innovation	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
		Webinar/ Online Seminar	June 12, 2024	June 12, 2024		
		Pelatihan Training	26 Juli 2024	26 Juli 2024	Executive Refreshment For Top Level Management	LPPI
		Pelatihan Training	13 September 2024	13 September 2024	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	LPPI
		Pelatihan (Benchmark) Training (Benchmark)	24 Oktober 2024	02 November 2024	International Benchmarking Visit To United Kingdom	LPPI
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	Seminar	04 Desember 2024	04 Desember 2024	Resilient Leadership: ESG, AI, and GRC in Modern Risk Governance	ERMA x CRMS x LSP MKS
		Seminar	05 Desember 2024	06 Desember 2024	Risk Beyond 2024 : Sustainable Symphony: Echoes of Change	ERMA
		Pelatihan Training	26 Juli 2024	26 Juli 2024	Executive Refreshment For Top Level Management	LPPI
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	13 September 2024	13 September 2024	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	LPPI
		Seminar	09 Oktober 2024	10 Oktober 2024	#RISK London 2024	GRC World Forum
		Pelatihan Training	26 Juli 2024	26 Juli 2024	Executive Refreshment For Top Level Management	LPPI
		Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	08 Agustus 2024	09 Agustus 2024	Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Exam Preparation Education and Training	CRMS x LPK MKS
			August 8, 2024	August 9, 2024		

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date			
			Dari From	Sampai To	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
Angger P Yuwono	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Profesi Professional Certification	28 Agustus 2024 August 28, 2024	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Manajemen Risiko: Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP) Risk Management: Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera
		Pelatihan Training	13 September 2024 September 13, 2024	13 September 2024 September 13, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	LPPI
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	06 Maret 2024 March 6, 2024	06 Maret 2024 March 6, 2024	Sosialisasi CPD dan Diskusi Panel POJK 20/2023 CPD Dissemination and Panel Discussion on POJK 20/2023	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuary Association
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	28 Maret 2024 March 28, 2024	28 Maret 2024 March 28, 2024	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Sub-Field of Supervision	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Assurance Professional Certification Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	08 Mei 2024 May 8, 2024	08 Mei 2024 May 8, 2024	Semkain Berkah Pasca Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) More Blessings After the Spin-Off of the Sharia Business Unit (UUS)	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuary Association
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	28 Mei dan 5 Juni 2024 May 28 and June 5, 2024	28 Mei dan 5 Juni 2024 May 28 and June 5, 2024	Joint Regional Seminar 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuary Association
		Pelatihan Training	26 Juli 2024 July 26, 2024	26 Juli 2024 July 26, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management	LPPI
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	20 Agustus 2024 August 20, 2024	22 Agustus 2024 August 22, 2024	7th Indonesian Actuaries Summit 2024 “Actuaries, Now and Beyond”	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuary Association
		Pelatihan Training	13 September 2024 September 13, 2024	13 September 2024 September 13, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	LPPI
		Pelatihan Training	26 Juli 2024 July 26, 2024	26 Juli 2024 July 26, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management	LPPI
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	08 September 2024 September 8, 2024	13 September 2024 September 13, 2024	Data for Executive Decision Making	University of Queensland
		Pelatihan Training	13 September 2024 September 13, 2024	13 September 2024 September 13, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	LPPI
		Pelatihan Training	26 Juli 2024 July 26, 2024	26 Juli 2024 July 26, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management	LPPI

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date			
			Dari From	Sampai To	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
M Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Profesi	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2024 December 31, 2024	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Assurance Certification: Assurance Supervision Sub-Field	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	22 Februari 2024 February 22, 2024	22 Februari 2024 February 22, 2024	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	07 Maret 2024 March 7, 2024	07 Maret 2024 March 7, 2024	Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	13 Maret 2024 March 13, 2024	13 Maret 2024 March 13, 2024	Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan <i>Market Conduct</i> Financial Services Development Strategy through Strengthening Islamic Banking and Market Conduct	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Assurance Professional Certification Institute
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	15 Mei 2024 May 15, 2024	15 Mei 2024 May 15, 2024	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Assurance Certification: Assurance Supervision Sub-Field	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	11 Juni 2024 June 11, 2024	11 Juni 2024 June 11, 2024	Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	27 Juni 2024 June 27, 2024
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	27 Juni 2024 June 27, 2024	27 Juni 2024 June 27, 2024	Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding	LPPI
		Pelatihan Training	26 Juli 2024 July 26, 2024	26 Juli 2024 July 26, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management	Fora Group
		Seminar	10 Agustus 2024 August 10, 2024	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Seminar Ai4: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation" Ai4 Seminar: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation"	LPPI
		Pelatihan Training	13 September 2024 September 13, 2024	13 September 2024 September 13, 2024	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	LPPI

Manajemen Risiko dan Prinsip Pencegahan [GRI 2-23][OJK E.3]

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

Dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, Perusahaan juga memasukkan potensi tersebut ke dalam bagian sistem Manajemen Risiko Jamkrindo. Sesuai dengan peraturan Direksi Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/*downtime* & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and engineering*), pihak *external*, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Jamkrindo telah memiliki panduan untuk melaksanakan *Risk and Control Self Assessment* (RC SA). RC SA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up*, sehingga identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian atau Seksi di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidental. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Risk Management and Prevention Principles [GRI 2-23][OJK E.3]

Risk Management is a system used to strengthen the accountability aspect of the Board of Directors in supporting decision-making processes and the development of the Company's performance. The commitment to implementing Risk Management—as an integral part of the Company's overall management system—is articulated through the Risk Management Policies and Procedures, which are developed in accordance with the Company's context and capabilities. The Company's Risk Management is implemented in line with its conditions and needs, using ISO 31000:2018 as the standard framework.

Operational Risk Management

To minimize the impact of losses arising from operational activities, the Company incorporates these potential risks into Jamkrindo's Risk Management system. In accordance with the regulations issued by the Board of Directors of Jamkrindo, operational risk is defined as a risk that may arise, among other things, due to the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failures, or external problems that affect the Company's operations.

These operational risks may be caused by various factors, including system/technology failure or downtime, human error, equipment issues (mechanical and engineering), external parties, fraud, failure of internal processes, organizational and human capital issues, counterparties, Health, Safety and Environment (HSE), and Information Technology.

To implement Operational Risk Management, Jamkrindo has established guidelines for conducting Risk and Control Self Assessment (RC SA). The RC SA is carried out using a bottom-up approach, where risk identification and assessment are conducted by Heads of Sections in Work Units at the Head Office, Branch Offices and Sub-Branch Offices. Determination of the level of implementation of risk identification and assessment is based on the consideration that this level is the lowest official in their work unit, so they know about technical problems and the link between these technical problems and the achievement of the Company's goals.

Risk Management Implementation

Risk Management activities are carried out on both a periodic and incidental basis. Periodic Risk Management activities follow a four-stage process, consisting of risk identification, risk assessment, risk treatment, and risk monitoring and evaluation.

In the early stages, the process carried out is Inherent Risk Identification and Assessment. Based on the results of risk identification and risk assessment, an evaluation is carried out to improve the risk management process.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidental adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Kegiatan insidental berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kegiatan insidental berupa pemberian opini sesuai Surat Edaran Direksi No. 126/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang SOP Pendapat (Opini) Manajemen Risiko yaitu untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.

2. Organisasi Manajemen Risiko Jamkrindo secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Incidental Risk Management activities are the implementation of risk management carried out at certain stages in accordance with those stipulated in the risk-based business process SOP and the provision of opinions related to matters that must be consulted to the Risk Management Division.

Incidental activities in the form of providing opinions on matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the Company, manufacture of new products and/or activities, transactions with a certain value, write-off policies on Company receivables, preparation of SOPs, RJP, RKAP, implementation of the use of new applications/software, determination of new banks for deposit and investment placements, and other strategic policies.

Incidental activities in the form of giving opinions according to Directors Circular Letter No. 126/SE/5/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning SOP for Risk Management Opinion, namely for matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the Company, manufacture of new products and/or activities, transactions with a certain value, policies write-off of Company receivables, preparation of SOP, RJP, RKAP, implementation of use of new applications/software, determination of new banks for deposit and investment placements, and other strategic policies.

Completeness of Risk Management

For the implementation of integrated risk management, several components are required to support the implementation of risk management. In this regard, Jamkrindo has prepared the following components:

1. Regulation of the Board of Directors regarding Implementation of Risk Management.

The Board of Directors' Regulation regarding the Implementation of Risk Management is a regulation that states the application of risk management and the necessary supporting tools. In this regulation, a statement regarding risk management is attached, which is a statement by the Board of Directors and all Jamkrindo officials regarding the Company's risk management policy. This statement is a written form of the commitment of the Board of Directors and Jamkrindo Officers to implement risk management at each stage of activity.

2. Structurally, Jamkrindo's Risk Management Organization, the Board of Directors has established an organizational structure in which there is a Risk Management Division. In addition to a structural organization, there is also an *ad hoc* structure, namely the Jamkrindo Risk Management Committee. The Risk Management Committee (KMR) is a committee consisting of Directors and Heads of Divisions related to the management of Company Risk Management. The Risk Management Committee's role is to carry out periodic assessments and provide recommendations on business risks, their types and impacts on the Company's activities, determine the Company's risk appetite and risk tolerance, and provide reports on the implementation of Company Risk Management to the Board of Commissioners.

3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.
4. Kebijakan Manajemen Risiko Jamkrindo merupakan pedoman atau acuan penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi di Perusahaan dan pedoman penyusunan kebijakan pendukung di korporasi dan tingkat Unit Kerja. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko.
5. SOP Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Jamkrindo. SOP Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No. 127/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko.
6. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No. 124/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai panduan teknis penerapan Manajemen Risiko di Jamkrindo.

Panduan teknis penerapan Manajemen Risiko tersebut secara garis besar adalah:

- a. Penetapan Konteks dan Kriteria;
- b. Identifikasi Risiko;
- c. Analisis Risiko;
- d. Evaluasi Risiko;
- e. Penanganan Risiko;
- f. Monitoring Risiko;
- g. Komunikasi dan Konsultasi Risiko;
- h. Pencatatan dan Pelaporan Risiko;
- i. Toleransi Risiko.
7. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko sebagai *second opinion* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap oleh setiap pemilik proses bisnis.
8. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi telah ada sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk *data base* yang terstruktur.

3. In addition, for the smooth implementation of the risk management process, each work unit appoints a *Person in Charge* (PIC) who is responsible for coordinating the implementation of the risk management process in each work unit. In carrying out their duties, the Risk Management PIC coordinates and consults with the Risk Management Division.
4. Jamkrindo's Risk Management Policy is a guideline or reference for the implementation of integrated Risk Management in the Company and a guideline for the preparation of supporting policies at the corporate and Work Unit level. The Risk Management Policy is then cascaded into SOP contained in the Risk Management Division.
5. Risk Management SOP is intended to provide technical guidance in the implementation of the risk management process at Jamkrindo. The Risk Management SOP is issued through the Board of Directors Circular Letter No. 127/SE/5/XII/2020 dated 30 December 2020 concerning the Standard Operating Procedure (SOP) for Risk Management.
6. Risk Management Implementation Guidelines Issued through the Board of Directors Circular Letter No. 124/SE/5/XII/2020 dated 30 December 2020. The Technical Guidelines contain an explanation of the technical guidance for the implementation of Risk Management at Jamkrindo.

The technical guidance for the implementation of Risk Management generally includes:

- a. Determination of Context and Criteria;
- b. Risk Identification;
- c. Risk Analysis;
- d. Risk Evaluation;
- e. Risk Management;
- f. Risk Monitoring;
- g. Risk Communication and Consultation;
- h. Risk Recording and Reporting;
- i. Risk Tolerance.
7. SOP for Risk-Based Business Processes is an SOP of a business process that is prepared by considering the risks involved in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk register and the necessary risk controls have been considered in the implementation of the business processes, while for new types of risks it has been ensured that an opinion has been obtained from the Risk Management Division as a second opinion in consideration of decision-making considerations. Considering that the types of activities that exist in Jamkrindo are quite diverse, the preparation of SOPs for risk-based business processes is carried out in stages by each business process owner.
8. Integrated Risk Management Support System has been in place since 2011, the company has started to develop the Risk Management Information System Application. This application functions to simplify the process of risk identification, risk assessment, and follow-up on risk management. With the application, risk data can be stored in a structured database.

Jenis dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2024

Monitoring *Top Risk* Perusahaan pada tahun 2024 dilakukan atas potensi risiko sebagai berikut:

1. Risiko Strategis
 - a. Potensi Target *Underwriting* Non Program tidak tercapai. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Mengembangkan dan meningkatkan kontribusi produksi penjaminan (volume penjaminan) melalui kolaborasi dengan Bank BUMN.
 - ii) Meningkatkan kerja sama dengan asosiasi, Holding, anak perusahaan Bank BUMN/Penerima Jaminan/Bowheer atau mitra strategis lainnya. Perluasan pangsa pasar penjaminan super mikro dan *suretyship*.
 - iii) Melakukan konversi bisnis model PEN untuk penjaminan kredit produktif dengan skema yang sama.
 - b. Potensi tidak tercapainya target ROE. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Memperluas, standarisasi, simplifikasi *digital channeling* (e-SP dan e-IJP).
 - ii) Mengembangkan konsolidasi dan kolaborasi dengan anggota Holding dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis Perusahaan.
 - iii) Mengembangkan pengembangan inovasi produk baru yang lebih selektif dan sesuai kebutuhan pasar.
 - iv) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan TC untuk produk yang kurang profitable dan dampak pandemi Covid-19.
 - v) Meningkatkan kualitas penyusunan tarif IJP/IJK standar.
2. Risiko Operasional
 - a. Potensi pemasaran produk yang tidak optimal. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait produk *knowledge*, strategi marketing dan branding produk penjaminan non program.
 - ii) Membuat *tool marketing kit* sebagai media komunikasi dan pemasaran yang lebih efektif.
 - b. Potensi Perusahaan tidak dapat mengoptimalkan aset yang sudah dibeli sehingga tidak memberi nilai tambah bagi Perusahaan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Perusahaan membuat rencana strategis optimalisasi aset yang telah dibeli.
 - ii) Apabila diperlukan Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak konsultan independent yang berkompeten di bidangnya guna mengetahui pemberdayaan terbaik/teroptimal yang dapat dilakukan dari aset tersebut.
 - iii) Sebelum pembelian perlu adanya dukungan dokumen appraisal kelayakan gedung.
 - c. Potensi proses bisnis tidak efisien. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:

Types and Management of Risks in 2024

Company's *Top Risk* Monitoring in 2024 was conducted on the following potential risks:

1. Strategic Risk
 - a. Potential shortfall in achieving the Non-Program *Underwriting* Target. The following mitigation strategies may be implemented:
 - i) Developing and increasing the contribution of guarantee production (guarantee volume) through collaboration with State-Owned Banks.
 - ii) Enhancing cooperation with associations, the Holding Companies, subsidiaries of State-Owned Banks/Guaranteed Parties/brokers or other strategic partners. Expanding the market share of supermicro and surety bonds.
 - iii) Transforming the PEN business model into productive credit guarantees with the same scheme.
 - b. Potential Failure to achieve ROE Target. The following mitigation strategies may be implemented:
 - i) Expanding, standardizing, simplifying digital channeling (e-SP and e-IJP).
 - ii) Developong consolidation and collaboration with Holding Company by improving the company's business efficiency and performance.
 - iii) Developing innovations for new products that are more selective and in line with market needs.
 - iv) Evaluating and improving TC for less profitable products and those affected by the Covid-19 pandemic.
 - v) Improving the quality of standard IJP/IJK tariff formulation.
2. Operational Risk
 - a. The potential for non-optimal product marketing. Some mitigations that can be done including:
 - i) Conducting socialization and training related to product knowledge, marketing strategies, and branding of non-program guarantee products.
 - ii) Creating marketing toolkit as more effective communication and marketing media.
 - b. The Company faces a potential risk of failing to optimize acquired assets, which may result in a lack of added value. The following mitigation strategies may be implemented:
 - i) The Company creates a strategic plan to optimize the acquired assets.
 - ii) Where necessary, the Company may collaborate with an independent and qualified consultant to assess the most effective and optimal utilization of the asset. If necessary, the Company may collaborate with an independent and qualified consultant to assess the most effective and optimal utilization of the assets.
 - iii) Prior to purchase, supporting documentation in the form of a building feasibility appraisal must be obtained.
 - c. The potential for business process inefficiencies. Some mitigating actions that can be taken including:

- i) Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dilakukan secara tertib.
 - ii) Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.
 - 3. Risiko Kredit
 - a. Potensi Peningkatan *nonperforming guarantee* Perusahaan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan Monitoring berkala NPL Penerima Jaminan.
 - b. Potensi pengembalian bunga dan pokok MTN tidak tepat waktu. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Pembelian MTN BPUI agar tetap menjaga tingkat RKI yang mendukung bisnis penjaminan. Divisi Keuangan agar berkoordinasi dengan Divisi Aktuaria dan Divisi Klaim dalam penentuan tingkat RKI yang harus dijaga.
 - ii) Agar dalam perjanjian pembelian MTN terdapat persyaratan bahwa PT BPUI bersedia membeli kembali MTN apabila PT Jamkrindo mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4. Risiko Likuiditas
 - a. Potensi penurunan likuiditas Perusahaan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah Perusahaan melakukan seleksi atas aset yang ditawarkan Jasindo dan hanya melakukan pembelian terhadap aset yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pendapatan Perusahaan.
 - b. Potensi penurunan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Melakukan proyeksi arus kas perusahaan.
 - ii) Melakukan perencanaan pendanaan darurat sesuai hasil kajian *stress testing*.
 - iii) Melakukan pengelolaan *Liquidity Gap Asset* dan Liabilitas dan mengusahakan agar nilai aset lebih besar dibandingkan dengan nilai liabilitas.
 - 5. Risiko Kepatuhan
 - a. Potensi tidak terpenuhinya aspek legalitas atau aspek kepatuhan yang berlaku tentang penjualan aset BUMN/Anak BUMN. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah seluruh pihak yang terlibat memenuhi seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan aset BUMN/Anak BUMN antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/Mbu/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Per-03/MBU/03/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/Mbu/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Potensi Audit tidak selesai secara tepat waktu. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dilakukan secara tertib.
- i) Data reconciliation from all work units to Head Office is performed in an orderly manner e.
 - ii) IT system support for data fulfillment.
 - 3. Credit Risk
 - a. Potential increase in the Company's non-performing guarantees. Mitigation measures include regular monitoring of the Guaranteed Parties' Non-Performing Loans (NPL)
 - b. Potential untimely return of MTN interest and principal. Some mitigations that can be done including:
 - i) Purchasing BPUI MTNs to maintain the RKI level that supports the guarantee business. The Finance Division should coordinate with the Actuarial Division and Claims Division in determining the RKI level that must be maintained.
 - ii) The MTN purchase agreement should include a clause that PT BPUI to be willing to repurchase the MTNs if PT Jamkrindo experiences liquidity difficulties.
 - 4. Liquidity Risk
 - a. Potential decline in the Company's liquidity. Mitigation that can be carried out is the Company selects assets offered by Jasindo and only purchases only those assets that can be optimally utilized for Company income.
 - b. Potential decline in the Company's ability to meet its short-term obligations. Some mitigating actions that can be done including:
 - i) Conducting company cash flow projections.
 - ii) Conducting contingency funding planning PT Jaminan Kredit Indonesia according to the results of the stress testing study.
 - iii) Managing the Liquidity Gap of Assets and Liabilities and strive to have the value of assets greater than the value of liabilities.
 - 5. Compliance Risk
 - a. Potential non-compliance of legality or compliance aspects related to the sale of SOE/Subsidiary assets. Mitigation that can be carried out is that all involved parties must comply with all applicable laws and regulations that must be fulfilled in the process of disposal of assets of SOEs/Subsidiaries, including Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/2010 concerning Procedures for Write-Off and Transfer of Fixed Assets of State-Owned Enterprises and PER-03/MBU/03/2021 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/2010 concerning Procedures for Write-Off and Transfer of Fixed Assets of of State-Owned Enterprises.
 - b. Potential delay in audit completion. Some mitigating actions that can be taken including:
 - i) Conducting orderly data reconciliation from all Work Units to the Head Office.

- ii) Membentuk tim audit yang kompeten.
- iii) Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.

6. Risiko Pasar

- a. Potensi *Opportunity Loss* adanya kenaikan suku bunga. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Agar melakukan manajemen portofolio yang *prudent* dan memastikan bahwa pembelian setiap instrumen investasi dapat memenuhi capaian target investasi yang sudah ditetapkan.
 - ii) Agar menetapkan strategi *exit policy* yang konkret dan dapat diterapkan guna mengurangi eksposur risiko yang mungkin terjadi.

7. Risiko Hukum

- a. Potensi nilai tuntutan dan atau gugatan hukum. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Tinjauan secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara perusahaan dengan mitra.
 - ii) Unit Kerja rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi pada klausul-klausul yang terdapat pada seluruh Ketentuan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja sama dengan pihak bank/mitra dan agar selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut.
 - iii) Divisi Kepatuhan melakukan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan gratifikasi kepada seluruh Unit Kerja dan seluruh Unit Kerja rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman mengenai SMAP dan gratifikasi.

8. Risiko Reputasi

- a. Potensi Audit tidak selesai secara tepat waktu. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dilakukan secara tertib.
 - ii) Membentuk tim audit yang kompeten.
 - iii) Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.

9. Risiko Penjaminan

- a. Potensi tingginya klaim atas penjaminan KUR. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Melakukan integrasi *online* dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
 - ii) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan TC PKS saat ini untuk produk yang kurang *profitable* dan pembaharuan kerja sama KUR terkait dampak Covid-19
- b. Potensi Rendahnya penerimaan subrogasi. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Memperluas, standarisasi, simplifikasi *digital channeling* (e-subro) dengan mitra perbankan maupun non perbankan.
 - ii) Mengembangkan aplikasi terintegrasi antara penjaminan (klaim dan subrogasi) dengan akuntansi.
 - iii) Perluasan mitra penagihan subrogasi.

- ii) Forming a competent audit team.
- iii) IT system support in terms of data fulfillment.

6. Market Risk

- i) Potential opportunity loss due to the increase in interest rates. Some mitigations that can be done including:
- ii) Conducting prudent portfolio management and ensuring that the purchase of each investment instrument can contribute to the achievement of the established investment objective.
- iii) Establishing a concrete and workable exit policy strategy to mitigate potential risk exposure.

7. Legal Risk

- a. Potential values of claims and/or lawsuits. Some mitigating actions that can be taken including:
 - i) Periodic review of contracts and agreements between the company and partners.
 - ii) Work Units routinely conducting socialization activities to all personnel to provide understanding and common perception on the clauses contained in all Company Regulations and Cooperation Agreements with banks/partners and always referring to these provisions.
 - iii) The Compliance Division conducting socialization of the Anti-Bribery Management System (SMAP) and gratification to all Work Units and all Work Units routinely conduct socialization activities to all their staff to provide an understanding of SMAP and gratification.

8. Reputation Risk

- a. Risk of audit not being completed in a timely manner projection. Several mitigation measures that can be taking suggested including:
 - i) Orderly data reconciliation from all Work Units to the Head Office.
 - ii) Establish a competent audit team.
 - iii) IT system support in terms of data provision.

9. Guarantee Risk

- a. Potentially high claims on KUR (People's Business Credit) guarantees. Some mitigation measures that can be taken including:
 - i) Conduct online integration with the Program Credit Information System (SIKP).
 - ii) Evaluation and improvement of the current TC of PKS for less profitable products, as well as renewal of the KUR collaboration related to the impacts of Covid-19.
- b. Potentially low subrogation recoveries. Some mitigating actions that can be taken including:
 - i) Expand, standardize, and simplify digital channels (e-subro) with banking and non-banking partners.
 - ii) Develop integrated applications between underwriting (claims and subrogation) and accounting.
 - iii) Expansion of subrogation collection partners.

- c. Potensi rendahnya *co-guarantee* Perusahaan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
 - i) Melakukan pengajuan penggantian klaim secara periodik.
 - ii) Melakukan rekonsiliasi penggantian klaim secara periodik dengan mitra Reasuransi.
 - iii) Melakukan *offset* antara piutang klaim dan hak subrogasi mitra Reasuransi.
 - iv) Melakukan penyelesaian klaim secara *offset* antara piutang klaim dan premi reasuransi.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko dilakukan melalui penilaian RMI (*Risk Maturity Index*). Penilaian RMI dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai pada BUMN sesuai dengan Juknis Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Hasil Penilaian RMI utamanya untuk mendapatkan *gap* dan langkah perbaikan peningkatan penerapan Manajemen Risiko. RMI dinilai dari dua aspek yaitu aspek dimensi dan aspek kinerja.

1. Aspek Dimensi dalam penilaian RMI terdiri dari:
2. Budaya dan Kapabilitas Risiko;
3. Organisasi dan Tata Kelola Risiko;
4. Kerangka Risiko dan Kepatuhan;
5. Proses dan Kontrol Risiko; dan
6. Model, Data, dan Teknologi Risiko.

Sedangkan dalam aspek kinerja dalam Penilaian RMI terdiri dari:

1. Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*); dan
2. Peringkat Komposit Risiko.

Pernyataan Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen Jamkrindo senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko. Dalam mendukung rangka implementasi rencana strategis Perusahaan, di antaranya adalah:

1. Melakukan *addendum* kebijakan *risk appetite* untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.
2. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko.
3. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko pasar dan likuiditas.
4. Melakukan *review* kebijakan pengelolaan permodalan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan terus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Komite Audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan Direksi.

- c. Potential underperformance of the Company's *co-guarantee*. Some mitigation measures that can be taken including:
 - i) Submitting claim reimbursement on a periodic basis.
 - ii) Conducting periodic reconciliation of claim reimbursements with reinsurance partners.
 - iii) Offsetting claim receivables against the subrogation rights of Reinsurance partners.
 - iv) Settling claims through offsetting claim receivables and reinsurance premiums.

Evaluation of the Effectiveness of Risk Management System

Evaluation of the effectiveness of the Risk Management system is carried out through the RMI (*Risk Maturity Index*) assessment. The RMI assessment is conducted to measure the level of design quality and effectiveness of Risk Management implementation in protecting and creating value in SOEs in accordance with Technical Guidelines Number SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment in State Owned Enterprises. The results of the RMI Assessment are primarily to identify gaps and corrective actions to improve the implementation of Risk Management. RMI is assessed from two aspects, namely dimensional aspects and performance aspects.

1. Dimension Aspect in the RMI assessment consists of:
2. Risk Culture and Capability;
3. Organization and Risk Governance;
4. Risk and Compliance Framework;
5. Risk Processes and Controls; and
6. Risk Models, Data, and Technology.

Meanwhile, the performance aspect of the RMI assessment consists of:

1. Final Rating of Health Level; and
2. Risk Composite Rating.

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or Audit Committee on Risk Management System Adequacy

The management of Jamkrindo constantly evaluates the effectiveness of risk management system. The following initiatives have been implemented as part of the company's strategic plan:

1. Make an addendum to the risk appetite policy to align with current business conditions.
2. Review the risk management policies.
3. Review the market and liquidity risk management policies.
4. Review the capital management policies.

As part of its endeavors to enhance the quality of risk management implementation, the Company continues to optimize the implementation of the Audit Committee's function to support the effectiveness of carrying out the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Sistem Pelaporan Pelanggaran [GRI 2-26]

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi *Whistleblowing System* (WBS) No. 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) yang telah diperbarui melalui Peraturan Direksi No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 tentang *Whistleblowing System*, SPI melakukan sosialisasi WBS terhadap *auditee* bersamaan dengan pelaksanaan *general audit*.

Berdasarkan Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) pada *holding* IFG, kebijakan WBS Terintegrasi "IFG Integritas" telah diperbarui. Selain itu, dilakukan harmonisasi dan diterbitkan ketentuan Direksi PT Jamkrindo Nomor 35/Per-Dir/4/XII/2023 yang berlaku sejak 29 Desember 2023. Ketentuan tersebut mengatur tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Terintegrasi.

Seluruh karyawan Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktikkan WBS dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Jamkrindo juga memiliki komitmen membuat kebijakan untuk melindungi pelapor. Dalam kebijakan WBS menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan. Sistem pelaporan pelanggaran berada di bawah Direksi, khususnya Direktur Utama. Dewan Komisaris ikut melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas atas pelaksanaan sistem tersebut.

Sesuai data Tim Pengelola WBS, pada tahun 2024,, terdapat 4 (empat) pengaduan yang masuk. Jumlah pelaporan yang masuk dan tindak lanjut selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut: [GRI 2-25]

Media Penyampaian Channeling Media	2024	2023	2022
Surat Letter	-	-	-
Email E-mails	-	-	-
Situs Web Websites	4	1	-
SMS	-	-	-
Lain-lain Others	-	-	-
Jumlah Total	4	1	-

Whistleblowing System [GRI 2 - 26]

The Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for reporting witnesses to convey information regarding acts of violation indicated to have occurred within a company based on accountable evidence and good intentions for the benefit of the company.

Since the publication of the Board of Directors' Whistleblowing System (WBS) Regulation No. 04/Per-Dir/IV/2018 dated April 10, 2018 concerning Guidelines for Management of the Whistleblowing System (WBS) which has been updated through the Board of Directors' Regulation No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 concerning Whistleblowing System, SPI conducts WBS socialization to *auditees* simultaneously with conducting general audits.

Based on the Management of the Whistleblowing System (WBS) within the IFG holding, the Integrated WBS policy, 'IFG Integritas', has been updated. In addition, harmonization efforts were undertaken, resulting in the issuance of Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo Number 35/Per-Dir/4/XII/2023, which came into effect on 29 December 2023. This regulation governs the Integrated Whistleblowing System Policy.

All Jamkrindo employees are committed to practicing WBS in order to implement a whistleblowing system. Employees are also required to participate actively in reporting when they find violations. Jamkrindo is also committed to making policies to protect whistleblowers. The WBS policy states clearly that a whistleblower will receive protection from the Company against adverse treatment. The violation reporting system is under the Board of Directors, especially the President Director. The Board of Commissioners participates in supervising the adequacy and effectiveness of the implementation of the system.

According to data from the WBS Management Team, in 2024, a total of 4 (four) incoming complaints were received. The number of incoming reports and their respective follow-ups are presented in the following table: [GRI 2-25]

Status Laporan Report Status	2024	2023	2022
Laporan Dalam Proses Report In-Process	0	-	-
Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti Reports which have been followed-up		-	-
Laporan Tidak Terbukti Reports Proven Untrue	-	-	-
Laporan Selesai dengan Tindak Lanjut Reports Resolved with Follow-up	4	1	-
Jumlah Total	4	1	-

Kode Etik Perusahaan [GRI 2-23]

Perusahaan memiliki komitmen untuk berusaha meningkatkan kinerja Perusahaan dengan berbasiskan budaya Perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-Jamkrindo/XIII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).
4. Memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah:

Corporate Code of Ethics [GRI 2-23]

The Company is committed to continuously enhancing its performance based on corporate culture through good corporate governance guided by the principles of transparency, fairness, accountability and independence, so that it can support government policies in the field of developing micro, small and medium enterprises and cooperatives. This was stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-Jamkrindo/XIII/2020 dated December 30, 2020.

The Company's standard behavior are transparency and disclosure of information, independence, responsibility, and fairness. The application of these business ethics standards is the Company's way of doing business in order to realize the commitment to:

1. Placing customer satisfaction as a top priority;
2. Implementing Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance;
3. Always proportionately in the context of providing high quality services to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives;
4. Treating all stakeholders as partners;
5. Companies must serve and try to anticipate the needs of stakeholders well.

The contents of the Company's Code of Conduct include

Etika Perusahaan Corporate Ethics

Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

1. Perusahaan harus memperlakukan *stakeholder* secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *stakeholder*.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *stakeholder*.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus mematikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada *stakeholder*.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.

Corporate Ethics with Stakeholders

1. The Company must treat stakeholders well and fairly by fulfilling stakeholder rights.
2. The Company are required to improve performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders.
3. The Company is obliged to maintain the confidentiality of information and data.
4. The Company must stop providing information that is misleading to stakeholders.
5. The Company must serve and try to anticipate the needs of stakeholders properly.

Etika Perusahaan dengan Karyawan

1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Corporate Ethics with Employees

1. The Company must prioritize employee's health, work safety, quality improvement and welfare by fulfilling employee rights proportionally so that employees are expected to show maximum performance.
2. The Company provides equal employment opportunities to all employees regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, person's disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.
3. The Company provides equal opportunities for employee self development.
4. The Company provides rewards based on employee competence and performance.
5. The Company creates a conducive and productive working environment, communication and working relationship with superiors, subordinates and colleagues.
6. The Company must respect human dignity without regard to differences in ethnic background, religion, gender, age, a person's physical disability or other special conditions protected by laws and regulations.
7. The Company must uphold the general principles of humanity, rights and obligations based on applicable laws and regulations.
8. The Company allows employees to carry out multiple activities outside the Company for social activities, professional membership, associations or similar groups.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (*supplier*) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Corporate Ethics with Goods and Service Providers

1. The Company treats goods or service providers (suppliers), including the procurement process, in accordance with sound, open, impartial business principles based on applicable regulations.
2. The Company must carry out the procurement process in a transparent and accountable manner based on applicable regulations by referring to the principles of effectiveness, efficiency, and economy.
3. The Company uses goods and services providers based on written documents.
4. The Company must maintain the confidentiality of information and documents for procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations.
5. The Company does not engage in corruption, collusion and nepotism in the procurement of goods and services.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Corporate Ethics with Competitors

1. The Company must carry out fair business competition by prioritizing product excellence and service quality.
2. The Company must avoid misleading behavior and or dishonest actions.
3. The Company opposes agreements or covenants that are anti-competitive in nature.
4. The Company does not cooperate without acceptable and reasonable reasons.

Etika Perusahaan Corporate Ethics

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

1. Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Corporate Ethics with the Government

1. The Company must comply with the applicable laws and regulations.
2. The Company must maintain good relations and communication with the Government.
3. The Company must support government programs in accordance with applicable laws and regulations.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Corporate Ethics with Society

1. The Company maintains a clean and healthy environment.
2. The Company supports social, cultural, traditional, religious, and human rights activities.
3. The Company participates in empowering the local community's economy.
4. The Company optimizes the distribution of the Company's social responsibility programs to the community (Partnership and Community Development Program).
5. The Company does not take actions that lead to discrimination based on ethnicity, religion, race and between groups.

Etika Perusahaan dengan Media Massa

1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

Corporate Ethics with Mass Media

1. The Company must provide relevant information.
2. The Company makes the mass media a partner in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefit.
3. The Company accepts and follows up proportionally on constructive criticism submitted through the mass media

Standar Perilaku Insan Jamkrindo Jamkrindo Personnel Behavior Standard

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Personal and Professional Responsibility

1. All Company personnel must comply with all Company regulations regarding employment.
2. All Company personnel must understand and comply with all provisions issued by the Company and regulators in accordance with their duties and responsibilities.
3. All Company personnel must be dedicated, loyal, active and conscientious in their work and always try to improve their knowledge and skills for the smooth execution of their duties.
4. All Company personnel must apply the interests of the Company above personal or group interests.

Standar Perilaku Insan Jamkrindo

Jamkrindo Personnel Behavior Standard

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor):
6. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkoba atau obat-obatan terlarang.
7. Mengonsumsi minuman beralkohol.
8. Melakukan semua bentuk perjudian.
9. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
10. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
11. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespons bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

Creating a Conducive Work Environment

1. All Company personnel must be polite in communicating.
2. All Company personnel must uphold ethical values in working relationships with superiors, subordinates, and colleagues.
3. All Company personnel must avoid actions and speech that contain elements of harassment, humiliation, ridicule, slander and condescension.
4. All Company personnel are prohibited from committing extramarital affairs and acts of sexual harassment verbally, visually or physically including harassment of privacy and status.
5. All Company personnel are prohibited (both in the office and outside the office) to:
6. Using, possessing, distributing or selling narcotics or illegal drugs.
7. Consuming alcoholic beverages.
8. Doing all forms of gambling.
9. Committing all forms of criminal acts
10. All Company personnel must maintain a healthy environment.
11. All Company personnel strive to use the telephone efficiently and effectively, and avoid excessive use of the telephone for personal gain and respond to telephone beeps or call alerts at the first opportunity

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan *mark up* harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Avoiding All Conflicts of Interest and Their Potential to Trigger Unhealthy and Dishonest Behavior

1. All Company personnel use their energy, thoughts and work abilities for the benefit of the Company. Work or activities outside of office hours can be carried out as long as it does not take advantage of the name and interests of the Company.
2. All Company personnel who are no longer active or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property rights, Company data and information and carrying out activities on behalf of the Company.
3. All Company personnel may not invest Company funds on behalf of individuals or groups.
4. All Company personnel may not invest Company funds by promising personal benefits with other parties.
5. All Company personnel may not accept bribes or payments in any form from parties who have a direct or indirect relationship with their position or duties.
6. All Company personnel may not receive and give gifts in any form that can reasonably be suspected of influencing sound business decisions.
7. All Company personnel are prohibited from becoming providers of goods and services that directly or indirectly sell goods, rights or services to the Company.
8. All Company personnel are prohibited from marking up sales or purchase prices for personal or other party interests.
9. All Company personnel are prohibited from taking advantage of their position to give preferential treatment to other parties.

Standar Perilaku Insan Jamkrindo

Jamkrindo Personnel Behavior Standard

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.
3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Safeguarding Assets, Property and Information for the Interests of the Company

1. All Company personnel use Company assets only for the benefit of the Company and are not permitted for personal or group interests.
2. All Company personnel must be responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement and misuse of assets in accordance with their respective authorities.
3. All Company personnel are required to maintain data and information along with their devices in accordance with their authority so that they are not misused, damaged, stolen, or not accessed by other irresponsible parties.
4. All Company personnel are not permitted to use the name, logo, copyright and various accessories belonging to the Company for personal gain.
5. All Company personnel are required to keep the Company's internal information confidential and not use it for personal gain, family, friends, group, or any other group.
6. All Company personnel are required to prepare and provide reports and data correctly and honestly to interested parties in accordance with applicable laws and regulations.

Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan *insider trading* guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat:
4. Tidak mengatasnamakan Perusahaan.
5. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya.
6. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan.
7. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Comply with Laws and Regulations

1. All Company personnel are prohibited from engaging in insider trading activities for personal gain and not acting as brokers, prospectors or other intermediaries for personal or group interests in transactions conducted by the Company.
2. All Company personnel are prohibited from engaging or involving themselves in investments and or money laundering practices.
3. All Company personnel are prohibited from making agreements, statements either directly or indirectly indicating that the Company has an affiliation with any political party, however the Company gives freedom to all Company personnel to channel their political aspirations with the following conditions:
4. Not on behalf of the Company.
5. Does not use Company assets in its political activities.
6. Does not make any contribution on behalf of the Company.
7. If you hold a position in a Political Party (political party) and become a candidate/member of the legislature, you will be deemed to have resigned from the Company.
8. All Company personnel are prohibited from committing acts of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Dalam melakukan penegakan Kode Etik di seluruh lini Perusahaan, setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan ketentuan atau sanksi pelanggaran yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal mengenai Pemberian Sanksi yang ditetapkan oleh Jamkrindo, yang berupa peringatan tertulis, penurunan *grade*, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Semua pemangku kepentingan dapat menyampaikan saran dan kekhawatiran terkait etika melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*). [GRI 2-24]

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tiga tahun terakhir:

In enforcing the Code of Ethics to all employees of the Company, any violation of the Code of Ethics is subject to provisions or sanctions for violations that apply as described in the internal provisions regarding the Giving of Sanctions stipulated by Jamkrindo, in the form of written warnings, grade reductions, and termination of employment (PHK). All stakeholders can submit suggestions and concerns regarding ethics through the whistleblowing system (WBS) ethics through the Whistleblowing System (WBS). [GRI 2-24]

As a realization of the enforcement of the Code of Conduct, the following details the sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Ethics for the last three years:

Jenis Sanksi Type of Sanctions	2024	2023	2022
Teguran Reprimand	-	1	5
Peringatan 1 Warning Letter 1	1	3	3
Peringatan 2 Warning Letter 2	-	1	5
Peringatan 3 Warning Letter 3	-	1	-
Pengunduran Diri Resignation	1	-	-
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Termination of Employment (PHK)	-	-	-

Komunikasi Masalah Penting, serta Mekanisme untuk Mencari Nasihat dan Mengemukakan Masalah [GRI 2-16, 2-26]

Jamkrindo membuka diri terhadap berbagai masalah penting tentang dampak negatif potensial maupun aktual dari pemangku kepentingan melalui mekanisme F berupa *Whistleblowing System* (WBS). Dampak dimaksud termasuk yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial-ekonomi dan tata kelola (*Environmental Social and Governance/ESG*). Seluruh pengaduan yang masuk akan ditinjau oleh Tim WBS dan untuk pengaduan yang bersifat kritis atau penting akan dibahas oleh tim bersama badan tata kelola tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, pada tahun pelaporan, tidak tercatat adanya masalah penting terkait dampak negatif potensial dan aktual terhadap para pemangku kepentingan yang dikemukakan melalui mekanisme pengaduan dan proses lainnya yang ditujukan kepada Jamkrindo.

Benturan Kepentingan [GRI 2-15]

Segenap insan Jamkrindo berkomitmen untuk menghindari benturan kepentingan. Komitmen itu sejalan dengan semangat Perusahaan untuk mengimplementasikan GCG dimana salah satu prinsipnya adalah prinsip independensi yang menjamin pengelolaan Perusahaan secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pada prinsip independensi, Perusahaan juga berpegang teguh pada prinsip integritas yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam lingkup perusahaan.

Salah satu bentuk konkret dari komitmen Perusahaan tersebut adalah dengan menekankan bahwa setiap individu yang berada dalam lingkup perusahaan, terutama bagi mereka yang masuk ke dalam struktur organisasi perusahaan, wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan. Setiap individu juga dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung. Apabila

Communication of Important Issues, and Mechanism for Seeking Advice and Raising Issues [GRI 2-16, 2-26]

Jamkrindo opens itself to various important issues about potential and actual negative impacts from stakeholders through a complaint mechanism in the form of a *Whistleblowing System* (WBS). Such impacts include those related to environmental, socio-economic and governance (ESG) aspects. All incoming complaints will be reviewed by the WBS Team and for critical or important complaints will be discussed by the team together with the highest governance body, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors through meetings, both the Board of Commissioners meetings, the Board of Directors meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. However, in the reporting year, there were no significant issues related to potential and actual negative impacts on stakeholders raised through the grievance mechanism and other processes addressed to Jamkrindo.

Conflict of Interests [GRI 2-15]

All Jamkrindo personnel are committed to avoiding conflicts of interest. This commitment is in line with the spirit of the Company to implement GCG in which one of the principles is the principle of independence which guarantees the independent management of the Company without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations. In addition to the principle of independence, the Company also adhere to the principle of integrity that must be possessed by every individual within the scope of the Company.

One of the concrete forms of the Company's commitment is to emphasize that every individual within the scope of the Company, especially for those who are included in the Company's organizational structure, must avoid any form of conflict of interest that could harm the Company. Each individual is also prohibited from carrying out activities that directly or indirectly benefit his personal interests, family or relatives. If there are individuals who are facing a conflict of interest, they are

ada individu yang sedang menghadapi benturan kepentingan, diwajibkan untuk segera membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Secara spesifik, Jamkrindo mengatur benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Jamkrindo telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya. Sementara itu, bagi Direksi, pernyataan yang ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai Direksi dan diperbaharui setiap awal tahun adalah bahwa pernyataan bahwa anggota Direksi maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha Perusahaan.

Pada tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran yang melibatkan benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun seluruh Insan Jamkrindo.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Keberhasilan Jamkrindo menjalankan usaha tak lepas dari dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kontribusi pemangku kepentingan terhadap keberadaan Perusahaan sangat tergantung kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Jamkrindo mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan Perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan.

Oleh karena posisi pemangku kepentingan yang demikian strategis, maka Jamkrindo berupaya untuk membangun kerja sama dan bersinergi dengan mereka. Langkah nyata yang diambil Perusahaan antara lain menyelenggarakan komunikasi yang intensif bersama kelompok-kelompok pemangku kepentingan, dan mengupayakan pelibatan mereka sesuai dengan harapan masing-masing pemangku kepentingan.

Jamkrindo mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan merujuk pada AA1000 Stakeholder Engagement Standard versi tahun 2015, yang membagi pemangku kepentingan dalam 6 atribut sebagai berikut:

1. *Dependency (D)*
Jika Perseroan memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya.
2. *Responsibility (R)*
Jika Perseroan memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi.
3. *Tension (T)*
Jika seseorang atau suatu kelompok/organisasi membutuhkan perhatian Perseroan terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu.

required to immediately free themselves from the situation or notify their leadership or the party responsible for this matter.

Specifically, Jamkrindo regulates conflicts of interest for the Board of Commissioners and the Board of Directors. All members of Jamkrindo's Board of Commissioners have signed a statement free of conflict of interest stating that they have no affiliation with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners. Meanwhile, for the Board of Directors, a statement that is signed at the start of their appointment as the Board of Directors, and renewed at the beginning of each year, is a statement that says members of the Board of Directors and their families do not have share ownership or are administrators in companies or business activities related either directly or indirectly to the Company's business sector.

In 2024, there were no violations involving conflicts of interest by the Board of Commissioners, the Board of Directors, or all Jamkrindo personnel.

Stakeholders Engagement

Jamkrindo's success in running a business cannot be separated from the support and cooperation of both internal and external stakeholders. The contribution of stakeholders to the existence of the Company really depends on the interests of each stakeholder. Jamkrindo defines stakeholders as groups or individuals who are affected by the Company's activities. On the other hand, their existence also influences the Company in realizing the successful implementation of strategies and achievement of goals.

Due to the strategic position of the stakeholders, Jamkrindo strives to build cooperation and synergy with them. Concrete steps taken by the Company include conducting intensive communication with stakeholder groups, and trying to involve them in accordance with the expectations of each stakeholder.

Jamkrindo identifies stakeholders by referring to the 2015 version of the AA1000 Stakeholder Engagement Standard, which divides stakeholders into 6 attributes as follows:

1. *Dependency (D)*
If the Company has a dependency on a person or an organization, or vice versa.
2. *Responsibility (R)*
If the Company has a legal, commercial or ethical responsibility to a person or an organization.
3. *Tension (T)*
If a person or a group/organization requires the Company's attention regarding certain economic, social or environmental issues.

4. Influence (I)

Jika seseorang atau suatu kelompok/organisasi memiliki pengaruh terhadap Perseroan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.

5. Diverse Perspective (DP)

Jika seseorang atau suatu kelompok/organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

4. Influence (I)

If a person or a group/organization has influence over the Company or the strategies or policies of other stakeholders.

5. Diverse Perspective (DP)

If a person or a group/organization has different views that can influence the situation and encourage action that did not exist before.

Setelah dilakukan pemetaan, pemangku kepentingan JamkrindoAfter mapping, Jamkrindo's stakeholders and their involvement dan pelibatangannya adalah sebagai berikut: [GRI 2-29][OJK E.4] are as follows: [GRI 2-29] [OJK E.4]

Daftar Pemangku Kepentingan List of Stakeholders	Basis Penetapan/Identifikasi Basis of Assignment/Identification	Metode Pelibatan/ Pendekatan Methods of Engagement/ Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency	Topik dan Isu Utama Kepentingan Main Topics and Issue of Interest	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholders' Expectation
Pelanggan Customers	D, R, I	Website dan Frontline Information Websites and Frontline Information	Setiap saat bila diperlukan Any time when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan Commercial relations/ customer retention/services quality	Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan Get satisfactory service and service quality
		Kunjungan langsung Direct Visit	Setiap saat bila diperlukan Any time when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan Commercial relations/ customer retention/services quality	Informasi produk dan jasa terbaru yang dimiliki Perusahaan Information on the latest products and services owned by the Company
		Call center Call center	Setiap saat bila diperlukan Any time when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan Commercial relations/ customer retention/services quality	Mendapatkan solusi apabila ada pertanyaan atau keluhan soal layanan produk dan jasa Get solutions if you have questions or complaints about products and services
		Pengukuran Kepuasan Pelanggan Measurement of Customer Satisfaction	Setiap saat bila diperlukan Any time when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan Commercial relations/ customer retention/service quality	Mendapatkan gambaran tentang angka kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan Get an overview of customer satisfaction and dissatisfaction numbers
Pemegang Saham Shareholders	D, R, I	RUPS dan RUPSLB GMS and EGMS	Tahunan Annual	Dividen/pengembangan usaha/tata kelola/manajemen Dividends/business development/governance/management	Perusahaan berjalan secara produktif dan meningkatnya kinerja serta mencapai target dari pemegang saham The Company is running productively and improving performance and achieving targets from shareholders
Pemerintah dan DPR Government and House of Representatives	D, R, T, I, DP	Pelaporan Pelaksanaan Kepatuhan Compliance Implementation Reporting	4 (empat) kali dalam setahun 4 (four) times a year	Pembangunan/pengembangan usaha/investasi Establishment/business development/investment	Memastikan dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku Ensure compliance with applicable laws and regulations
Pegawai Employee	D,R, T, I	Media Internal (Majalah) Internal Media (Magazine)	1 (satu) kali dalam Sebulan 1 (one) time in a month	Distribusi informasi kepada karyawan Distribution of information to employees	Melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian Dissemination of policies and strategies related to staffing
		Survei Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Survey	1 (satu) kali setahun 1 (one) time in a year	Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction	Mengukur tingkat kepuasan pegawai dan menjangkau harapan mereka Measuring employee satisfaction levels and capturing their expectations

Daftar Pemangku Kepentingan List of Stakeholders	Basis Penetapan/ Identifikasi Basis of Assignment/ Identification	Metode Pelibatan/ Pendekatan Methods of Engagement/ Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency	Topik dan Isu Utama Kepentingan Main Topics and Issue of Interest	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholders' Expectation
Serikat Pekerja Worker Union	D, R, T, I	Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama Discussion of Collective Bargaining Agreements	Saat diperlukan When needed	Ketenagakerjaan/ kesejahteraan Employment/welfare	Menciptakan iklim kerja yang kondusif Creating a conducive working climate
		Pembahasan apabila ada persoalan karyawan dengan manajemen Discussion if there are employee issues with management	Saat diperlukan When needed	Ketenagakerjaan/ kesejahteraan Employment/welfare	Mencari solusi terbaik Looking for the best solution
Mitra Kerja. Supplier Work Partners, Suppliers	D, R, T	Kontrak kerja Mitra investasi Seminar dan Workshop Investment partner work contract Seminars and Workshop	Setiap saat bila diperlukan Any time when needed	Hubungan komersial Commercial relationship	Proses pengadaan yang obyektif memperoleh kerja sama yang saling menguntungkan Objective procurement process obtains mutually beneficial cooperation
Media massa Mass media	T, I, DP	Press Release Press Release	Setiap saat bila diperlukan Any time when needed	Pelaksanaan program Program implementation	Sumber informasi yang terpercaya, memberikan informasi terkait bisnis Perusahaan yang perlu diketahui oleh publik A trusted source of information, providing information, related to the Company's business that the public needs to know.
Masyarakat, Komunitas Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Local Community, Community Organization, Non-governmental organization	D, R, T, I, DP	Kerja sama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan Strategic cooperation to carry out Corporate Responsibility programs, both in the social and environmental fields	Setiap saat bila diperlukan Any time when needed	Rencana dan aktualisasi kegiatan-kegiatan TJSL Perusahaan Plans and actualization of the Company's TJSL activities	Mengoptimalkan pencapaian Program TJSL Perusahaan Optimizing the achievement of the Company's TJSL Program

Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E.5]

Sesuai dengan bidang usahanya sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo terkena kewajiban menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan per 1 Januari 2024. Dalam mengimplementasikan regulasi baru tersebut, Perusahaan menghadapi permasalahan antara lain belum seragamnya pemahaman karyawan terhadap keuangan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jamkrindo menjadwalkan pelatihan tentang keuangan berkelanjutan kepada karyawan.

Challenges in Implementing Sustainable Finance [OJK E.5]

In accordance with its business activities as a credit guarantee company, Jamkrindo is required to implement the Financial Services Authority Regulation (PJOK) on Sustainable Finance starting January 1, 2024. In implementing the new regulations, the Company encountered several issues, including a lack of consistent understanding of sustainable finance among employees. To address this issue, Jamkrindo scheduled training on sustainable finance for employees.

KINERJA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY PERFORMANCE





KINERJA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY PERFORMANCE



Sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Peraturan ini mulai diberlakukan untuk Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4 dan bank asing per 1 Januari 2019 dengan kewajiban menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahun 2019; sedangkan bagi perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo, peraturan mulai berlaku per 1 Januari 2024.

Dalam implementasinya, Jamkrindo telah mengadopsi peraturan tersebut secara sukarela sejak tahun 2019 dengan menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2019, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Laporan berisi pencapaian kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan Jamkrindo sesuai dengan tahun pelaporan. Bagi Jamkrindo, keselarasan antara aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial merupakan suatu keharusan karena fungsi suatu perusahaan bukan hanya mencetak laba tetapi juga dituntut menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menunjukkan kepedulian pada isu-isu sosial. Lebih dari itu, Perseroan meyakini keselarasan ketiga aspek merupakan fondasi penting untuk mewujudkan bisnis yang berkesinambungan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

As part of the financial services institutions in Indonesia, Jamkrindo is committed to implementing sustainable finance as stipulated in POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Sustainable Finance Implementation for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies or POJK Sustainable Finance. This regulation came into effect on January 1, 2019, for Commercial Banks in Business Activity (BUKU) 3 and 4, as well as foreign banks, as well as foreign banks, with the obligation to publish a Sustainability Report for the 2019 reporting year. For guarantee companies such as Jamkrindo, the regulation takes effect starting January 1, 2024.

In its implementation, Jamkrindo has voluntarily adopted the regulation since 2019 by publishing its 2019 Sustainability Report, even several years prior. The report outlines Jamkrindo's performance achievements in the economic, social, and environmental aspects according to the reporting year. For Jamkrindo, alignment among economic, environmental, and social aspects is essential, as a company's role is not only to generate profit but also to preserve the environment and demonstrate concern for social issues. Beyond that, the Company firmly believes that the harmony of these three aspects forms a vital foundation for building a sustainable business while achieving optimal performance.

Membangun Budaya Keberlanjutan [OJK F.1]

Berpedoman pada POJK Keuangan Berkelanjutan, selain menerbitkan Laporan Keberlanjutan, dukungan Jamkrindo terhadap keuangan berkelanjutan direalisasikan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR). Rencana aksi, rencana kerja dan program CSR disusun merujuk pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan yaitu:

1. Prinsip investasi bertanggung jawab;
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup;
4. Prinsip tata kelola;
5. Prinsip komunikasi yang informatif;
6. Prinsip inklusif;
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
8. Prinsip koordinasi dan kolaborasi

Selanjutnya, berpedoman pada delapan prinsip tersebut, Jamkrindo menetapkan budaya keberlanjutan yang disosialisasikan kepada seluruh manajemen dan karyawan sehingga keberadaannya menjangkau seluruh insan Perseroan. Budaya keberlanjutan merujuk pada budaya Jamkrindo sebagai bagian dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Sosialisasi untuk membangun budaya keberlanjutan dilakukan Perusahaan melalui berbagai media dan kesempatan, seperti situs/*website*, media sosial, pertemuan antara manajemen dengan pegawai atau pertemuan dengan mitra kerja, masyarakat atau pemangku kepentingan eksternal lainnya, baik yang terjadwal maupun yang insidental.

Selain itu, sosialisasi budaya keberlanjutan juga dilakukan melalui berbagai inisiatif yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan, seperti memastikan kegiatan yang dijalankan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/CSR, serta menerapkan operasional kantor yang ramah lingkungan. Penerapan operasional kantor ramah lingkungan diwujudkan melalui berbagai program efisiensi, termasuk pengurangan penggunaan kertas, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan air. Sejalan dengan itu, Jamkrindo juga secara optimal membangun budaya keberlanjutan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai dengan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta mengurangi risiko penyakit akibat kerja, sehingga menciptakan tempat kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Building Sustainability Culture [OJK F.1]

Guided by the POJK of Sustainable Finance, Jamkrindo's support for sustainable finance is not only reflected in the publication of its Sustainability Report but also in the preparation of a Sustainable Finance Action Plan (RAKB), the Company's Work Plan and Budget (RAKP), and the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR) programs. These action plans, work plans, and TJSL/CSR programs are developed based on the 8 (eight) principles of sustainable finance, as follows:

1. Responsible investment principles;
2. Sustainability business strategies and practices principles;
3. Social and environmental risk management principles;
4. Governance principles;
5. Informative communication principles;
6. Inclusiveness principles;
7. Development of priority leading sectors principles; and
8. Coordination and collaboration principles.

Furthermore, guiding on these eight principles, Jamkrindo has established a sustainability culture disseminated to all management and employees to reach all of the Company's members. The sustainability culture refers to Jamkrindo's culture as part of a State-Owned Enterprise (SOE) Subsidiary, namely AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). The socialization to build a culture of sustainability is performed by the Company through various media and occasions, such as website, social media, management-employee meetings or partners meetings, communities or other external stakeholders, both scheduled and incidental.

Additionally, in the sustainability culture, socialization is carried out through various initiatives aligned with sustainable finance principles, including ensure that business activities do not negatively impact the environment, conducting Social and Environmental Responsibility (TJSL)/CSR programs, and applying environmentally friendly office operations. The environment-friendly office operations are realized through efficiency initiatives, including reducing the use of papers, electricity, fuel oil (BBM), and water. Similarly, Jamkrindo also strengthens its sustainability culture by fostering a safe and healthy work environment per the principles of Occupational Health and Safety (OHS). These efforts aim to prevent workplace accidents and minimize the risk of work-related illnesses, thereby creating a productive and sustainable workplace.

KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY ECONOMIC PERFORMANCE



Sekilas Ekonomi Global dan Nasional

Pada tahun 2024, perekonomian global mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2%, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 3,3%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan, seperti konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, serta kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju. Sementara itu, laju inflasi global diperkirakan mencapai 5,7%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 6,7%.

Di tengah tren perlambatan global, ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap mencatat pertumbuhan positif. Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,0%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,1%. Malaysia juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 5,1% dibandingkan 3,6% pada tahun 2023. Sebaliknya, perekonomian Tiongkok mengalami perlambatan dari 5,4% pada tahun 2023 menjadi 5,5% pada tahun 2024. Amerika Serikat pun mencatat penurunan pertumbuhan dari 2,9% di tahun 2023 menjadi 2,8% pada tahun 2024.

Global and National Economic Overview

In 2024, the global economy experienced a slowdown compared to the previous year. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth at 3.2%, slightly lower than the 3.3% recorded in 2023. This deceleration was driven by ongoing geopolitical uncertainties, such as the Russia-Ukraine and Israel-Palestine conflicts, as well as continuation of tight monetary policies in advanced economies. Meanwhile, global inflation was projected at 5.7%, lower than the 6.7% recorded in 2023.

Amid the global slowdown, several of Indonesia's key trading partners continued to post positive economic growth. Singapore's economy grew by 4.0%, a significant increase from 1.1% in the previous year. Malaysia also recorded improved performance, with economic growth at 5.1%, compared to 3.6% in 2023. In contrast, China experienced a slight deceleration, with growth moderating from 5.4% in 2023 to 5.5% in 2024. The United States also saw a marginal decline in growth from 2.9% in 2023 to 2.8% in 2024.

Di dalam negeri, tren perlambatan ekonomi juga terlihat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03%, sedikit lebih rendah dibandingkan 5,05% pada tahun 2023. Angka ini juga berada di bawah target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditetapkan sebesar 5,2%. Meskipun demikian, pencapaian ini masih berada dalam rentang proyeksi berbagai lembaga ekonomi global, seperti Bank Dunia, IMF, dan Asian Development Bank (ADB), yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,0%. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1%, dan Kementerian Keuangan memperkirakan di kisaran 5,0%–5,2%.

Tingkat inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$. Capaian ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter dan fiskal, serta sinergi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi yang terkendali ini turut berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat pada tahun 2024. Dibandingkan tahun 2023, inflasi tahun ini mengalami penurunan dari 2,61% (yoy), bahkan menjadi yang terendah dalam dua dekade terakhir. Inflasi Indonesia pada tahun 2024 juga lebih rendah dibandingkan beberapa negara anggota G20, seperti Argentina (118% yoy), Turki (44,28% yoy), Rusia (9,5% yoy), dan Amerika Serikat (2,90% yoy).

Kinerja Lapangan Usaha Jasa Keuangan 2024

BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 ditopang oleh bertumbuhnya semua lapangan usaha, termasuk jasa keuangan yang tumbuh sebesar 4,74%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 dengan pertumbuhan 4,77%. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain ketidakpastian ekonomi global dan tekanan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar serta perlambatan investasi asing turut menekan likuiditas dan minat investasi di dalam negeri.

Selain itu, kebijakan moneter yang lebih ketat dan pengetatan regulasi di sektor keuangan membuat lembaga keuangan harus lebih berhati-hati dalam mengelola risiko dan pinjaman sehingga mempengaruhi laju ekspansi produk dan layanan keuangan. Di sisi lain, pergeseran perilaku konsumen yang menjadi lebih selektif dan konservatif dalam mengambil keputusan finansial juga menambah beban industri jasa keuangan dalam mempertahankan pertumbuhan yang sebelumnya lebih dinamis.

Di sisi lain, berkaitan dengan kinerja sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor ini terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Namun demikian terkhusus untuk perusahaan penjaminan, per 31 Desember 2024, nilai aset terkontraksi 0,04% yoy dengan nilai Rp46,39 triliun. Adapun outstanding penjaminan per Desember 2024 tercatat terkontraksi 0,71% yoy menjadi Rp419,90 triliun.

Domestically, signs of economic moderation were also evident. According to data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economic growth in 2024 stood at 5.03%, slightly lower than the 5.05% recorded in 2023. This figure also fell short of the 2024 State Budget (APBN) target of 5.2%. Nonetheless, the achievement remained within the projection range of various global economic institutions, such as the World Bank, IMF, and the Asian Development Bank (ADB), which estimated Indonesia's economic growth at 5.0%. Bank Indonesia projected growth at 5.1%, while the Ministry of Finance estimated it to range between 5.0% and 5.2%.

Indonesia's inflation rate in 2024 was recorded at 1.57% year-on-year (yoy), remaining within the target range of $2.5\% \pm 1\%$. This achievement was the result of consistent monetary and fiscal policy, along with coordinated inflation control efforts at both national and regional levels through the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP and TPID). The well-managed inflation contributed to maintaining robust economic growth in 2024. Compared to 2023, inflation declined from 2.61% (yoy), marking the lowest level in the past two decades. In 2024, Indonesia's inflation was also lower than that of several G20 countries, including Argentina (118% yoy), Turkey (44.28% yoy), Russia (9.5% yoy), and the United States (2.90% yoy).

Business Field of Financial Services in 2024

BPS reported that Indonesia's economic growth in 2024 was supported by expansion across all business sectors, including financial services sector, which grew by 4.74%, marking a slight deceleration compared to 4.77% growth in 2023. The slowdown was influenced by several factors including global economic uncertainty and external pressures such as exchange rate fluctuations and a slowdown in foreign investment, which contributed to tighter domestic liquidity and subdued investment appetite.

In addition, tighter monetary policies and stricter financial sector regulations prompted financial institutions to adopt a more prudent approaches in risk and credit management, thereby affecting the pace of expansion in financial products and services. Furthermore, the shift in consumer behavior—becoming more selective and conservative in making financial decisions—added further challenges for the financial services industry in sustaining the previously more dynamic growth.

On the other hand, in terms of the performance of the financial services sector, the Financial Services Authority (OJK) assessed that sectoral stability remained well-maintained amidst global and domestic economic fluctuations. However, specifically for guarantee companies, as of December 31, 2024, the value of assets contracted 0.04% yoy with a value of IDR 46.39 trillion. The outstanding guarantee as of December 2024 was recorded to have contracted 0.71% yoy to IDR 419.90 trillion.

Kiprah Jamkrindo sebagai Lembaga Penjamin [GRI 3-3]

Lembaga Penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan. Melalui sistem penjaminan kredit, lembaga penjamin menjembatani akses UMKM ke bank/lembaga keuangan, khususnya UMKM yang *feasible*, namun belum *bankable*. Hal itu terjadi karena adanya keterbatasan modal yang dimiliki sehingga UMKM kesulitan mengakses sumber pembiayaan karena tidak mampu menyediakan agunan. Perusahaan Penjaminan Kredit sekaligus berfungsi menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank/lembaga keuangan.

Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, sehingga risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin. Dalam skema penjaminan ini, Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Di Indonesia, Jamkrindo merupakan satu-satunya Perusahaan Penjamin BUMN. Sejak tahun 2015, Perusahaan telah menjaga *sustainability* (keberlangsungan) melalui pertumbuhan volume dan peningkatan layanan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK), baik langsung terhadap Terjamin maupun melalui Penerima Jaminan. Dari tahun ke tahun, secara rata-rata, jumlah yang dijamin oleh Jamkrindo terus mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini mengharuskan Perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran dengan lebih selektif dalam hal mitra dan portofolio penjaminan agar dapat mengelola risiko penjaminan sesuai *Risk Appetite* Perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan secara terus-menerus memperbaiki sistem implementasi atau penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) pada setiap tahapan proses bisnis. Hal ini merupakan langkah-langkah yang terus dilakukan Perusahaan dalam rangka memitigasi risiko agar sampai pada tingkat yang bisa diterima perusahaan.

Kinerja Jamkrindo sebagai Lembaga Penjamin mendapat peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan prospek stabil untuk periode 22 Desember 2023-1 Desember 2024. Peringkat tersebut mencerminkan peran penting Jamkrindo bagi pemerintah Indonesia, posisi bisnisnya yang sangat kuat, dan profil permodalan yang sangat kuat.

Strategi Pengembangan Usaha Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo telah merumuskan berbagai strategi pengembangan usaha untuk mewujudkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2024 dengan fokus utama pada inovasi digital dan penguatan jaringan fisik. Salah satu langkah strategis yang

Jamkrindo's Work as a Guarantee Institution [GRI 3-3]

Guarantee Institution is a particular financial institution whose role is to encourage business independence, empower the business world and increase access for businesses, notably Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives and other prospective businesses to financing sources. With a credit guarantee system, the guarantee institutions bridges MSMEs' access to banks/financial institutions, particularly for feasible but unbankable MSMEs. This occurs because of the limited capital owned, so MSMEs have difficulty accessing financing sources as they cannot provide any collateral. Credit Guarantee Companies simultaneously ensure the fulfillment of the financial obligations of MSMEs as credit recipients from banks/financial institutions.

Guarantee activity constitute a form of protection or risk coverage against potential losses, whereby such risks must be measurable in financial terms. Three parties are involved in guarantee activities: the Guarantor, the Guarantee Recipient, and the Guaranteed Party. In the guarantee scheme, the Guarantor is responsible for bearing the financial obligations of the Guaranteed Party to the Guarantee Recipient if the Guaranteed Party can no longer fulfill its commitments based on the signed agreement.

In Indonesia, Jamkrindo is the only State-owned Guarantee Company. Since 2015, the Company has maintained sustainability through volume growth and improved services to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives directly to Guaranteed Party and through Guarantee Recipients. Over the years, on average, the amount guaranteed by Jamkrindo continues to increase significantly. The situation requires the Company to implement a more selective marketing strategi regarding partners and guarantee portfolios to manage guarantee risks as required by the Company's Risk Appetite. Furthermore, the Company continuously improves the implementation system or the application of Enterprise Risk Management (ERM) at every stage of the business process. These are measures that the Company continues to take to mitigate risks and reach a level that is acceptable to the Company.

Jamkrindo's performance as a Guarantee Institution has received an idAA+ rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) with a stable prospect for the period of December 22, 2023, to December 1, 2024. This rating reflects Jamkrindo's important role for the Indonesian government, its very strong business position, and its robust capital profile.

Jamkrindo's Business Development Strategy in 2024

Jamkrindo has formulated various business development strategies to achieve its 2024 Corporate Work Plan and Budget, with a primary focus on digital innovation and the strengthening of physical networks. One of the key strategic initiatives is the

diambil adalah implementasi platform digital J@DE dan klaim digital yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi dan mempercepat proses klaim bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, Jamkrindo juga melakukan akselerasi model bisnis, menerapkan manajemen risiko yang *robust* serta mempersiapkan talenta masa depan.

Strategi lainnya mencakup diversifikasi pendapatan melalui optimalisasi bisnis non-penugasan dan pengembangan model bisnis yang lebih efisien. Jamkrindo menargetkan volume penjaminan sebesar Rp414 triliun pada tahun 2024, didukung oleh transformasi fundamental dalam manajemen risiko dan kepatuhan melalui penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four eyes principles*. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) yang terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan UMKM. Melalui berbagai inisiatif ini, Jamkrindo optimis dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.

implementation of the J@DE digital platform and a digital claims system, aimed at improving access to information and accelerating the claims process for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). In addition, Jamkrindo is accelerating its business model transformation, implementing robust risk management practices, and preparing future talent.

Other strategies include revenue diversification by optimizing non-mandated business lines and developing a more efficient business model. Jamkrindo has set a guarantee volume target of IDR 414 trillion for 2024, supported by fundamental transformations in risk and compliance management through the application of the three lines of defense and four eyes principles. The company is also committed to supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) by carrying out corporate social and environmental responsibility programs (TJSL) that are integrated with MSME empowerment initiatives. Through these initiatives, Jamkrindo is optimistic about enhancing corporate performance while contributing to national economic stability.

Adapun inisiatif strategis yang disusun Jamkrindo pada Aspirasi Pemegang Saham pada RKAP Tahun 2024 adalah sebagai berikut: [GRI 3-3]

The following are the strategic initiatives developed by Jamkrindo as part of the Shareholders' Aspirations outlined in the 2024 RKAP : [GRI 3-3]

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Kebijakan Policy
Memperkuat portofolio produk existing, baru, dan kolaborasi Holding dan BUMN berorientasi pada Profitabilitas Strengthening the portfolio of existing products, new products development, and collaborative initiative with Holding and State-Owned Enterprises (SOEs), all oriented towards enhancing Profitability	1. Kelompok produk dengan profitabilitas tinggi didorong untuk bertumbuh 2. Kelompok produk dengan profitabilitas rendah dapat dipertahankan bila secara teknis dapat diperbaiki 3. Kolaborasi BUMN dilakukan pada produk dengan profitabilitas tinggi pada sektor industri yang potensial 4. Pengembangan produk mengikuti strategi bisnis Holding dan regulasi yang berlaku 5. Penyelenggaraan bisnis penjaminan memperhatikan prinsip risiko/prudent 1. High-profitability product groups are encouraged to grow 2. Low-profitability product groups can be retained if technical improvements are feasible 3. Collaboration with SOEs is carried out for high-profitability products in potential industrial sectors 4. Product development is aligned with the Holding's business strategy and applicable regulations 5. Guarantee business operations are conducted with consideration for risk and prudential principles
Memperkuat portofolio usaha dan Investasi Strengthening the Business and Investment Portfolio	1. Diversifikasi usaha harus terkait dengan bisnis inti perusahaan dan strategi bisnis Holding 2. Pengelolaan portofolio usaha dan investasi memperhatikan prinsip prudent dan efektif 3. Laba dari anak perusahaan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat modal perusahaan tersebut sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas penjaminan 1. Business diversification must be related to the company's core business and Holding's business strategy 2. Management of business and investment portfolios must pay attention to prudent and effective principles 3. Profits from subsidiaries are fully utilized to strengthen the capital of the company so that it can support the increase in guarantee capacity
Memperkuat & mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar Strengthen & develop partnership network for market penetration & expansion	1. Pengembangan jejaring tidak dengan membuka unit kerja baru (milik Jamkrindo) 2. Pengembangan jejaring menekankan kepada upaya anorganik 3. Pengembangan jejaring dengan memanfaatkan potensi Holding 1. Network development not by opening a new work unit (owned by Jamkrindo) 2. Network development emphasizes inorganic efforts 3. Network development by utilizing the potential of Holding
Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo Increase customer preference for Jamkrindo products	1. Upaya peningkatan brand preference ditujukan kepada berbagai stakeholder secara berimbang dengan memperhatikan ketepatan media yang digunakan 2. Upaya peningkatan brand preference dengan memanfaatkan kekuatan branding Holding 1. Efforts to increase brand preference are aimed at various stakeholders in a balanced manner by paying attention the accuracy of the media used 2. Efforts to increase brand preference by utilizing the strength of Holding branding

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Kebijakan Policy
Meningkatkan loyalitas pelanggan & mitra melalui CRM Increase customer & partner loyalty through CRM	1. Pengelolaan hubungan ditujukan kepada penerima jaminan dan terjamin secara seimbang 2. Pengelolaan hubungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika dan kepatuhan 1. Relationship management is aimed at the guarantee recipient and the guaranteed party in a balanced manner 2. Relationship management is carried out with due regard to the principles of ethics and compliance
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI Improve the quality and coverage of IT-based customer services	1. Pengembangan aplikasi berdasarkan prinsip business case (manfaat) yang dapat dipertanggungjawabkan 2. Peningkatan kapabilitas IT bersama Holding 1. Application development based on the principle of business cases (benefits) that can be accounted for 2. Improvement of IT capability with Holding

Kinerja Ekonomi Jamkrindo Tahun 2024

Dalam upaya mencapai kinerja optimal, Jamkrindo secara konsisten menyosialisasikan berbagai inisiatif strategis yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2024. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan, termasuk dalam rapat terjadwal maupun pertemuan insidental yang dihadiri oleh manajemen. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam membangun budaya keberlanjutan. Sementara itu, sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, regulator, mitra, dan masyarakat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web resmi, siaran pers, media sosial, serta publikasi informasi di berbagai platform digital. [OJK F.1]

Selain menyosialisasikan kebijakan strategis, manajemen Jamkrindo, dengan dukungan karyawan, secara konsisten menjalankan inisiatif strategis tersebut sepanjang tahun pelaporan. Implementasi kebijakan ini terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya, serta memungkinkan perusahaan mengambil langkah korektif jika terjadi deviasi atau kendala operasional. Konsistensi dan komitmen ini berkontribusi pada pencapaian target serta realisasi kinerja pendapatan dan laba rugi tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. [GRI 3-3][OJK F.1, F.2]

Jamkrindo's Economic Performance in 2024

In its efforts to achieve optimal performance, Jamkrindo consistently communicates various strategic initiatives outlined in the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Communication with internal stakeholders is carried out through various media and opportunities, including scheduled meetings and incidental gatherings attended by management. This step is also part of the Company's efforts to build a culture of sustainability. Meanwhile, outreach to external stakeholders such as the government, regulators, partners, customers, and the public is conducted through multiple communication channels, including the official website, press releases, social media, and publication of information across various digital platforms. [OJK F.1]

In addition to disseminating strategic policies, Jamkrindo's management, supported by employees, has consistently implemented these strategic initiatives throughout the reporting year. The implementation of these policies is continuously monitored and evaluated to ensure their effectiveness and to enable the company to take corrective actions in case of deviations or operational constraints. This consistency and commitment have contributed to achieving the company's targets and the realization of revenue and profit performance for 2024, as shown in the following table. [GRI 3-3][OJK F.1, F.2]

Tabel Laporan Laba (Rugi) Terkonsolidasi Tahun 2022-2024

Consolidated Income Statement Table for 2022-2024

Deskripsi Descriptions	2024 (Rp juta) (million IDR)	2023 (Rp juta) (million IDR)	2022 (Rp juta) (million IDR)	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
	(1)	(2)	(3)	Jumlah Amounts	Persentase Percentages
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income					
Imbal jasa penjaminan Guarantee fee income	7.733.031	6.738.700	5.641.788	994.331	14,76
Imbal jasa kafalah bruto Gross kafalah fee	368.277	408.035	503.297	(39.758)	(9,74)
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan Increase in unearned kafalah fees	(22.205)	(24.212)	128.623	2.007	(8,29)

Tabel Laporan Laba (Rugi) Terkonsolidasi Tahun 2022-2024
Consolidated Income Statement Table for 2022-2024

Deskripsi Descriptions	2024 (Rp juta) (million IDR)	2023 (Rp juta) (million IDR)	2022 (Rp juta) (million IDR)	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
				Jumlah Amounts	Persentase Percentages
	(1)	(2)		(4 = 1-2)	(5 = 1/2)
Premi penjaminan ulang Re-guarantee premiums	(1.157.054)	(767.795)	(997.898)	(389.259)	50,70
Imbal jasa penjaminan bersih Net guarantee fees	6.922.049	6.354.728	5.275.810	567.321	8,93
Beban Penjaminan Guarantee Expenses					
Beban klaim Claims expenses	9.129.657	5.957.023	3.237.332	3.172.634	53,26
Klaim penjaminan ulang Re-guarantee claims	(1.068.761)	(788.483)	(539.414)	(280.278)	35,55
Beban ujarah Ujarah expenses	11.364	15.386	39.045	(4.022)	(26,14)
Biaya kafalah lainnya Other kafalah expenses	0	762	1.068	(762)	(100,00)
Kenaikan (Penurunan) cadangan klaim Increase in claims reserves	(1.101.458)	(529.220)	1.440.312	(572.238)	108,13
Pendapatan subrogasi - bersih Subrogation income - net	(1.940.167)	(1.509.417)	(835.372)	(430.750)	28,54
Pendapatan ujarah penjaminan ulang Re-guarantee ujarah income	(11.244)	(18.719)	(33.738)	7.475	(39,93)
Jumlah beban klaim Total claim expenses	5.019.391	3.577.332	3.309.233	1.442.059	40,31
Pendapatan penjaminan bersih Net guarantee income	1.902.658	2.777.396	1.966.577	(874.738)	(31,49)
Komisi - bersih Net - Commission	127.317	61.313	9.279	66.004	107,65
Pendapatan investasi - bersih Investment income - net	1.458.916	1.204.178*	844.995	254.738	21,15
Beban usaha Operating expenses	(2.041.533)	(2.266.001)*	(1.206.253)	224.468	(9,91)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other operating income (expenses)	7.566	15.099	61.671	(7.533)	(49,89)
Laba Sebelum Pajak Profit before tax	1.454.924	1.791.985 *	1.676.269	(337.061)	(18,81)
Beban pajak final Final tax expenses	(167.873)	(153.023)	(95.652)	(14.850)	9,70
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	1.287.051	1.638.962	1.580.617	(351.911)	(21,47)
(Beban)/Manfaat pajak penghasilan Income tax benefits (expenses)	(125.557)	(202.113)	(300.460)	76.556	(37,88)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	1.161.494	1.436.849	1.280.157	(275.355)	(19,16)

*) Disajikan kembali

*) Restated

Selanjutnya, Jamkrindo telah memetakan antara target dan pencapaian RKAP 2024 sebagaimana tabel berikut: [GRI 3-3][OJK F.1, F.2]

Furthermore, Jamkrindo has mapped out the targets and achievements of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) as in the following table: [GRI 3-3][OJK F.1, F.2]

Uraian Descriptions	2024			2023		2022	
	RKAP 2024 RKAP	Realisasi Realizations	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 (%) Realization Achievements towards 2024 Target (%)	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi Realizations	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi Realizations
Jumlah Pendapatan Penjaminan Total Guarantee Income	7.013.297	6.922.049	98,70	5.848.300	6.354.728	4.347.090	5.275.810
Beban Klaim Claim Expenses	(4.862.956)	5.019.391	88,48	(3.466.575)	(3.577.332)	(2.148.545)	(3.309.233)
Pendapatan Penjaminan Bersih Net Guarantee Income	2.150.341	1.902.658	88,48	2.314.000	2.777.396	1.981.760	1.966.577
Pendapatan Investasi Bersih Net Investment Income	1.359.353	1.458.916	107,32	953.088	1.204.178*	765.227	844.995
Beban Usaha Operating Expenses	(1.707.534)	(2.041.533)	119,56%	(1.428.279)	(2.266.001)*	(1.569.165)	(1.206.253)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	10.498	7.566	72,07	12.327	15.099	11.735	61.671
Laba sebelum Pajak Profit before Tax	1.812.658	1.287.051	71,00	1.851.408	1.638.962	1.189.556	1.676.269
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.346.789	1.161.494	86,24	1.369.356	1.436.849	818.954	1.280.157

*) Disajikan kembali
*) Restrated

Uraian selengkapnya tentang kinerja ekonomi tahun 2024 disampaikan dalam Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2024.

Investasi yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan [OJK F.3]

Jamkrindo secara resmi wajib menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan per 1 Januari 2024. Namun demikian, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan peraturan tersebut lebih awal antara lain terkait dengan perlunya lembaga jasa keuangan melaksanakan program pembiayaan atau investasi pada instrumen atau proyek yang sejalan dengan keuangan/kegiatan berkelanjutan. Adapun kriteria program pembiayaan, investasi atau proyek yang sejalan dengan keuangan/kegiatan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
2. Mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial; atau
3. Memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

The complete report on the 2024 economic performance is presented on the Chapter of Management Discussion and Analysis of the 2024 Company Annual Report.

Investments Aligning with Sustainable Finance [OJK F.3]

Jamkrindo is officially required to implement the POJK Sustainable Finance starting January 1, 2024. However, the Company is committed to implementing the regulation in advance, which is related to concerns about the necessity for financial service institutions to implement financing or investment programs in instruments or projects that are in line with sustainable finance/activities. The financing program, investment or project criteria that are aligned with sustainable finance/activities are as follows:

1. Prioritizing the efficient and effective utilization of sustainable natural resources;
2. Preventing/limiting/reducing/improving environmental damage, pollution spikes, waste, ecosystem damage, and social injustice/gaps; or
3. Provide solutions for communities facing the effects of climate change.

Sebagai korporasi yang bergerak di bidang penjaminan, upaya nyata yang dilakukan Jamkrindo untuk melaksanakan POJK Keuangan Berkelanjutan antara lain melakukan investasi dana yang dikelolanya sesuai dengan prinsip kegiatan berkelanjutan. Target dan realisasi investasi yang dilakukan Jamkrindo adalah sebagai berikut: [OJK F.3]

As a corporation engaged in the guarantee sector, Jamkrindo's genuine actions in implementing POJK Sustainable Finance include investing the funds it manages following the principles of sustainable activity. The target and realization of investments by Jamkrindo are as follows: [OJK F.3]

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2022-2024 (Jutaan Rupiah)
Table of 2022-2024 Investment Target and Realization Comparison (in million Rupiah)

Uraian Descriptions	2024		2023		2022	
	Target Targets	Realisasi Realizations	Target Targets	Realisasi Realizations	Target Targets	Realisasi Realizations
Obligasi Bond	17.411.473	16.143.645	11.475.747	13.100.992	10.517.197	10.812.847
Deposito Berjangka Term Deposit	2.823.310	3.960.252	3.793.437	7.233.119	4.079.561	5.451.815
Sukuk Islamic Bond	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Asset-Backed Securities (ABS)	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Mutual Fund	2.365.501	1.427.037	1.326.939	1.459.974	1.636.110	975.629

Distribusi Nilai Ekonomi

Berdasarkan kinerja Jamkrindo di atas, maka bisa disampaikan mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang ditahan tahun 2024. Nilai ekonomi yang dihasilkan adalah manfaat ekonomi yang diperoleh selama Perusahaan menjalankan usaha, misalnya imbalan jasa penjaminan bersih, pendapatan investasi, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan adalah manfaat ekonomi yang diberikan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti beban klaim, beban usaha, beban pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN). Adapun nilai ekonomi yang ditahan adalah manfaat ekonomi yang disimpan Perusahaan yang diperoleh dari pengurangan nilai ekonomi yang dihasilkan dikurangi nilai ekonomi yang didistribusikan yang digunakan untuk pengembangan usaha. Distribusi nilai ekonomi selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 3-3, 201-1]

Distribution of Economic Value

According to Jamkrindo's above performance, the direct economic value generated, the distributed economic value, and the retained economic value in 2024 can be reported. The economic value generated is the benefit earned during the Company's business, such as net guarantee service fees, investment income, and other income. At the same time, the distributed economic value is the economic benefit the Company provides to stakeholders, such as claims expenses, business expenses, tax expenses, dividends, payments to suppliers, and fund realization for the State-Owned Enterprises Social and Environmental Responsibility (TJSL BUMN) program. The retained economic value is the benefit retained by the Company derived from the reduction of the economic value generated minus the economic value distributed used for business development. The complete economic value distribution is presented in the following table: [GRI 3-3, 201-1]

Tabel Distribusi Ekonomi Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan Rupiah)
Table of 2022-2024 Economic Distribution (in million Rupiah)

Uraian Descriptions	2024	2023	2022
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated			
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih Net - Guarantee Fee	6.922.049	6.354.728	5.275.810
Pendapatan Investasi-Bersih Net - Investment Income	1.458.916	1.204.178*	844.995
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	7.566	15.099	61.671
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Total Direct Economic Value Generated	8.388.531	7.574.005*	6.182.476

Tabel Distribusi Ekonomi Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan Rupiah)
Table of 2022-2024 Economic Distribution (in million Rupiah)

Uraian Descriptions	2024	2023	2022
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan Direct Economic Value Distributed			
Beban Klaim Claim Expenses	(9.129.657)	(5.957.023)	(3.237.332)
Beban Usaha, termasuk di dalamnya Beban Sumber Daya Manusia Operating Expenses, including Human Resources Expenses	(2.041.533)	(2.266.001)*	(1.206.253)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(167.873)	(153.023)	(95.652)
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expenses)	(125.557)	(202.113)	(300.460)
Pembayaran kepada Masyarakat Melalui TJSL BUMN (d.h. PKBL) Payment to the Community through SOE's CSR (d.h PKBL)	(10.937)	(8.153)	(11.686)
Pembayaran Dividen Dividend Payment	(1.077.761)	(959.876)	(799.366)
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan Total Direct Economic Value Distributed	(12.553.318)	(9.546.189)*	(5.650.749)
Nilai Ekonomi yang Ditahan Retained Economic Value	(4.164.787)	(1.972.184)*	531.727

Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jamkrindo berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan dalam pembayaran pajak. Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kepatuhan yang konsisten, hingga 31 Desember 2024, Jamkrindo tidak menerima peringatan atau sanksi signifikan terkait dengan perpajakan.

Pengelolaan pajak di Jamkrindo dilakukan oleh Divisi Keuangan dan Investasi di bawah Direktur Keuangan dan Investasi sebagai badan tata kelola tertinggi yang meninjau serta menyetujui strategi perpajakan perusahaan. Sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi regulasi guna menghindari sanksi administrasi, seperti denda, bunga, kenaikan pajak, maupun sanksi pidana. Sebagai bagian dari perencanaan pajak, Divisi Keuangan dan Investasi juga aktif menyosialisasikan manajemen risiko pajak kepada seluruh karyawan Jamkrindo. Sepanjang tahun 2024, sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan daring serta reviu berkala ke berbagai unit kerja.

Sebagai salah satu bagian dari perencanaan pajak, Divisi Keuangan dan Investasi melakukan sosialisasi tentang manajemen risiko pajak kepada seluruh insan Jamkrindo. Pada tahun 2024, sosialisasi dilakukan melalui *online meeting* dan *review* secara berkala ke unit-unit kerja.

Berkaitan dengan laporan pajak, Perseroan hanya beroperasi di Indonesia dan tidak memiliki cabang atau kantor operasional di luar negeri. Dengan demikian, laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia. Adapun pajak yang dibayarkan

Disclosure of the Governance, Management, and Control Framework for Taxation Aspects

As a State-Owned Enterprise (SOE), Jamkrindo is committed to supporting national development through compliance with tax obligations. Throughout 2024, the Company fulfilled all its tax obligations in accordance with applicable legal provisions. Due to its consistent compliance, as of December 31, 2024, Jamkrindo had not received any significant warnings or sanctions related to taxation.

Tax management at Jamkrindo is carried out by the Finance and Investment Divisions under the Director of Finance and Investment, who serves as the highest governance body overseeing and approving the Company's tax strategies. As a responsible taxpayer, the Company is committed to adhering to regulations in order to avoid administrative sanctions such as fines, interest, tax increases, or criminal penalties. As part of its tax planning efforts, the Finance and Investment Division also actively disseminates information on tax risk management to all Jamkrindo employees. In 2024, this was carried out through online meetings and regular reviews across various business units.

As part of the tax planning process, the Finance and Investment Division conducted outreach activities on tax risk management to all Jamkrindo personnel. In 2024, this outreach was delivered through online meetings and regular reviews with business units.

Regarding tax reporting, the Company operates solely in Indonesia and does not maintain any branches or operational offices abroad. Accordingly, the Company's tax reporting is conducted exclusively in accordance with Indonesian tax

Perseroan tahun 2024 selengkapnya adalah sebagai berikut:

regulations. Details of the taxes paid by the Company in 2024 are as follows:

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Tax Payment for 2022-2024 (in IDR Million)

Jenis Pajak Tax Type	2024	2023	2022
Pajak Kini Current Tax	30.936	296.283	625.576
Pajak Tangguhan Deferred Tax	95.952	(87.595)*	(325.116)
Jumlah Total	126.888	208.688*	300.460

*) Disajikan kembali
*) Restrated

Implikasi Finansial Serta Risiko dan Peluang Lain Akibat dari Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global menjadi tantangan bagi seluruh sektor bisnis dan industri di Indonesia, termasuk sektor penjaminan. Dampak nyata dari perubahan iklim yang semakin terasa meliputi peningkatan suhu, badai yang lebih intens, kekeringan yang semakin parah, serta kenaikan volume dan suhu lautan. Selain itu, perubahan ini juga berkontribusi terhadap kepunahan spesies, kelangkaan pangan, serta meningkatnya risiko kesehatan masyarakat. Tak hanya itu, perubahan iklim turut memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, badai, dan tanah longsor, yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial.

Secara lebih spesifik, perubahan iklim membawa implikasi finansial yang signifikan serta menciptakan berbagai risiko dan peluang bagi perekonomian nasional maupun global. Dampaknya yang luas menjadikan manajemen risiko perubahan iklim sebagai prioritas bagi pemerintah, perusahaan, dan individu untuk memastikan keberlanjutan usaha dan ketahanan lingkungan. Dalam hal ini, Jamkrindo telah mengambil langkah mitigasi terhadap potensi dampak perubahan iklim dan bencana melalui penerapan *Business Continuity Management System* (BCMS) di seluruh unit kerja, guna memastikan keberlangsungan operasional serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul.

Implementasi BCMS dilakukan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya *event* disruptif baik yang bersumber dari bencana alam (termasuk perubahan iklim) maupun non-bencana alam yang memengaruhi bisnis dan kegiatan operasional Perusahaan, di mana ketika *event* disruptif tersebut terjadi, Perusahaan akan tetap siap dalam memenuhi kewajibannya kepada *stakeholder* dengan tetap mengutamakan keselamatan jiwa karyawan. Lebih lanjut, Jamkrindo telah menyusun kebijakan BCMS dan dokumen pendukungnya seperti *Business Continuity Plan*, *Emergency Response Plan*, *Business Impact Analysis*, dan lainnya. Implementasi BCMS di Jamkrindo telah mendapatkan pengakuan melalui lembaga sertifikasi yang ditandai dengan diperolehnya Sertifikasi ISO 22301:2019 - *Business Continuity Management System* (BCMS) pada tahun 2023.

Financial Implication and Other Risks, and Opportunity Due to Climate Change

Climate change driven by global warming presents a significant challenge for all business and industrial sectors in Indonesia, including the guarantee sector. The tangible impacts of climate change have become increasingly apparent, including rising temperatures, more intense storms, prolonged droughts, and increasing ocean volume and temperature. In addition, these changes contribute to species extinction, food scarcity, and heightened public health risks. Climate change has also triggered hydrometeorological disasters such as floods, storms, and landslides, which may directly affect economic and social stability.

More specifically, climate change brings significant financial implications and creates various risks and opportunities for both the national and global economies. Its widespread impact has made climate risk management a priority for governments, businesses, and individuals in ensuring business continuity and environmental resilience. In this regard, Jamkrindo has taken mitigation measures to address the potential impacts of climate change and related disasters through the implementation of a Business Continuity Management System (BCMS) across all work units, to ensure operational sustainability and preparedness in facing potential challenges.

The implementation of BCMS is carried out to anticipate potential disruptive events, whether caused by natural disasters (including climate change) or non-natural events that may affect the Company's business and operational activities. In the event of such disruptions, the Company remains committed to fulfilling its obligations to stakeholders while prioritizing employee safety. Furthermore, Jamkrindo has established a BCMS policy along with supporting documents such as the Business Continuity Plan, Emergency Response Plan, Business Impact Analysis, and others. The implementation of BCMS at Jamkrindo has been recognized by a certification body, as evidenced by the achievement of ISO 22301:2019-Business Continuity Management System (BCMS) certification in 2023.

Berkaitan dengan implikasi finansial serta risiko akibat perubahan iklim, Jamkrindo belum secara spesifik melakukan perhitungan, termasuk dampaknya bagi operasional perusahaan. Sebab itu, Perusahaan belum bisa menyampaikan informasi terkait hal tersebut. [GRI 201-2]

Imbalan Pasca Kerja

Jamkrindo berkomitmen untuk memenuhi semua regulasi dalam menjalankan usaha, termasuk regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan pemenuhan hak karyawan berkaitan dengan imbalan pasca kerja/program pensiun. Dalam hal ini, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. [GRI 3-3]

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti yang mana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

1. Program JHT sebesar 30 x gaji karyawan;
2. Program THT sebesar 2,5% x masa kerja x gaji karyawan.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 4,4% dari gaji pokok karyawan dan sisanya 6,6% ditanggung Perusahaan. Pada tahun 2024, Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja tercatat sebesar Rp17,40 miliar, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp19,86 miliar. [GRI 3-3, 201-3]

Bantuan Finansial dari Pemerintah

Sejak tahun 2010, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada BUMN dengan menyalurkan dana melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Kebijakan tersebut diambil sejalan dengan upaya pemerintah agar BUMN bisa menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Tanah Air. Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada 17 BUMN dengan total nilai Rp26,79 triliun. PMN ini diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai. Di antara 17 BUMN, Jamkrindo tidak termasuk salah satu di antaranya. Di sisi

In relation to the financial implications and risks resulting from climate change, Jamkrindo has not yet made specific calculations, including the impact on the company's operations. Therefore, the Company is not yet able to provide information on this matter. [GRI 201-2]

Post-employment Benefits

Jamkrindo is committed to complying with all regulations in the course of its business operations, including those related to employment. One of this compliance is the fulfilment of employee rights concerning post-employment benefits/pension program. In this regard, the Company has enrolled its employees in a pension program, namely the Employee Welfare Insurance Program and the Employee Welfare Program through a Financial Institution Pension Fund (DPLK). In addition to the pension program, the Company also provides defined benefit post-employment obligations for employees in accordance with the Labor Law, as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. [GRI 3-3]

A defined benefit pension program is a retirement plan that specifies the amount of pension benefits to be paid, typically based on one or more factors such as age, years of service, or compensation. In addition to the defined benefit plan, the Company also offers a defined contribution plan, under which it contributes a fixed percentage of the employee's base salary to a pension insurance program managed by a financial institution pension fund. Contributions are recognised in the income statement when they become due.

The benefits to be received from the defined benefit plan are as follows:

1. JHT Program is 30 x the employee's salary;
2. THT Program: 2.5% x years of service x employee's salary.

The pension program is funded jointly by the Company and employees through monthly contributions. The funding contribution is 4.4% of the employee's basic salary, with the remaining 6.6% borne by the Company. In 2024, the Company's Estimated Post-Employment Benefits Expense was recorded at IDR 17.40 billion, a decrease compared to IDR19.86 billion in 2023. [GRI 3-3, 201-3]

Government Financial Assistance

Since 2010, the Government has delivered special attention to SOEs by channeling funds through the State Equity Participation (PMN) mechanism. This policy aligns with the government's efforts to position SOEs as one of the key drivers of the national economy. In 2024, the Ministry of Finance and Commission XI of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) agreed to provide state equity participation (PMN) to 17 SOEs, totaling Rp26.79 trillion. This PMN is provided in both cash and non-cash forms. Among the 17 SOEs, Jamkrindo is not included. On the other hand, in 2024, the Company did not receive any

lain, pada tahun 2024, Perseroan juga tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah, baik dalam bentuk pembebasan pajak dan kredit pajak, subsidi, hibah investasi, maupun bentuk lainnya. [GRI 3-3, 201-4]

Kebijakan Antikorupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus diberantas secara kolektif. Oleh karena itu, sikap tegas terhadap antikorupsi perlu dikukuhkan, mengingat sifatnya yang sistemis serta dampaknya yang luas terhadap keuangan negara dan hak sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai integritas, Jamkrindo berkomitmen untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Komitmen ini selaras dengan kebijakan pemerintah serta berbagai regulasi yang mengikat individu dan entitas bisnis di Indonesia dalam hal pencegahan korupsi dan gratifikasi. Jamkrindo juga menempatkan prinsip antikorupsi dan antigratifikasi sebagai bagian fundamental dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). [GRI 3-3]

Untuk mengukuhkan komitmen tersebut, Jamkrindo telah mengadopsi berbagai kebijakan, termasuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI 37001:2016 *Anti-bribery System*, Peraturan Direksi terkait *Due Diligence*, Penundaan Transaksi Bisnis, Anti-Fraud, serta pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan penerapan *Whistleblowing System*. Kebijakan ini secara berkala disosialisasikan kepada seluruh karyawan Jamkrindo. Dengan demikian, per 31 Desember 2024, seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan telah menerima informasi mengenai kebijakan serta prosedur antikorupsi yang diterapkan oleh perusahaan. [GRI 205-2]

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat komitmen antikorupsi dan mengantisipasi potensi risiko secara efektif, Jamkrindo telah melakukan pemetaan serta mitigasi terhadap proses bisnis yang memiliki risiko tinggi terhadap korupsi dan penyuapan. Beberapa area yang menjadi fokus utama dalam upaya ini meliputi pengadaan barang dan jasa, rekrutmen karyawan, pengelolaan keuangan, serta layanan penjaminan. Sebagai langkah mitigasi, Perseroan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko penyuapan dengan menerapkan peraturan tertulis mengenai Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta sejumlah peraturan lain yang mendukung penegakan SMAP antara lain kebijakan Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System (WBS)*, *Anti Fraud* dan *Due Diligence*. [GRI 205-1]

Selaras dengan upaya membangun risk awareness dan compliance awareness, maka Perusahaan secara periodik melakukan sosialisasi atas sejumlah peraturan yang berkaitan dengan antikorupsi sebagai berikut:

1. Refreshment atas Kebijakan Peraturan Direksi Tahun 2024 yaitu Peraturan Direksi Nomor 22/Per-Dir/4/III/2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan
2. Refreshment atas Peraturan Direksi Nomor 01/Per-Dir/4/II/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024.

financial assistance from the government, either in the form of tax exemptions and tax credits, subsidies, investment grants, or any other forms. [GRI 3-3, 201-4]

Anti-Corruption Policy

Corruption is an extraordinary crime that must be collectively eradicated. Therefore, a firm stance against corruption needs to be reinforced, considering its systemic nature and its wide-ranging impact on the nation's finances and the socio-economic rights of society. As a company that upholds integrity, Jamkrindo is committed to preventing and combating corrupt practices. This commitment is in line with government policies and various regulations that bind individuals and business entities in Indonesia in terms of corruption and gratuity prevention. Jamkrindo also places anti-corruption and anti-gratuity principles as fundamental elements of the implementation of Good Corporate Governance. [GRI 3-3]

To reinforce this commitment, Jamkrindo has adopted various policies, including the implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS) based on SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery System, Board of Directors' regulations related to Due Diligence, Suspension of Business Transactions, Anti-Fraud, as well as the establishment of a Gratification Control Unit (UPG) and the implementation of a Whistleblowing System. These policies are regularly communicated to all Jamkrindo employees. As of 31 December 2024, all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees have received information regarding the Company's anti-corruption policies and procedures. [GRI 205-2]

To strengthen its anti-corruption commitment and effectively anticipate potential risks, Jamkrindo has mapped and mitigated business processes that pose a high risk of corruption and bribery. Key focus areas in this effort include procurement of goods and services, employee recruitment, financial management, and guarantee services. As a mitigation measure, the Company has established an anti-bribery risk management policy by implementing written regulations on the Anti-Bribery Management System (ABMS) policy, as well as several other supporting policies such as the Gratification Control Policy, Whistleblowing System (WBS), Anti-Fraud Policy, and Due Diligence procedures. [GRI 205-1]

In line with efforts to build risk awareness and compliance awareness, the Company periodically socializes a number of regulations relating to anti-corruption as follows:

1. Refreshment of the Board of Directors Regulation Policy 2024, namely Board of Directors Regulation Number 22/Per-Dir/4/III/2022 concerning Guidelines for the Implementation of Anti-Bribery Management System and
2. Refreshment of the Board of Directors Regulation Number 01/Per-Dir/4/I/2023 concerning Guidelines for Gratification Control.

Implemented on July 15, 2024.

Selanjutnya Perusahaan secara periodik melakukan penyempurnaan kebijakan internal yang berkaitan dengan Anti Korupsi di antaranya:

1. Peraturan Direksi Nomor 30/Per-Dir/4/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
2. Peraturan Direksi Nomor 31/Per-Dir/4/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
3. Surat Edaran Direksi Nomor 46/SE/4/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Prosedur Uji Kelayakan (due diligence); dan
4. Surat Edaran Direksi Nomor 47/SE/4/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis.

Jamkrindo juga mendorong setiap Unit Kerja secara periodik melakukan identifikasi potensi risiko yang dihadapi masing-masing Unit Kerja, dan selanjutnya melakukan penilaian risiko berdasarkan kriteria kemungkinan dan dampak, melakukan analisis sehingga dapat ditetapkan langkah-langkah mitigasi risikonya.

Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan dukungan terhadap komitmen penciptaan lingkungan usaha yang bersih dari praktik gratifikasi, penyuapan dan korupsi, Perusahaan juga melakukan sejumlah kebijakan di antaranya dengan mewajibkan setiap Insan Jamkrindo menandatangani Pakta Integritas Komitmen Anti Gratifikasi, melakukan pengukuran atas implementasi kebijakan SMAP melalui kegiatan tahunan Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001 : 2016 *Anti Bribery Management System*. Selanjutnya, Jamkrindo juga melakukan evaluasi atas pemahaman Insan Jamkrindo terhadap kebijakan SMAP melalui penyelenggaraan kuis secara daring, menambahkan klausul Anti Gratifikasi, Penyuapan, Korupsi dan Kolusi dalam perjanjian/perikatan dengan mitra Perusahaan dan menginformasikan dukungan Perusahaan terhadap komitmen anti korupsi dalam penyelenggaraan usaha melalui sejumlah media komunikasi PT Jamkrindo. [GRI 205-1]

Untuk mendukung dan mewujudkan lingkungan usaha yang bersih, Perusahaan juga mendorong dan mengajak mitra strategis untuk menyepakati adanya klausul pasal tambahan tentang gratifikasi, anti penyuapan, anti korupsi dan anti pencucian uang sebagai bagian kesepakatan Para Pihak dalam penyusunan dan pembaharuan Kerja Sama Penjaminan maupun dalam Perjanjian Kontrak dengan mitra penyedia barang dan jasa ke Perusahaan. Kebijakan dan langkah ini diambil dalam rangka mendorong seluruh *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi, gratifikasi dan anti penyuapan. Dengan kebijakan ini, maka semua (100%) mitra Jamkrindo telah mendapatkan sosialisasi kebijakan antikorupsi di Perseroan.

[GRI 205-2]

Selain memiliki kebijakan antikorupsi dan melakukan sosialisasi di kalangan internal maupun eksternal, Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan Jamkrindo untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan antikorupsi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. [GRI 205-2]

Furthermore, the Company periodically improves internal policies related to Anti-Corruption including:

1. Board of Directors Regulation Number 30/Per-Dir/4/XII/2024 dated December 24, 2024 concerning Policy on Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP);
2. Board of Directors Regulation Number 31/Per-Dir/4/XII/2024 dated December 24, 2024 concerning Gratification Control Policy;
3. Circular Letter of the Board of Directors Number 46/SE/4/XII/2024 dated December 24, 2024 regarding Due Diligence Procedures; and
4. Circular Letter of the Board of Directors Number 47/SE/4/XII/2024 dated December 24, 2024 on Procedure for Postponement of Business Transactions.

Jamkrindo also encourages each Work Unit to periodically identify potential risks specific to their respective areas, followed by a risk assessment based on likelihood and impact criteria. This process includes conducting risk analysis to determine appropriate mitigation measures.

To ensure the implementation of business activities and to support the commitment to creating a business environment free from gratification, bribery, and corruption practices, the Company has implemented several policies. These include requiring every Jamkrindo personnel to sign an Anti-Gratification Integrity Pact, measuring the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) policy through an annual certification activity of the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. In addition, Jamkrindo also evaluates employees' understanding of the ABMS policy through online quizzes, includes Anti-Gratification, Bribery, Corruption, and Collusion clauses in agreements/contracts with the Company's partners, and communicates the Company's anti-corruption commitment in business operations through several communication media of PT Jamkrindo. [GRI 205-1]

To support and promote a clean business environment, the Company also encourages and invites strategic partners to agree on the inclusion of an additional clause regarding gratification, anti-bribery, anti-corruption, and anti-money laundering as part of the agreement between Parties in the formulation and renewal of Guarantee Cooperation as well as in contractual agreements with goods and services providers. This policy and initiative are taken to encourage all stakeholders to actively participate in the prevention of corruption, gratification, and bribery. As a result of this policy, 100% of Jamkrindo's partners have received socialization on the Company's anti-corruption policy. [GRI 205-2]

In addition to having an anti-corruption policy and conducting socialization both internally and externally, the Company also provides opportunities for Jamkrindo's management and employees to participate in anti-corruption training and education programs, organized either internally or externally.

[GRI 205-2]

Komitmen dan kesungguhan insan Jamkrindo terhadap antikorupsi membawa hasil dengan tidak adanya insiden korupsi yang terbukti selama tahun pelaporan. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengambil tindakan tertentu, seperti menghentikan karyawan yang terbukti melakukan korupsi, atau menghentikan kontrak dengan mitra bisnis karena pelanggaran kasus korupsi. [GRI 205-3]

Bersaing Sehat

Persaingan usaha merupakan dinamika yang wajar dalam dunia bisnis, termasuk di industri penjaminan. Bagi mitra penjaminan, kondisi ini memberikan keuntungan karena mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan layanan terbaik. Sementara itu, bagi pelaku usaha, persaingan mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan agar lebih sesuai dengan harapan pelanggan serta menciptakan nilai tambah yang kompetitif. [GRI 3-3]

Jamkrindo's strong commitment to anti-corruption was reflected in the absence of any proven corruption incidents during the reporting year. As a result, the Company did not take any measures such as terminating employees found guilty of corruption or ending contracts with business partners due to corruption-related violations. [GRI 205-3]

Fair Competition

Business competition is a natural dynamic in the commercial world, including within the guarantee industry. For customers or consumers, such competition provides benefits by offering more options to access the best services. Meanwhile, for businesses, competition drives improvements in product and service quality to better meet customer expectations and create competitive added value.

[GRI 3-3]



KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY ENVIRONMENTAL PERFORMANCE





KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY ENVIRONMENTAL PERFORMANCE



Sebagai bagian dari industri jasa keuangan, perusahaan penjaminan memiliki peran strategis dalam mendukung kelestarian lingkungan. Meskipun operasional bisnisnya tidak berdampak langsung terhadap lingkungan seperti sektor industri manufaktur atau pertambangan, perusahaan penjaminan dapat berkontribusi melalui kebijakan investasi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Being part of the financial services industry, credit guarantee companies have a strategic role in supporting environmental preservation. Even though its operational business is indirectly affecting the environment unlike those in the manufacturing or mining sectors, credit guarantee companies can contribute through responsible and sustainability oriented investment policies.



Dengan menerapkan prinsip *sustainable finance*, perusahaan penjaminan dapat memastikan bahwa dana yang dikelola dan dijamin tidak digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang merusak lingkungan, melainkan diarahkan pada kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

By implementing the principle of *sustainable finance*, credit guarantee companies can ensure that the funds they manage and underwrite are not allocated to projects that harm the environment, but are instead directed toward environmentally friendly and sustainable economic activities.

Selain itu, perusahaan penjaminan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek lingkungan dalam dunia bisnis. Melalui kebijakan selektif dalam penjaminan kredit, perusahaan dapat mendorong mitra usaha dan pelaku industri untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Misalnya, perusahaan penjaminan dapat memberikan preferensi kepada UMKM atau korporasi yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, seperti efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan penjaminan turut berkontribusi dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi internal, perusahaan penjaminan juga dapat menjalankan berbagai inisiatif hijau dalam operasionalnya. Upaya seperti penerapan kebijakan *green office*, pengurangan penggunaan kertas melalui sistem digitalisasi, efisiensi energi di lingkungan kerja, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang berfokus pada lingkungan, merupakan langkah konkret dalam mendukung pelestarian alam. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan bisnis dan operasionalnya, perusahaan penjaminan tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosial, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Komitmen Jamkrindo terhadap Lingkungan Hidup

Jamkrindo sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan di Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut sejalan dengan spirit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana pada Pasal 43, ayat (3), huruf c terdapat klausul, "Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup". Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan "sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Sebagai tindak lanjut atas regulasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Dengan peraturan ini, maka perusahaan penjaminan sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan non-bank wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance*. Merujuk peraturan ini, Jamkrindo wajib menerapkan keuangan berkelanjutan per 1 Januari 2024. Walau demikian, secara faktual, Perseroan telah mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan secara sukarela yang dilaporkan melalui Laporan Keberlanjutan sejak tahun 2019 saat POJK Keuangan Berkelanjutan mulai berlaku untuk lembaga jasa keuangan bank.

On the other side, credit guarantee companies participate in increasing awareness toward the importance of environmental aspects in a business. Through this credit guarantee selective policy, a company can encourage business partners and enterprises to focus more on environmental impact from their activities. For example, credit guarantee companies can provide preferences to the MSME's or corporations which are implementing sustainable business practices, such as energy efficiency, eco-friendly technology usage, and responsible waste management. Therefore, a credit guarantee companies contribute to accelerate the transition toward a greener and more environmentally responsible economy.

On the internal side, credit guarantee companies can implement various green initiatives inside their operations. An attempt to apply *green office* policy, such as reducing paper usage through digitalization systems, energy efficiency in the work environment, and *Corporate Social Responsibility (CSR)* programs, is a concrete step to support nature preservation. By integrating environmental aspects in business and operational policy, credit guarantee companies are not only carrying out their responsibilities, but also contribute to create a more sustainable future.

Jamkrindo Commitment for the Environment

Jamkrindo, as part of financial services institutions, is committed to contribute for the environmental preservation. This commitment aligns with the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, particularly Article 43, paragraph (3), letter c, which includes the provision: "The Development of an environmentally friendly financial institution and capital market system". According to this law, an "environmentally friendly financial institution system" refers to a financial institution system in which both banking and non-banking financial institutions apply environmental protection and management requirements in their financing policies and institutional practices.

In response to the regulation, Financial Services Authority (issued Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies or POJK Sustainable Finance. With this regulation, guarantee companies as part of non-bank financial services institutions are obligated to implement the principle of *sustainable finance*. Refer to this regulation, Jamkrindo is obligated to apply sustainable finance per January 1, 2024. Nevertheless, in practice, the Company has voluntarily implemented the principle of sustainable finance and has disclosed its implementation through the Sustainability Report since 2019 when POJK of Sustainable Finance first became applicable to bank financial services institutions.

Landasan Kebijakan [GRI 3-3]

Komitmen Jamkrindo terhadap kelestarian lingkungan merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di bidang lingkungan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, beserta peraturan-peraturan turunannya, antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Selanjutnya, dari berbagai regulasi tersebut, Jamkrindo menerbitkan regulasi internal berkaitan dengan lingkungan antara lain berupa Memorandum Divisi MSDM No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 terkait Program Jamkrindo *Go Green Lifestyle*.

Era Baru Keuangan Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, termasuk perusahaan penjaminan, sangat *concern* terhadap pentingnya lembaga jasa keuangan berkontribusi terhadap isu dan permasalahan lingkungan. Sikap dan pandangan lembaga tersebut antara lain disampaikan dalam *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019* oleh OJK. Sebagai kelanjutan *roadmap* tersebut, lembaga yang sama menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2021-2025*. Keberadaan *roadmap* tersebut sangat penting karena memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi upaya internalisasi lingkungan hidup dan pengarusutamaan lingkungan hidup bagi lembaga jasa keuangan.

Policy Foundation [GRI 3-3]

Jamkrindo's commitment to environmental refers to various environmental regulations, such as laws, government regulations, ministerial regulations, and derivative regulations, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 concerning Energy;
3. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 concerning the Management of Hazardous and Toxic Waste Materials;
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
6. Government Regulation No. 20 of 1990 on the Control of Water Pollution;
7. Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Conservation;
8. Decision of State Minister for the Environment No. 111 of 2003 concerning Guidelines to the Requirements and Procedures of License and Review Manual on Liquid Waste Disposal into The Water of Water Resources;
9. Regulation of State Minister for the Environment No. 01 of 2010 on the Implementation of Water Pollution Control;
10. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Efficiency of Electric Usage

Furthermore, regarding the various regulations, Jamkrindo issued internal regulations related to the environmental, including the Human Resources Division Memorandum No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 concerning the Jamkrindo *Go Green Lifestyle Program*.

New Era of Sustainable Finance

The Financial Services Authority (OJK), as a state institution serves to organize an integrated regulation and supervise the system for all financial services activities in banking sector, capital markets, and non-banking financial services sector, including guarantee companies, is highly concerned about the importance of financial services institution contribution to the environmental issues and problems. The institution's attitudes and views are conveyed in the 2015-2019 Indonesia Sustainable Finance *Roadmap* by OJK. To complement this roadmap, they have issued a *Roadmap for 2021-2025 Indonesia Sustainable Finance*. The roadmap is significant as it provides clear guidance and direction regarding environmental internalization and mainstreaming efforts for financial services institutions.

Sejalan dengan *roadmap* tersebut, pada tahun 2017, OJK menerbitkan POJK Keuangan Berkelanjutan. Peraturan ini mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan diperlukan sebagai modal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun penerapannya dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 1 Januari 2019 untuk Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4 dan bank asing. Sedangkan perusahaan penjaminan wajib melaksanakan prinsip keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance* sebagaimana diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan per 1 Januari 2024.

Sustainable finance memiliki empat dimensi, yaitu pencapaian keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global serta pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; promosi investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi, dan pemberian dukungan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan Indonesia 4P (*pro-growth, projobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan semakin menemukan makna penting di saat warga dunia saat ini tengah menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim yang dampaknya kian nyata, antara lain, memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Implementasi tersebut sekaligus merupakan dukungan perusahaan penjaminan terhadap Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia. Piagam Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim diserahkan oleh Wakil Tetap RI pada PBB di New York pada 31 Oktober 2016. Perjanjian Paris adalah komitmen warga dunia untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C guna mengurangi risiko dan dampak merugikan akibat perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Pengelolaan Bahan Baku/ Material Kertas

Kertas merupakan salah satu material utama yang mendukung operasional harian Jamkrindo, terutama dalam aktivitas administrasi perkantoran seperti surat-menyurat, pencetakan dokumen pelaporan, dan keperluan lainnya. Oleh karena dalam memproduksi kertas menggunakan bubur kayu, memerlukan listrik dan air, serta menghasilkan emisi gas rumah kaca, maka Jamkrindo mengurangi penggunaan kertas dalam operasional perkantoran melalui berbagai kebijakan berikut: [GRI 3-3]

In line with the roadmap, in 2017, OJK issued the POJK Sustainable Finance. The regulation defines sustainable finance as the comprehensive support to the financial services industries for sustainable growth resulting from the alignment of economic, social, and environmental priorities. The implementation of sustainable finance is necessary as it is a crucial capital to achieve sustainable development. The implementation is conducted in phases, starting on January 1, 2019, for Commercial Banks on Business Activities (BUKU) 3, BUKU 4 and foreign banks. Meanwhile, guarantee companies are obligated to implement the principles of sustainable finance as regulated in the POJK Sustainable Finance on January 1, 2024.

Sustainable finance has four dimensions, which are achieving industrial, social, and economic excellence in order to reduce the global warming threat and prevent other environmental and social problems; target shifting towards a competitive low-carbon economy; promoting eco-friendly investments in various business/economic sectors, and providing support for the implementation of Indonesia's 4P development principles (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, and pro-environment*).

The implementation of sustainable finance principle is increasingly gaining significance as the world's population face the tangible impacts of global warming and climate change, including triggering hydro meteorological disasters such as floods, landslides, and etc. This implementation also serves as the commitment of a guarantee companies toward the Paris Agreement, which has signed by the Indonesian government. The Instrument of Ratification of the Paris Agreement upon the United Nations Framework Convention on Climate Change was submitted by the Permanent Representative of Indonesia to the UN in New York on October 31, 2016. The Paris Agreement is a global commitment to limit the rise of the global average temperature below 2°C to reduce the risks and detrimental impacts of climate change. Indonesia's commitment to the Paris Agreement is realized through the issuance of Law No. 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Raw Material/Paper Material Management

Paper is one of main materials to support Jamkrindo's daily operation, especially in the office administration activity such as business correspondence, printing reporting documents, and other purposes. Since paper production uses pulp, electricity and water, and produce greenhouse gas emission, therefore Jamkrindo has reduced paper usage on its office operations through the implementation of following policies: [GRI 3-3]

1. Penggunaan teknologi informasi (*e-mail*) dalam menyampaikan informasi;
2. Pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat;
3. Mencetak naskah draf dalam kertas bolak-balik;
4. Melakukan pengecekan naskah secara optimal sebelum dicetak sehingga tidak perlu mencetak ulang akibat ada kesalahan dalam penulisan;
5. Penggunaan *E-Office* (Snapjam) untuk pengiriman surat/memorandum internal.

Sejalan dengan efisiensi yang dijalankan, per 31 Desember 2024, volume kertas yang digunakan Jamkrindo tercatat sebanyak 1.026 rim, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.144 rim. [GRI 3-3, 301-1]

1. Using information technology (*e-mail*) to deliver information;
2. Utilizing used paper for draft letters;
3. Printing draft documents on both sides of the paper;
4. Conducting thorough checks of documents before printing to avoid reprints due to writing errors;
5. Use of *E-Office* (Snapjam) for internal mail/memorandum delivery.

In line with ongoing efficiency efforts, per December 31, 2024, the volume of paper used by Jamkrindo was recorded at 1.026 reams, it decreases compared to 2023 which reached 1.144 reams. [GRI 3-3, 301-1]

Tabel Volume Penggunaan Kertas 2022-2024
Table of Paper Usage Volume of 2022-2024

Tahun Year	A4 A4 Paper		F4 F4 Paper	
	Rim Reams	Berat(kg) Weights (kg)	Rim Reams	Berat(kg) Weights (kg)
2024	1,026	2,237	0	0
2023	1,088	2,372	56	122
2022	837	1,825	28	61

Catatan :

1. Kertas A4

- a. Asumsi jenis kertas yang digunakan adalah kertas fotokopi ukuran A4, berat 70gsm (gram square meter)
- b. Ukuran kertas A4 = 21,0 x 29,7 cm
- c. Rumus perhitungan berat per rim (500 lembar) adalah $21,0 \times 29,7 \times 70 \times 500 / 10.000 = 2.183$ gram/rim atau 2,18 kg/rim

2. Kertas F4

- a. Asumsi jenis kertas yang digunakan adalah kertas fotokopi ukuran F4, berat 70gsm (gram square meter)
- b. Ukuran kertas F4 = 21x33 cm
- c. Rumus perhitungan berat per rim (500 lembar) adalah $21 \times 33 \times 70 \times 500 / 10.000 = 2.425,5$ gram/rim or 2,43 kg/rim

Notes:

1. A4 Paper

- a. Assuming the type of used paper is a A4 photocopy paper, with 70gsm weight (gram square meter)
- b. A4 paper's measurement = 21,0 x 29,7 cm
- c. The formula to calculate weight per ream (500 sheets) is $21,0 \times 29,7 \times 70 \times 500 / 10,000 = 2,183$ gram/ream or 2,18 kg/ream.

2. F4 Paper

- a. Assuming the type of used paper is a F4 photocopy paper, with 70gsm weight (gram square meter)
- b. F4 paper's measurement = 21 x 33 cm
- c. The formula to calculate weight per ream (500 sheets) is $21 \times 33 \times 70 \times 500 / 10,000 = 2,425,5$ gram/rim or 2,43 kg/rim

Penggunaan kertas dalam operasional Jamkrindo menghasilkan limbah berupa kertas bekas yang perlu dikelola dengan bijak. Untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab, Jamkrindo menyerahkan limbah kertas tersebut kepada pihak ketiga yang berkompeten untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Sementara itu, dokumen yang bersifat rahasia dan tidak boleh diakses oleh pihak lain akan dihancurkan menggunakan mesin penghancur kertas guna menjaga keamanan informasi. Meskipun Jamkrindo menggunakan material kertas yang dapat didaur ulang dan tergolong ramah lingkungan, hasil kertas daur ulang tersebut belum digunakan kembali dalam operasional sehari-hari. Selain itu, sebagai perusahaan penjaminan, Jamkrindo tidak memiliki produk dengan kemasan tertentu sehingga Perseroan tidak bisa menyampaikan informasi mengenai *product reclaimed* dan material kemasan dalam laporan ini. [GRI 301-2, 301-3][OJK F.5]

The paper usage on Jamkrindo operation produces used paper waste that should be managed wisely. To ensure responsible management, Jamkrindo hands over those used paper waste to the competent third parties for recycling or reusing. Meanwhile, a confidential document that is prohibited to be accessed by other parties will be shredded using a paper shredder to keep information security. Even though Jamkrindo uses paper material that can be recycled and eco-friendly, it is not reused in the daily operation. On the other hand, as a guarantee company, Jamkrindo does not have specific packaging products, therefore the Company cannot inform regarding the reclaimed products and packaging material in this report. [GRI 301-2, 301-3] [OJK F.5]

Pengelolaan Energi

Jamkrindo mengandalkan dua sumber energi utama dalam operasionalnya yaitu listrik dan bahan bakar minyak, yang keduanya diperoleh dari pihak ketiga. Listrik digunakan untuk penerangan serta mengoperasikan berbagai perangkat elektronik, termasuk mesin AC, fotokopi, lift, PC, laptop, dan televisi. Perusahaan menyadari bahwa pasokan listrik nasional masih didominasi oleh pembangkit berbasis batu bara yang merupakan sumber energi fosil dengan ketersediaan terbatas dan tidak terbarukan. Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, Jamkrindo menerapkan berbagai inisiatif penghematan listrik. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pengurangan konsumsi energi nasional. Upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. [GRI 3-3]

Kebijakan penghematan listrik yang dilakukan Jamkrindo adalah sebagai berikut: [GRI 302-4] [OJK F.7, F.12]

1. Mengganti lampu dengan lampu LED;
2. Melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi waktu lembur;
3. Memperbanyak panel kaca ruangan sehingga bisa optimal memanfaatkan sinar matahari pada siang hari;
4. Mematikan semua alat elektronik saat karyawan pulang;
5. Mengoptimalkan penggunaan AC dari AC Central ke AC Cassete/Split sehingga dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan ruangan.

Per 31 Desember 2024, konsumsi listrik Kantor Pusat Jamkrindo tercatat sebesar 1.217 kWh atau setara dengan 4,39 Gigajoule (GJ), naik dibandingkan tahun 2023, yang mencapai 1.099 kWh atau 3,96 GJ. Kenaikan terjadi karena adanya penambahan jumlah karyawan dan bertambahnya kegiatan perusahaan sehingga intensitas penggunaan listrik meningkat. [GRI 302-1] [OJK F.6]

Untuk mengukur intensitas penggunaan energi listrik, Jamkrindo menghitung dengan membagi total penggunaan energi listrik (kWh) dengan luas ruangan kantor. Per 31 Desember 2024, penggunaan listrik adalah sebesar 1.217 kWh, sedangkan luas ruangan gedung yang dipakai saat ini adalah 16.430 meter persegi. Dengan demikian, intensitas konsumsi energinya tercatat sebesar 13,50 kWh/meter persegi/per tahun, atau masuk kategori "Sangat Efisien" sesuai dengan rujukan Tabel IKE Standar di bawah ini: [GRI 302-3] [OJK F.6]

Energy Management

Jamkrindo requires two primary energy sources to conduct their operations: electricity and fuel oil, both obtained from third parties. Electricity is used for a lighting source and energy provider for various electronic equipment, facilities, and infrastructures at Jamkrindo, including air conditioning units, photocopiers, elevators, PCs, laptops, televisions. The company realizes that national electricity supply is dominantly derived from coal-powered plants, utilizing non-renewable energy and has limited availability. Therefore, as a form of responsibility toward environment sustainability, Jamkrindo has implemented various initiatives of electricity-savings programs. This step is not only to increase energy efficiency, but also to support government policy in reducing national energy consumption. These attempts are aligned with the programs of Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Conservation and the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 on Electricity Usage Efficiency. [GRI 3-3]

The electricity-saving policy implemented by Jamkrindo includes these following actions: [GRI 302-4] [OJK F.7, F.12]

1. Replacing traditional bulbs with LED lights;
2. Implementing efficiency in working hours by reducing overtime;
3. Increasing the number of glass panels in rooms to optimize natural sunlight during the day;
4. Increasing the number of glass panels in rooms to optimize natural sunlight during the day;
5. Optimizing air conditioning from central AC to cassette/split AC units, allowing for room-specific control.

As per December 31, 2024, the electricity consumption of Jamkrindo Head Office was recorded at 1.217 kWh or equivalent to 4.39 Gigajoules (GJ), an increase compared to 2023, which reached 1.099 kWh or 3.96 GJ. The increase occurred due to an additional number of employees and more company activities, resulting in increased electricity usage. [GRI 302-1] [OJK F.6]

To measure the intensity of electricity usage, Jamkrindo calculated by dividing the total electricity use (kWh) by the area of the office space. Per December 31, 2024, the usage of electricity is at 1.217 kWh, meanwhile the width of a used room building is at 16.430 square meters. Thus, energy consumption intensity was recorded at 13.50 kWh/square meter/year, or in the "Highly Efficient" category according to the Standard IKE Table reference below: [GRI 302-3] [OJK F.6]

Tabel Nilai IKE Standard di Bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Berdasarkan Permen ESDM No. 13/2012
Table of IKE Standard Values in Government Office Building Based on Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 13/2012.

Kriteria Criteria	Ber-AC With AC		Tanpa AC Without AC	
	kWh/m2/bulan kWh/m2/month	kWh/m2/tahun* kWh/m2/year*	kWh/m2/bulan* kWh/m2/month	kWh/m2/tahun* kWh/m2/year*
Sangat Efisien Very Efficient	<8,5	<102	<3,4	<40,8
Efisien Efficient	8,5-14	102-168	3,4-5,6	40,8-67,2
Cukup Efisien Quite Efficient	14-18,5	168-222	5,6-7,4	67,2-88,8
Boros Not Efficient	>18,5	>222	>7,4	>88,8

Rujukan: Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik
*) Konversi dalam setahun

Reference: Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 on Electricity Usage Efficiency
*Conversion per year

Selain listrik, konsumsi energi lain yang dipakai Jamkrindo adalah bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk kendaraan operasional dan genset sebagai cadangan sumber energi apabila pasokan listrik mengalami gangguan. Jenis bahan bakar yang dipakai adalah bensin dan solar. Sama seperti listrik, ketersediaan dan pasokan BBM juga terbatas karena masuk kategori energi tak terbarukan sehingga Perusahaan berkomitmen untuk melakukan efisiensi. [GRI 3-3]

Other than electricity, Jamkrindo also consumes other energy sources, such as fuel oil (BBM), used for operational vehicles and generators as a backup energy source in case of electricity supply disruptions. The types of fuel used are gasoline and diesel. Similar to electricity, the availability and supply of fuel oil are also limited as they are categorized as non-renewable energy, so the Company is committed to efficiency measures. [GRI 3-3]

Untuk mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), Jamkrindo menerapkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah mengurangi pertemuan atau rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga peserta rapat tidak perlu hadir secara fisik dan dapat mengurangi penggunaan moda transportasi. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala guna memastikan kinerja mesin tetap optimal dan lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Di samping itu, Jamkrindo membatasi usia pakai kendaraan operasional dengan mempertimbangkan umur ekonomisnya yaitu maksimal 5 (lima) tahun.

To support the efficiency of fuel oil usage Jamkrindo is implementing various strategic policies. One of them is reducing face-to-face meetings or conferences by utilizing information technology, so that the meeting participants do not need to be physically present and can reduce the use of transportation. In addition, the company is also maintaining operational vehicles regularly to ensure the engine remains in optimal condition for the greater efficiency in fuel consumption. On the other hand, Jamkrindo limits the operational vehicles' service life by considering their economic life i.e maximum5 (five) year.

Pemeliharaan, perbaikan, serta pembatasan waktu penggunaan kendaraan operasional tidak hanya bertujuan untuk efisiensi energi, tetapi juga untuk menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari mesin kendaraan. Dengan langkah ini, Jamkrindo memastikan bahwa emisi yang dihasilkan tetap sesuai dengan baku mutu lingkungan yang diperbolehkan. Di sisi lain, berkaitan dengan bidang usaha Jamkrindo di bidang penjaminan, maka informasi mengenai pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa tidak bisa disampaikan dalam laporan ini. [GRI 302-4, 302-5]

Maintenance, repair, and usage hours of operational vehicles are intended not only to improve energy efficiency, but also to suppress greenhouse gas emission generated by vehicles engines. Through this initiative, Jamkrindo ensures that produced emission is in compliance with the permitted environmental quality standards. On the other hand, given the Jamkrindo line of business in guarantee services, therefore, information regarding the required energy reduction for products and services cannot be presented in this report. [GRI 302-4, 302-5]

Per 31 Desember 2024, jumlah penggunaan BBM Kantor Pusat Jamkrindo tercatat sebesar 155.671 liter atau 5.323 GJ, naik dibandingkan tahun 2023, yang mencapai 154.215 liter atau 5.274 GJ. Kenaikan terjadi karena bertambahnya kegiatan perusahaan [GRI 302-1]

Per December 31, 2024, the usage of fuel oil of Jamkrindo Head Office was recorded at 155.671 liter or 5.323 GJ, in increase compared to 2023, which reached 154.215 liter or 5.274 GJ. The increase occurred due to added company activities. [GRI 302-1]

Tabel Volume Penggunaan Energi Tahun 2022-2024
Table of Energy Usage Volume in 2022-2024

No No.	Uraian Descriptions	Satuan Units	2024	2023	2022
1	Listrik Electricities	kWh	1,217	1,099	1,052
		Gigajoule	4,38	3,96	3,79
2	BBM (Bensin dan Solar) Fuel Oil (Gasoline and Solar)	Liter	155,671	154,215	153,715
		Gigajoule	5,323	5,274,15	5,257,05

Keterangan: Konversi kWh ke Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>, konversi liter ke Gigajoule: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

Notes: kWh to Gigajoule Conversion: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>, liter to Gigajoule conversion: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

Sementara itu, untuk konsumsi energi di luar organisasi, seperti penggunaan BBM dan listrik oleh pemasok/mitra, Jamkrindo tidak bisa melaporkan karena dalam perjanjian kerja sama dengan pemasok tidak terdapat klausul tentang pencatatan volume energi yang dikeluarkan oleh mitra. Namun demikian, sesuai dengan Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporat (Cakupan 3) Protokol GRK (Gas Rumah Kaca), Perseroan melakukan identifikasi konsumsi energi yang relevan di luar organisasi, yaitu kategori hulu berupa perjalanan bisnis, terkhusus perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang.

Meanwhile, for energy consumption outside the organization, such as fuel oil and electricity usage by suppliers/partners, Jamkrindo cannot report such data, as the cooperation agreements with suppliers do not contain clauses requiring the recording of energy consumption volumes by the respective partners. However, in line with the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standards of Greenhouse Gas (GHG) Protocol, The Company has identified relevant energy consumption outside the organization, specifically upstream activities in the form of business travel, particularly air travel.

Dalam laporan ini, perjalanan dengan pesawat terbang merujuk pada perjalanan Dewan Komisaris dan Direksi. Volume energi atau bahan bakar yang dikonsumsi dari perjalanan dinas dengan pesawat terbang pada tahun 2023 dihitung dengan kalkulator emisi karbon ICAO (*International Civil Aviation Organization/Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional*).

In this report, air travel refers to business trips undertaken by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Volume of energy or fuel consumption from official air travel in 2023 was calculated using the carbon emissions calculator provided by the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Konsumsi Energi dari Perjalanan Dinas dengan Pesawat oleh Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024. [GRI 302-2] [OJK F.6]

Energy consumption from official air travel by Board of Commissioners and the Board of Directors. [GRI 302-2] [OJK F.6]

Tabel Konsumsi Energi dari Perjalanan Dinas dengan Pesawat oleh Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Table of Energy Consumption from Official Air Travel by the Board of Commisioners and the Board of Directors in 2024

Tahun Year	Total Perjalanan Number of Trips	Total Jarak (km) Number of Distances (km)	Total BBM (kg) Total Fuel Oil (kg)	Amount of Fuel Oil		Total Energi (GJ) Total Energies (GJ)
				Liter Litre	Kiloliter Kilolitre	
2024	248	443,054	3.625.899	4.532.374	4,532	182,176
2023	291	255,465	1.378.579	1.723.223	1,723	69,261
2022	226	199,887	1.077.856	1.347.320	1,347	54,146

Konversi kilogram ke liter: <https://iataops.com/conversion/> Konversi liter ke Gigajoule: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

Kilogram to liter conversion: <https://iataops.com/conversion/> Liter to Gigajoule conversion: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

Tabel Intensitas Konsumsi Energi Kantor Pusat Tahun 2022-2024 [GRI 302-3][OJK F.6]
 Table of Head Office Energy Consumption Intensity in 2022-2024 [GRI 302-3][OJK F.6]

No No.	Jenis Energy Energy Types	Satuan Units	2024	2023	2022
1	Listrik Electricities	Gigajoule	4,38	3,96	3,79
2	BBM Fuel Oil	Gigajoule	5,323	5.274,15	5.257,05
3	Avtur Aviation Turbin Fuel	Gigajoule	182,176	69,261	54,146
4	Jumlah Penggunaan Energi Number of Energy Usage	Gigajoule	187.503,38	74.539,11	59.406,84
5	Jumlah Pendapatan/Karyawan Number of Income/Employe	Employee	389	306	283
Intensitas Energi Energy Intensity		Gigajoule/employee	482,01	243,59	209,92

Pengelolaan Emisi

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan faktor utama dalam pemanasan global dan perubahan iklim yang berpotensi mengancam kehidupan di bumi. Menyadari dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kehidupan, Jamkrindo berkomitmen untuk mengelola dan mengurangi emisi GRK secara bertanggung jawab. Upaya ini dilakukan melalui efisiensi energi serta pengurangan konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan dalam operasional perusahaan. Dalam aktivitas bisnisnya, sumber utama emisi GRK Jamkrindo berasal dari penggunaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta perjalanan dinas dengan pesawat terbang.

Dalam laporan ini, Jamkrindo melaporkan emisi GRK langsung (Cakupan 1) yang dihasilkan dari konsumsi BBM, serta emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) yang berasal dari penggunaan listrik, dengan cakupan data yang difokuskan pada Kantor Pusat Jamkrindo. Selain itu, emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) yang dihasilkan dari perjalanan dinas dengan pesawat merujuk pada perjalanan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dari ketiga cakupan tersebut, emisi yang paling dominan dihasilkan adalah karbon dioksida (CO₂), yang menjadi perhatian utama dalam strategi pengelolaan emisi Jamkrindo.

Emission Management

Greenhouse Gas (GHG) is the main factor which is leading to global warming and climate change, potential threats to life on Earth. Realizing that negative impact toward environment and life, Jamkrindo is committed to manage and reduce GHG emission responsibly. This attempt will be done through energy efficiency and reduction on the operational sources' consumption in the companies. In the business activities, Jamkrindo's main sources of GHG emissions come from fuel oil, and business trips by airplane.

In this report, Jamkrindo reports direct GHG emissions (Scope 1) produced from the fuel oil usage, and indirect GHG emissions (Scope 2) produced from electricity usage, with the data coverage focused on Jamkrindo Head Office. On the other side, other indirect GHG emissions (Scope 3) produced from the business trip by airplane refers to business trips that are conducted by the Board of Commissioners and Directors. From those three coverages, the most dominant produced emissions is carbon dioxide (CO₂) become the main focus of Jamkrindo's emission management.

Emisi Hasil Pembakaran Bahan Bakar Fuel Combustion Emissions

$$\text{Emisi GRK} \left(\frac{\text{kg}}{\text{thn}} \right) = \text{Konsumsi Energi} \left(\frac{\text{TJ}}{\text{thn}} \right) \times \text{Faktor Emisi}$$

GHG emissions Energy Consumption Emission Factor

Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas, maka selama tahun pelaporan, Perseroan menghasilkan emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1) dari penggunaan BBM sebesar 380.532 kgCO₂eq, naik dibandingkan tahun 2023, yang mencapai 365.211 kgCO₂eq. Kenaikan sejalan dengan penambahan penggunaan BBM pada tahun pelaporan. [OJK F.11]

Based on the calculation with the above formula, during the reporting year, the Company generated direct greenhouse gas emissions (scope 1) from fuel oil usage of 380.532 kgCO₂eq, which increased compared to 2023, which reached 365,211 kgCO₂eq. The increase is in line with the rise in fuel oil consumption during the reporting year. [OJK F.11]

Tabel Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Langsung (Cakupan 1) Tahun 2022-2024
Table of Direct Calculations of Greenhouse Gas Emissions (Scope 1) 2022-2024

Bahan Bakar Fuel	Total Energi (TJ/Tahun) Number of Energies (TJ/Year)			Faktor Emisi CO ₂ (kgCO ₂ /TJ) Emission Factor CO ₂ (KgCO ₂ /TJ)	Emisi CO ₂ (Kg CO ₂ /Tahun) CO ₂ Emission (Kg CO ₂ /year)		
	2024	2023	2022		2024	2023	2022
	C=A*B			D	E=C*D		
Bensin Gasoline	5,32	5,27	5,19	69,300	368,676	365,211	359,667
Solar Solar	0,16	0,16	0,06	74,100	11,856	11,856	4,790
Jumlah Amount	5,48	5,43	5,25		380,532	377,067	364,457

Sumber: Diolah dari Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Kementerian Lingkungan Hidup 2012

Resources: Compiled from the National Greenhouse Gas Inventory Guidelines, Ministry of Environment, 2012

Adapun perhitungan emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2, yaitu yang bersumber dari energi dari luar berupa listrik) dilakukan dengan mengalikan konsumsi listrik (dalam Kwh per tahun) dengan *average grid emission factor* yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024 yaitu sebesar 0,934 kgCO₂/Kwh (2017). Berdasarkan perhitungan itu, emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) dari penggunaan energi listrik tahun 2024 tercatat sebesar 1.136,68 kgCO₂eq, naik dibanding tahun 2023, yang mencapai 1.026,46 kgCO₂eq. [OJK F.11]

In addition, the calculation of indirect greenhouse gas emissions (Scope 2, sourced from external energy such as electricity) is conducted by multiplying electricity consumption (in kWh per year) by the average grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources, referring to the RUPTL PLN 2015-2024, which is 0.934 kgCO₂/kWh (2017). Based on the calculation, indirect greenhouse gas emissions (scope 2) from electrical energy use in 2024 were recorded at 1,136.46 kgCO₂eq, it increases comparing to 2023, which is reached 1.026,46 kgCO₂eq. [OJK F.11]

Tabel Emisi Gas Rumah Tidak Langsung (Cakupan 2) Tahun 2022-2024
Table of Indirect Greenhouse Gas Emissions (Scope 2) 2022-2024

Konsumsi Energi Energy Consumption	Tahun (kWh) Year (kWh)			Emisi CO ₂ yang dihasilkan (kg) Produced CO ₂ Emission (kg)		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Listrik Electricities	1,217	1,099	1.052,66	1.136,68	1.026,46	983,18

Selanjutnya, emisi gas rumah kaca (cakupan 3) tidak langsung lainnya seperti diminta oleh POJK Keuangan Berkelanjutan dihitung dengan menggunakan kalkulator karbon dari ICAO (*International Civil Aviation Organization/Organisasi Penerbangan Sipil Internasional*). Merujuk tabel di bawah, emisi gas rumah kaca [Cakupan 3] tidak langsung lainnya dari perjalanan dinas dengan pesawat tahun 2024 sebesar 34.078 kgCO₂eq, naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 24.072 kgCO₂eq. [OJK F.11]

Furthermore, indirect greenhouse gas emissions (Scope 3), as requested by POJK Financial Sustainability, are calculated by using the carbon calculator from ICAO (International Civil Aviation Organization). Refer to the table below, the other indirect greenhouse gas emissions [Scope 3] from the official air travel in 2024 were recorded at 34.078 kgCO₂eq, an increase compared to 2023 which reached 24.072 kg CO₂eq. [OJK F.11]

2024		2023		2022	
Jumlah Perjalanan Number of Trips	Jumlah emisi (kgCO ₂ eq) Number of Emission (KgCO ₂ eq)	Jumlah Perjalanan Number of Trips	Jumlah emisi (kgCO ₂ eq Number of Emission (KgCO ₂ eq)	Jumlah Perjalanan Number of Trips	Jumlah emisi (kgCO ₂ eq Number of Emission (KgCO ₂ eq)
248	34,078	291	24,072	226	18,845

Selanjutnya, untuk menghitung intensitas emisi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Furthermore, to calculate emissions intensity it will be conducted by this following formula;

$$\text{Intensitas Emisi} = \frac{\text{Jumlah emisi cakupan 1 + cakupan 2 + cakupan 3}}{\text{Jumlah karyawan Kantor Pusat}}$$

Emissions Intensity = $\frac{\text{Total emissions of scope 1 + scope 2 + scope 3}}{\text{Number of Head Office Employees}}$

Sesuai rumus di atas, intensitas emisi GRK tahun 2024 tercatat sebesar 1.068,76 kgCO₂eq, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.314,26 kgCO₂eq. [OJK F.11]

According to the mentioned formula, GHG emissions intensity in 2024 were recorded at 1.068,76 kgCO₂eq, a decrease compared to 2023 which reached 1.314,26 kgCO₂eq. [OJK F.11]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam perlindungan lapisan ozon, Jamkrindo telah mengeliminasi penggunaan bahan perusak ozon seperti freon (CFC) dalam sistem pendingin, termasuk AC dan kulkas. Selain itu, Perseroan juga tidak lagi menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mengandung halon, bahan pemadam yang diketahui dapat merusak lapisan ozon. Sebagai langkah substitusi yang lebih ramah lingkungan, Jamkrindo kini menggunakan refrigeran yaitu R32 dan R22. Selain itu, APAR yang digunakan juga telah beralih ke zat pemadam api yang lebih aman bagi lingkungan yaitu Powder CO₂. [OJK F.11]

As part of commitment toward sustainability and to support the government's policy in protecting the ozone layer, Jamkrindo eliminates the use of destructive materials that can damage ozone such as freon (CFC) on the cooling systems, including air conditioners and refrigerators. On the other side, the Company is not using a Light Fire Extinguisher (APAR) anymore which contains halon, extinguishing materials that can damage ozone layer. As an eco-friendly substitution step, this time Jamkrindo is using refrigerant, that is R32 dan R22. On the other side, Jamkrindo is shifting to safer extinguisher material for the environment than the currently used APAR, that is Powder CO₂. [OJK F.11]

Terkhusus tentang emisi udara, Jamkrindo berkomitmen untuk mengelola emisi udara dengan menerapkan kebijakan khusus pada kendaraan operasional. Upaya tersebut mencakup uji emisi rutin, serta pembatasan usia kendaraan operasional 5 (lima) tahun guna memastikan bahwa emisi karbon yang dihasilkan tetap rendah dan sesuai dengan baku mutu/ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Perawatan kendaraan dilakukan secara berkala, termasuk penggantian suku cadang untuk memastikan kondisi mesin tetap optimal dan mengurangi risiko peningkatan emisi akibat kinerja mesin yang kurang efisien. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan lebih lanjut, Jamkrindo juga berkomitmen untuk mendukung program penghijauan sebagai langkah kompensasi emisi dan peningkatan kualitas udara. [OJK F.11]

Especially for air emissions, Jamkrindo is committed to manage air emissions by implementing specific policy toward operational vehicles. The mentioned attempt is covering routine emissions exams, and limiting the service life of operational vehicles 5 (five) years to ensure low carbon emission production and align with the government's quality standards. Vehicles maintenance will be conducted regularly, including the replacement of spare parts to ensure the engine remains in optimal condition and to reduce the risk of increased emissions due to inefficient engine performance. On the other hand, as a form of responsibility toward environment sustainability, Jamkrindo is also committed to support the reforestation program as a compensation step in increasing air quality. [OJK F.11]

Pengelolaan Air

Air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam operasional sehari-hari Jamkrindo. Perusahaan menggunakan air untuk berbagai keperluan domestik karyawan dan manajemen, seperti kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi, wudu, penyiraman tanaman, dan sebagainya. Air juga digunakan untuk konsumsi minum sehari-hari bagi karyawan. Kebutuhan air Kantor Pusat Jamkrindo bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan tidak menggunakan air tanah. [GRI 3-3]

Jamkrindo menyadari bahwa ketersediaan air bersih semakin berkurang akibat berbagai faktor, seperti pencemaran sumber air baku dan eksploitasi air tanah yang masif. Pasokan bahan baku air untuk PDAM semakin terbatas, sementara penyedotan air tanah terus meningkat untuk berbagai keperluan, termasuk industri, perkantoran, dan perhotelan. Jika tidak dikelola dengan baik, krisis air bersih dapat menjadi ancaman nyata di masa depan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM 2019 bahkan memproyeksikan bahwa Indonesia dapat mengalami kelangkaan absolut air pada tahun 2040, di mana sumber daya air tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami kondisi stres air, yaitu ketidakmampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk maupun lingkungan sekitarnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan efisiensi dalam penggunaan air guna mendukung keberlanjutan sumber daya air. Perseroan aktif mengedukasi karyawan tentang pentingnya penggunaan air secara bijaksana dan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, seperti mengurangi jam kerja lembur untuk menekan konsumsi air, melakukan pemeriksaan rutin pada instalasi air, serta segera memperbaiki kebocoran yang terdeteksi. Selain itu, sebagai langkah tambahan, distribusi air dikendalikan dengan menutup keran setelah jam kerja guna mencegah pemborosan.

Dengan kebijakan pengelolaan air yang baik, Jamkrindo memastikan bahwa operasionalnya tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama dalam hal tekanan terhadap sumber daya air. Mengingat bahwa air yang digunakan berasal dari PDAM, perusahaan memastikan bahwa konsumsi airnya tidak berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kelangkaan air di wilayah-wilayah dengan tingkat stres air tinggi. Melalui langkah-langkah ini, Jamkrindo turut berperan dalam upaya menjaga keberlanjutan air bersih bagi generasi mendatang. [GRI 303-1]

Per 31 Desember 2024, volume pengambilan air Kantor Pusat Jamkrindo tercatat sebesar 12.849 meter kubik (m3), naik dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 10.376 m3. Kenaikan dipengaruhi oleh penambahan karyawan/penghuni gedung kantor sehingga penggunaan air meningkat. [GRI 303-3] [QJK F.8]

Water Management

Water is one of the vital necessities in Jamkrindo's daily operations. The Company uses water for various domestic purposes for employees and management, such as drinking water, hygiene, sanitation, ablution, plant watering, etc. Water is also used for daily drinking consumption for employees. The water supply of Jamkrindo's Head Office is sourced from the Regional Drinking Water Company (PDAM) and does not utilize groundwater. [GRI 3-3]

Jamkrindo realizes that the availability of clean water is continuously decreasing. The raw water supply for the Regional Drinking Water Company (PDAM) is becoming increasingly limited, meanwhile groundwater extraction continues to rise for various purposes, including industrial, office, and hospitality uses. If not properly managed, a clean water crisis can pose a significant threat in the future. The National Development Planning Agency (Bappenas), in its Strategic Environmental Study (KLHS) of the 2019 National Medium-Term Development Plan (RPJM), even projected that Indonesia could face absolute water scarcity by 2040, where water resources would no longer be sufficient to meet human needs. Additionally, several regions in Indonesia have already experienced water stress conditions, meaning an area's inability to fulfill water demands for both its population and surrounding environment.

In response to these challenges, Jamkrindo is committed to implementing water-use efficiency measures to support water resource sustainability. The company actively educates employees on the importance of prudent water usage and enforces various conservation policies, such as reducing overtime hours to lower water consumption, conducting routine inspections of water installations, and promptly repairing detected leaks. Additionally, as a supplementary measure, water distribution is controlled by shutting off taps after working hours to prevent wastage.

With proper water management policies, Jamkrindo ensures that its operations do not negatively impact the environment and surrounding communities, particularly in terms of pressure on water resources. Given that the water used is sourced from the Regional Drinking Water Company (PDAM), the company ensures that its water consumption does not contribute to increased water scarcity risks in high-water-stress regions. Through these measures, Jamkrindo plays a role in supporting the sustainability of clean water for future generations. [GRI 303-1]

As of December 31, 2023, the volume of water usage at Jamkrindo Head Office was recorded at 12,849 cubic meters (m3), an increase compared to the previous year, which reached 10,376 m3. The increase was influenced by the addition of employees/occupants to the office building resulting in increased water usage. [GRI 303-3] [QJK F.8]

Di sisi lain, pemanfaatan dan pengambilan air oleh Jamkrindo membawa konsekuensi dengan adanya air limbah (effluent) yang perlu dibuang ke badan air sebagai penerima antara lain ke parit/selokan. Untuk pengelolaan air limbah, Gedung Jamkrindo telah dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah yang terletak di lantai B1 dan B2, dan mesin-mesin pengolahan tersebut dikelola dengan perawatan rutin oleh Badan Pengelola Gedung dan kerja sama pihak ketiga dengan menggunakan jasa layanan *Sewage Treatment Plan* (STP). Mesin tersebut berfungsi untuk mengolah air kotor yang dihasilkan oleh gedung Jamkrindo menjadi air dengan kadar racun dan limbah yang layak untuk dibuang di saluran air kotor kota Jakarta. [GRI 303-2]

Per 31 Desember 2024, volume air limbah Gedung Jamkrindo yang dibuang ke badan air tercatat sebanyak 12.988 m³. Berdasarkan volume pengambilan air dan pembuangan air limbah di atas, maka konsumsi air Jamkrindo pada tahun 2024 adalah sebesar sebanyak 12.849 m³, naik dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 10.376 m³. [GRI 303-4, 303-5] [OJK F.13]

Pengelolaan Sampah/Limbah

Limbah domestik perkantoran dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmen untuk menerapkan prinsip operasional kantor yang ramah lingkungan, Jamkrindo terus berupaya mengurangi sampah dan limbah dengan mengadopsi prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, terutama dari kemasan air minum. Sebagai gantinya, Jamkrindo menyediakan air minum isi ulang di lingkungan kantor dan membagikan *tumbler* kepada karyawan sebagai wadah air minum guna mengurangi limbah plastik.

Dalam pengelolaan sampah domestik, Jamkrindo telah menyediakan tempat sampah yang cukup dengan sistem pemisahan berdasarkan jenis sampah, yaitu organik dan non-organik. Untuk memastikan sampah dikelola dengan baik hingga tahap akhir, Perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pengangkutan dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir dengan mengalokasikan biaya tertentu. Kebijakan serupa juga diterapkan dalam pengelolaan limbah sanitasi. Sementara itu, limbah yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti aki bekas, lampu bekas, *cartridge* bekas, dan oli bekas, dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi untuk menangani limbah B3 secara aman dan sesuai regulasi. [OJK F.13, F.14]

Tumpahan yang Signifikan [OJK F.15]

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Jamkrindo tidak memanfaatkan zat kimia atau bahan-bahan lain yang bisa berdampak negatif bagi kesehatan karyawan serta kerusakan lingkungan hidup apabila terjadi tumpahan. Untuk itu, hingga akhir tahun pelaporan, tidak tercatat adanya insiden tumpahan signifikan yang berdampak bagi karyawan, lingkungan maupun masyarakat.

Meanwhile, the utilization and extraction of water by Jamkrindo has resulted in wastewater (effluent) that needs to be discharged to receiving water bodies, such as ditches. For wastewater management, the Jamkrindo Building has been equipped with a wastewater treatment system located on the B1 and B2 floors, and the treatment machines are managed with regular maintenance by the Building Management Agency and third-party cooperation using *Sewage Treatment Plan* (STP) services. The machines treat the dirty water waste from Jamkrindo's building into water with suitable toxins and waste to be discharged into Jakarta's sewerage. [GRI 303-2]

As of December 31, 2024, the volume of wastewater from the Jamkrindo Building discharged into water bodies amounted to 12,988 m³. Based on the volume of water withdrawal and wastewater discharge above, Jamkrindo's water consumption in 2023 was 12,849 m³, an increase compared to the previous year, which reached 10,376 m³. [GRI 303-4, 303-5] [OJK F.13]

Garbage/Waste Management

Office domestic waste can become a source of environmental pollution if not managed properly. Therefore, as part of its commitment to implementing environmentally friendly office operational principles, Jamkrindo continues to strive to reduce waste by adopting the 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) principles. One concrete step taken is minimizing the use of single-use plastics, particularly from drinking water packaging. As an alternative, Jamkrindo provides refillable drinking water stations in the office premises and distributes tumblers to employees as reusable drinking containers to reduce plastic waste.

In the management of domestic waste, Jamkrindo has provided adequate waste bins with a separation system based on waste type, namely organic and non-organic. To ensure proper waste management through to the final stage, the company collaborates with a third party for the transportation and disposal process to the final landfill, allocating a specific budget for this purpose. A similar policy is also applied in the management of sanitary waste. Meanwhile, waste classified as hazardous and toxic materials (B3), such as used batteries, used lamps, used cartridges, and used oil, is managed through cooperation with a licensed third party authorized to handle B3 waste safely and in compliance with regulations. [OJK F.13, F.14]

Significant Spillage [OJK F.15]

In conducting its business operations, Jamkrindo does not utilize chemicals or other materials that could negatively impact employee health or cause environmental damage in the event of a spill. Therefore, as of the end of the reporting year, no recorded incidents of significant spillage affecting employees, the environment, or the community have occurred.

Keanekaragaman Hayati

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit, operasional Jamkrindo tidak berdampak langsung terhadap lingkungan maupun keanekaragaman hayati. Namun, Perusahaan tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Salah satu langkah nyata yang diterapkan adalah dengan memastikan bahwa Jamkrindo tidak membangun atau menempati lokasi operasional di dalam atau di sekitar kawasan konservasi maupun wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Selain itu, sebagai bagian dari komitmennya terhadap keberlanjutan, Jamkrindo mengalokasikan dana untuk mendukung berbagai inisiatif lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satu bentuk konkret dari program ini adalah kegiatan penanaman pohon yang bertujuan untuk meningkatkan tutupan hijau serta mendukung rehabilitasi ekosistem yang terdampak oleh aktivitas manusia. Program ini merupakan bagian dari upaya Jamkrindo dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Informasi lebih lanjut mengenai kontribusi perusahaan dalam aspek lingkungan dapat ditemukan dalam Bab Kinerja Sosial Keberlanjutan dalam laporan ini. [OJK F.9, F.10]

Biaya Lingkungan

Selama tahun 2024, Jamkrindo mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp 788,14 juta, naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp455,36 juta dengan penggunaan sebagai berikut: [OJK F.4]

Tabel Biaya Lingkungan Tahun 2022-2024
Table of Environmental Costs in 2022-2024

Tahun Year	Jumlah Biaya Lingkungan Total Environmental Costs		Pemanfaatan/Penggunaan Utilization/Usage
2024	Rp 788,14 juta IDR788.14 million	1. Biaya <i>Sewage Treatment Plan</i> 2. Biaya <i>Sanitact Ladybin</i> 3. Biaya Perawatan Taman 4. Biaya Pekerjaan <i>Landscape</i> Gedung Jamkrindo	1. Cost of Sewage Treatment Plan 2. Cost of Sanitact Ladybin 3. Cost of Park Maintenance 4. Cost of Landscape Work for the Jamkrindo Building
2023	Rp445,36 juta IDR445.36 million	1. Biaya <i>Sewage Treatment Plant</i> 2. Biaya <i>Sanitact Ladybin</i> 3. Biaya Perawatan Taman	1. Cost of Sewage Treatment Plant 2. Cost of Sanitact Ladybin 3. Cost of Park Maintenance
2022	Rp354,89 juta IDR354.89 million	1. Biaya perawatan taman 2. Biaya <i>Sewage Treatment Plan</i> 3. Pengelolaan Limbah Cair	1. Cost of Park Maintenance 2. Cost of Sewage Treatment Plan 3. Wastewater Management

Kepatuhan Lingkungan

Komitmen Jamkrindo dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik, sekaligus menguatkan daya dukung lingkungan, melalui berbagai program dan kebijakan membawa hasil dengan tidak adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait lingkungan. Dengan demikian, Perseroan tidak mendapat denda moneter maupun sanksi lain akibat pelanggaran terhadap regulasi lingkungan sepanjang tahun 2024. [OJK F.16]

Biodiversity

As a company operating in the credit guarantee sector, Jamkrindo's operations do not have a direct impact on the environment or biodiversity. Nevertheless, the company remains committed to contributing to the preservation of nature and biodiversity. One concrete measure implemented is ensuring that Jamkrindo does not establish or occupy operational sites within or near conservation areas or regions with high biodiversity value.

Furthermore, as part of its sustainability commitment, Jamkrindo allocates funds to support various environmental initiatives through its TJSL Program. A tangible example of this program is tree-planting activities aimed at increasing green cover and supporting the rehabilitation of ecosystems affected by human activities. This initiative is part of Jamkrindo's efforts to maintain ecological balance and support climate change mitigation. Further details regarding the company's environmental contributions can be found in the Sustainable Social Performance chapter of this report. [OJK F.9, F.10]

Environmental Costs

During 2024, Jamkrindo incurred environmental costs of IDR788.14 million, up from IDR455.36 million in 2023, with the following allocations: [OJK F.4]

Environmental Compliance

Jamkrindo's commitment to creating a better environment while strengthening environmental support through various programs and policies has yielded results without non-compliance with environmental regulations. Therefore, the Company did not incur monetary fines or other sanctions due to environmental regulation violations throughout 2024. [OJK F.16]

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE

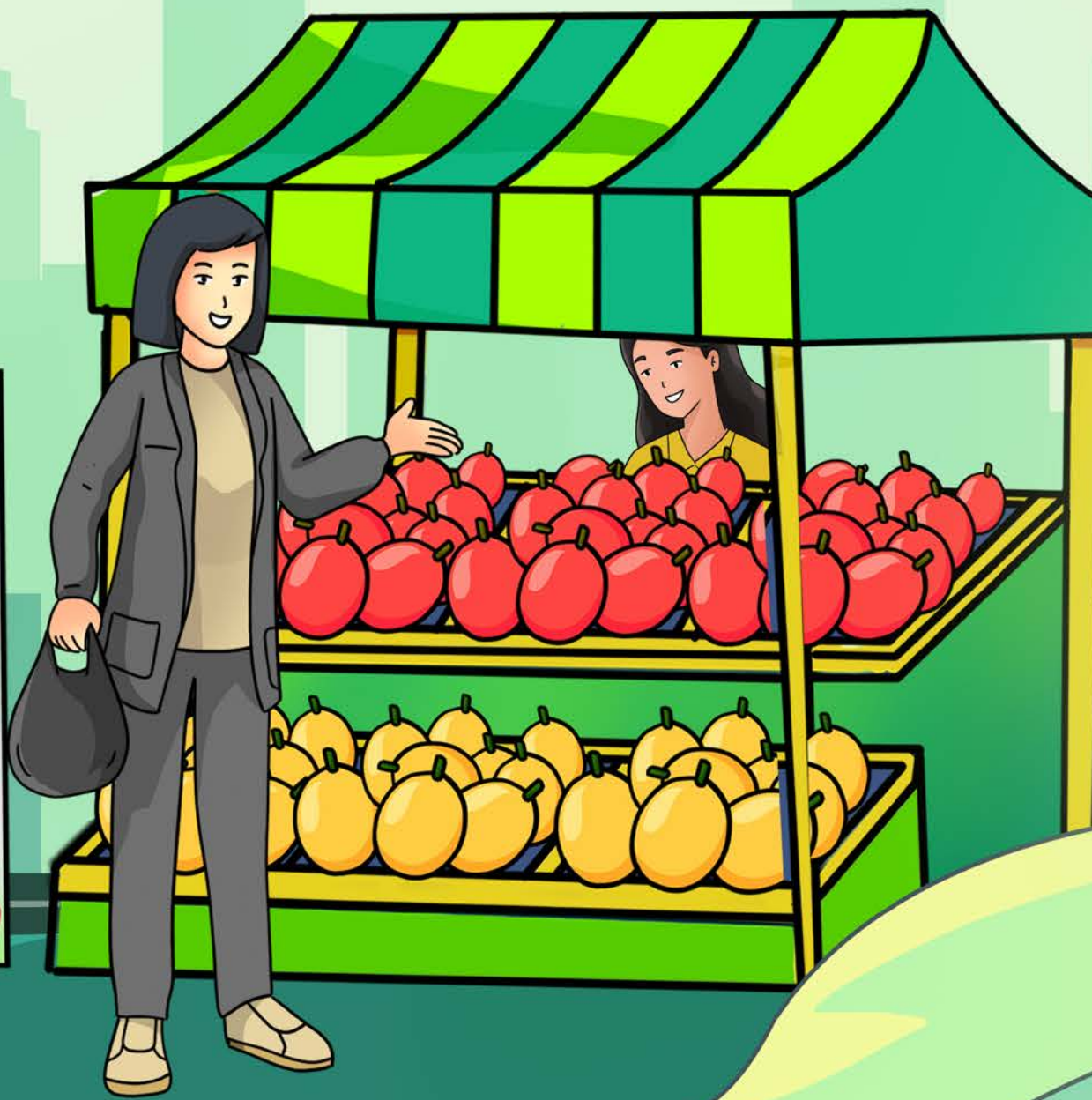


Health Program

**KEBUN
GIZI**

Desa Bajur, Kab. Lombok Barat



KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE



Jamkrindo secara konsisten menerapkan prinsip keberlanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan meyakini bahwa harmoni antara ketiga aspek tersebut merupakan faktor kunci dalam memastikan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dengan pendekatan ini, Jamkrindo tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan bisnis, tetapi juga memastikan keberadaannya membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Dalam aspek sosial, Jamkrindo berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi pemegang saham, karyawan dan manajemen dari berbagai divisi dan tingkatan jabatan. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal terdiri dari pelanggan, pemerintah, DPR, mitra kerja, media massa, serta masyarakat luas, termasuk penerima manfaat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dengan mempertimbangkan keberagaman pemangku kepentingan tersebut, Perusahaan merancang berbagai program sosial yang mencakup Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hak asasi manusia, inovasi produk dan layanan, tanggung jawab terhadap produk/jasa, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai inisiatif sosial.

Jamkrindo consistently implements the principle of sustainability by balancing economic, social, and environmental aspects in the course of its business. The company believes that the harmony among these three pillars is a key factor in ensuring sustainable performance growth year after year. Through this approach, Jamkrindo not only focuses on achieving business profitability, but also ensures that its presence contributes meaningful benefits to society and the surrounding environment.

In the social aspect, Jamkrindo is committed to fulfilling its responsibilities toward various stakeholders, both internal and external. Internal stakeholders include shareholders, employees, and management across different divisions and hierarchical levels. Meanwhile, external stakeholders consist of customers, the government, the House of Representatives (DPR), business partners, mass media and wider society, including beneficiaries of the social and environmental responsibility program (TJSL). Considering the diversity of these stakeholders, the Company designed various social programs encompassing employment, Occupational Health and Safety (OHS), human rights, product and service innovation, responsibility for products/services, and community engagement in various social initiatives.

Jamkrindo meyakini pemenuhan tanggung jawab sosial merupakan strategi efektif untuk membangun hubungan yang kuat dan komunikasi yang positif dengan para pemangku kepentingan. Melalui komunikasi yang baik dan keterlibatan yang tepat, Perusahaan dapat memperkuat posisinya sebagai entitas bisnis yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Komitmen ini juga menjadi modal penting bagi Jamkrindo untuk terus berkembang, mencapai visi dan misinya, serta memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Landasan Kebijakan

Dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, Jamkrindo merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia di antaranya: [GRI 3-3]

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Jamkrindo believes that fulfilling social responsibility is an effective strategy for building strong relationships and positive communication with stakeholders. Through effective communication and appropriate engagement, the Company can strengthen its position as a business entity that generates a positive impact on society. This commitment also serves as a vital asset for Jamkrindo to continue growing, achieving its vision and mission, and making broader contributions to advancing sustainable development.

Policy Foundation

In managing relationships with stakeholders, Jamkrindo refers to various regulations in force in Indonesia, including: [GRI 3-3]

1. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety;
2. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
4. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
5. Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2011 concerning Social Security Agency;
6. Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as a Law;
7. Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2023 concerning Health;
8. Law of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection;
9. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 36 of 2021 concerning Wages;
10. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 7 of 2019 concerning Occupational Diseases;
11. Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.
12. Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector;
13. Financial Services Authority (SEOJK) Circular Letter Number 2/SEOJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services and Resolution by Financial Services Providers.
14. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.07/2020 concerning Provision of Consumer and Public Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority;
15. Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;
16. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;
17. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 3 of 2023 concerning Increasing Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Community;
18. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 12 of 2024 concerning Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions;

19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjaminan, dan Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.

Berdasarkan serangkaian regulasi tersebut, selanjutnya Jamkrindo menyusun berbagai kebijakan internal sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yaitu penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta koperasi (UMKMK), penjaminan bagi bumh, penjaminan sistem resi gudang, dan penjaminan lainnya. Kebijakan tersebut di antaranya berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian dengan berbagai aspeknya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tanggung jawab produk, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset strategis yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan operasional bisnis Jamkrindo. Karyawan yang terlibat adalah individu-individu dengan kompetensi tinggi, yang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Selain itu, komitmen dan loyalitas karyawan menjadi faktor utama dalam mendukung visi dan misi Perusahaan. Jamkrindo percaya bahwa keberadaan SDM berkualitas tidak hanya menopang pencapaian prestasi terbaik, tetapi juga memperkuat posisi Perusahaan di industri penjaminan.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan SDM, Jamkrindo berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan Perusahaan dan harapan karyawan. Di satu sisi, Perusahaan menargetkan kinerja optimal melalui pengembangan kompetensi dan produktivitas karyawan. Di sisi lain, Jamkrindo memberikan perhatian pada kebutuhan karyawan, seperti kesempatan kerja yang setara, remunerasi yang kompetitif, serta jenjang karier yang jelas. Melalui pendekatan ini, Jamkrindo tidak hanya memastikan tercapainya tujuan bisnis tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional setiap individu.

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]

Prinsip kesetaraan atau non-diskriminasi diterapkan Jamkrindo secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kompetensi dan karier, serta pemberian remunerasi. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk bekerja dan menempati posisi atau jabatan yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Per 31 Desember 2024, komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 56,52% laki-laki dan 43,48% perempuan.

Komitmen Jamkrindo terhadap kesetaraan kesempatan kerja selaras dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang

19. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 34 of 2024 concerning Human Resource Quality Development for Insurance Companies, Guarantee Institutions, Pension Funds, and Specialized Institutions in the Fields of Insurance, Guarantee, and Pension Funds.

Based on these regulations, Jamkrindo then developed various internal policies in accordance with the Company's business fields, namely guarantees for micro enterprises, small enterprises, medium enterprises and cooperatives (UMKMK), guarantees for soes, warehouse receipt system guarantees, and other guarantees. Among these policies relate to personnel management with various aspects, occupational health and safety (OHS), product responsibility, as well as social and environmental responsibility (TJSL).

PERSONNEL MANAGEMENT

Human resources (HR) are strategic asset that plays a vital role in supporting the sustainability of Jamkrindo's business operations. The employees involved are highly competent individuals who serve as the frontline in achieving performance targets as outlined in the Company Work Plan and Budget. Additionally, employee commitment and loyalty are key factors in supporting the Company's vision and mission. Jamkrindo believes that the presence of high-quality human resources not only underpins the achievement of the best performance but also strengthens the Company's position in the guarantee industry.

As part of its human resource management strategy, Jamkrindo strives to create a balance between the Company's needs and employee expectations. On one hand, the Company aims for optimal performance through employee competency development and productivity enhancement. On the other hand, Jamkrindo addresses employee needs, such as equal employment opportunities, competitive remuneration, and clear career progression. Through this approach, Jamkrindo not only ensures the achievement of business objectives but also the creation of a work environment that supports each individual's professional growth.

Equal Employment Opportunities [OJK F.18]

The principle of equality or non-discrimination is implemented comprehensively by Jamkrindo, from the recruitment processes, competency and career development, as well as remuneration. The Company provides equal opportunities for all employees to work and occupy positions or roles in accordance with their respective capacities and competencies. As of December 31, 2024, the composition of the Company's permanent employees by gender consisted of 56.52% male and 43.48% female.

Jamkrindo's commitment to equal employment opportunities is in line with Law No. 13 of 2003, Law No. 6 of 2023, Law No. 21 of 1999 concerning Ratification of ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*, Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Komitmen Perusahaan dalam mewujudkan kesetaraan atau non-diskriminasi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk bekerja dan menempati berbagai posisi, termasuk posisi sebagai *top management*, membawa hasil dengan tidak adanya insiden diskriminasi selama tahun pelaporan. Dengan demikian, Jamkrindo tidak perlu melakukan tindakan perbaikan terkait kebijakan kesetaraan atau non-diskriminasi tersebut.

Rekrutmen dan Turnover

Jamkrindo menerapkan sistem rekrutmen yang terbuka dan transparan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat yang memenuhi kualifikasi, tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Proses rekrutmen difokuskan untuk mencari kandidat terbaik yang memiliki kemampuan dan kapasitas sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan Perusahaan.

Sebagai wujud komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, Jamkrindo memberikan kesempatan kepada kandidat yang berdomisili di sekitar wilayah operasional perusahaan (tenaga kerja lokal) untuk bergabung dengan syarat memenuhi kriteria kebutuhan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Metode rekrutmen yang digunakan Jamkrindo meliputi Program Rekrutmen Bersama BUMN FHCI, rekrutmen internal, pengangkatan *outsourcing*/magang, serta rekrutmen eksternal melalui job posting maupun *head hunter*. [GRI 3-3]

Per 31 Desember 2024, Jamkrindo merekrut karyawan baru sebanyak 175 orang, naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 140 orang. Karyawan baru tersebut terdiri dari 101 karyawan tetap dan 74 karyawan tidak tetap/kontrak. Komposisi karyawan baru hasil rekrutmen berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah kerja selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

[GRI 401-1]

National Development, as well as Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia).

The Company's commitment to realizing equality or non-discrimination by providing equal opportunities for employees to work and occupy various positions, including positions as top management, has resulted in no incidents of discrimination during the reporting year. Hence, Jamkrindo does not need to take corrective action regarding the equality or non-discrimination policy.

Recruitment and Turnover

Jamkrindo implements an open and transparent recruitment system, providing equal opportunities to all qualified candidates regardless of ethnicity, religion, race, or other backgrounds. The recruitment process is focused on identifying the best candidates who possess the competencies and competencies aligned with the job specifications required by the Company.

As a manifestation of its commitment to delivering benefits to the surrounding community, Jamkrindo provides opportunities for candidates residing near the company's operational areas (local workforce) to join, provided they meet the established competency standards and required criteria. Jamkrindo's recruitment methods include the State-Owned Enterprises (BUMN) FHCI Joint Recruitment Program, internal recruitment, outsourcing/internship appointments, and external recruitment through job postings or headhunters. [GRI 3-3]

As of December 31, 2024, Jamkrindo recruited a total of 175 of new employees, increased compared to 2023 which reached 140. The new employees consist of 101 Permanent employees and 74 non-permanent/contract employees. The complete composition of new employees recruited based on age, gender and work area is presented in the following table: [GRI 401-1]

Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Usia Tahun 2022-2024
New Employees Composition Based on Age 2022-2024

Kelompok Usia Age Group	2024	2023	2022
<25 Tahun <25 Years old	65	71	163
26-35 Tahun 26-35 Years old	108	65	100
36-45 Tahun 36-45 Years old	0	2	1
46-55 Tahun 46-55 Years old	1	1	3
>56 Tahun >56 Years old	1	1	1
Jumlah Total	175	140	268

Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024

New Employees Composition Based on Gender 2022-2024

Jenis Kelamin Gender	2024	2023	2022
Pria Male	89	64	117
Wanita Female	86	76	151
Jumlah Total	175	140	268

Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024

New Employees Composition Based on Gender 2022-2024

Wilayah Kerja Working Area	2024	2023	2022
Kantor Pusat Headquarters	61	55	85
Kantor di Daerah Regional Office	114	85	183
Jumlah Total	175	140	268

Selain bertambah karena proses rekrutmen, jumlah karyawan Jamkrindo berkurang dengan adanya karyawan yang berhenti atau meninggalkan Perusahaan karena berbagai alasan. Per 31 Desember 2024, terdapat 26 karyawan yang meninggalkan Perusahaan dengan alasan 5 orang pensiun normal, 19 orang mengundurkan diri, dan 2 orang meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, tingkat *turnover* pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,26%, naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,86%.

[GRI 3-3, 401-1]

In addition to increasing number due to the recruitment process, the number of Jamkrindo employees has decreased with employees who quit or left the Company for various reasons. As of December 31, 2024, there were 26 employees who left the Company for the following reason where 5 people retired normally, 19 people resigned, and 2 people passed away. Based on this data, the turnover rate in 2024 was recorded at 2.26% an increase compared to 2023 which reached 1,86%. [GRI 3-3, 401-1]

Penyebab Karyawan Meninggalkan Perusahaan Tahun 2022-2024

Key Factors Contributing to Employee Turnover within the Company for the Period 2022-2024

Penyebab Causes	2024	2023	2022
Pensiun Normal Normal Retirement	5	3	5
Pensiun Dini/Dipercepat Early/Expedited Retirement	0	0	0
Meninggal Dunia Passed Away	2	1	3
Mengundurkan Diri Resigned	19	15	32
Diberhentikan karena Melakukan Pelanggaran Dismissed for Violations	0	1	0
Jumlah Karyawan Tetap yang Keluar Number of Permanent Employees who Leave	0	20	40
Jumlah Karyawan Total Employees	1.150	1.075	1.025
Turnover Karyawan Employees Turnover	2,26%	1,86%	3,90%

Adapun komposisi karyawan yang berhenti atau meninggalkan Jamkrindo berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah kerja disajikan dalam tabel berikut:

The composition of employees who quit or left Jamkrindo by age group, gender and work area is presented in the following table:

Komposisi Karyawan Berhenti/Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Usia Tahun 2022-2024

Composition of Employees Quitting/Leaving the Company by Age for the Period 2022-2024

Kelompok Usia Age Group	2024	2023	2022
<25 Tahun <25 Years old	2	3	7
26-35 Tahun 26-35 Years old	13	8	22
36-45 Tahun 36-45 Years old	6	4	4
46-55 Tahun 46-55 Years old	4	5	7
>56 Tahun >56 Years old	1	0	0
Jumlah Total	26	20	40

Komposisi Karyawan Berhenti/Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022-2024

Composition of Employees Quitting/Leaving the Company by Gender for the Period 2022-2024

Jenis Kelamin Gender	2024	2023	2022
Pria Male	11	14	19
Wanita Female	15	6	21
Jumlah Total	26	20	40

Komposisi Karyawan Berhenti/Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2022-2024

Composition of Employees Quitting/Leaving the Company by Working Area for the Period 2022-2024

Wilayah Kerja	2024	2023	2022
Kantor Pusat Headquarters	12	7	13
Kantor di Daerah Regional Office	14	13	17
Jumlah Total	26	20	40

Berdasarkan hasil kajian dan analisis internal, Jamkrindo telah menetapkan tiga kebijakan untuk menurunkan tingkat *turnover* sekaligus meningkatkan kenyamanan kerja bagi karyawan. Kebijakan tersebut meliputi perbaikan sistem remunerasi karyawan, perhatian terhadap kondisi dan usia karyawan saat melakukan promosi dan mutasi, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua karyawan untuk mengembangkan keterampilan teknis (*hard skill*) dan keterampilan interpersonal (*soft skill*). [GRI 3-3]

Penilaian Karyawan dan Pengembangan Karier

Jamkrindo mengapresiasi seluruh karyawan melalui tinjauan atau penilaian kinerja rutin secara berkala. Penilaian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan dukungan, serta menetapkan target pencapaian yang jelas bagi seluruh karyawan, tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam proses penilaian, perusahaan menggunakan *key performance indicator* (KPI) individu sebagai acuan utama. [GRI 3-3]

Based on the results of internal studies and analysis, Jamkrindo has established three policies to reduce turnover rates, while enhancing work comfort for employees. These policies include improving the employee remuneration system, consideration of employee conditions and age in promotions and transfer decisions, and providing equal opportunities for all employees to develop technical skills (*hard skills*) and interpersonal skills (*soft skills*). [GRI 3-3]

Employee Assessment and Career Development

Jamkrindo appreciates all employees through regular performance reviews or assessments. These assessments aim to create fairness, provide support, and set clear achievement targets for all employees, without distinct of gender. In the assessment process, the company uses individual *key performance indicators* (KPI) as the primary reference. [GRI 3-3]

Hasil penilaian kinerja karyawan menjadi dasar dalam menentukan remunerasi dan pengembangan karier. Karyawan berprestasi akan mendapatkan promosi atau kenaikan posisi, sementara mutasi dan rotasi dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan unit kerja, serta *refreshment* dan *replacement* karyawan. Demosi akan diberlakukan bagi karyawan yang kinerjanya tidak mencapai target KPI yang telah ditetapkan. Hasil penilaian karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 404-3]

Employee performance assessments results serve as the basis for determining remuneration and career development. High-performing employees will receive promotion or increase in position to a higher level, while transfers and rotations are conducted with consideration of competency, departmental needs, and employee refreshment or replacement. Demotions will be applied to employees whose performance fails to meet established KPI targets. The complete employee evaluation results are presented in the following table: [GRI 404-3]

Tabel Penilaian Karyawan dan Jenjang Karier Tahun 2022-2024
Table of Employee Assessment and Career Development for the Period 2022-2024

Tahun Year	Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Peninjauan/Review Number of Employees Receiving Reviews	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier (orang) Assessment Results and Career Development Relevance (person)		
		Promosi Promotion	Rotasi/Mutasi Rotation/Mutation	Demosi Demotion
2024 2024	1.150 (100% dari total karyawan tetap) 1,1150 (100% of total permanent employees)	69	196	0
2023 2023	1.075 (100% dari total karyawan tetap) 1,075 (100% of total permanent employees)	100	174	0
2022 2022	1.025 (100% dari total karyawan tetap) 1,025 (100% of total permanent employees)	106		0

Khusus mengenai promosi karyawan, tabel selengkapnya adalah sebagai berikut:

Specifically regarding employee promotions, the complete table is as follows:

Tabel Promosi Karyawan Tahun 2022-2024
Table of Employee Promotion for the Period 2022-2024

Jabatan Position	2024	2023	2022
Kepala Divisi/Setingkat Head of Division/Equivalent Level	2	3	4
Pemimpin Wilayah/Wakil Pemimpin Wilayah Regional Leader/Deputy Regional Leader	0	7	0
Pemimpin Cabang Tipe A/B/C/D Branch Manager Type A/B/C/D	5	12	9
KaBag Kanpus/Wil/KCK/Cab Tipe A/B Head of Kanpus/Regional/KCK/Subsidiary Type A/B	44	53	49
KaBag Kanca Tipe C/D Head of Kanca Type C/D	18	17	36
Kepala KUP Head of KUP	0	8	8
Jumlah Total	69	100	106

Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status

Berdasarkan statusnya, karyawan Jamkrindo terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan *outsourcer*. Perbedaan status tersebut memengaruhi tunjangan yang diterima oleh karyawan. Rincian tunjangan yang diterima karyawan berdasarkan statusnya ditunjukkan dalam tabel berikut: [GRI 3-3, 401-2]

Employee Benefits Based on Status

Based on their status, Jamkrindo employees are divided into 3 (three) groups, namely permanent employees, contract employees, and outsourced employees. This difference in status affects the benefits received by employees. Details of benefits received by employees based on their status are shown in the following table: [GRI 3-3, 401-2]

Tabel Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status
Table of Employee Benefits by Status

Jenis Tunjangan Allowance Type	Karyawan Tetap Permanent Employees		Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees		Karyawan Outsource Outsourced Employees	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Tunjangan Jabatan Tetap Permanent Position Allowance				✓		✓
Tunjangan Jabatan Tidak Tetap Non-Permanent Position Allowance		✓		✓		✓
Tunjangan Kesejahteraan Welfare Benefits	✓			✓		✓
Tunjangan Wilayah Territory Allowance	✓			✓		✓
Tunjangan Komunikasi Communication Allowance		✓		✓		✓
Tunjangan Transportasi Pelatihan Training Transportation Allowance	✓			✓		✓
Tunjangan Kesehatan Health Allowance	✓			✓		✓

Cuti Melahirkan

Jamkrindo memberikan hak cuti melahirkan kepada karyawan perempuan dan karyawan laki-laki yang istrinya akan melahirkan. Cuti ini bertujuan agar karyawan perempuan dapat mempersiapkan kelahiran dengan baik, sementara karyawan laki-laki dapat mendampingi istri mereka selama proses tersebut. Karyawan perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan, yang terdiri dari 1,5 (satu setengah) bulan sebelum perkiraan waktu melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 82. Sementara itu, karyawan laki-laki yang istrinya hendak melahirkan diberikan cuti selama dua hari. [GRI 3-3]

Per 31 Desember 2024, karyawan perempuan yang memiliki hak cuti melahirkan dan mengambil hak tersebut sebanyak 42 orang atau 100%. Setelah waktu cutinya habis, sebanyak 42 orang atau 100% telah kembali bekerja. Sementara itu, berdasarkan data tahun 2023, dari 42 karyawan wanita yang mengambil cuti melahirkan, kemudian kembali bekerja dan tetap bekerja hingga 12 bulan berikutnya tercatat sebanyak 42. orang atau 100%. Sementara itu, karyawan laki-laki yang memiliki hak mengambil cuti karena istrinya melahirkan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 26 orang atau 100%. Adapun jumlah karyawan laki-laki yang kembali bekerja setelah hak cuti mendampingi istri berakhir pada tahun pelaporan adalah 26 orang atau 100%. Selanjutnya, sesuai data tahun 2023, dari 25 karyawan laki-laki yang mengambil cuti melahirkan, tercatat sebanyak 25 orang atau 100% telah kembali bekerja, dan tetap bekerja hingga 12 bulan berikutnya. [GRI 3-3, 401-3]

Maternity Leave

Jamkrindo provides maternity leave rights for female employees and male employees whose wives are about to give birth. This leave is intended to allow female employees to prepare well for birth, while male employees can support their wives throughout the process. Female employees are entitled to three (3) months of maternity leave, consisting of 1.5 (one and a half) months before the estimated delivery and 1.5 (one and a half) months after giving birth, as such in accordance with Employment Law No. 13 of 2003, Article 82. Meanwhile, male employees whose wives are giving birth are granted two days of paternity leave.

[GRI 3-3]

As of December 31, 2024, female employees who have the right to maternity leave and take this right are 42 individuals or 100%. After the leave was over, a total of 42 individuals or 100% had returned to work. Meanwhile, based on 2023 data, of the 42 female employees who took maternity leave, then returned to work and continued working for the next 12 months, were 42 individuals or 100%. Meanwhile, the number of male employees who exercised their entitlement to paternity leave due to their spouses giving birth in 2024 was recorded at 26 individuals or 100%. The number of male employees who returned to work upon the completion of their paternity leave during the reporting year was recorded at 26 individuals or 100%. Furthermore, according to 2023 data, of the 25 male employees who took paternity leave, it was recorded that 25 individuals or 100% had returned to work, and remained employed for the subsequent 12 months. [GRI 3-3, 401-3]

Tabel Cuti Melahirkan Karyawan Tahun 2022-2024
Table of Employees Maternity Leave 2022-2024

Uraian Description	Perempuan Female					Laki-laki Male				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2024 2024	Tiga bulan Three months	42	42	42	42	2 hari/days	26	26	26	26
2023 2023	Tiga bulan Three months	49	49	49	42	2 hari/days	25	25	25	25
2022 2022	Tiga bulan Three months	42	42	42	42	2 hari/days	25	25	25	25

Keterangan:
Information
1. Durasi cuti (hari)/Duration of leave (days)
2. Jumlah yang berhak cuti/Number of employees entitled to leave
3. Jumlah yang mengambil hak cuti/Number of employees taking leave
4. Jumlah kembali setelah cuti/Number of employees returned to work after leave
5. Jumlah tetap bekerja hingga 12 bulan setelah mengambil cuti/Number of people retained for 12 months following return from leave

Berdasarkan data di atas, karyawan yang mengambil cuti melahirkan, baik perempuan maupun laki-laki, dan kembali bekerja mencapai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Jamkrindo merupakan tempat kerja yang nyaman.

Hubungan Ketenagakerjaan

Jamkrindo mengkomunikasikan setiap perubahan signifikan dalam struktur organisasi dan operasional kepada karyawan melalui berbagai saluran, termasuk surat elektronik, surat edaran, papan pengumuman, dan sosialisasi langsung. Mekanisme penyampaian informasi yang berdampak bagi karyawan diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yaitu minimal 30 hari sebelum perubahan tersebut berlaku. Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan signifikan dalam kegiatan proses bisnis yang berdampak pada perubahan pola pekerjaan di lapangan. [GRI 402-1]

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan merupakan prioritas utama bagi Jamkrindo dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan secara berkala menyelenggarakan program pengembangan kompetensi karyawan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Program-program tersebut diselenggarakan berlandaskan prinsip kesetaraan, terbuka bagi seluruh karyawan tanpa membedakan jenis kelamin. Selama tahun 2024, Perusahaan telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 270 kali, yang diikuti oleh 7.766 karyawan. Jenis pengembangan kompetensi karyawan terdiri dari *hard skill* maupun *soft skill*. Rekapitulasi pengembangan karyawan selama tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut: [GRI 3-3, 404-2]

Based on the data above, employees who took maternity leave, both female and male, and returned to work reached 100%. This indicates that Jamkrindo is a comfortable workplace.

Employment Relations

Jamkrindo communicates every significant change in its organizational and operational structure to employees through various channels, including electronic mail, circulars, bulletin boards, and direct outreach. The mechanism for delivering information that impacts employees is regulated in the collective labor agreement (PKB), which stipulates that such information must be communicated at least 30 days before the changes take effect. In 2024, there were no significant changes in business processes that impacted work patterns in the field. [GRI 402-1]

Employee Competency Development

Increasing employee capacity and competency is a key priority for Jamkrindo in realizing a sustainable business. Therefore, the Company periodically organizes employee competency development programs through various education and training initiatives. These programs are based on the principle of equality, being open to all employees regardless of gender. Throughout 2024, the Company has conducted 270 education and training sessions, attended by 7,766 employees. The types of employee competency development include both hard skills and soft skills. A recapitulation of employee development during 2024 is presented in the following table: [GRI 3-3, 404-2]

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants		From From		To To	Penyelenggara Organizer
1	Program Pelatihan Business Acumen and Innovation Business Acumen and Innovation Training Program	1	15 Oct 24	October 15, 2024	16 Oct 24	October 16, 2024	IFG Corporate University
2	Ambidextrous Leadership (Shaping a Future With Effective and Sustainable Growth)	5	16 Oct 24	October 16, 2024	17 Oct 24	October 17, 2024	Kubik Leadership
3	Indonesia Human Capital Beyond Summit 2024	6	13 Nov 24	November 13, 2024	15 Nov 24	November 15, 2024	IHCBS
4	Program LEAD-2 - Group Coaching 1 LEAD-2 Program - Group Coaching 1	2	12 Sep 24	September 12, 2024	12 Sep 24	September 12, 2024	IFG Corporate University
5	Program LEAD-2 - Group Coaching 2 LEAD-2 Program - Group Coaching 2	2	2 Oct 24	October 02, 2024	2 Oct 24	October 02, 2024	IFG Corporate University
6	Program LEAD-2 - Phase 1A: Kesamaptaan dan Bintalsik LEAD-2 Program - Phase 1A: Fitness and Mental and Attitude Development	2	29 Jul 24	July 29, 2024	2 Aug 24	August 02, 2024	IFG Corporate University
7	Program LEAD-2 - Phase 1B: Personal Leadership Journey LEAD-2 Program - Phase 1B: Personal Leadership Journey	2	9 Aug 24	August 09, 2024	10 Aug 24	August 10, 2024	IFG Corporate University
8	Program LEAD-2 - Phase 1C: Social Culture Program LEAD-2 Program - Phase 1C: Social Culture Program	2	14 Aug 24	August 14, 2024	14 Aug 24	August 14, 2024	IFG Corporate University
9	Program LEAD-2 - Phase 3 LEAD-2 Program - Phase 3	2	18 Oct 24	October 18, 2024	19 Oct 24	October 19, 2024	IFG Corporate University
10	Program LEAD-2 - Phase 3 : Group Coaching 3 LEAD-2 Program - Phase 3: Group Coaching 3	2	18 Oct 24	October 18, 2024	6 Nov 24	November 06, 2024	IFG Corporate University
11	Program LEAD-2 - Phase 4 LEAD-2 Program - Phase 4	2	22 Nov 24	November 22, 2024	23 Nov 24	November 23, 2024	IFG Corporate University
12	Program LEAD-3 Phase 3 LEAD-3 Program Phase 3	2	25 Oct 24	October 25, 2024	26 Oct 24	October 26, 2024	IFG Corporate University
13	Program LEAD-3 sesi Pitstop 2 LEAD-3 program Pitstop 2 session	1	7 Nov 24	November 07, 2024	7 Nov 24	November 07, 2024	Daya Dimensi Indonesia
14	1000 Manusia Bercerita dan BUMN Fun Run 1000 People Tell Their Stories and SOE Fun Run	3	19 Jul 24	July 19, 2024	20 Jul 24	July 20, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
15	7th Indonesian Actuaries Summit 2024	1	20 Aug 24	August 20, 2024	22 Aug 24	August 22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Indonesian Actuarial Association (PAI)
16	Ai4 - The Forefront of Artificial Intelligence Innovation	2	12 Aug 24	August 12, 2024	14 Aug 24	August 14, 2024	Fora Group
17	APAC Regional Experience at Knowledge 2024	1	20 May 24	May 20, 2024	30 May 24	May 30, 2024	Servicenow
18	Asian Actuarial Conference 2024 - Exploring the Future of Insurance and Beyond: Innovation, International Hubs and Hong Kong	1	22 Oct 24	October 22, 2024	25 Oct 24	October 25, 2024	Asian Actuarial Conference 2024
19	Awareness & Requirement Training Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001 : 2016 PT Jamkrindo Tahun 2024 Awareness & Requirement Training SMAP Certification SNI ISO 37001: 2016 PT Jamkrindo of 2024	95	21 Mar 24	March 21, 2024	21 Mar 24	March 21, 2024	Cevral Consulting
20	Bakti Diaspora untuk Indonesia Tahun 2024 Diaspora Devotion for Indonesia in 2024	1	9 Jun 24	June 09, 2024	14 Jun 24	June 14, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
21	Batch 1 - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Batch 1 - Level 4 Risk Management Certification Debriefing	19	24 Aug 24	August 24, 2024	31 Aug 24	August 31, 2024	EfektifPro
22	Batch 2 - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Batch 2 - Level 4 Risk Management Certification Debriefing	13	7 Sep 24	September 07, 2024	14 Sep 24	September 14, 2024	EfektifPro
23	Benchmarking Visit Program SESPIBANK Angkatan 79 Benchmarking Visit of SESPIBANK Program Batch 79	1	24 Oct 24	October 24, 2024	2 Nov 24	November 02, 2024	LPPI
24	Branch Manager Development Program (BMDP) - Graduation Prgoram Igniting Future Visionaries	25	30 May 24	May 30, 2024	30 May 24	May 30, 2024	Duage Manajemen
25	Branch Manager Development Program (BMDP) - Project Presentation	25	10 Jan 24	January 10, 2024	26 Feb 24	February 26, 2024	PPM Manajemen
26	BUMN Muda Leadership Day Leading Through Turbulence Strategies for Success in Crisis	1	26 Apr 24	April 26, 2024	26 Apr 24	April 26, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
27	Business Essential Batch III - Innovation & Digital Disruption	1	3 Oct 24	October 03, 2024	3 Oct 24	October 03, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
28	Business Essential Batch III - Managing Organization Transformation	2	3 Oct 24	October 03, 2024	3 Oct 24	October 03, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
29	Business Essential Batch III - Strategic Management	1	3 Oct 24	October 03, 2024	3 Oct 24	October 03, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
30	Certification In Audit Committee Practices (CACP) 2024	1	23 Jan 24	January 23, 2024	29 Jan 24	January 29, 2024	Ikatan Komite Audit (IKAI) Audit Committee Association (IKAI)
31	Certified Corporate Learning Technologist : Modul 1 Certified Corporate Learning Technologist: Module 1	2	6 Mar 24	March 06, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	Wahana Tatar Wirakelola
32	Certified Corporate Learning Technologist : Modul 2 Certified Corporate Learning Technologist: Module 2	2	24 Apr 24	April 24, 2024	26 Apr 24	April 26, 2024	Wahana Tatar Wirakelola
33	Certified Corporate Learning Technologist : Modul 3 Certified Corporate Learning Technologist: Module 3	2	27 Jun 24	June 27, 2024	28 Jun 24	June 28, 2024	Wahana Tatar Wirakelola
34	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	1	18 Nov 24	November 18, 2024	30 Nov 24	November 30, 2024	YPIA
35	CHRO Masterclass Innovation Workplace : Work Less Produce More	2	18 Jan 24	January 18, 2024	18 Jan 24	January 18, 2024	BUMN School of Excellence
36	COSO-2013 Internal Control Framework (COSO)	3	1 Feb 24	February 01, 2024	2 Feb 24	February 02, 2024	YPIA
37	CRMO (Certified Risk Management Officer)	3	27 May 24	May 27, 2024	6 Jun 24	June 06, 2024	PT Jasindo Bangun Insani
38	CSR Leader Bootcamp 2024 Smart Village 4.0 Platform	3	12 Dec 24	December 12, 2024	14 Dec 24	December 14, 2024	Sentul Innovation Centre

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants		From From		To To	Penyelenggara Organizer	
39	CTO Masterclass Modern AI - How Can Indonesia Compete with Leveraging AI?	1		29 May 24	May 29, 2024	29 May 24	May 29, 2024	BUMN School of Excellence
40	Data for Executive Decision Making	1		12 Sep 24	September 12, 2024	13 Sep 24	September 13, 2024	UQ Executive Education
41	Digitalization & Strategies for Dealing with Cybercrime Threats In Financial Sector	6		22 Oct 24	October 22, 2024	22 Oct 24	October 22, 2024	The Finance
42	Emerging Tech Meetup : Machine Learning-Powered Predictive Maintenance for Industrial Equipment	2		12 Jun 24	June 12, 2024	12 Jun 24	June 12, 2024	Fordigi BUMN dan SISI Fordigi BUMN and SISI
43	Employee & Industrial Relations Conference 2024	1		19 Sep 24	September 19, 2024	20 Sep 24	September 20, 2024	FHCI
44	End User Training Implementasi ERP Oracle EBS (JStream) Batch 1 End User Training Oracle EBS ERP Implementation (JStream) Batch 1	54		10 Sep 24	September 10, 2024	14 Sep 24	September 14, 2024	PT Jamkrindo
45	End User Training Implementasi ERP Oracle EBS (JStream) Batch 2 End User Training Oracle EBS ERP Implementation (JStream) Batch 2	37		17 Sep 24	September 17, 2024	21 Sep 24	September 21, 2024	PT Jamkrindo
46	End User Training Implementasi ERP Oracle EBS (JStream) Batch 3 End User Training Oracle EBS ERP Implementation (JStream) Batch 3	43		24 Sep 24	September 24, 2024	28 Sep 24	September 28, 2024	PT Jamkrindo
47	ERM Fundamental with (ERMAP Certification)	3		9 Dec 24	December 09, 2024	9 Dec 24	December 09, 2024	CRMS
48	EUT Jamkrindo Guarantee System (JaGuarS) Suretyship Batch 1	93		16 Dec 24	December 16, 2024	17 Dec 24	December 17, 2024	Jamkrindo
49	Excel For Data Analysis level Basic	15		18 Oct 24	October 18, 2024	16 Dec 24	December 16, 2024	Edspert For Corporation
50	Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)	21		13 Sep 24	September 13, 2024	13 Sep 24	September 13, 2024	LPPI
51	Executive Risk Management Refresher Program Batch 5 ESG & Business Sustainability	1		23 Feb 24	February 23, 2024	3 Mar 24	March 03, 2024	LPPI
52	Expansive Leadership Program	6		5 Sep 24	September 05, 2024	6 Sep 24	September 06, 2024	CLDI MSE
53	Final Pitching dan Awarding J-Neration 2023	15		27 Mar 24	March 27, 2024	28 Mar 24	March 28, 2024	PT Telekomunikasi Indonesia
54	Final Presentation - First Line Leader Development Program	19		26 Aug 24	August 26, 2024	26 Aug 24	August 26, 2024	PT Jamkrindo
55	Final Presentation Middle Manager Development Program (MMDP)	25		15 Jan 24	January 15, 2024	15 Jan 24	January 15, 2024	PT Jamkrindo
56	Focus Group Discussion AKHLAK Culture Journey 2023	9		23 Apr 24	April 23, 2024	23 Apr 24	April 23, 2024	Jamkrindo
57	Focus Group Discussion dan Halal Bihalal Harmonisasi Dana Pensiun Focus Group Discussion and Halal Bihalal Harmonization of Pension Funds	1		16 May 24	May 16, 2024	16 May 24	May 16, 2024	AKKAI
58	Global Executive CWM & CPD Program 2024	1		18 Jul 24	July 18, 2024	20 Jul 24	July 20, 2024	CWMA
59	Global Internal Audit Standards With Local Perspectives : A Deep Dive Into Internal Audit Practices	31		3 Feb 24	February 03, 2024	3 Feb 24	February 03, 2024	YPIA
60	GRC World Forums #RISK London	2		9 Oct 24	October 09, 2024	10 Oct 24	October 10, 2024	GRC World Forums
61	Grup Coaching - First Line Leader Development Program	19		2 Aug 24	August 02, 2024	16 Aug 24	August 16, 2024	PT Jamkrindo
62	Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 4	29		7 Nov 24	November 07, 2024	8 Nov 24	November 08, 2024	LPPI
63	Hands-on Training Nginx CDT	5		8 Mar 24	March 08, 2024	9 Mar 24	March 09, 2024	Central Data Technology
64	HR Business Partner	3		18 Sep 24	September 18, 2024	19 Sep 24	September 19, 2024	PPM Manajemen
65	In House Training Corporate Secretary IFG Corporate University	2		20 Jun 24	June 20, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	IFG Corporate University
66	Indonesian Actuarial Conference 2024	2		20 Nov 24	November 20, 2024	20 Nov 24	November 20, 2024	PAI
67	Infobank Leadership Mastery Class Series The Art of Execution	1		5 Mar 24	March 05, 2024	5 Mar 24	March 05, 2024	Infobank
68	Internal Auditing for Beginners	2		28 Aug 24	August 28, 2024	30 Aug 24	August 30, 2024	YPIA
69	International Benchmarking and Master Class on ESGRC	2		22 Sep 24	September 22, 2024	29 Sep 24	September 29, 2024	CRMS
70	J-Neration 2023 Workshop How Create Pitch Deck & Powerful Pitching	15		9 Jan 24	January 09, 2024	9 Jan 24	January 09, 2024	PT Jamkrindo
71	Jamtizen-Beraksi: Live In Social Project - Desa Osing Kemiren Jamtizen- in Action: Live In Social Project - Osing Kemiren Village	25		12 Aug 24	August 12, 2024	12 Aug 24	August 12, 2024	Maxima
72	Jamtizen-Beraksi: Workshop Design Thinking Jamtizen- in Action: Design Thinking Workshop	25		12 Aug 24	August 12, 2024	12 Aug 24	August 12, 2024	Maxima
73	Joint Regional Seminar 2024 - Opportunities and Risks for Asian Actuaries	3		28 May 24	May 28, 2024	5 Jun 24	June 05, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
74	JURNAL : "Mid-Year Momentum : Boost Your Performance to Achieve Excellence" JOURNAL: "Mid-Year Momentum: Boost Your Performance to Achieve Excellence"	409		4 Jul 24	July 04, 2024	4 Jul 24	July 04, 2024	PT Jamkrindo

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	From From	To To	Penyelenggara Organizer		
75	JURNAL: "Refreshment Analisa Kredit" Part 1 JOURNAL: "Credit Analysis Refreshment" Part 1	409	11 Sep 24	September 11, 2024	11 Sep 24	September 11, 2024	PT Jamkrindo
76	JURNAL: "Refreshment Analisa Kredit" Part 2 JOURNAL: "Credit Analysis Refreshment" Part 2	117	18 Sep 24	September 18, 2024	18 Sep 24	September 18, 2024	PT Jamkrindo
77	Key User Training Implementasi ERP Oracle EBS Key User Training for Oracle EBS ERP Implementation	40	15 Jul 24	July 15, 2024	26 Jul 24	July 26, 2024	PT Jamkrindo
78	Kick Off Meeting Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001 : 2016 PT Jamkrindo Tahun 2024 Kick Off Meeting SMAP Certification SNI ISO 37001: 2016 PT Jamkrindo of 2024	77	21 Mar 24	March 21, 2024	21 Mar 24	March 21, 2024	Cevral Consulting
79	Kick Off Program Jamkrindo Empowered Women for Excellence (JEWEL)	21	4 Oct 24	October 04, 2024	4 Oct 24	October 04, 2024	AMBIZ
80	Kindness to Progress 2024 - Design Thinking Workshop	4	17 Jun 24	June 17, 2024	18 Jun 24	June 18, 2024	IFG Corporate University
81	Kindness to Progress 2024 - Live In Desa Lembang	4	6 Aug 24	August 06, 2024	9 Aug 24	August 09, 2024	IFG Corporate University
82	KRISTAL Inspiration II - Mentoring Capture & Create Video	28	27 Jun 24	June 27, 2024	27 Jun 24	June 27, 2024	Inspigo
83	KRISTAL Inspiration II - Workshop Capture & Create	28	25 Jun 24	June 25, 2024	25 Jun 24	June 25, 2024	Inspigo
84	Launching Buku Saku dan Apresiasi Kinerja Terbaik bagi RM Handbook Launching and Best Performance Appreciation for RMs	23	20 Sep 24	September 20, 2024	20 Sep 24	September 20, 2024	PT Jamkrindo
85	LEAD-1 Batch 2 Phase 3	1	8 Mar 24	March 08, 2024	9 Mar 24	March 09, 2024	IFG Corporate University
86	Leader SPARK (Sharing Perspectives and Resources for Key Insight)	696	22 Oct 24	October 22, 2024	22 Oct 24	October 22, 2024	LPPI
87	Leaders Spark Series 2 : Core Values for Business Continuity and Accelerated Performance	140	26 Nov 24	November 26, 2024	26 Nov 24	November 26, 2024	LPPI
88	Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Batch 2 Phase 1C – Sesi 1: Design Thinking	1	10 Jan 24	January 10, 2024	10 Jan 24	January 10, 2024	IFG Corporate University
89	Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Batch 2 Phase 1C – Sesi 2: Live in and Social Project	1	18 Jan 24	January 18, 2024	21 Jan 24	January 21, 2024	IFG Corporate University
90	Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Batch 2 Phase 2	1	1 Feb 23	February 01, 2023	3 Feb 23	February 03, 2023	IFG Corporate University
91	Leadership Mastery Class - The Art of Execution By Elia Massa Manik	1	5 Mar 24	March 05, 2024	5 Mar 24	March 05, 2024	Info Bank
92	Learning Design & Development	4	21 May 24	May 21, 2024	22 May 24	May 22, 2024	KelasHR
93	Master Class - Resilient Leadership	3	4 Dec 24	December 04, 2024	4 Dec 24	December 04, 2024	CRMS
94	Materi Persiapan untuk Sertifikasi Tableau Preparation Materials for Tableau Certification	5	6 Mar 24	March 06, 2024	6 Mar 24	March 06, 2024	Metrodata
95	Onboarding Directorship Program Angkatan 7 Tahun 2024 Onboarding Directorship Program Batch 7 of 2024	1	12 Jan 24	January 12, 2024	14 Jan 24	January 14, 2024	BUMN school of excellence
96	Onboarding Induction Fundamentals Batch 2 Tahun 2024 Onboarding Induction Fundamentals Batch 2 of 2024	29	17 Jul 24	July 17, 2024	27 Jul 24	July 27, 2024	PT Jamkrindo dan Smartperonality PT Jamkrindo and Smartperonality
97	Onboarding Induction Fundamentals Bela Negara Batch 2 Tahun 2024 Onboarding Induction Fundamentals Batch 2 of 2024	44	17 Jul 24	July 17, 2024	19 Jul 24	July 19, 2024	Yayasan Raksa Bhumi Samudera Raksa Bhumi Samudera Foundation
98	Onboarding Induction Fundamentals: Professional Communication at Work - Mentoring 1	26	12 Jun 24	June 12, 2024	12 Jun 24	June 12, 2024	Jamkrindo
99	Onboarding Induction Fundamentals: Professional Communication at Work - Mentoring 2	23	21 Jun 24	June 21, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	Jamkrindo
100	Onboarding Induction Fundamentals: Professional Communication at Work - Mentoring 3	19	28 Jun 24	June 28, 2024	28 Jun 24	June 28, 2024	Jamkrindo
101	Panel Discussion on Credit Insurance after POJK 20/2023	1	6 Mar 24	March 06, 2024	6 Mar 24	March 06, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
102	Pelatihan Aktuaria (Training ASAI A10 Matematika Keuangan) Actuarial Training (ASAI A10 Financial Mathematics Training)	2	13 May 24	May 13, 2024	12 Jun 24	June 12, 2024	MIB & REKAN Konsultan Aktuaria
103	Pelatihan Aktuaria (Training ASAI A20 Probabilitas dan Statistika) Actuarial Training (ASAI A10 Financial Mathematics Training)	1	13 May 24	May 13, 2024	12 Jun 24	June 12, 2024	MIB & REKAN Konsultan Aktuaria
104	Pelatihan Awareness Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 1 Personal Data Protection Law Awareness Training 1	34	22 Aug 24	August 22, 2024	22 Aug 24	August 22, 2024	PT Jamkrindo
105	Pelatihan Awareness Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2 Personal Data Protection Law Awareness Training 2	1	23 Aug 24	August 23, 2024	23 Aug 24	August 23, 2024	PT Jamkrindo
106	Pelatihan Business Analyst IT IT Business Analyst Training	4	3 Dec 24	December 03, 2024	6 Dec 24	December 06, 2024	IFG Corporate University
107	Pelatihan Communication & Negotiation Communication & Negotiation Training	7	28 Nov 24	November 28, 2024	2 Nov 24	November 02, 2024	IFG Corporate University
108	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 2 Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 2 Training and Certification	2	27 May 24	May 27, 2024	30 May 24	May 30, 2024	IFG Corporate University
109	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 3 Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 3 Training and Certification	1	3 Jun 24	June 03, 2024	6 Jun 24	June 06, 2024	IFG Corporate University
110	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 3 Training and Certification	2	27 Feb 24	February 27, 2024	1 Mar 24	March 01, 2024	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants		From From		To To	Penyelenggara Organizer
111	Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Banking Law Consultant Training and Certification	1	31 Jul 24	July 31, 2024	3 Aug 24	August 03, 2024	Justitia Training Center
112	Pelatihan Data Science dan Data Analytics Data Science and Data Analytics Training	2	23 Jul 24	July 23, 2024	24 Jul 24	July 24, 2024	IFG Corporate University
113	Pelatihan Digitalisasi Proses Klaim Claims Process Digitalization Training	63	31 Jan 24	January 31, 2024	2 Feb 24	February 02, 2024	PT Jamkrindo
114	Pelatihan Functional Automation Testing using Katalon (customized) Training on Functional Automation Testing using Katalon (customized)	4	26 Jul 24	July 26, 2024	27 Jul 24	July 27, 2024	I3 (Inovasi Informatika Indonesia)
115	Pelatihan Fundamental IT Audit Fundamental IT Audit Training	4	21 Oct 24	October 21, 2024	22 Oct 24	October 22, 2024	YPIA
116	Pelatihan Human Resource Business Partner Human Resource Business Partner Training	3	18 Sep 24	September 18, 2024	19 Sep 24	September 19, 2024	PPM Management
117	Pelatihan Implementasi ITSM Tools Incident Management & Sharing awareness keamanan informasi 1 ITSM Tools Incident Management Implementation Training & Information Security Awareness Sharing 1	67	5 Aug 24	August 05, 2024	6 Aug 24	August 06, 2024	PT Jamkrindo
118	Pelatihan Implementasi ITSM Tools Incident Management & Sharing awareness keamanan informasi 2 ITSM Tools Incident Management Implementation Training & Information Security Awareness Sharing 2	6	6 Aug 24	August 06, 2024	7 Aug 24	August 07, 2024	PT Jamkrindo
119	Pelatihan Life Cycle Assessment (LCA) and Carbon Reduction Strategy Life Cycle Assessment (LCA) and Carbon Reduction Strategy Training	9	25 Jul 24	July 25, 2024	26 Jul 24	July 26, 2024	LSPMR
120	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Bela Negara Batch 1 Onboarding Induction Fundamentals Training - State Defense Batch 1	29	29 May 24	May 29, 2024	31 May 24	May 31, 2024	Yayasan Raksa Bhumi Samudra Raksa Bhumi Samudera Foundation
121	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Core Business Competency Onboarding Induction Fundamentals - Core Business Competency Training	28	3 Jun 24	June 03, 2024	5 Jun 24	June 05, 2024	PT Jamkrindo
122	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Professional Communication at Work Onboarding Induction Fundamentals Training - Professional Communication at Work	29	6 Jun 24	June 06, 2024	8 Jun 24	June 08, 2024	PT Jamkrindo bersama smartpersonality
123	Pelatihan Pengelolaan Protokol Perusahaan Corporate Protocol Management Training	2	29 Aug 24	August 29, 2024	30 Aug 24	August 30, 2024	IFG Corporate University
124	Pelatihan Pengelolaan Subrogasi Subrogation Management Training	6	3 Sep 24	September 03, 2024	3 Sep 24	September 03, 2024	IFG Corporate University
125	Pelatihan Penilai Risk Maturity Index Risk Maturity Index Assessor Training	4	8 Mar 24	March 08, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
126	Pelatihan Professional Communication at Work Risk Maturity Index Assessor Training	3	25 Jul 24	July 25, 2024	27 Jul 24	July 27, 2024	smartpersonality
127	Pelatihan Standards & Code of Ethics for Professional Internal Audit (SACEP) Standards & Code of Ethics for Professional Internal Audit (SACEP) Training	1	18 Apr 24	April 18, 2024	19 Apr 24	April 19, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Raksa Bhumi Samudera Foundation
128	Pelatihan Strategi Pengelolaan Produk Suretyship Suretyship Product Management Strategy Training	3	22 Aug 24	August 22, 2024	22 Aug 24	August 22, 2024	IFG Corporate University
129	Pelatihan Talent Big Data Platforms Big Data Platforms Talent Training	26	29 Jul 24	July 29, 2024	30 Jul 24	July 30, 2024	Artha Solutions
130	Peluang dan tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital Opportunities and challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	24	6 Jun 24	June 06, 2024	6 Jun 24	June 06, 2024	OJK
131	Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restruturisasi Kredit Credit Growth Opportunities Following the End of Credit Restructuring Policies	22	22 May 24	May 22, 2024	22 May 24	May 22, 2024	OJK
132	Pemahaman ESG (Environment, Social, Govenance) Understanding of ESG (Environment, Social, Governance)	5	2 Dec 24	December 02, 2024	4 Dec 24	December 04, 2024	IFG Corporate University
133	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Debriefing and Level 4 Risk Management Certification Exam	1	10 Jul 24	July 10, 2024	11 Jul 24	July 11, 2024	EfektifPro
134	Pembekalan Sertifikasi Kemenaker Ahli K3 Umum Debriefing of Ministry of Manpower Certification for General OHS Experts	4	4 Nov 24	November 04, 2024	16 Nov 24	November 16, 2024	3S Learning Center
135	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification Debriefing	7	13 May 24	May 13, 2024	14 May 24	May 14, 2024	efektifPro
136	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification Debriefing	4	14 Oct 24	October 14, 2024	15 Oct 24	October 15, 2024	EfektifPro
137	Pembekalan Sertifikasi Skema Analis Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Certification Debriefing of Quality Assurance Analyst Scheme Batch 1 of 2024	21	2 May 24	May 02, 2024	3 May 24	May 03, 2024	PT Bintang Cahaya Gempita
138	Pembekalan Sertifikasi Skema Analis Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Certification Debriefing of Quality Assurance Analyst Scheme Batch 2 of 2024	30	12 Aug 24	August 12, 2024	13 Aug 24	August 13, 2024	PT Bintang Cahaya Gempita
139	Pembekalan Sertifikasi Skema Analis Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Certification Debriefing of Assurance Analyst Scheme Batch 1 of 2024	25	20 May 24	May 20, 2024	21 May 24	May 21, 2024	Bintang Cahaya Gempita

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants		From From		To To	Penyelenggara Organizer
140	Pembekalan Sertifikasi Skema Analis Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Certification Debriefing of Assurance Analyst Scheme Batch 2 of 2024	48	3 Jun 24	June 03, 2024	4 Jun 24	June 04, 2024	Bintang Cahaya Gempita
141	Pengelolaan Reputasi dan Optimalisasi Branding perusahaan Reputation Management and Optimization of Company Branding	20	6 Mar 24	March 06, 2024	6 Mar 24	March 06, 2024	PT Jamkrindo
142	Penguatan Product Knowledge Suretyship Strengthening Suretyship Product Knowledge	28	19 Jan 24	January 19, 2024	19 Jan 24	January 19, 2024	PT Jamkrindo
143	PensionWell : Preparing for Life Beyond Work - Batch I	25	17 Jul 24	July 17, 2024	20 Jul 24	July 20, 2024	Yutha Edukasi Solusindo
144	Phase 3 - Sesi 2 : Live In and Social Project (FEMALE)	4	29 Feb 24	February 29, 2024	3 Mar 24	March 03, 2024	IFG Corporate University
145	Phase 4: Group Coaching 4	2	5 Dec 24	December 05, 2024	5 Dec 24	December 05, 2024	IFG Corporate University
146	Praktik Underwriting Asuransi Umum General Insurance Underwriting Practices	5	20 May 24	May 20, 2024	21 May 24	May 21, 2024	IFG Corporate University
147	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 2 General Insurance Underwriting Practices Batch 2	1	20 Jun 24	June 20, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	IFG Corporate University
148	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 3 General Insurance Underwriting Practices Batch 3	1	20 Jun 24	June 20, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	IFG Corporate University
149	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 4 General Insurance Underwriting Practices Batch 4	1	20 Jun 24	June 20, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	IFG Corporate University
150	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 5 General Insurance Underwriting Practices Batch 5	1	20 Jun 24	June 20, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	IFG Corporate University
151	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 6 General Insurance Underwriting Practices Batch 6	1	20 Jun 24	June 20, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	IFG Corporate University
152	Professional Recognition Program (PRP) for Qualified Government Internal Auditor (QGI/A)	1	15 Nov 24	November 15, 2024	16 Nov 24	November 16, 2024	YPIA
153	Program Business Essential Batch II Business Essential Batch II Program	1	4 Sep 24	September 04, 2024	5 Sep 24	September 05, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
154	Program Business Essential Batch IV Tahun 2024 Business Essential Program Batch IV of 2024	3	29 Nov 24	November 29, 2024	29 Nov 24	November 29, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
155	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment Program for Top Level Management	20	26 Jul 24	July 26, 2024	26 Jul 24	July 26, 2024	LPPI
156	Program Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 1 Guardian Mastery Program: RM Skill Builder Batch 1	29	18 Sep 24	September 18, 2024	19 Sep 24	September 19, 2024	PT Jamkrindo
157	Program Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 2 Guardian Mastery Program: RM Skill Builder Batch 2	27	10 Oct 24	October 10, 2024	11 Oct 24	October 11, 2024	LPPI
158	Program Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 3 Guardian Mastery Program: RM Skill Builder Batch 3	31	17 Oct 24	October 17, 2024	18 Oct 24	October 18, 2024	LPPI
159	Program Inklusif dan Berdaya Bersama Pelaku UMKM Pariwisata di Labuan Bajo Inclusive and Empowering Program with Tourism MSME Players in Labuan Bajo	1	9 Sep 24	September 09, 2024	13 Sep 24	September 13, 2024	IFG Corporate University
160	Program JEWEL : 3 Days Offline Workshop JEWEL Program: 3 Days Offline Workshop	19	23 Oct 24	October 23, 2024	25 Oct 24	October 25, 2024	AMBIZ
161	Program Kegiatan IFG Disability Community Hari Disabilitas Internasional Tahun 2024 IFG Disability Community Activity Program International Day of Disability 2024	7	5 Dec 24	December 05, 2024	6 Dec 24	December 06, 2024	IFG Corporate University
162	Program LEAD-1 Batch 2 Phase 4 LEAD-1 Batch 2 Phase 4 Program	3	30 May 24	May 30, 2024	1 Jun 24	June 01, 2024	IFG Corporate University
163	Program LEAD-1 Batch 2 Sesi Leaders Cafe 2 LEAD-1 Batch 2 Leaders Cafe 2 Session Program	1	22 Feb 24	February 22, 2024	22 Feb 24	February 22, 2024	IFG Corporate University
164	Program LEAD-1 Batch 2 Sesi Leaders Cafe 3 LEAD-1 Batch 2 Leaders Cafe Session 3 Program	1	24 Apr 24	April 24, 2024	24 Apr 24	April 24, 2024	IFG Corporate University
165	Program LEAD-1 Batch 2 Leaders Cafe4 LEAD-1 Batch2 Leaders Cafe 4 Program	1	19 Jun 24	June 19, 2024	19 Jun 24	June 19, 2024	IFG Corporate University
166	Program LEAD-2 - Social Culture Program LEAD-2 Program - Social Culture Program	1	12 Dec 24	December 12, 2024	15 Dec 24	December 15, 2024	IFG Corporate University
167	Program LEAD-3 sesi Pitstop 1 LEAD-3 program Pitstop 1 session	2	10 Oct 24	October 10, 2024	10 Oct 24	October 10, 2024	Daya Dimensi Indonesia
168	Program LEAD-3 sesi Pitstop 2 LEAD-3 program Pitstop 2 session	1	7 Nov 24	November 07, 2024	7 Nov 24	November 07, 2024	Daya Dimensi Indonesia
169	Program Leadership Excellence and Development (LEAD-3) Diklat Kesamaptaaan dan Bintlalsik Leadership Excellence and Development Program (LEAD-3) Fitness Training and Mental and Attitude Development	2	3 Sep 24	September 03, 2024	7 Sep 24	September 07, 2024	IFG Corporate University
170	Program Leadership Excellence and Development (LEAD-3) Phase 2 Leadership Excellence and Development Program (LEAD-3) Phase 2	2	23 Sep 24	September 23, 2024	27 Sep 24	September 27, 2024	IFG Corporate University
171	Program Leadership Excellence and Development (LEAD-3) sesi Kick Off Leadership Excellence and Development Program (LEAD-3) Kick Off session	2	15 Aug 24	August 15, 2024	15 Aug 24	August 15, 2024	IFG Corporate University
172	Program Pelatihan Business Acumen and Innovation Business Acumen and Innovation Training Program	2	15 Oct 24	October 15, 2024	16 Oct 24	October 16, 2024	IFG Corporate University
173	Program Pelatihan Creative Thinking Creative Thinking Training Program	2	31 Oct 24	October 31, 2024	31 Oct 24	October 31, 2024	Excellence Asia
174	Program Pelatihan Internal Control Testing Internal Control Testing Training Program	2	17 Sep 24	September 17, 2024	18 Sep 24	September 18, 2024	IFG Corporate University

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants		From From		To To	Penyelenggara Organizer
175	Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Strengthening of National Values Program at the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia	3	22 Jul 24	July 22, 2024	28 Jul 24	July 28, 2024	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan Smandel Jakarta Business Network
176	Qualified Internal Auditor (QIA)	1	14 Oct 24	October 14, 2024	26 Oct 24	October 26, 2024	YPIA
177	Qualified Internal Audit (QIA) Dasar Reguler Qualified Internal Audit (QIA) Basic Regular	6	4 Nov 24	November 04, 2024	16 Nov 24	November 16, 2024	YPIA
178	Quiz Online AKHLAK dan Meaningful Work 2024 AKHLAK and Meaningful Work 2024 Online Quiz	602	15 Mar 24	March 15, 2024	16 Mar 24	March 16, 2024	PT Jamkrindo
179	Quiz Online Topik "Juklak Penjaminan Kredit Mikro" Online Quiz on "Micro Credit Guarantee Guidelines"	248	7 Jun 24	June 07, 2024	9 Jun 24	June 09, 2024	PT Jamkrindo
180	Quiz Online Topik "Penjaminan Tidak Langsung" Online Quiz on the Topic "Indirect Guarantee"	294	17 May 24	May 17, 2024	19 May 24	May 19, 2024	PT Jamkrindo
181	Quiz Online Topik "SE JUKLAK KUR" Online Quiz with Topic "Circular Letter Title and Guidelines for KUR"	269	26 Apr 24	April 26, 2024	28 Apr 24	April 28, 2024	PT Jamkrindo
182	Quiz Online Topik SMAP, Gratifikasi, dan BWS Online Quiz on SMAP, Gratuity, and BWS Topics	1246	21 Jun 24	June 21, 2024	26 Jun 24	June 26, 2024	Jamkrindo
183	Risk Beyond 2024 - Sustainable Symphony: Echoes of Change	3	5 Dec 24	December 05, 2024	6 Dec 24	December 06, 2024	CRMS
184	RISKHub International Webinar ESG Intergration in Risk Management A Practical Exploration	1	13 Mar 24	March 13, 2024	13 Mar 24	March 13, 2024	ERM Akademi Indonesia
185	Seminar & Masterclass GRC Summit: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs GRC Summit Seminar & Masterclass: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs	3	22 Aug 24	August 22, 2024	23 Aug 24	August 23, 2024	GRC Summit
186	Seminar 7th Indonesian Actuaries Summit 7th Indonesian Actuaries Summit Seminar	1	20 Aug 24	August 20, 2024	22 Aug 24	August 22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Indonesian Actuarial Association (PAI)
187	Seminar dengan tema Global Internal Audit Standards (GIAS) With Local Perspective a Deep Dive into Internal Audit Practices Seminar with the theme Global Internal Audit Standards (GIAS) With Local Perspective a Deep Dive into Internal Audit Practices	4	11 May 24	May 11, 2024	11 May 24	May 11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Raksa Bhumi Samudera Foundation
188	Seminar Indonesia Cyber Risk 2024 : "Mitigating Cyber Risk and Building a Trust" Indonesia Cyber Risk 2024 Seminar: "Mitigating Cyber Risk and Building a Trust"	4	27 Jun 24	June 27, 2024	27 Jun 24	June 27, 2024	LPPI
189	Seminar Nasional Bertumbuh Dalam Pengaturan UU P2SK National Seminar on Growing in the Arrangement of the P2SK Law	1	8 Mar 24	March 08, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) APPI (Indonesian Financing Companies Association)
190	Sertifikasi ISEB-ISTQB International Certified Software Testing Foundation Level - Mastering Series (CTFL) + Exam ISEB-ISTQB International Certified Software Testing Foundation Level - Mastering Series (CTFL) + Exam Certification	1	19 Jan 24	January 19, 2024	19 Jan 24	January 19, 2024	Andalan Nusantara Teknologi
191	Sertifikasi Kompetensi Okupasi Skema Komisaris Occupational Competency Certification Commissioner Scheme	1	28 Feb 24	February 28, 2024	28 Feb 24	February 28, 2024	LSP Penjaminan
192	Sertifikasi Kompetensi Okupasi Skema Komisaris Occupational Competency Certification Commissioner Scheme	1	3 Apr 24	April 03, 2024	3 Apr 24	April 03, 2024	LSP Penjaminan
193	Sertifikasi Penjaminan Skema Komisaris Commissioner Scheme Assurance Certification	1	28 Nov 24	November 28, 2024	28 Nov 24	November 28, 2024	LSP Penjaminan
194	Sertifikasi Penjaminan Skema Tenaga Ahli Penjaminan Assurance Certification Scheme for Assurance Experts	1	19 Jul 24	July 19, 2024	19 Jul 24	July 19, 2024	LSP Penjaminan
195	Sertifikasi QRG QRGP Certification	1	10 Dec 24	December 10, 2024	10 Dec 24	December 10, 2024	CRMS
196	Sesi 1: Training Jira dan Confluence Role Administrator Session 1: Jira and Confluence Role Administrator Training	4	29 Apr 24	April 29, 2024	29 Apr 24	April 29, 2024	PT Aims Progrez
197	Sesi 2: Training Jira dan Confluence Role User Session 2: Jira and Confluence Role User Training	20	30 Apr 24	April 30, 2024	30 Apr 24	April 30, 2024	PT Aims Progrez
198	Sharing Session Relationship Manager "Tantangan Dalam Menjawab Era Penjaminan" Sharing Session Relationship Manager "Challenges in Answering the Era of Guarantee	21	12 Jul 24	July 12, 2024	12 Jul 24	July 12, 2024	PT Jamkrindo
199	Social Impact Bootcamp Vol.2	1	7 Oct 24	October 07, 2024	13 Oct 24	October 13, 2024	Social Impact.id
200	SOE Srikandi Leadership Program (SSLP)	1	28 May 24	May 28, 2024	30 May 24	May 30, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
201	Structured Finance and Syndication Loan: Financing for Construction Services and Toll Road Development	5	2 Sep 24	September 02, 2024	3 Sep 24	September 03, 2024	Infobank
202	Superior Session Program LEAD-2	2	10 Oct 24	October 10, 2024	10 Oct 24	October 10, 2024	IFG Corporate University
203	Sustainability for Organizational Resilience and Competitive Advantage	2	12 Dec 24	December 12, 2024	13 Dec 24	December 13, 2024	LSPMR
204	Swift International Banker's Operation Seminar (SIBOS) 2024	3	21 Oct 24	October 21, 2024	24 Oct 24	October 24, 2024	Swift
205	The 8th Indonesia Risk Management Outlook 2025	1	20 Nov 24	November 20, 2024	20 Nov 24	November 20, 2024	LPPI
206	The International Conference on Neuromanagement and Leadership	5	14 May 24	May 14, 2024	15 May 24	May 15, 2024	IARF Conference

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	From From	To To	Penyelenggara Organizer	
207	Training Certified Data Management Professionals (CDMP) Certified Data Management Professionals (CDMP) Training	2	27 Feb 24	February 27, 2024	1 Mar 24 March 01, 2024	PT Jamkrindo
208	Training dan Awareness Teknologi Informasi : Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan Information Technology Training and Awareness: Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	246	5 Mar 24	March 05, 2024	5 Mar 24 March 05, 2024	PT Jamkrindo
209	Training dan Sertifikasi COMPTIA Security+ COMPTIA Security+ Training and Certification	4	23 Sep 24	September 23, 2024	27 Sep 24 September 27, 2024	Multimatics
210	Training dan Sertifikasi ITIL v4 Foundation ITIL V4 Foundation Training and Certification	7	25 Mar 24	March 25, 2024	27 Mar 24 March 27, 2024	Multimatics
211	Training dan Workshop Business Continuity Management System (BCMS) Awareness Business Continuity Management System (BCMS) Awareness Training and Workshop	116	6 Feb 24	February 06, 2024	6 Feb 24 February 06, 2024	PT Jamkrindo
212	Training ERM Fundamental with (ERMAP Certification) ERM Fundamental Training with (ERMAP Certification)	3	2 Dec 24	December 02, 2024	4 Dec 24 December 04, 2024	CRMS
213	Training Financial Risk Management Financial Risk Management Training	2	26 Aug 24	August 26, 2024	28 Aug 24 August 28, 2024	Ganesha Inti Persada
214	Training IDEA Data Analysis Level 1 IDEA Data Analysis Level 1 Training	2	20 Nov 24	November 20, 2024	21 Nov 24 November 21, 2024	PT Insight Consulting
215	Training IDEA Data Analysis Level 2 IDEA Data Analysis Level 2 Training	2	28 Nov 24	November 28, 2024	29 Nov 24 November 29, 2024	PT Insight Consulting
216	Training Implementing GRC (Certification by LSP GRK and OCEG)	2	10 Dec 24	December 10, 2024	12 Dec 24 December 12, 2024	CRMS
217	Training of Trainers (ToT) BCMS Batch 2 BCMS Training of Trainers (ToT) Batch 2	22	7 Mar 24	March 07, 2024	8 Mar 24 March 08, 2024	PT Jamkrindo
218	Training of Trainers (ToT) BCMS Batch 3 BCMS Training of Trainers (ToT) Batch 3	33	13 May 24	May 13, 2024	14 May 24 May 14, 2024	PT Jamkrindo
219	Training of Trainers (ToT) Business Continuity Management System (BCMS) Batch 1	24	21 Feb 24	February 21, 2024	22 Feb 24 February 22, 2024	PT Jamkrindo
220	Training Risk Management & Wallet Sizing Risk Management & Wallet Sizing Training	57	23 Feb 24	February 23, 2024	23 Feb 24 February 23, 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
221	Training Tableau Desktop Basic Tableau Desktop Basic Training	9	27 Feb 24	February 27, 2024	27 Feb 24 February 27, 2024	Metrodata
222	Uji Sertifikasi Penjaminan Skema Direktur Bisnis Business Director Scheme Assurance Certification Test	1	20 Dec 24	December 20, 2024	20 Dec 24 December 20, 2024	LSP Penjaminan
223	Uji Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Business Director Scheme Assurance Certification Test	21	3 May 24	May 03, 2024	4 May 34 May 04, 2024	LSP Penjaminan
224	Uji Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Business Director Scheme Assurance Certification Test	30	13 Aug 24	August 13, 2024	14 Aug 24 August 14, 2024	LSP Penjaminan
225	Uji Sertifikasi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Certification Test for Assurance Expert Scheme Batch 1 of 2024	25	21 May 24	May 21, 2024	22 May 24 May 22, 2024	LSP Penjaminan
226	Uji Sertifikasi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Certification Test for Assurance Expert Scheme Batch 2 of 2024	25	5 Jun 24	June 05, 2024	5 Jun 24 June 05, 2024	LSP Penjaminan
227	Ujian Implementing GRC (Certification by LSP GRK and OCEG) Implementing GRC Exam (Certification by LSP GRK and OCEG)	2	13 Dec 24	December 13, 2024	13 Dec 24 December 13, 2024	CRMS
228	Ujian Sertifikasi Aktuaria Actuarial Certification Exam	1	21 Oct 24	October 21, 2024	21 Oct 24 October 21, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
229	Ujian Sertifikasi Aktuaria Actuarial Certification Exam	1	22 Oct 24	October 22, 2024	22 Oct 24 October 22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
230	Ujian Sertifikasi Kemenaker Ahli K3 Umum Ministry of Labor Certification Examination for General OHS Expert	4	22 Nov 24	November 22, 2024	23 Nov 24 November 23, 2024	3S Learning Center
231	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification Exam	42	12 Jun 24	June 12, 2024	1 Nov 24 November 01, 2024	BSMR dan LSP BSMR and LSP
232	Webinar Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management Webinar on Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	29	11 Jun 24	June 11, 2024	11 Jun 24 June 11, 2024	OJK Institute
233	Webinar Insight (IT Maturity Networking Session and Highlight) Webinar on Insight (IT Maturity Networking Session and Highlight)	8	11 Jun 24	June 11, 2024	11 Jun 24 June 11, 2024	Fordigi
234	Webinar Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks Webinar on Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks	33	6 Jul 24	July 06, 2024	6 Jul 24 July 06, 2024	Yayasan Pendidikan Internal audit Raksa Bhumi Samudera Foundation
235	Webinar OJK - Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management OJK Webinar - Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	28	11 Jun 24	June 11, 2024	11 Jun 24 June 11, 2024	OJK Institute
236	Webinar OJK - How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance OJK Webinar - How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	34	16 May 24	May 16, 2024	16 May 24 May 16, 2024	OJK Institute
237	Webinar OJK - Navigating The Half-Year: Roadmap to Success OJK Webinar - Navigating The Half-Year: Roadmap to Success	17	20 Jun 24	June 20, 2024	20 Jun 24 June 20, 2024	OJK

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	From	To	Penyelenggara Organizer		
238	Webinar OJK - Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan OJK Webinar - The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding	32	27 Jun 24	June 27, 2024	27 Jun 24	June 27, 2024	OJK Institute
239	Webinar Strategi Pemasaran Digital di Era Digital Digital Marketing Strategy Webinar in the Digital Age	9	5 Jun 24	June 20, 2024	5 Jun 24	June 20, 2024	OJK Institute
240	Workshop Business Impact Analysis Business Impact Analysis Workshop	43	26 Jun 24	June 27, 2024	26 Jun 24	June 27, 2024	PT Robere Manajemen Indonesia
241	Workshop Governance Risk Management, and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyuapan Workshop on Governance Risk Management, and Compliance and Dissemination of Anti Fraud and Bribery Risks	139	6 Jun 24	June 06, 2024	6 Jun 24	June 06, 2024	PT Robere & Associates Indonesia
242	Workshop Influencer BUMN Jawa Barat SOE Influencer Workshop in West Java	3	18 Jul 24	July 18, 2024	20 Jul 24	July 20, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
243	Workshop Influencer BUMN Kalimantan SOE Influencer Workshop in Kalimantan	3	26 Feb 24	February 26, 2024	28 Feb 24	February 28, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
244	Workshop Influencer BUMN Malang SOE Influencer Workshop in Malang	1	25 Jan 24	January 25, 2024	27 Jan 24	January 27, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
245	Workshop Influencer BUMN Sulawesi SOE Influencer Workshop in Sulawesi	3	20 Jun 24	June 20, 2024	22 Jun 24	June 22, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
246	Workshop Influencer BUMN Yogyakarta SOE Influencer Workshop in Yogyakarta	1	11 Jan 24	January 11, 2024	13 Jan 24	January 13, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
247	Workshop Influencer Sulawesi Influencer Workshop in Sulawesi	3	20 Jun 24	June 20, 2024	22 Jun 24	June 22, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
248	Workshop Influencer Sumatera Selatan Influencer Workshop in South Sumatera	3	4 Oct 24	October 04, 2024	6 Oct 24	October 06, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
249	Workshop Kementerian BUMN - Strategic Approach to Risk Managemen towards SOE's Business Sustainability Ministry of SOE Workshop - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	2	19 Jan 24	January 19, 2024	19 Jan 24	January 19, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
250	Workshop Ketenagakerjaan Nasional : Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan atas Aksi Korporasi Perusahaan serta Dampaknya terhadap Masa Depan Karyawan National Employment Workshop: Legal Perspectives on Corporate Actions and Their Impact on the Future of Employees	5	28 Feb 24	February 28, 2024	29 Feb 24	February 29, 2024	Pusat Pengkajian dan Pengemangan Informasi Publik (P3IP) Center for Public Information Assessment and Development (P3IP)
251	Workshop Nasional: Impelementasi Kepnaker No. 76 Tahun 2024 dalam Pedoman Hubungan Industrial yang Berkeadilan Berbasis Pancasila National Workshop: Implementation of Manpower Decree No. 76 of 2024 in Guiding Fair Industrial Relations Based on Pancasila	2	12 Jun 24	June 12, 2024	13 Jun 24	June 13, 2024	Lembaga P3IP Center for Public Information Assessment and Development (P3IP)
252	Workshop Pembuatan Kamus Kompetensi Perusahaan Workshop on the Creation of Company Competency Dictionary	1	7 Mar 24	March 07, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	Kelas HR HR Class
253	Workshop SROI: Social Return On Invesment Batch 2 SROI Workshop: Social Return On Invesment Batch 2	2	16 Oct 24	October 16, 2024	17 Oct 24	October 17, 2024	LPPI
254	Workshop Tata Cara Hapus Buku dan Pindah Tangan Aset Tetap BUMN dan Anak Perusahaan SROI Workshop: Social Return On Invesment Batch 2	3	2 Feb 24	February 02, 2024	2 Feb 24	February 02, 2024	Koran BUMN
255	Workshop The 6 Critical Practices for Leading a Team (First Line Leader Development Program) The 6 Critical Practices for Leading a Team (First Line Leader Development Program) Workshop	19	19 Jul 24	July 19, 2024	20 Jul 24	July 20, 2024	PT Jamkrindo
256	Workshop The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies Workshop	4	17 Sep 24	September 17, 2024	18 Sep 24	September 18, 2024	Prasmul-eli
257	YLDP Basic Competency Analisa Penjaminan YLDP Basic Competency Guarantee Analysis	14	21 Oct 24	October 21, 2024	22 Oct 24	October 22, 2024	BCG
258	YLDP Basic Competency Culture Compass - Navigating Change through Corporate Culture	14	7 Oct 24	October 07, 2024	8 Oct 24	October 08, 2024	Maxima
259	YLDP Basic Competency Financial Report & Credit Analysis	14	9 Oct 24	October 09, 2024	16 Oct 24	October 16, 2024	LPPI
260	YLDP Basic Competency Manajemen Risiko Penjaminan YLDP Basic Competency Guarantee Risk Management	14	23 Oct 24	October 23, 2024	24 Oct 24	October 24, 2024	Jamkrindo
261	YLDP Basic Competency Marketing & Selling Technique	14	25 Oct 24	October 25, 2024	26 Oct 24	October 26, 2024	LPPI
262	YLDP Basic Competency Rules Proficiency, Product Knowledge, & Business Process	14	19 Nov 24	November 19, 2024	21 Nov 24	November 21, 2024	Jamkrindo
263	YLDP Branch Experience	14	9 Dec 24	December 09, 2024	7 Mar 25	March 07, 2025	Jamkrindo
264	YLDP Business Perspective	14	28 Oct 24	October 28, 2024	1 Nov 24	November 01, 2024	PPM
265	YLDP Character Building Mindset Shifting - Shaping Tomorrow's Resilient Leaders through Character Building	14	1 Oct 24	October 01, 2024	4 Oct 24	October 04, 2024	Markplus
266	YLDP Digital Mindset Cybersecurity	14	18 Nov 24	November 18, 2024	18 Nov 24	November 18, 2024	Jamkrindo
267	YLDP Digital Mindset Digital Mindset & Data Analytics	14	11 Nov 24	November 11, 2024	15 Nov 24	November 15, 2024	Dibimbing
268	YLDP Innovation Bootcamp	14	22 Nov 24	November 22, 2024	27 Nov 24	November 27, 2024	Metranet
269	YLDP Personal Appearance	14	4 Nov 24	November 04, 2024	6 Nov 24	November 06, 2024	Markplus

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	From From	To To	Penyelenggara Organizer
270	YLDP Self Leadership	14	7 Nov 24	November 07, 2024	8 Nov 24 November 08, 2024 Josh Lie

Komitmen Jamkrindo terhadap pengembangan kompetensi karyawan tidak hanya berlaku bagi karyawan yang masih aktif bekerja, tetapi juga bagi mereka yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP)/program bantuan peralihan sebagaimana tabel berikut: [GRI 404-2]

Jamkrindo's commitment to employee competency development not only applies to employees who are still actively working, but also to those who are entering the retirement preparation period (MPP)/transitional assistance program as shown in the following table: [OJK F.22][GRI 404-1]

Pelatihan Menjelang Pensiun/Program Bantuan Peralihan Tahun 2024 [GRI 404-2]

Pre-Retirement Training/Transition Assistance Program 2024 [GRI 404-2]

Pelatihan Menjelang Pensiun/Program Bantuan Peralihan Tahun 2024 [GRI 404-2]
Pre-Retirement Training/Transition Assistance Program 2024 [GRI 404-2]

No.	Materi Pelatihan Training Subject	Tujuan Purposes	Waktu/Tempat Time/Place	Syarat Peserta Requirements for Participant	Jumlah Peserta Number of Participant
1.	PENSION WELL : PREPARING FOR LIFE BEYOND WORK Materi: a. Entrepreneurship b. Mental Switching / Psikologi c. Investasi Keuangan d. Pola Hidup Sehat dan Bugar di Masa Purnabakti e. Digital Marketing PENSION WELL : PREPARING FOR LIFE BEYOND WORK Subject: a. Entrepreneurship b. Mental Switching / Psychology c. Financial Investment d. Healthy and Fit Lifestyle in Post-Retirement e. Digital Marketing	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan agar mampu mempersiapkan pensiun dengan persiapan lebih dini. Diharapkan nantinya peserta dapat mempersiapkan pensiun termasuk di dalamnya penyiapan aspek psikologis, kesehatan, keuangan maupun kegiatan yang akan dilakukan pada masa purnakarya. Providing knowledge and skills to training participants to enable them to prepare for retirement early. It is hoped that participants will be able to prepare for retirement, including psychological, health, and financial aspects, as well as planning activities to engage in during retirement.	Waktu: Rabu s.d. Sabtu, 17 s.d. 20 Juli 2024 Tempat: Yogyakarta Date: Wednesday to Saturday, July 17 to 20, 2024 Location: Yogyakarta	5 Tahun sebelum masuk usia pensiun 5 years before reaching retirement age	25 Peserta 25 Participant

Sesuai dengan rekapitulasi pengembangan kompetensi di atas, total jam pelatihan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4.907 jam, naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3.362 jam. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya intensifikasi pelatihan, sehingga meskipun jumlah peserta berkurang, durasi atau intensitas pelatihan yang diterima per individu meningkat. Hal ini mencerminkan upaya untuk mendesain pelatihan secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kinerja. Adapun rerata jam pelatihan menurut jenis kelamin dan level jabatan disajikan dalam tabel berikut: [OJK F.22][GRI 404-1]

Based on the competency development recap above, the total training hours in 2024 were recorded at 4,907 hours, an increase from 3,362 hours in 2023. This increase indicates an intensification of training, meaning that despite a decrease in the number of participants, the duration or intensity of training received per individual has increased. This reflects efforts to design training programs in a more targeted and needs-based manner, thereby aiming to deliver more tangible impacts on performance improvement. The average training hours by gender and job level are presented in the table below: [OJK F.22] [GRI 404-1]

Tabel Pelatihan tahun 2022-2024
Training Table for 2022-2024

Uraian Description	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan Total Employees who Received Training			Jam Pelatihan Training Hours			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan Average Training Hours per Employee		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Keseluruhan Whole	7.766	30.264	22.005	4.907	3.362	319.591	56,17	190,38	334,19
Berdasarkan jenis kelamin Based on Gender									
Laki-laki Male	4.518	17.212	12.623	4.360	2.814	183.325	53,41	191,46	300,53
Perempuan Female	3.248	13.052	9.382	3.599	2.275	136.266	56,85	188,96	318,38
Berdasarkan kategori jabatan karyawan Based on Employee Position Category									
Manajemen Management	2.528	8.515	6.395	2.213	3.635	92.878	54,02	168,75	277,25
Staf Staff	4.172	21.749	15.610	2.187	3.197	226.713	71,83	200,60	328,57

Berdasarkan tabel di atas, rerata jam pendidikan dan pelatihan bagi karyawan laki-laki tercatat sebanyak 53,41 jam/tahun, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 191,46 jam/tahun. Sedangkan rerata jam pendidikan dan pelatihan bagi karyawan perempuan adalah 56,85 jam/tahun, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 188,96 jam/tahun. Rerata jam pelatihan karyawan pria lebih banyak dibanding karyawan perempuan, walau terdapat perbedaan rerata jam pelatihan antara karyawan laki-laki dan perempuan, hal itu bukan berarti Perusahaan melakukan diskriminasi. Perbedaan rerata jam pelatihan terjadi karena komposisi keseluruhan karyawan masih didominasi oleh karyawan pria.

Based on the table above, the average hours of education and training for male employees were recorded at 53.41 hours/year, a decrease compared to 2023, which reached 191.46 hours/year. Meanwhile, the average hours of education and training for female employees were 56.85 hours/year, a decrease compared to 2023, which reached 188.96 hours/year. The average number of training hours for male employees is higher than for female employees. Although there is a difference in the average number of training hours between male and female employees, this does not mean that the Company is practicing discrimination. The difference in average training hours occurred because the overall composition of employees which remains predominantly male.

Pertimbangan yang sama berlaku terkait dengan rerata jam pelatihan berdasarkan kategori level jabatan. Pada tahun 2024, rerata jam pelatihan level staf tercatat sebanyak 71,83 jam/tahun, turun dibanding tahun 2023 yang mencapai 200,60 jam/tahun. Sedangkan rerata jam pelatihan level manajemen, yang terdiri dari level L1 hingga L3, tercatat sebanyak 54,02 jam/tahun, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 168,75 jam/tahun. Perbedaan rerata jam pelatihan antara manajemen dan staf terjadi karena penyesuaian kebutuhan yang dimiliki oleh karyawan maupun perusahaan, bukan karena Jamkrindo menerapkan diskriminasi berdasarkan level jabatan.

The same considerations apply to the average training hours based on job level categories. In 2024, the average training hours for staff level were recorded at 71.83 hours/year, decreasing from 200.60 hours/year in 2023. Meanwhile, the average training hours for the management level, which consists of levels L1 to L3, were recorded at 54.02 hours/year, lower than in 2023, which reached 168.75 hours/year. The difference in average training hours between management and staff happened due to adjustments in the needs of employees and the company, and not because Jamkrindo applied discrimination based on job level.

Selanjutnya, untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan di atas, per 31 Desember 2024, Jamkrindo mengeluarkan biaya sebesar Rp36,6 miliar, naik dibanding tahun 2023, yang mencapai Rp29,5 miliar. Kenaikan dipengaruhi oleh peningkatan kualitas dan fokus program pelatihan yang lebih strategis, termasuk pelatihan bersertifikasi, digitalisasi, dan pengembangan kepemimpinan. Meskipun rata-rata jam pelatihan per karyawan menurun, pendekatan pelatihan menjadi lebih selektif, mendalam, dan berdampak sesuai kebutuhan transformasi perusahaan

Furthermore, to fund the various education and training programs mentioned above, as of December 31, 2024, Jamkrindo incurred expenses of IDR36.6 billion, an increase compared to 2023, which reached IDR29.5 billion. The increase was influenced by improvements in the quality and strategic focus of training programs, including certified training, digitalization, and leadership development. Although the average training hours per employee decreased, the training approach became more selective, in-depth, and impactful, aligning with the company's transformation needs.

Tabel Biaya Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022-2024
Table of Education and Training Costs for 2022-2024

Tahun Year	Realisasi Realization
2024	Rp36,6 miliar IDR36.6 billion
2023	Rp29,5 miliar IDR29.5 billion
2022	Rp23,3 miliar IDR23.3 billion

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19]

Jamkrindo berkomitmen untuk menghapus tenaga kerja anak dan kerja paksa karena praktik tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai wujud komitmen ini, perusahaan secara tegas mengatur usia minimal karyawan dan jam kerja. Jamkrindo memastikan bahwa seluruh karyawan, baik tetap, kontrak maupun outsource telah berusia di atas 18 tahun atau termasuk dalam kategori dewasa. Terkait jam kerja, perusahaan memberlakukan 40 jam kerja per minggu dengan 5 (lima) hari kerja, sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan yang menjalani lembur diberikan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terhindar dari praktik kerja paksa

Implementasi batasan usia dan jam kerja yang jelas ini merupakan bentuk kepatuhan Jamkrindo terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan. Hal ini mencakup Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 1823 *Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*. Adapun pemberlakuan jam kerja dengan batasan waktu yang jelas juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 1053 *Concerning The Abolition of Forced Labour*.

Kepatuhan Jamkrindo terhadap regulasi ketenagakerjaan dengan tidak mempekerjakan anak serta tidak ada kerja paksa membawa hasil dengan tidak adanya sanksi atau denda dari regulator terkait kedua isu tersebut. Selain itu, selama tahun pelaporan, Perusahaan juga tidak mencatat adanya pengaduan terkait pekerja anak dan kerja paksa.

Child Labor and Forced Labor [OJK F.19]

Jamkrindo is committed to eliminating child labor and forced labor, as these practices constitute violations of human rights. As a manifestation of this commitment, the company strictly regulates the minimum age of employees and working hours. Jamkrindo ensures that all employees, whether permanent, contract, or outsourced, are over 18 years of age or fall under the adult category. Regarding working hours, the Company implements a 40-hour workweek with five working days, in accordance with Article 77 of Law No. 13 of 2003 on Manpower. Employees who work overtime are compensated in accordance with applicable regulations, thereby avoiding forced labor practices.

The implementation of clear age and working hour limits is Jamkrindo's compliance with various labor regulations. These include Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 1999 concerning the Ratification of ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2000 concerning Ratification of ILO Convention No. 1823 *Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor*. The implementation of working hours with clear time limits is also in line with Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 1999 concerning the Ratification of ILO Convention No. 105 *Concerning The Abolition of Forced Labor*.

Jamkrindo's compliance with labor regulations by not employing children and not having forced labor has resulted in the absence of sanctions or fines from regulators regarding these two issues. Additionally, during the reporting year, the Company did not record any complaints regarding child labor and forced labor.

Upah Minimum Regional [OJK F.20]

Upah atau imbalan kerja/remunerasi merupakan hak normatif karyawan yang dijunjung tinggi pemenuhannya oleh Jamkrindo. Perusahaan memberikan remunerasi berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan kinerja setiap karyawan tanpa membedakan gender, sehingga setiap karyawan berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan. Jika terdapat perbedaan jumlah upah yang diterima, hal itu lebih disebabkan oleh pencapaian kinerja atau prestasi masing-masing karyawan. Komitmen perusahaan memberikan kesetaraan remunerasi tanpa memandang gender merupakan implementasi undang-undang ketenagakerjaan, serta Konvensi ILO No.: 100/1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.

Pemberian upah di Jamkrindo diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak bagi karyawan. Dengan pendekatan itu, besaran upah minimum bagi karyawan tetap level terendah akan menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya di masing-masing provinsi di mana perusahaan beroperasi. Berdasarkan prinsip tersebut, Perusahaan memberikan upah untuk karyawan tetap level terendah dengan merujuk ketentuan upah minimum provinsi yang ditetapkan pemerintah. Sesuai prinsip tersebut, Jamkrindo menjamin bahwa remunerasi karyawan tetap level terendah telah sesuai dengan ketentuan upah minimum regional di masing-masing daerah. Sebagai contoh, upah minimum yang diberikan Jamkrindo untuk karyawan tetap di tingkat terendah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebesar Rp5.283.740 atau 104% dari UMR di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan upah yang lebih tinggi dibanding UMR Tingkat Provinsi tersebut berlaku untuk semua wilayah operasi Jamkrindo.

Mekanisme dan proses pemberian upah di Jamkrindo di atas, termasuk bagi karyawan tetap di tingkat terendah, telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, yang di dalamnya mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Sesuai dengan berbagai rujukan di atas, remunerasi karyawan tetap dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah selengkapny adalah sebagai berikut:

[GRI 3-3, 202-1] [OJK F.20]

Regional Minimum Wage [OJK F.20]

Wages or employee benefits/remuneration are the normative rights of employees, whose fulfillment is highly respected by Jamkrindo. The company provides remuneration based on the experience, competence, and performance of each employee without distinguishing gender, ensuring that each employee has the right to receive equal treatment in the implementation of the wage system. If there is a difference in the amount of wages received, this is more due to the performance or achievements of each employee. The company's commitment to providing equal remuneration regardless of gender is an implementation of labor law, as well as ILO Convention No. 100/1951 concerning Equal Remuneration for Male and Female Workers for Work of Equal Value.

Wages at Jamkrindo are directed at achieving the needs of a decent living for employees. With this approach, the minimum wage for the lowest level permanent employees will be adjusted to the price of basic necessities, inflation rate, living standards, and other variables in each province where the company operates. Based on this principle, the company provides wages for permanent employees at the lowest level by referring to the provincial minimum wage provisions set by the government. In accordance with this principle, Jamkrindo guarantees that the remuneration of the lowest level permanent employees is in line with the regional minimum wage provisions in each area. For example, Jamkrindo's minimum wage for permanent employees at the lowest level in DKI Jakarta Province in 2024 is IDR5,283,740 or 104% of the minimum wage in the DKI Jakarta area. The wage policy is higher compared to the Provincial UMR applies to all of Jamkrindo's operational areas.

The mechanism and process for providing wages at Jamkrindo above, including for permanent employees at the lowest level, is in accordance with the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 226 of 2000 concerning Amendments to Articles 1, 3, 4, 8, 11, 20, and 21 of the Minister of Manpower Regulation No. PER-01/MEN/1999 concerning Minimum Wages, as well as the Regulation Government Regulation No. 51 of 2023 on Amendments to Government Regulation No. 36 of 2021 on Wages, which regulates the Provincial Minimum Wage (UMP) for 2024.

In accordance with the references above, the remuneration of permanent employees compared to the Provincial Minimum Wage (UMP) set by the government is as follows: [GRI 3-3, 202-1]

[OJK F.20]

Tabel Upah Pegawai Dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 [OJK F.20]
Table of Employee Wages Compared to Provincial Minimum Wage for 2024 [OJK F.20]

No.	Unit Usaha	Business Unit	Provinsi/ Daerah Province/Region	Province/ Region Province/Region	Upah Minimum Provinsi (Rp) Provincial Minimum Wage (IDR)	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest-Level Employee Compensation	Persentase Percentage
1	Kantor Pusat	Head Office	DKI Jakarta	DKI Jakarta	5.067.381	5.283.740	104%
2	Kanca Cabang Khusus Jakarta	Jakarta Special Branch Office	DKI Jakarta	DKI Jakarta	5.067.381	6.031.900	119%
3	Kanwil Medan	Medan Regional Office	Sumatera Utara	North Sumatra	2.809.915	6.947.955	247%

Tabel Upah Pegawai Dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 [OJK F.20]
Table of Employee Wages Compared to Provincial Minimum Wage for 2024 [OJK F.20]

No.	Unit Usaha	Business Unit	Provinsi/ Daerah Province/Region	Province/ Region Province/Region	Upah Minimum Provinsi (Rp) Provincial Minimum Wage (IDR)	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest-Level Employee Compensation	Persentase Percentage
4	Kanca Medan	Medan Branch Office	Sumatera Utara	North Sumatra	2.809.915	5.460.000	194%
5	Kanca Balige	Balige Branch Office	Sumatera Utara	North Sumatra	2.809.915	6.476.758	230%
6	Kanca Padang	Padang Branch Office	Sumatera Barat	West Sumatra	2.811.449	5.828.000	207%
7	Kanca Pekanbaru	Pekanbaru Branch Office	Riau	Riau	3.294.625	6.748.457	205%
8	Kanca Tanjung Pinang	Tanjung Pinang Branch Office	Kepulauan Riau	Riau Islands	3.402.492	8.433.887	248%
9	Kanca Batam	Batam Branch Office	Kepulauan Riau	Riau Islands	3.402.492	5.560.000	163%
10	Kanwil Palembang	Palembang Regional Office	Sumatera Selatan	South Sumatra	3.456.874	6.725.503	195%
11	Kanca Jambi	Jambi Branch Office	Jambi	Jambi	3.037.121	5.560.000	183%
12	Kanca Bengkulu	Bengkulu Branch Office	Bengkulu	Bengkulu	2.507.079	6.748.457	269%
13	Kanca Palembang	Palembang Branch Office	Sumatera Selatan	South Sumatra	3.456.874	5.950.340	172%
14	Kanca Bandar Lampung	Bandar Lampung Branch Office	Lampung	Lampung	2.716.497	6.023.454	222%
15	Kanca Pangkal Pinang	Pangkal Pinang Branch Office	Bangka Belitung	Bangka Belitung	3.640.000	6.515.232	179%
16	Kanwil Jakarta	Jakarta Regional Office	DKI Jakarta	DKI Jakarta	5.067.381	5.999.013	118%
17	Kanca Serang	Serang Branch Office	Banten	Banten	2.727.812	6.809.683	250%
18	Kanca Tangerang	Tangerang Branch Office	Banten	Banten	2.727.812	5.319.448	195%
19	Kanca Jakarta	Jakarta Branch Office	DKI Jakarta	DKI Jakarta	5.067.381	5.510.202	109%
20	Kanca Pontianak	Pontianak Branch Office	Kalimantan Barat	West Kalimantan	2.702.616	6.031.900	223%
21	Kanwil Bandung	Bandung Regional Office	Jawa Barat	West Java	2.057.495	6.762.753	329%
22	Kanca Bandung	Bandung Branch Office	Jawa Barat	West Java	2.057.495	6.023.454	293%
23	Kanca Cirebon	Cirebon Branch Office	Jawa Barat	West Java	2.057.495	5.460.000	265%
24	Kanca Purwakarta	Purwakarta Branch Office	Jawa Barat	West Java	2.057.495	7.083.239	344%
25	Kanca Sukabumi	Sukabumi Branch Office	Jawa Barat	West Java	2.057.495	6.273.454	305%
26	Kanca Tasikmalaya	Tasikmalaya Branch Office	Jawa Barat	West Java	2.057.495	5.560.000	270%
27	Kanwil Semarang	Semarang Regional Office	Jawa Tengah	Central Java	2.036.947	6.809.683	334%
28	Kanca Semarang	Semarang Branch Office	Jawa Tengah	Central Java	2.036.947	6.725.503	330%
29	Kanca Solo	Solo Branch Office	Jawa Tengah	Central Java	2.036.947	5.460.000	268%
30	Kanca Purwokerto	Purwokerto Branch Office	Jawa Tengah	Central Java	2.036.947	5.460.000	268%
31	Kanca Kudus	Kudus Branch Office	Jawa Tengah	Central Java	2.036.947	5.661.150	278%
32	Kanca Tegal	Tegal Branch Office	Jawa Tengah	Central Java	2.036.947	6.711.250	329%
33	Kanca Yogyakarta	Yogyakarta Branch Office	Daerah Istimewa Yogyakarta	Special Region of Yogyakarta	2.125.897	6.748.457	317%
34	Kanwil Surabaya	Surabaya Regional Office	Jawa Timur	East Java	2.165.244	6.616.750	306%
35	Kanca Surabaya	Surabaya Branch Office	Jawa Timur	East Java	2.165.244	5.950.340	275%
36	Kanca Kediri	Kediri Branch Office	Jawa Timur	East Java	2.165.244	4.700.000	217%
36	Kanca Banyuwangi	Banyuwangi Branch Office	Jawa Timur	East Java	2.165.244	6.640.519	307%
38	Kanca Malang	Malang Branch Office	Jawa Timur	East Java	2.165.244	7.197.453	332%
39	Kanca Madiun	Madiun Branch Office	Jawa Timur	East Java	2.165.244	5.460.000	252%
40	Kanwil Denpasar	Denpasar Regional Office	Bali	Bali	2.813.672	6.031.900	214%
41	Kanca Denpasar	Denpasar Branch Office	Bali	Bali	2.813.672	5.560.000	198%
42	Kanca Mataram	Mataram Branch Office	NTB	West Nusa Tenggara	2.444.067	6.626.005	271%

Tabel Upah Pegawai Dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 [OJK F.20]
Table of Employee Wages Compared to Provincial Minimum Wage for 2024 [OJK F.20]

No.	Unit Usaha	Business Unit	Provinsi/ Daerah Province/Region	Province/ Region Province/Region	Upah Minimum Provinsi (Rp) Provincial Minimum Wage (IDR)	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest-Level Employee Compensation	Persentase Percentage
43	Kanca Sumbawa Besar	Sumbawa Besar Branch Office	NTB	West Nusa Tenggara	2.444.067	6.616.750	271%
44	Kanca Kupang	Kupang Branch Office	NTT	East Nusa Tenggara	2.186.826	4.700.000	215%
45	Kanwil Banjarmasin	Banjarmasin Regional Office	Kalimantan Selatan	South Kalimantan	3.282.812	6.616.750	202%
46	Kanca Banjarmasin	Banjarmasin Branch Office	Kalimantan Selatan	South Kalimantan	3.282.812	5.661.150	172%
47	Kanca Palangkaraya	Palangkaraya Branch Office	Kalimantan Tengah	Central Kalimantan	3.261.616	5.560.000	170%
48	Kanca Samarinda	Samarinda Branch Office	Kalimantan Timur	East Kalimantan	3.360.858	7.131.633	212%
49	Kanca Balikpapan	Balikpapan Branch Office	Kalimantan Timur	East Kalimantan	3.360.858	5.950.340	177%
50	Kanca Tarakan	Tarakan Branch Office	Kalimantan Utara	North Kalimantan	3.361.653	7.509.508	223%
51	Kanwil Makassar	Makassar Regional Office	Sulawesi Selatan	South Sulawesi	3.434.298	7.194.289	209%
52	Kanca Makassar	Makassar Branch Office	Sulawesi Selatan	South Sulawesi	3.434.298	5.260.000	153%
53	Kanca Manado	Manado Branch Office	Sulawesi Utara	North Sulawesi	3.545.000	5.460.000	154%
54	Kanca Palu	Palu Branch Office	Sulawesi Tengah	Central Sulawesi	2.736.698	5.826.813	213%
55	Kanca Ambon	Ambon Branch Office	Maluku	Maluku	2.949.953	7.170.407	243%
56	Kanca Gorontalo	Gorontalo Branch Office	Gorontalo	Gorontalo	3.025.100	6.515.232	215%
57	Kanca Jayapura	Jayapura Branch Office	Papua	Papua	4.024.270	7.023.329	175%
58	Kanca Kendari	Kendari Branch Office	Sulawesi Tenggara	Southeast Sulawesi	2.885.964	7.401.348	256%
59	Kanca Mamuju	Mamuju Branch Office	Sulawesi Barat	West Sulawesi	2.914.958	6.515.232	224%
60	Kanca Manokwari	Manokwari Branch Office	Papua Barat	West Papua	3.393.000	5.950.340	175%
61	Kanca Ternate	Ternate Branch Office	Maluku Utara	North Maluku	3.200.000	7.023.329	219%
62	Kanca Palopo	Palopo Branch Office	Sulawesi Selatan	South Sulawesi	3.434.298	7.082.019	206%
63	Kanca Pare-Pare	Pare-Pare Branch Office	Sulawesi Selatan	South Sulawesi	3.434.298	5.740.293	167%
64	Kanca Sorong	Sorong Branch Office	Papua Barat	West Papua	3.393.000	5.950.340	175%

Kepuasan Karyawan

Kepuasan dan keterikatan karyawan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja individu, yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja Jamkrindo secara keseluruhan. Untuk itu, Jamkrindo secara berkala melakukan survei kepuasan dan keterikatan karyawan. Survei bertujuan untuk mengukur persepsi karyawan terhadap aspek kepuasan dan keterikatan mereka dengan perusahaan, efektivitas kebijakan, serta program pengelolaan SDM yang dijalankan sepanjang tahun 2024. Hasil survei melalui indeks kepuasan dan *engagement* karyawan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.

Pada tahun 2024, survei dilakukan di Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kanwil beserta unit kerja di bawahnya, dan KCK dengan responden karyawan tetap sebanyak 637 orang, terdiri dari 390 laki-laki (61,22%) dan 247 perempuan (38,78%). Survei menggabungkan antara dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif di mana pendekatan kuantitatif melalui kuesioner tertutup, sementara pendekatan kualitatif dilakukan melalui in-depth interview. Hasil survei tahun 2024 selengkapnya adalah

Employee Satisfaction

Employee satisfaction and engagement have a significant impact on individual performance, which ultimately contributes to Jamkrindo's overall performance. For this reason, Jamkrindo periodically conducts employee satisfaction and engagement surveys. The survey aims to measure employees' perceptions regarding their satisfaction and engagement with the company, the effectiveness of policies, and the human resources management programs implemented during 2024. The results of the survey, as measured through the employee satisfaction and engagement index, are expected to serve as a foundation for the Company to continue improving performance and create a conducive working environment.

In 2024, a survey was conducted at the Head Office, 9 (nine) Regional Office and its subordinate work units, and KCK with 637 permanent employees as respondents, consisting of 390 male (61.22%) and 247 female (38.78%). The survey combined two approaches: quantitative and qualitative. The quantitative approach was conducted through a closed-ended questionnaire, while the qualitative approach was implemented through in-depth interviews. The complete results of the 2024 survey are

sebagai berikut:

as follows:

Indeks Kepuasan Karyawan berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2022-2024
Employee Satisfaction Index by Work Area for 2022-2024

Uraian Description	Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction		
	2024	2023	2022
Kantor Pusat Head Office	79,62	80,60	80,69
Wilayah Medan Medan Region	80,63	82,50	82,10
Wilayah Palembang Palembang Region	83,21	82,30	82,20
Wilayah Jakarta Jakarta Region	81,70	78,70	79,44
Wilayah Bandung Bandung Region	82,57	81,90	80,51
Wilayah Semarang Semarang Region	82,99	84,80	82,73
Wilayah Surabaya Surabaya Region	82,57	81,60	81,25
Wilayah Denpasar Denpasar Region	82,76	82,50	84,31
Wilayah Banjarmasin Banjarmasin Region	82,72	82,00	82,42
Wilayah Makassar Makassar Region	82,68	82,70	83,44
Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	78,30	77,70	77,04

Sesuai hasil survei indeks kepuasan karyawan tahun 2024, di seluruh wilayah kerja Jamkrindo berada pada kategori Baik. Nilai indeks kepuasan tertinggi diperoleh Kantor Wilayah Palembang sebesar 83,21. Beberapa aspek yang mendukung kantor wilayah tersebut memiliki indeks kepuasan tertinggi adalah:

1. Karyawan memahami visi & misi perusahaan.
2. Karyawan bekerja sesuai dengan visi & misi perusahaan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan kebutuhan karyawan.

Selain survei kepuasan karyawan, Jamkrindo juga menyelenggarakan Survei Keterikatan Karyawan untuk mengukur persepsi pegawai terhadap keterikatan mereka dengan perusahaan serta evaluasi mereka terhadap kebijakan dan program pengelolaan SDM yang dijalankan. Hasil survei ini disampaikan sebagai *management report* kepada Direksi dan digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelola SDM untuk terus memperbaiki sistem serta meningkatkan berbagai aspek yang telah dinilai baik dalam pelaksanaan pengelolaan SDM. Nilai keterikatan diukur berdasarkan 12 pernyataan loyalitas dan emosional karyawan yang diadaptasi dari Teori Gallup. Adapun dalam penelitian ini, klasifikasi kategori keterikatan karyawan terbagi menjadi 3 yaitu:

According to the results of the 2024 employee satisfaction index survey, all Jamkrindo work areas were categorized as Good. The highest satisfaction index score was achieved by the Palembang Regional Office with a score of 83.21. Several aspects that contributed to this regional office achieving the highest satisfaction index score are:

1. Employees understand the company's vision and mission.
2. Employees work in accordance with the company's vision and mission.
3. The Company provides opportunities for employees to practice their religion according to their needs.

In addition to the employee satisfaction survey, Jamkrindo also conducts the Employee Engagement Survey to assess employees' perceptions regarding their attachment to the company, as well as their evaluation of the HR management policies and programs implemented. The results of this survey are submitted as a management report to the Board of Directors and used as input for HR managers to continuously improve the system and enhance various aspects that have been rated well in the implementation of HR management. Engagement scores are measured based on 12 statements reflecting employee loyalty and emotional connection adapted from Gallup Theory. In this research, employee engagement levels are classified into 3 categories, namely:

Indikator Skor Score Indicator	Kategori Keterikatan Engagement Category
Setuju (Skor 3) Agree (Score 3)	Terikat Engaged
Ragu-ragu (Skor 2) Uncertain (Score 2)	Tidak Terikat Not Engaged
Tidak Setuju (Skor 1) Disagree (Score 1)	Tidak Terikat Sama Sekali Actively disengaged

Hasil penelitian keterikatan karyawan Jamkrindo tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 92,94% dari responden karyawan tergolong sebagai karyawan yang terikat, persentase ini naik dibandingkan tahun 2023 dengan nilai sebesar 92,6%. Sedangkan karyawan Jamkrindo yang masuk ke dalam kategori tidak terikat (not engaged) tercatat sebesar 7,06%, turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 7,4%. Adapun kategori karyawan yang tidak terikat sama sekali (actively disengaged) tercatat nihil. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa keterikatan karyawan Jamkrindo mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023.

The results of the 2024 employee engagement survey at Jamkrindo indicate that 92.94% of respondents are classified as engaged employees, an increase from 92.6% in 2023. Meanwhile, the percentage of Jamkrindo employees categorized as not engaged stands at 7.06%, a decrease from 7.4% in the previous year. The category of employees who are actively disengaged was recorded as zero. The survey results indicate that employee engagement at Jamkrindo has improved compared to 2023.

LINGKUNGAN KERJA LAYAK DAN AMAN [OJK F.21]

Jamkrindo meyakini bahwa lingkungan kerja yang layak dan aman, sesuai dengan kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berkorelasi positif terhadap produktivitas karyawan. Oleh karena itu, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan lingkungan kerja terbaik dengan tujuan agar tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*) dan tidak ada penyakit akibat kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan telah menetapkan kebijakan K3 yang menjadi acuan dan panduan dalam operasional sehari-hari, di antaranya: [GRI 3-3]

1. Surat Edaran No. 132/SE/4/XII/2020 tanggal 30 Januari 2021 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Jaminan Kredit Indonesia;
2. Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/5/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Kebijakan Umum *Business Continuity Management* (BCM);
3. Surat Edaran Direksi No. 132/SE/4/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Merujuk kebijakan K3 di atas, Jamkrindo telah mengidentifikasi jenis pekerjaan dan tingkat risikonya bagi karyawan, sekaligus menetapkan mitigasi atas risiko tersebut. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan mitigasi selengkapnya adalah sebagai berikut: [GRI 403-2]

DECENT AND SAFE WORKING ENVIRONMENT [OJK F.21]

Jamkrindo believes that a decent and safe working environment, in accordance with Occupational Health and Safety (OHS) principles, has a positive correlation with employee productivity. Therefore, the Company makes every effort to create the best work environment with the aim of ensuring that there are zero accidents and no occupational diseases. To achieve this goal, the Company has established an OHS policy, which serves as a reference and guide in daily operations, including: [GRI 3-3]

1. Circular Letter No. 132/SE/4/XII/2020 dated January 30, 2021, concerning the Management of the Occupational Health and Safety Management System of PT Jaminan Kredit Indonesia;
2. Board of Directors' Regulation No. 13/Per-Dir/5/IX/2020 dated September 4, 2020, concerning the General Policy on Business Continuity Management (BCM);
3. Circular Letter of the Board of Directors No. 132/SE/4/XII/2020 dated December 30, 2020, concerning the Management of the Occupational Health and Safety Management System.

Referring to the OHS policy above, Jamkrindo has identified the type of work and the level of risk for employees, as well as determining mitigation for these risks. Hazard identification, risk assessment, and mitigation are as follows: [GRI 403-2]

Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Mitigasi Risiko
Table of Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Mitigation

No.	Jenis Pekerjaan Type of Work	Penilaian Risiko Risk Assessment	Mitigasi Mitigation
1	Melakukan aktivitas berangkat kerja menuju lokasi kantor dan pulang menuju rumah Engaging in commuting activities from home to the office and returning home after work	Risiko Operasional Potensi terjadinya kecelakaan yang memengaruhi keselamatan. Operational Risk Potential for accidents that affect safety.	Mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Registering employees in the BPJS program

Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Mitigasi Risiko
Table of Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Mitigation

No.	Jenis Pekerjaan Type of Work	Penilaian Risiko Risk Assessment	Mitigasi Mitigation
2	Melakukan pekerjaan di lingkungan kantor Performing work in the office environment	Risiko Operasional Potensi terjadinya penularan penyakit.) Operational Risk Potential for disease transmission.	- Mengikutsertakan pemeriksaan kesehatan berkala kepada karyawan - Penerapan Work From Home (WFH) - Registering periodic health checks for employees - Implement Work From Home (WFH) policy
3	Melakukan pekerjaan di dalam ruang kerja selama jam kerja berlangsung Performing work within the workspace during working hours	Risiko Operasional Potensi terjadinya risiko ergonomi akibat postur tubuh yang tidak sesuai dengan prinsip ergonomi Operational Risk Potential ergonomic risks due to postures that are not in accordance with ergonomic principles.	Menyediakan fasilitas kerja dengan standar ergonomi yang baik Providing work facilities with good ergonomic standards

Jamkrindo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, perusahaan merancang tata letak kantor dengan baik dan menggunakan peralatan ergonomis. Selain itu, Jamkrindo juga menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan keselamatan kerja (K3), termasuk jalur evakuasi, alat deteksi asap, sprinkler, alat pemadam api ringan, *hydrant*, dan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di setiap lantai gedung. Perusahaan juga melakukan pengecekan berkala untuk memastikan semua sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik. [GRI 403-2]

Jamkrindo is committed to creating a decent and safe working environment. To reduce the risk of workplace accidents, the company designs office layouts effectively and uses ergonomic equipment. Additionally, Jamkrindo provides Occupational Health and Safety (OHS) facilities and infrastructure, including evacuation routes, smoke detection devices, sprinklers, light fire extinguishers, hydrants, and first aid boxes (P3K) on each floor of the office building. The company also conducts regular checks to ensure that these facilities and infrastructures function properly. [GRI 403-2]

Selain itu, Jamkrindo menyediakan fasilitas seperti tempat ibadah, ruang parkir, tempat istirahat, kantin, serta keamanan 24 jam. Karyawan juga diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan BPJS dan Asuransi Mandiri Inhealth. Lebih dari itu, Perusahaan menjalin kerja sama dengan layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan menyediakan ruang kesehatan di Kantor Pusat. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan kerja karyawan, Jamkrindo secara berkala menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga yang dikelola oleh Badan Pengelola Olahraga dan Seni (BAPORSI) Jamkrindo. [GRI 403-3, 403-6, 403-7]

Moreover, Jamkrindo provides amenities such as prayer rooms, parking spaces, rest areas, a canteen, and 24-hour security. Employees are also included in the BPJS health insurance program and Mandiri Inhealth Insurance. Furthermore, the company collaborates with healthcare services to conduct regular health check-ups and provides a health room at the Head Office. To improve the quality of employee health, Jamkrindo regularly organizes various sports activities managed by the Jamkrindo Sports and Arts Management Agency (BAPORSI). [GRI 403-3, 403-6, 403-7]

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan budaya K3, Perusahaan juga mengadakan berbagai kegiatan untuk menghadapi situasi kedaruratan seperti pelatihan dan simulasi tanggap darurat sebagai berikut: [GRI 403-5]

1. Memutar video prosedur simulasi evakuasi tanggap darurat sebelum memulai rapat/acara;
2. Memberikan sosialisasi dan buku saku tanggap bencana kepada Unit kerja;
3. Melaksanakan simulasi tanggap darurat gempa bumi kepada pengguna gedung;
4. Melaksanakan simulasi tanggap darurat kebakaran kepada pengguna gedung;
5. Memberikan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan yang ditunjuk.

Furthermore, in an effort to realize an OHS culture, the Company also organizes various activities to handle emergency situations such as training and emergency response simulations as follows: [GRI 403-5]

1. Playing a video of emergency response evacuation simulation procedures before starting the meeting/event;
2. Providing outreach and disaster response pocketbooks to work units;
3. Carrying out earthquake emergency response simulations for building users;
4. Carrying out fire emergency response simulations for building users;
5. Providing occupational health and safety training to appointed employees.

Komitmen Jamkrindo dalam memberikan perlindungan kepada karyawan tercermin melalui sertifikasi berbagai sarana dan prasarana gedung perkantoran, termasuk instalasi proteksi kebakaran, motor diesel (genset), instalasi listrik, elevator penumpang (lift), dan sistem penyalur petir. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang, dan Produk Teknis Lainnya. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan yang melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemakaian, perubahan teknis, pembongkaran, atau pemusnahan instalasi dan peralatan untuk memperoleh izin dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Ibukota Jakarta.

Organisasi Pelaksana K3

Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan K3 dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penerapan SMK3 dikuatkan melalui Surat Edaran No. 24/SE/4/VIII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berlaku bagi seluruh insan Jamkrindo. Dalam menerapkan SMK3, Perusahaan telah menyusun Rencana K3 dengan melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yang terkait. [GRI 403-1, 403-8]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kerja No. PER-04/MEN/1987, Jamkrindo membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna melaksanakan K3 yang efektif. P2K3 merupakan badan pembantu di tempat kerja yang menjadi wadah kerja sama antara pengusaha dan pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam penerapan K3. Tugas P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan mengenai masalah K3.

P2K3 di Jamkrindo dibentuk pada 12 Maret 2021 dengan penanggung jawab adalah Direktur MSDM dan dikoordinatori oleh Kepala Bagian Administrasi dan Umum Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Tim anggota P2K3 sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari regu evaluasi, regu penyelamat dokumen, dan regu pemadam lantai/zona. Kemudian, dalam P2K3 juga terdapat koordinator badan pengelola, koordinator regu keamanan, koordinator *engineer* dan tim tanggap darurat yang terdiri dari 11 (sebelas) pihak dengan total 21 (dua puluh satu) anggota. Keberadaan P2K3 telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan selama tahun pelaporan [GRI 3-3, 403-4]

Pelatihan K3

Untuk mewujudkan target *zero accident* dan tidak adanya penyakit akibat kerja, Jamkrindo melaksanakan berbagai pelatihan K3. Dengan pelatihan tersebut, peserta bisa mengambil langkah dan tindakan terbaik pada saat menghadapi situasi darurat. Pelatihan K3 yang dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut: [GRI 403-5]

Jamkrindo's commitment to providing protection to employees is also reflected in the certification of various office building facilities and infrastructure, including fire protection installations, diesel motors (gensets), electrical installations, passenger elevators (lifts), and lightning distribution systems. This policy is a follow-up to DKI Jakarta Governor Regulation No. 19 of 2008 concerning the Procedures for Licensing the Use of Installed Aircraft, Machines, Equipment, Materials, Goods, and Other Technical Products. This regulation requires every company involved in planning, manufacturing, installing, using, making technical changes, dismantling, or destroying installations and equipment to obtain permission from the Head of the Manpower and Transmigration Department of the Jakarta Capital City Government.

OHS Implementing Organization

Jamkrindo is committed to increasing the effectiveness of achieving OHS goals by implementing an Occupational Safety and Health Management System (SMK3). The implementation of SMK3 was confirmed through Circular Letter No. 24/SE/4/VIII/2018 concerning Guidelines for Implementing the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), which applies to all Jamkrindo employees. In implementing SMK3, the Company has prepared an OHS Plan involving OHS Experts, the Occupational Safety and Health Advisory Committee (P2K3), Worker Representatives, and other related parties. [GRI 403-1, 403-8]

In accordance with Minister of Work Regulation No. PER-04/MEN/1987, Jamkrindo formed the Occupational Safety and Health Advisory Committee (P2K3) to implement effective OHS. P2K3 is an auxiliary body in the workplace which serves as a forum for cooperation between employers and workers to actively participate in implementing OHS. P2K3's task is to provide advice and considerations to employers regarding OHS issues.

P2K3 in Jamkrindo was formed on March 12, 2021, with the person in charge being the Director of HRM and coordinated by the Head of the Administration and General Section of the Human Resources Management (HRM) Division, with a team of P2K3 members consisting of 60 (sixty) people, including an evaluation team, a document rescue team, and floor/zone fire teams. Additionally, within P2K3, there is a coordinator for the management body, a security team coordinator, an engineering coordinator, and an emergency response team consisting of 11 (eleven) parties, with a total of 21 (twenty-one) members. The existence of P2K3 has been socialized to stakeholders during the reporting year. [GRI 403-4]

OHS Training

To achieve the target of zero accidents and no work-related illnesses, Jamkrindo conducts various OHS training sessions. Through this training, participants are equipped to take the best steps and actions when facing an emergency situation. OHS training conducted during 2024 is as follows: [GRI 403-5]

No.	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Tujuan Purposes	Jumlah Peserta
1	Uji Coba BCMS di Kantor Pusat : Simulasi Gempa Bumi BCMS Trial at Head Office: Earthquake Simulation	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran Disaster Preparedness for Earthquakes/Fires	448 orang 448 people
2	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bandung Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Regional Office and Bandung Branch Office	25-28 Februari 2024 February 25-28, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	33 orang 33 people
3	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Wilayah Medan dan Kantor Cabang Medan Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Medan Regional Office and Medan Branch Office	26-29 Februari 2024 February 26-29, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	22 orang 22 people
4	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Padang Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Padang Branch Office	22-24 April 2024 April 22-24, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	26 orang 26 people
5	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Bandar Lampung Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Bandar Lampung Branch Office	29-30 April 2024 April 29-30, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	27 orang 27 people
6	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Manado Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Manado Branch Office	20-22 April 2024 April 20-22, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	8 orang 8 people
7	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Solo Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Manado Branch Office	20-22 April 2024 April 20-22, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	8 orang 8 people
8	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Manokwari Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) in Manokwari	24-25 April April 24-25	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	14 orang 14 people
9	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Makassar Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Regional Office and Makassar Branch Office	27-30 Mei 2024 May 27-30, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	21 orang 21 people
10	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Malang Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Malang Branch Office	19-21 Juni 2024 June 19-21, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	16 orang 16 people
11	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Palu Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Palu Branch Office	19-21 Juni 2024 June 19-21, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	17 orang 17 people

No.	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Tujuan Purposes	Jumlah Peserta
13	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Kupang Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Kupang Branch Office	24-26 Juni 2024 June 24-26, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	14 orang 14 people
14	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Sorong Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Sorong Branch Office	15-17 Juli 2024 July 15-17, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	10 orang 10 people
15	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Batam Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Batam Branch Office	17-19 Juli 2024 July 17-19, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	12 orang 12 people
16	Sosialisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BCMS (Business Continuity Management System) Kantor Cabang Jayapura Dissemination of OHS (Occupational Health and Safety) and BCMS (Business Continuity Management System) Jayapura Branch Office	24-26 Juli 2024 July 24-26, 2024	Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi/Kebakaran dan simulasi BCMS Disaster preparedness for earthquakes/fires and BCMS simulation	23 orang 23 people

Kinerja K3 Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak tercatat laporan tentang penyakit akibat kerja di Jamkrindo. Namun demikian, tercatat empat kecelakaan kerja dengan Parameter 1 sebanyak 1 (satu) kasus, Parameter 3 sebanyak 2 (dua) kasus, dan Parameter 5 sebanyak 1 (satu) kasus. Terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, Perusahaan memberikan hak berupa asuransi kesehatan atau BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja untuk korban cedera/luka dan santuan meninggal untuk korban meninggal dunia. Sejalan dengan itu, Perusahaan juga memetakan kecelakaan yang terjadi, termasuk mitigasinya, sebagaimana tabel berikut: [GRI

403-9, 403-10]

Jenis Risiko Type of Risk	Risiko Risk	Penyebab Causes	Dampak Impact	Mitigasi Mitigation
Risiko Operasional Operational Risk	Terjadinya kecelakaan kerja Occurrence of work accidents	- Kurangnya awareness terhadap keselamatan kerja - Kurangnya awareness Unit Kerja atas pemenuhan peralatan K3 - Kurangnya monitoring atas peralatan K3 - Kurangnya pemahaman karyawan terkait K3	- Cedera atau luka - Timbulnya korban jiwa - Peningkatan risiko reputasi	- Memberikan himbauan kepada karyawan terkait keselamatan berkendara selama perjalanan pulang dan menuju kantor - Melakukan <i>threat assessment</i> di Kantor Pusat maupun Unit Kerja - Pemenuhan peralatan K3 di Kantor Pusat maupun Unit Kerja - Melakukan monitoring atas peralatan K3 - Memberikan himbauan kepada karyawan terkait K3
		- Lack of awareness of occupational safety - Lack of awareness of work units regarding the fulfillment of occupational safety and health equipment - Lack of monitoring of occupational safety and health equipment - Lack of employee understanding of occupational safety and health	- Injury or wound - Loss of life - Increased reputation risk	- Provide reminders to employees regarding driving safety during their commute to and from work. - Conduct threat assessments at the Head Office and Work Units. - Ensure that OHS equipment is available at the Head Office and Work Units. - Monitor OHS equipment. - Provide reminders to employees regarding OHS.

Occupational Safety and Health Performance in 2024

In 2024, there were no reports of work-related diseases at Jamkrindo. However, there were four work accidents with Parameter 1 in one case, Parameter 3 in two cases, and Parameter 5 in one case. For employees who experienced workplace accidents, the Company provided benefits in the form of health insurance or BPJS Work Accident Insurance for injured/wounded victims and compensation for deceased victims. Additionally, the Company mapped out the accidents that occurred, including their mitigation measures, as shown in the following table: [GRI 403-9, 403-10]

Tabel Skala Ukur Tingkat Keparahan Kecelakaan Kerja
Table of Work Accident Severity Scale

Level	Parameter	Dampak Kecelakaan Kerja Impact of Work Accidents
5	Sangat Tinggi Very Severe	Kematian Death
4	Tinggi Severe	Cedera fisik/mental yang menyebabkan cacat tetap Physical/mental injury resulting in permanent disability
3	Menengah Moderate	Cedera fisik/mental yang mengharuskan rawat inap Physical/mental injury requiring hospitalization
2	Rendah Minor	Cedera fisik/mental yang perlu penanganan rawat jalan rumah sakit Physical/mental injury requiring outpatient hospital treatment
1	Sangat Rendah Very Minor	Luka ringan yang dapat diatasi dengan P3K Minor injuries that can be treated with first aid

Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Pendirian Jamkrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga memiliki nilai luhur untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha dari golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan berupaya meraih keuntungan maksimal sambil tetap berkomitmen memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), koperasi, dan masyarakat di sekitarnya.

Kontribusi BUMN dalam pemberdayaan UMKM, koperasi, dan masyarakat diperkuat oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Berdasarkan peraturan tersebut, BUMN dapat melaksanakan TJSL melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya, termasuk Pembinaan. [GRI 3-3]

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Spirit program ini sejalan dengan TJSL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Langkah konkret yang diambil Jamkrindo untuk memberdayakan pelaku UMKM dan masyarakat meliputi penyaluran dana Program Pendanaan UMK, membuka peluang bagi pelaku UMK untuk menjadi pemasok lokal barang dan jasa, serta merekrut masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan sebagai karyawan. Melalui berbagai kebijakan ini, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran Jamkrindo. Selain itu, pelaksanaan TJSL BUMN juga merupakan bentuk dukungan

Responsibility to Society

The establishment of Jamkrindo as a State-Owned Enterprise (SOE) is not solely about pursuing profit, but also upholds noble values, namely actively participating in providing guidance and assistance to entrepreneurs from economically disadvantaged groups, cooperatives, and the community. For this reason, the Company strives to achieve maximum profits while continuing to strengthen its commitment to empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), cooperatives, and the surrounding community.

The contribution of SOEs in empowering MSMEs, cooperatives, and the community is strengthened by the issuance of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Programs of State-Owned Enterprises. According to this regulation, SOEs can implement TJSL through the Micro and Small Business Funding Program, as well as assistance and/or other activities, including coaching. [GRI 3-3]

The SOE Social and Environmental Responsibility Program (SOE CSR Program) is an activity that represents the commitment and devotion of SOEs to sustainable development by providing benefits to the economy, society, the environment, as well as law and governance with principles that are more integrated, focused, measurable, and accountable and it is part of the company's business approach. The spirit of this program is in line with CSR as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the implementation of which is regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

Concrete steps taken by Jamkrindo to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and the community include distributing funds from the MSE Funding Program, opening opportunities for MSEs to become local suppliers of goods and services, and recruiting members of the surrounding community where the company operates as employees. Through these policies, the community will benefit from Jamkrindo's presence. Furthermore, the implementation of SOE CSR is

nyata Jamkrindo terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai TJSL BUMN dapat ditemukan dalam Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Jamkrindo Tahun 2024. [GRI 3-3]

Penerapan TJSL BUMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [OJK F.25]

Setiap lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik di Indonesia wajib menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Sesuai regulasi tersebut, kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan penjamin adalah 1 Januari 2024. Walau peraturan tersebut belum berlaku, Jamkrindo sebagai bagian dari perusahaan penjamin berinisiatif untuk lebih awal menerapkan peraturan tersebut karena *spirit* keberlanjutan yang diusung selaras dengan *spirit* Jamkrindo.

Sesuai dengan POJK Keuangan Berkelanjutan, setiap lembaga jasa keuangan yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Laporan penggunaan dana TJSL dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan. Selanjutnya, berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebagai pedoman teknis, Laporan Keberlanjutan antara lain memuat informasi mengenai kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis perusahaan dikaitkan dengan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia.

Jamkrindo telah melakukan pemetaan pelaksanaan TJSL BUMN dengan pencapaian 17 (Tujuh Belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Dalam hal ini, Perusahaan menyusun prioritas TPB/SDGs dengan menganalisa risiko dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan TJSL BUMN tersebut. Hingga akhir tahun 2023, implementasi program TJSL BUMN terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. [OJK F.23]

Program TJSL BUMN Tahun 2024 [GRI 203-2, 413-1] [OJK F.3, F.23, F.25]

Program TJSL BUMN Jamkrindo tahun 2024 merujuk hasil Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSL Tahun 2024, yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor: RIS-22/DSI.MBU.B/12/2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

also a tangible form of Jamkrindo's support for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), as well as participation in community empowerment. Detailed information about SOE CSR can be found in PT Jamkrindo's 2024 Social and Environmental Responsibility Report. [GRI 3-3]

Implementation of SOE CSR and Sustainable Development Goals [OJK F.25]

All financial service institutions, issuers, and public companies in Indonesia are required to implement the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, also known as the POJK Sustainable Finance. According to this regulation, the obligation for guarantee companies to implement sustainable finance begins on January 1, 2024. Although the regulation is not yet in effect, Jamkrindo, as part of a guarantee company, has taken the initiative to implement the regulation ahead of time, as the spirit of sustainability it promotes aligns with Jamkrindo's own values.

In accordance with the POJK Sustainable Finance, every financial service institution required to implement CSR must allocate a portion of its CSR funds to support sustainable finance activities. The use of CSR funds must be reported in the Sustainability Report. Furthermore, based on the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies as a technical guideline, the Sustainability Report must include, among other things, information on CSR activities related to community empowerment and support for the company's business in alignment with the 17 (seventeen) Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia.

Jamkrindo has mapped the implementation of SOE CSR in alignment with the achievement of the 17 (seventeen) Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. In this regard, the company sets SDGs priorities by analyzing the risks and impacts arising from its SOE CSR activities. As of the end of 2024, the implementation of the SOE CSR program has proven to bring positive impacts to the community as its beneficiaries. [OJK F.23]

2024 SOE CSR Program [GRI 203-2, 413-1] [OJK F.3, F.23, F.25]

Jamkrindo's 2024 SOE CSR Program refers to the results of the 2024 CSR Program Work Plan and Budget Discussion, as stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) No RIS-22/DSI.MBU.B/12/2023 concerning the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKA), which are as follows:

Tabel RKA Program TJSL Tahun 2024
2024 CSR Program RKA Table

No.	Program	RKA 2024 (Rp) 2024 RKA (Rp)
1	Penyaluran Program TJSL Non PUMK (CID) Distribution of Non-PUMK CSR Program (CID)	15.500.000.000
2	Penyaluran Program TJSL Non PUMK (Non CID) Distribution of Non-PUMK CSR Program (Non-CID)	875.000.000
3	Penyaluran Pendanaan UMK Mandiri Distribution of Independent MSE Funding	-
4	Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi "BRI" Distribution of "BRI" Collaborative MSE Funding	3.900.000.000
Total		20.275.000.000

Realisasi Program dan Kegiatan 2024

RKA Program Pendanaan UMK

Jamkrindo akan menyalurkan Program Pendanaan UMK yang masuk ke dalam pilar ekonomi sebesar Rp3.900.000.000 melalui Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK") kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022. Adapun implementasi penyaluran PUMK merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. No. PER-1/MBU/3/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial BUMN.

RKA Program TJSL/Program Bantuan

Nomor: RIS-22/DSI.MBU.B/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024 ditetapkan bahwa RKA Program TJSL/Program Bantuan (CID) sebesar Rp15.500.000.000 dan RKA Program TJSL/Program Bantuan (NON-CID) sebesar Rp875.000.000.

2024 Program and Activity Realization

MSE Funding Program RKA

Jamkrindo will distribute the MSE Funding Program, which falls under the economic pillar, amounting to IDR3,900,000,000 through a Cooperation Program for Micro and Small Business Funding ("PUMK Cooperation Program") with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, in accordance with the letter from the Minister of State-Owned Enterprises Number S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022. The implementation of the PUMK distribution refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/3/2023 dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and the Environmental and Social Responsibility Program of SOEs.

CSR Program/Aid Program RKA

No: RIS-22/DSI.MBU.B/12/2023 dated December 12, 2023 regarding the 2024 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget, it has been determined that the CSR Program/Aid Program RKA (CID) amounts to IDR 15,500,000,000 and the CSR Program / Aid Program RKA (NON-CID) amounts to IDR875,000,000.

Tabel RKA Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024
2024 Sustainable Development Goals (SDG) RKA Table

No.	TPB SDGs	RKA Tahun 2024 (Rp) 2024 RKA (IDR)
1	Pilar Pembangunan Sosial Pillars of Social Development	8.450.000.000
2	Pilar Pembangunan Ekonomi Pillars of Economic Development	5.625.000.000
3	Pilar Pembangunan Lingkungan Pillars of Environmental Development	6.000.000.000
4	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pillars of Legal and Governance Development	200.000.000
TOTAL		20.275.000.000

Selanjutnya, sesuai dengan surat arahan Menteri BUMN melalui Aspirasi Pemegang Saham bahwa program TJSL BUMN agar fokus kepada 3 (tiga) bidang prioritas yaitu Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK, maka pelaksanaan TJSL BUMN Jamkrindo juga fokus kepada 3 bidang dimaksud. Fokus program prioritas tersebut sekaligus menunjukkan dukungan Jamkrindo terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Furthermore, in accordance with the directive letter from the Minister of SOEs through the Shareholders' Aspirations, which states that the SOE CSR program should focus on three priority areas Education, Environment, and MSE Development—Jamkrindo's SOE CSR implementation will also focus on these three areas. This prioritization not only guides the program's direction but also demonstrates Jamkrindo's support for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Tabel Program TJSL Prioritas Tahun 2024
CSR Priority Program Table for 2024

No. Program		Program di Bidang Pendidikan Education Program	TPB SDG	RKA 2024 2024 RKA	Realisasi TW IV 2024 Realization Q4 2024	Capaian Achievement
1	2	3	4	5	6	7=6:5
1	Pendidikan Education	Edukasi Membangun Kesehatan Mental dalam Keluarga (Best Practice Parenting Program) Mental Health Education in Families (Best Practice Parenting Program)		150.000.000	199.206.150	132,80%
2		Edukasi Berjenjang Berkelanjutan pada 5,400 Siswa/i SMP (Usia sekolah jangan dulu nikah!) Sustainable Tiered Education for 5,400 Junior High School Students (Encouraging Students to Focus on Education Before Marriage)		350.000.000	401.982.308	114,85%
3		Edukasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Berkualitas kepada 540 Tenaga Pendidik DKI Jakarta (Guru Berkualitas Anak Indonesia Cerdas) Quality Primary School Teacher Education for 540 Teachers in DKI Jakarta (Quality Teachers for Smart Indonesian Children)		150.000.000	159.430.000	106,29%
4		5,400 Tas Sekolah Kepada Siswa/i di Wilayah Seluruh Indonesia 5,400 School Bags for Students Across Indonesia		700.000.000	611.070.353	87,30%
5		Renovasi Fasilitas Pendidikan Wilayah Seluruh Indonesia Renovation of Educational Facilities Across Indonesia		500.000.000	1.545.232.355	309,05%
6		Program Edukasi Literasi Keuangan bagi Keluarga Prasejahtera dan Pengentasan Stunting Financial Literacy Education for Underprivileged Families & Stunting Alleviation		250.000.000	388.970.288	155,59%
7		Beasiswa Siswa Berprestasi Scholarships for High-Achieving Students		200.000.000	298.218.400	149,11%
8		Program Mandatory BUMN Mandatory Program by the Ministry of SOEs		1.550.000.000	0	0,00%
9		Bantuan Sarana Digital Jaringan Internet untuk Sekolah di Wilayah Timur Indonesia Digital Internet Network Support for Schools in Eastern Indonesia		250.000.000	20.000.000	8,00%
10		Pameran Karya Seni Siswa/i Disabilitas Art Exhibition by Students with Disabilities		100.000.000	0	0,00%
Total Program Pendidikan Total – Education Program				4.200.000.000	3.624.109.854	86,29%

Tabel Program TJSL Prioritas Tahun 2024
CSR Priority Program Table for 2024

No.	Program	Program di Bidang Pendidikan Education Program	TPB SDG	RKA 2024 2024 RKA	Realisasi TW IV 2024 Realization Q4 2024	Capaian Achievement
1	Lingkungan Environment	Desa Binaan dengan Sumber Energi Terbarukan Assisted Village with Renewable Energy		200,000,000	35,000,000	17,50%
2		Optimalisasi Pengelolaan Sampah Waste Management Optimization		600,000,000	805,880,485	134,31%
3		Program Sanitasi Sekolah di Wilayah Seluruh Indonesia Pada 54 Sekolah School Sanitation Program Across 54 Schools in Indonesia		1,350,000,000	1,420,000,000	105,19%
4		Adopsi pohon Tree Adoption		250,000,000	155,270,000	62,11%
5		Drop box program untuk limbah tekstil Textile Waste Drop Box Program		200,000,000	0	0,00%
6		Perbaikan Fasilitas Umum Masyarakat Public Facility Renovation		750,000,000	1,055,322,500	140,71%
7		Program Renovasi Rumah Ibadah House of Worship Renovation Program		1,500,000,000	1,392,869,400	92,86%
8		Tanalino III Kolaborasi dengan Garuda Indonesia Tanalino III Collaboration with Garuda Indonesia		100,000,000	60,000,000	60,00%
9		Safari Ramadhan 2024 2024 Ramadan Outreach Program		250,000,000	294,000,000	117,60%
Total – Environment Program				5.200.000.000	5.218.342.385	100,35%
1	Pengembangan UMK MSE Development	MamaPreneur di Wilayah Timur MamaPreneur in Eastern Indonesia		200.000.000	490.360.043	245,18%
2		Kampung Binaan Jamkrindo di Wilayah Timur Indonesia Jamkrindo Assisted Village in Eastern Indonesia		200.000.000	362.191.532	181,10%
3		Bantuan alat pertanian kepada petani Millenial di Wilayah Jawa Tengah Farming Equipment Aid for Millennial Farmers in Central Java		150.000.000	265.000.000	176,67%
4		Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Keuangan Bagi Pengrajin Souvenir Khas Daerah Marketing & Financial Management Training for Local Souvenir Artisans		150.000.000	431.431.182	287,62%
5		Pemberian Bibit Kopi Unggul Untuk Kelompok Petani Kopi Superior Coffee Seed Aid for Coffee Farmer Groups		150.000.000	249.590.070	166,39%
6		Pelatihan Pengolahan dan Penyimpanan Rumput Laut di Wilayah Sulawesi Selatan Seaweed Processing and Storage Training in South Sulawesi		150.000.000	296.746.956	197,83%
Total Program Pengembangan UMK Total – MSE Development				1.000.000.000	2.095.319.783	209,53%
Grand Total Grand Total				10.400.000.000	10.937.772.022	105,17%

Sesuai tabel di atas, realisasi penyaluran dana program prioritas TJSL Jamkrindo hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp10,94 miliar atau 105,17% dari RKA Program prioritas tahun 2024.

Kinerja Program TJSL PT Jamkrindo Tahun 2024

PT Jamkrindo telah menyalurkan bantuan untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN CID & Non CID sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp18.648.763.304 atau 91,98% dari RKA TJSL BUMN Tahun 2024. Penyaluran program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) tercatat sebesar Rp2.075.000.000 atau 53,21% dari RKA penyaluran PUMK Tahun 2024 yang disalurkan secara kolaborasi dengan Bank BRI. Sedangkan untuk Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau Community Involvement & Development (CID) yaitu terbilang sebesar Rp15.538.763.304 atau 100,25% dari RKA TJSL Non PUMK CID 2024 dan di luar unit Community Involvement & Development (Non-CID) sebesar Rp1.034.527.849 atau 118,23% dari RKA TJSL Non PUMK (Non-CID).

According to the table above, the realization of the disbursement of Jamkrindo's priority CSR program funds by the end of 2024 amounts to IDR10.94 billion, or 105.17% of the 2024 Priority Program RKA.

Performance of PT Jamkrindo's CSR Program in 2024

PT Jamkrindo has distributed aid for the SOE CID & NON CID Social and Environmental Responsibility (CSR) Program until 2024 amounting to IDR 18,648,763,304 or 91.98% of the 2024 SOE CSR RKA. The distribution of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) is recorded at IDR2,075,000,000 or 53.21% of the 2024 PUMK Budget Plan, distributed in collaboration with Bank BRI. Meanwhile, the Non-PUMK Social Responsibility Program CSR carried out by the Community Involvement and Development (CID) unit amounted to Rp15,538,763,304 or 100.25% of the 2024 Non-PUMK CID CSR RKA, and the amount managed outside the Community Involvement and Development (Non-CID) unit totaled IDR1,034,527,849 or 118.23% of the CSR Non PUMK (Non-CID) RKA. The details of the CSR Program distribution based on the Sustainable Development Goals (SDGs) are presented in the following table:

Tabel Realisasi Program TJSL BUMN 2024
Table of SOE CSR Program Realization in 2024

Program Program	RKA 2024 2024 RKA	Real TW IV 2024 Q4 2024 Realization	Capaian Achievement
1	2	3	4=3:2
Penyaluran Program TJSL Non PUMK (CID) Distribution of Non-PUMK (CID) CSR Program	15.500.000.000	15.538.763.304	99,67%
Penyaluran Program TJSL Non PUMK (Non CID) Distribution of Non PUMK (Non CID) TJSL Program	875.000.000	1.034.527.849	118,23%
Penyaluran Pendanaan UMK Mandiri Distribution of Independent MSE Funding	-	-	0,00%
Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi Distribution of Collaborative MSE Funding	3.900.000.000	2.075.000.000	53,21%
Realisasi Program TJSL BUMN SOE CSR Program Realization	20.275.000.000	18.648.291.153	91,53%

Program Creating Share Value (CSV) PT Jamkrindo

Pada tahun 2024, terdapat 3 program (Microbusiness UMKM Lampung II, Pendampingan UMKM Garut dan Pemberdayaan Masyarakat Ciletuh) Program TJSL yang berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Shared Value ("CSV") bagi perusahaan yang tertuang dalam RKA TJSL Tahun 2024. Program CSV sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.735.120.526,- atau 122,52% jika dibandingkan dengan RKA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

PT Jamkrindo Creating Shared Value (CSV) Program

In 2024, there were three programs (Microbusiness for MSMEs in Lampung II, Assistance for MSMEs in Garut, and Community Empowerment in Ciletuh). The TJSL program is committed to supporting core businesses and creating Creating Shared Value ("CSV") for company as outlined in the 2024 TJSL Budget Plan. The CSV program through December 31, 2024 amounted to IDR735,120,526, or 122.52% compared to the 2024 Budget Plan, with details as follows:



Tabel Realisasi Program CSV Tahun 2024
CSV Program Realization Table 2024

No. No.	Program CSV CSV Program	TPB SDG	RKA 2024 2024 RKA	Realisasi Triwulan IV 2024 Q4 2024 Realization	
1	2	3	4	5	
1	Kelompok Usaha Bersama Microbusiness Lanjutan Advanced Microbusiness Joint Business		200.000.000	246.000.000	
2	Pendampingan UMKM Garut Group MSME Assistance in Garut		250.000.000	234.120.526	
3	Pemberdayaan Masyarakat Ciletuh Community Empowerment in Ciletuh		150.000.000	255,000,000	
Total			600.000.000	735.120.526	

Capaian Achievement	Keterangan Program Program Description	Manfaat Untuk Perusahaan dan Nilai Sosial Benefit for the Company and Social Values
6=5:4	7	7
123,00%	PT Jaminan Kredit Indonesia akan melaksanakan program dalam rangka mendukung penguatan ekonomi bagi UMKM dengan kegiatan pelatihan peningkatan usaha, legalitas usaha, laporan keuangan digital dengan tujuan agar UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan berbekal pengetahuan kewirausahaan yang kompleks sehingga memiliki daya saing yang kuat dengan harapan pelaku UMKM memiliki peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan yang relevan. PT Jaminan Kredit Indonesia PT Jaminan Kredit Indonesia will implement a program aimed at strengthening the economy of MSMEs through training in business development, business legality, and digital financial reporting. The objective is to equip MSMEs with comprehensive entrepreneurial knowledge to enhance their competitiveness, thereby increasing their opportunities to access relevant financing.	Dapat mendukung para UMKM dari sisi ekonomi untuk dapat mengembangkan usahanya agar dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan Jamkrindo mendukung program ini untuk dapat memajukan UMKM serta memberikan pembiayaan KUR kepada UMKM serta menjamin KUR tersebut. It aims to support MSMEs economically, enabling them to develop their businesses and remain competitive in line with current market trends. Jamkrindo supports this program to advance MSMEs by providing KUR financing and guaranteeing those loans
93,65%	Garut telah memiliki modal social yang baik yang menggerakkan dinamika perekonomian sehari-hari. Jaminan Kredit Indonesia berperan dalam menginspirasi masyarakat untuk memberikan nilai lebih demi pembangunan berkelanjutan. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain : Perluasan wilayah kampanye anti sampah plastic dan pendirian bank sampah, peningkatan usaha homestay dengan wisata edukasi budidaya hidroponik, pelatihan keterampilan usaha untuk sektor peternakan, pengolahan makanan, dan petani. PT Jaminan Kredit Indonesia bertujuan mendampingi UMKM tersebut untuk naik kelas dan mendapatkan pembiayaan KUR. Garut has established a strong social capital that drives the dynamics of its daily economy. Jaminan Kredit Indonesia plays a role in inspiring the community to add value for sustainable development. Potential areas for growth include: expanding the anti-plastic waste campaign and establishing a waste bank, enhancing homestay businesses through educational tours on hydroponic farming, providing business skills training for the livestock, food processing, and agriculture sectors. PT Jaminan Kredit Indonesia aims to assist these MSMEs in advancing to the next level and securing KUR financing.	
170,00%	Tujuan Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Geopark Ciletuh yaitu : 1. Menyelesaikan permasalahan ekonomi yang akan berdampak positif pada kualitas hidup Masyarakat Ciletuh, kemandirian pada ekonomi dan kehidupan yang Sejahtera; 2. 2025 ciletuh palabuhanratu bebas sampah plastik; 3. Pendidikan yang berkualitas sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul. The goals of the Geopark Ciletuh Community Economic Empowerment Program include: 1. Solving economic problems that positively impact Ciletuh residents' quality of life, economic independence, and overall well-being; 2. Achieving a plastic waste-free Ciletuh-Palabuhanratu by 2025; 3. Providing quality education to produce excellent human resources.	
122,52%		

Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan [GRI 203-1] [OJK F.23, F.25]

Pembangunan berbagai infrastruktur untuk masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan, seperti yang tercantum dalam tabel Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya, merupakan salah satu prioritas pelaksanaan TJSL BUMN oleh Jamkrindo pada tahun 2024. Infrastruktur yang tersedia memberikan banyak manfaat, seperti sarana pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, serta pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk MCK, yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu, bantuan untuk pembangunan sarana ibadah memungkinkan penganut agama untuk melaksanakan ibadah dengan lebih khushuk.

Di sepanjang tahun 2024, Jamkrindo menerima banyak proposal program bantuan pembangunan infrastruktur dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodasi usulan tersebut. Meskipun demikian, Perusahaan tetap melakukan seleksi agar program-program yang dipilih dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hingga akhir tahun pelaporan, beragam infrastruktur telah dibangun sebagai investasi yang sangat bermanfaat bagi komunitas setempat. Semua program tersebut merupakan bentuk bantuan dari Jamkrindo sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara gratis. Berbagai investasi infrastruktur ini terbukti mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi masyarakat.

Di antara investasi infrastruktur yang dibangun Jamkrindo tahun 2024 adalah perbaikan fasilitas umum di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Maluku. Selain itu, Perseroan juga merenovasi rumah ibadah di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali.

Titik Akses pada Wilayah Rendah Populasi atau Ekonomi Kurang Menguntungkan [GRI G4 FS13]

Jamkrindo berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya kepada itra terjamin dan penerima jaminan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di daerah dengan wilayah rendah populasi atau ekonomi masyarakat setempat yang kurang menguntungkan atau daerah tertinggal. Komitmen tersebut dilaksanakan Perusahaan dengan merujuk hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Selama tahun 2024, Jamkrindo telah memiliki kantor unit di daerah rendah populasi dan daerah tertinggal sebagaimana tabel berikut:

Infrastructure Investment and Service Support [GRI 203-1] [OJK F.23, F.25]

The development of various infrastructures for communities around the company's operational areas, as listed in the Assistance Programs and/or Other Activities table, is one of Jamkrindo's priorities in implementing the State-Owned Enterprise's CSR in 2024. The available infrastructure brings numerous benefits, such as educational and training facilities that improve education quality, as well as the development of health facilities including sanitation which contribute to better public health. Additionally, support for the construction of worship facilities enables religious adherents to worship in a more solemn and comfortable environment.

Throughout 2024, Jamkrindo received numerous proposals for infrastructure development assistance programs and made every effort to accommodate these requests. Nevertheless, the Company continued to apply a selection process to ensure that the chosen programs would deliver optimal benefits to the community. By the end of the reporting year, various infrastructure projects had been completed as valuable investments for the local communities. All of these programs were fully funded by Jamkrindo, allowing the public to access and utilize them free of charge. These infrastructure investments have proven to bring about positive change and advancement for the communities.

Among the infrastructure investments carried out by Jamkrindo in 2024 were the improvement of public facilities in Banten, West Java, Central Java, East Java, Bali, and Maluku. The Company also renovated places of worship in Banten, West Java, Central Java, East Java, and Bali.

Access Points in Low-Population or Economically Disadvantaged Areas [GRI G4 FS13]

Jamkrindo is committed to providing the widest possible access to customers across all regions of Indonesia, including areas with low population density or economically disadvantaged communities, as well as underdeveloped regions. This commitment is carried out by the Company in reference to the 2020 Population Census by Statistics Indonesia and Presidential Regulation No. 63 of 2020 concerning the designation of underdeveloped regions for the 2020–2024 period. Throughout 2024, Jamkrindo has established branch offices in low-population and underdeveloped areas as shown in the following table:

Nama Kantor Cabang/Unit Pelayanan Branch Office/Service Unit Name	Kota/Kabupaten City/Regency	Provinsi Province
Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat West Sulawesi
Tarakan	Tarakan	Kalimantan Utara East Kalimantan
Manokwari	Manokwari	Papua Barat West Papua
Sorong	Sorong	Papua Barat West Papua
Ternate	Ternate	Maluku Utara East Maluku

*) Sepuluh provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit menurut Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Juni 2024, adalah Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Papua, Gorontalo, Papua Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Papua Pegunungan.
 *) The ten provinces with the lowest population according to the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs, as of June 2024, are South Papua, West Papua, Southwest Papua, North Kalimantan, Papua, Gorontalo, Central Papua, North Maluku, West Sulawesi, and Highland Papua.

Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan [GRI 203-2] [OJK F.23]

Sebelum terbit regulasi tentang TJSL BUMN, dampak ekonomi tidak langsung atas keberadaan Jamkrindo sudah dirasakan masyarakat di sekitar operasional perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak positif itu, antara lain, Perusahaan membuka lapangan kerja sehingga warga setempat/lokal bisa bergabung menjadi karyawan setelah lolos proses rekrutmen. Selain itu, keberadaan Perusahaan juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi pemasok atau vendor barang dan jasa yang dibutuhkan Jamkrindo. Pada gilirannya, terserapnya pekerja lokal dan terjalinya kerja sama dengan penyedia atau vendor barang dan jasa lokal akan meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, Jamkrindo berupaya memastikan bahwa keputusan dan operasional bisnisnya memberikan dampak negatif seminimal mungkin terhadap masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan tanggung jawab ini, perusahaan membuka saluran komunikasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat setempat untuk menyampaikan pengaduan atau tanggapan terkait dampak negatif yang mungkin timbul dari operasional Jamkrindo. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai kanal yang disediakan oleh Jamkrindo, antara lain:

Telepon : +62 21 6540335
 Faksimile : +62 21 6540344, 6540348
 Email : contact@jamkrindo.co.id
 Situs Web : www.jamkrindo.co.id
 Media Sosial : Twitter @pt_jamkrindo
 Instagram @pt_jamkrindo
 Facebook Jamkrindo
 YouTube PT Jamkrindo

Significant Indirect Economic Impact [GRI 203-2] [OJK F.23]

Even before the issuance of regulations on the SOE CSR, the indirect economic impact of Jamkrindo's presence had already been felt by the communities surrounding the company's operations and other stakeholders. These positive impacts include the creation of job opportunities, allowing local residents to become employees after passing the recruitment process. In addition, the Company's presence also creates opportunities for local entrepreneurs to become suppliers or vendors of goods and services needed by Jamkrindo. Ultimately, the absorption of local workers and the establishment of partnerships with local goods and service providers help increase income and drive economic growth within the local communities.

Public Complaint Management Mechanism

As a responsible corporate entity, Jamkrindo strives to ensure that its business decisions and operations have minimal negative impact on the community and environment. In line with this responsibility, the company provides communication channels for stakeholders and local communities to submit complaints or feedback regarding any potential negative impact resulting from Jamkrindo's operations. Complaints can be submitted through various channels provided by Jamkrindo, including:

Phone : +62 21 6540335
 Fax : +62 21 6540344, 6540348
 Email : contact@jamkrindo.co.id
 Website : www.jamkrindo.co.id
 Social Media : Twitter @pt_jamkrindo
 Instagram @pt_jamkrindo
 Facebook Jamkrindo
 YouTube PT Jamkrindo

Per 31 Desember 2024, Jamkrindo tidak menerima pengaduan dari masyarakat atas dampak operasional perusahaan. [OJK F.23, F.24]

Tanggung Jawab Produk

Kualitas produk dan layanan kepada konsumen menjadi salah satu fokus utama bagi Jamkrindo dalam menjalankan usahanya. Perusahaan meyakini bahwa semakin tinggi kualitas layanan dan produk yang diberikan, semakin besar dampak positifnya terhadap keberlanjutan perusahaan. Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo telah melaksanakan berbagai upaya dan kebijakan untuk memberikan layanan dan produk terbaik kepada konsumen, dengan tujuan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan penjamin lainnya.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab kepada konsumen, Jamkrindo melaksanakan serangkaian program dan kebijakan. Program-program tersebut mencakup penyediaan layanan yang setara bagi semua konsumen, inovasi dan pengembangan produk serta jasa, penekanan pada evaluasi kualitas produk, pembukaan saluran pengaduan untuk konsumen, serta komitmen untuk memberikan solusi terbaik sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, Jamkrindo berupaya untuk terus meningkatkan pengalaman dan kepuasan konsumen.

Perlakuan Setara untuk mitra terjamin dan penerima jaminan/Konsumen [OJK F.17]

Jamkrindo selalu berupaya memahami kebutuhan seluruh mitra penjaminan dan memberikan pelayanan terbaik. Di tengah perkembangan era digital dan teknologi saat ini, perusahaan terus menyesuaikan layanan dengan menawarkan berbagai kemudahan sambil tetap menjaga keamanan data mitra terjamin dan penerima jaminan. Langkah ini penting untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas diganti mitra terjamin dan penerima jaminan.

Kepercayaan dan loyalitas mitra penjaminan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesetaraan dalam memberikan layanan. Dalam hal ini, Jamkrindo berkomitmen untuk memperlakukan semua mitra penjaminan secara inklusif dan setara, tanpa memandang latar belakang agama, suku, etnis, gender, atau politik yang bersifat diskriminatif.

Bagi Perusahaan, penghormatan terhadap kesetaraan dalam pelayanan merupakan salah satu wujud nyata penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

As of December 31, 2024, Jamkrindo had not received any public complaints regarding the impact of the company's operations. [OJK F.23, F.24]

Product Responsibility

Product and service quality for customers is one of Jamkrindo's main priorities in running its business. The company believes that the higher the quality of services and products provided, the greater the positive impact on the company's sustainability. Throughout 2024, Jamkrindo has implemented various efforts and policies to deliver the best services and products to its customers, with the goal of creating a competitive advantage over other guarantee companies.

To fulfill its responsibilities to consumers, Jamkrindo implements a series of programs and policies. These programs include providing equal services for all consumers, innovation and development of products and services, emphasis on product quality evaluation, the opening of complaint channels for consumers, and a commitment to providing the best solutions in accordance with applicable standard procedures. Through these measures, Jamkrindo strives to continuously improve the consumer experience and satisfaction.

Equal Treatment for Customers/Consumers [OJK F.17]

Jamkrindo consistently strives to understand the needs of all customers and provide the best service. Amid the current digital and technological advancements, the company continues to adjust its services by offering various conveniences while maintaining customer data security. This step is crucial to maintaining customer trust and loyalty.

Customer trust and loyalty are influenced by various factors, including equality in service delivery. In this regard, Jamkrindo is committed to treating all customers inclusively and equally, regardless of their religion, ethnicity, gender, or political background, without discrimination.

For the Company, respect for equality in service is a tangible manifestation of the implementation of good corporate governance, as well as compliance with applicable regulations. These regulations include Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 No. 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3821), as well as the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

Komitmen untuk memperlakukan mitra penjaminan secara setara membawa hasil dengan tidak adanya pengaduan akibat diskriminasi dari konsumen selama tahun pelaporan yang ditujukan kepada Jamkrindo.

Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa [OJK F.26]

Jamkrindo menyadari bahwa kebutuhan mitra penjaminan terus berubah seiring perkembangan zaman. Untuk tetap kompetitif dan memenangkan persaingan, perusahaan berkomitmen untuk melakukan inovasi serta pengembangan produk dan layanan secara berkelanjutan. Upaya inovasi ini tidak hanya mencakup produk dan layanan, tetapi juga meliputi aspek pemasaran dan bidang lainnya.

Dengan fokus pada keunggulan kompetitif, Jamkrindo melaksanakan berbagai program dan kebijakan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen. Program-program tersebut mencakup penyediaan layanan yang setara bagi semua mitra penjaminan, inovasi dalam pengembangan produk dan jasa, penekanan pada evaluasi kualitas produk, serta pembukaan saluran pengaduan untuk memberikan solusi terbaik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada tahun 2024, inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang dilakukan Jamkrindo antara lain meluncurkan Jamkrindo Digital Environment (J@DE), aplikasi yang memberikan kemudahan untuk Terjamin dan/atau Calon Terjamin dalam mendapatkan layanan penjaminan terdekat. J@DE merupakan alat komunikasi digital yang efektif untuk menunjang kebutuhan Terjamin dan/atau Calon Terjamin

Produk yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Konsumen [OJK F.27]

Jamkrindo berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku di perusahaan penjaminan dalam menjalankan usaha, termasuk regulasi dalam menawarkan produk dan layanan kepada mitra penjaminan. Perseroan memastikan semua produk dan jasa yang ditawarkan telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga teruji keamanannya bagi mitra penjaminan. Selaras dengan itu, Jamkrindo secara konsisten menerapkan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin, Jamkrindo intensif menyampaikan informasi terkait risiko produk penjaminan yang dapat dan tidak dapat dijamin kepada mitra penjaminan. Risiko penjaminan yang dapat dijamin adalah risiko kegagalan Terjamin dalam menyelesaikan kewajiban finansial kepada Penerima Jaminan (Bank/Non Bank) yang disebabkan karena kegagalan usaha atau proyek sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan kredit/pembiayaan sampai

The commitment to treating customers equally has yielded results, as there were no complaints regarding discrimination from consumers directed to Jamkrindo during the reporting year.

Innovation and Product/Service Development [OJK F.26]

Jamkrindo acknowledges that customer needs continue to evolve with the times. To remain competitive and succeed in the market, the company is committed to continuous innovation and development of products and services. This innovation effort not only covers products and services but also extends to marketing and other areas.

With a focus on competitive advantage, Jamkrindo implements various programs and policies to fulfill its responsibilities to consumers. These programs include providing equal services for all customers, innovation in product and service development, emphasis on product quality evaluation, and the establishment of complaint channels to provide the best solutions in accordance with applicable procedures.

In 2024, the innovation and development of products and services carried out by Jamkrindo. This includes launching Jamkrindo Digital Environment (J@DE), an application that makes it easier for Guaranteed Parties and/or Prospective Guaranteed Parties to obtain the nearest guarantee services. J@DE is an effective digital communication tool to support the needs of Guaranteed Parties and/or Prospective Guaranteed Parties.

Products That Have Undergone Safety Evaluation for Consumers [OJK F.27]

Jamkrindo is committed to complying with all regulations applicable to guarantee companies in the conduct of its business, including regulations on offering products and services to customers. The company ensures that all products and services offered meet the requirements and have been approved by the Financial Services Authority (OJK), ensuring their safety for customers. In line with this, Jamkrindo consistently implements POJK No. 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector; Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector; and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 17/SEOJK.07/2018 on Guidelines for Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.

To minimize the risk of losses as much as possible, Jamkrindo intensively provides information related to the risks of guarantee products that can and cannot be guaranteed to customers. The risks that can be guaranteed are the risk of failure by the Guaranteed Party in fulfilling its financial obligations to the Guarantee Recipient (Bank/Non-Bank), caused by business or project failure, thus causing credit/financing arrears up to collectability level 4 (doubtful). Losses that cannot be guaranteed

dengan kolektibilitas 4 (diragukan). Kerugian yang tidak dapat dijamin meliputi kerugian yang disebabkan *force majeure*, *fraud*, *sidestreaming*, transaksi fiktif dan hal-hal lain yang disepakati antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

Dalam upaya meningkatkan *risk awareness* dan literasi penjaminan kepada para mitra penjaminan, Jamkrindo melakukan beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Penjaminan UMKM Jamkrindo melalui kegiatan Webinar dan Workshop.
2. Pendampingan dan Pembinaan UMKM, antara lain:
 - a. Klinik Bisnis UMKM (*One on one Coaching*);
Program ini merupakan kegiatan pendampingan atau bimbingan intensif yang diberikan kepada para pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara *one on one*.
 - b. Kelas Bisnis 2024 (*Creative Fasihion Preneur*);
Kelas bisnis 2024 merupakan pembekalan kepada para UMKM khusus nya yang bergerak di bidang fesyen. Kegiatan ini telah berlangsung selama 3 bulan dengan jumlah peserta 30 UMKM yang berasal dari industri mode dengan berbagai profesi antara lain desainer, penjahit, dan pelaku usaha mode.
 - c. Pelatihan Literasi Keuangan UMKM di 10 Kota;
Program literasi keuangan merupakan program tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha, sehingga para UMKM dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan finansial.
 - d. Pelatihan tematik bagi UMKM
Pelatihan tematik UMKM bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pelaku UMKM di bidang tertentu. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, pada tahun 2024 telah dilakukan 2 pelatihan tematik yaitu :
 - i) Kupas Tuntas Shoptokopedia.
 - ii) Seminar Pentingnya Perlindungan Merek Bagi UMKM
3. Peningkatan UMKM
 - a. Pengembangan Platform UMKM Layak;
Platform “UMKM Layak” merupakan platform yang bertujuan membantu UMKM agar dapat menscroing para pelaku usaha. Pada tahun 2024 platform tersebut dikembangkan untuk membantu digitalisasi UMKM dari sisi laporan keuangan dengan penambahan modul *Point of Sale* (POS) yang merupakan sistem digital yang membantu UMKM mengelola transaksi penjualan.

Dampak Produk/Jasa

Sebagai lembaga penjamin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh Jamkrindo telah dievaluasi untuk memastikan keamanannya bagi mitra. Untuk memberikan layanan terbaik, perusahaan menyampaikan informasi produk dan layanan secara transparan melalui berbagai saluran, termasuk situs web, brosur, *banner*, dan mobil keliling. Upaya ini telah menghasilkan dampak positif dengan tidak adanya insiden ketidakpatuhan terkait informasi

include those caused by force majeure, fraud, sidestreaming, fictitious transactions, and other matters agreed upon between the Guarantor and the Guarantee Recipient.

In an effort to increase risk awareness and guarantee literacy among customers, Jamkrindo implements several work programs as follows:

1. Dissemination and education on Jamkrindo's MSME guarantee through webinars and workshops.
2. Assistance and guidance for MSMEs, including:
 - a. MSME Business Clinic (*One-on-One Coaching*);
This program is an intensive assistance or guidance activity provided to business actors with the aim of improving their capacity and competence in managing and developing their businesses on a one-on-one basis.
 - b. Business Class 2024 (*Creative Fashion Entrepreneurship*);
Business Class 2024 is a training program for SMEs, particularly those in the fashion industry. The program ran for three months with 30 participants from the fashion industry, including designers, tailors, and fashion business operators.
 - c. Financial Literacy Training for MSMEs in 10 Cities;
The financial literacy program is an annual program aimed at improving the understanding and ability of MSME actors in managing business finances, so that MSMEs can make better financial decisions and improve their financial well-being.
 - d. Thematic Training for MSMEs
Thematic training for MSMEs aims to improve the skills, knowledge, and capabilities of MSME actors in specific fields. This training can cover various topics. In 2024, two thematic training sessions were conducted, namely:
 - i) Shoptokopedia: A Comprehensive Overview.
 - ii) Seminar on the Importance of Brand Protection for MSMEs.
3. MSME Ranking
 - a. Development of a MSME-Friendly Platform;
The “UMKM Layak” platform is designed to assist SMEs in scoring business operators. In 2024, the platform was developed to support SME digitalization from a financial reporting perspective by adding a *Point of Sale* (POS) module, a digital system that helps SMEs manage sales transactions.

Impact of Products/Services

As a guarantee institution registered with the Financial Services Authority (OJK), all products and services offered by Jamkrindo have been evaluated to ensure their safety for partners. To provide the best service, the company communicates product and service information transparently through various channels, including its website, brochures, banners, and mobile units. These efforts have resulted in a positive impact, with no incidents of non-compliance related to product and service information,

produk dan layanan, serta tidak terdapat dampak negatif dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh Jamkrindo. [GRI 413-2, 417-1, 417-2] [OJK F.28]

Dalam memasarkan produk dan layanan, Jamkrindo selalu mematuhi aturan dan etika yang berlaku, termasuk dalam periklanan, promosi, dan sponsorship. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan pemasaran yang adil dan bertanggung jawab dengan menghindari klaim yang berlebihan atau menipu. Komitmen ini diambil karena Jamkrindo tidak ingin mengambil keuntungan dari kurangnya pengetahuan atau pilihan konsumen. Kesungguhan Jamkrindo dalam mematuhi etika dan regulasi terkait pemasaran berdampak positif, terbukti dengan tidak adanya insiden atau laporan mengenai ketidakpatuhan dalam komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship. [GRI 417-3]

Produk/Jasa yang Ditarik Kembali [OJK F.29]

Selama tahun 2024, tidak ada produk dan layanan Jamkrindo yang ditarik kembali dengan alasan apa pun.

Pengaduan Mitra penjaminan [OJK F.24]

Mitra penjaminan (Terjamin) merupakan salah satu pemangku kepentingan eksternal utama bagi Jamkrindo. Keberadaan dan kepercayaan mereka sangat menentukan keberlanjutan usaha Perusahaan. Dalam konteks ini, mitra penjaminan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja produk dan layanan yang ditawarkan oleh Jamkrindo. Untuk memenuhi tanggung jawab dan hak mitra penjaminan, Perusahaan menyediakan berbagai saluran untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan, seperti layanan *contact center* 1500-701, faksimile, email, website, *live chat*, media sosial, atau secara langsung ke kantor operasional. Semua keluhan yang diterima dikelola oleh Divisi Jaringan PT Jamkrindo.

Mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan POJK mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Jamkrindo menerapkan prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana dan cepat. Setiap pengaduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lambat 20 hari kerja setelah diterima. Jika diperlukan, Perusahaan dapat memperpanjang waktu penyelesaian hingga 20 hari kerja tambahan dengan pemberitahuan tertulis kepada nasabah sebelum batas waktu 20 hari pertama berakhir. Atas pengaduan yang masuk, tindak lanjut dan penyelesaiannya, Jamkrindo melaporkannya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2024, Perusahaan menerima pengaduan dari mitra penjaminan sebanyak 10 kasus. Dari jumlah itu, semuanya sudah diselesaikan dengan baik.

and no negative impacts from the products and services offered by Jamkrindo. [GRI 413-2, 417-1, 417-2] [OJK F.28]

In marketing its products and services, Jamkrindo always adheres to applicable rules and ethics, including in advertising, promotions, and sponsorships. The company is committed to implementing fair and responsible marketing by avoiding exaggerated or deceptive claims. This commitment is made because Jamkrindo does not seek to take advantage of consumers' lack of knowledge or choices. Jamkrindo's dedication to adhering to ethical standards and regulations related to marketing has had a positive impact, evidenced by the absence of incidents or reports of non-compliance in marketing communications, including advertising, promotions, and sponsorships. [GRI 417-3]

Products/Services Withdrawn [OJK F.29]

In 2024, no Jamkrindo's products or services were withdrawn for any reason.

Customer Complaints [OJK F.24]

Customers (Guaranteed Parties) are one of the key external stakeholders for Jamkrindo. Their presence and trust are critical to the sustainability of the Company's business. In this context, customers have high expectations regarding the performance of the products and services offered by Jamkrindo. To fulfill customer responsibilities and rights, the Company provides various channels to convey complaints or complaints, such as contact center service 1500-701, fax, email, website, live chat, social media, or directly to the operational office. All incoming complaints are managed by the Network and services Division of PT Jamkrindo.

Referring to the Law on Consumer Protection and POJK on Consumer Protection in the Financial Services Sector, Jamkrindo applies the principle of simple and fast complaint handling and dispute resolution. Every incoming complaint will be immediately followed up and resolved no later than 20 working days from the date of receipt. If necessary, the Company may extend the settlement time up to 20 additional working days with written notification to the customer before the first 20-day deadline expires. For incoming complaints, follow-up and settlement, Jamkrindo reports them periodically to the Financial Services Authority.

During 2024, the Company received complaints from customers as many as 10 cases. Of that number, all have been resolved properly.

Tabel Jumlah Pengaduan Mitra Penjaminan dan Tindak Lanjut Tahun 2022-2024
Table of Number Customer Complaints and Follow-Ups for 2022-2024

Uraian Description	Jumlah Keluhan Diterima Total Complaints Received		Status
	Sudah Diselesaikan Successfully Settled	Dalam Proses Penyelesaian In progress of Settlement	
2024	10	0	Selesai ditindaklanjuti Completed
2023	28	0	Selesai ditindaklanjuti Completed
2022	12	0	Selesai ditindaklanjuti Completed

Survei Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan [OJK F.30]

Kepuasan mitra penjaminan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Jamkrindo dalam memberikan produk dan layanan terbaik. Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen, Perusahaan secara berkala melaksanakan survei kepuasan mitra penjaminan. Selain untuk mengetahui respons mitra penjaminan terhadap kualitas produk dan layanan, survei ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan umpan balik yang berguna bagi perbaikan.

Pencapaian kepuasan mitra penjaminan diukur berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 75/SPK/UMU/XI/2020 yang mengatur pengadaan konsultan untuk survei kepuasan dan keterikatan pelanggan. Pelaksanaan survei ini mengikuti pedoman Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat No. S-445/D7.MBU/10/2016. Survei kepuasan pelanggan melibatkan 3 (tiga) responden yang terdiri dari: Mitra kerja (penerima jaminan) eksisting, calon mitra kerja, dan mantan mitra kerja. Pelanggan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jenis produk dan jenis instansinya.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan Jamkrindo tahun 2024 diperoleh nilai indeks kepuasan sebesar 89,64%, naik dibanding tahun 2023 yang mencapai 88,85%. Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa nilai kepuasan tergolong dalam kategori Sangat Baik.

Sementara itu, indeks keterikatan pelanggan Jamkrindo pada tahun 2024 tercatat sebesar 90,90%, naik dibandingkan tahun 2023 dengan nilai indeks 89,48%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mitra Jamkrindo semakin percaya dengan layanan Perusahaan dan terjadi komunikasi dua arah yang kontinu sehingga terjalin hubungan yang mendalam antara Jamkrindo dan mitra.

Customer Satisfaction and Engagement Survey [OJK F.30]

Customer satisfaction is the primary objective that Jamkrindo aims to achieve in providing the best products and services. To determine the level of customer satisfaction, the Company periodically conducts customer satisfaction surveys. In addition to gauging customer responses to the quality of the products and services, this survey is also serves a means to obtain constructive feedback for improvement.

Achievement of customer satisfaction is measured based on Work Order (SPK) No. 75/SPK/UMU/XI/2020 which regulates the procurement of consultants for customer satisfaction and engagement surveys. The implementation of this survey follows the guidelines of the SOE Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) stipulated by the Ministry of SOEs through letter No. S-445/D7.MBU/10/2016. The customer satisfaction survey involves 3 (three) respondents consisting of: Existing work partners (collateral recipients), prospective work partners, and former work partners. Customers were divided into 2 (two) groups, namely the product type and agency type.

Based on the results of Jamkrindo's 2024 customer satisfaction survey, a satisfaction index score of 89.64% was obtained, an increase from 88.85% in 2023. The survey results indicate that the satisfaction level is classified as Very Good.

Additionally, Jamkrindo's customer loyalty index in 2024 was recorded at 90.90%, an increase from 89.48% in 2023. These results demonstrate that Jamkrindo's partners are increasingly confident in the Company's services and that there is continuous two-way communication, fostering a strong relationship between Jamkrindo and its partners.

Kontribusi terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan [GRI G4 FS16]

Literasi dan inklusi keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih bijak dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu, pemerintah menekankan peran lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Adapun inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat, untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024. Hasil survei kolaborasi dua lembaga yang diumumkan pada awal Agustus 2024 menyebutkan indeks literasi keuangan masyarakat sebesar 65,43% dan inklusi keuangan 75,02%. Pengumpulan data SNLIK 2024 dilakukan pada 9 Januari-5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). Jumlah sampel SNLIK tahun 2024 sebanyak 10.800 responden yang berumur antara 15-79 tahun.

OJK dan BPS menegaskan indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK 2024 tidak dapat langsung dibandingkan secara langsung terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan hasil tahun 2022. Sebab, metodologi sampling untuk SNLIK 2024 berbeda dengan SNLIK 2022. Dalam SNLIK 2024 metodologi sampling yang digunakan adalah *stratified multistage cluster sampling* yang lebih mampu merepresentasikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara keseluruhan. Adapun SNLIK 2022 menggunakan metodologi *purposive sampling* dan *simple random sampling* yang menghasilkan sampel responden yang cenderung bias ke perkotaan dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Merujuk hasil SNLIK 2022, indeks literasi keuangan masyarakat tercatat sebesar 49,68%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%.

Lebih lanjut, hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%. Indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan laki-laki, yakni masing-masing 76,08% dan 73,97%. Sementara itu, berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 69,71% dan 78,41%, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni masing-masing sebesar 59,25% dan 70,13%.

Contribution to Financial Literacy and Inclusion [GRI G4 FS16]

Financial literacy and inclusion play a very important role in increasing public understanding of financial products and services, as well as enabling people to make more informed and prudent financial decisions in financial management. In this regard, the government emphasizes the role of financial services institutions, including banks, in increasing financial inclusion through various programs and activities. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 76/POJK.07/2016 on Improving Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public, financial literacy is knowledge, skills, and beliefs, which influence attitudes and behaviors to improve the quality of decision making and financial management in order to achieve prosperity. Meanwhile, financial inclusion is the availability of access to various financial institutions, products, and services in accordance with the needs and abilities of the community in order to improve people's welfare.

To measure the community's financial literacy and inclusion index, for the first time, the Financial Services Authority (OJK) and the Central Statistics Agency (BPS) conducted the National Survey of Financial Literacy and Inclusion (SNLIK) in 2024. The results of the two institutions' collaborative survey announced in early August 2024 stated that the public financial literacy index was 65.43% and financial inclusion was 75.02%. SNLIK 2024 data collection was conducted from 9 January to 5 February 2024 in 34 provinces covering 120 regencies/cities including 8 OJK office areas (1,080 census blocks). The SNLIK 2024 sample size is 10,800 respondents aged between 15-79 years.

OJK and BPS emphasized that the financial literacy and inclusion index from SNLIK 2024 cannot be directly compared to the financial literacy and inclusion index from 2022. This is because the sampling methodology for SNLIK 2024 is different from SNLIK 2022. In SNLIK 2024 the sampling methodology used is stratified multistage cluster sampling which is more capable of representing the overall level of financial literacy and inclusion of the community. SNLIK 2022 used purposive sampling and simple random sampling methodology which resulted in a sample of respondents that tended to be biased towards urban and highly educated groups. Referring to the SNLIK 2022 results, the public financial literacy index was recorded at 49.68%, while the financial inclusion index reached 85.10%.

Furthermore, the SNLIK 2024 results show that based on gender, the female financial literacy index is higher than the male financial literacy index, at 66.75% and 64.14% respectively. The female financial inclusion index is also higher than the male financial inclusion index, at 76.08% and 73.97% respectively. Meanwhile, based on village classification, the financial literacy and inclusion index in urban areas is 69.71% and 78.41% respectively, higher than in rural areas, which are 59.25% and 70.13% respectively.

Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82%, 71,72%, dan 70,19%. Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,70% dan 52,51%. Kemudian, kelompok umur 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 84,28%, 81,51%, dan 79,21%. Namun demikian, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 57,96% dan 63,53%.

Sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana terlampir dalam POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Jamkrindo telah menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan di sepanjang tahun 2024. Program tersebut adalah Edukasi Keuangan bertajuk Kelas Bisnis UMKM, Marketing Go Digital, dan Pengelolaan SDM bagi UMKM. Tujuan kegiatan tersebut adalah menambah pengetahuan bagi UMKM tentang perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan, identifikasi kesehatan keuangan, perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Selama tahun 2024, sebanyak 1.127 UMKM telah mengikuti program Edukasi Keuangan yang diselenggarakan oleh Jamkrindo.

Kepatuhan Sosial Ekonomi

Jamkrindo memiliki komitmen kuat terhadap kepatuhan pada seluruh regulasi sosial ekonomi dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini mencerminkan tindakan etis perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, mitra penjaminan, pemerintah, regulator, vendor, dan masyarakat. Sebagai bagian dari BUMN, Jamkrindo wajib menjunjung tinggi hukum serta mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga eksistensi perusahaan.

Komitmen Jamkrindo dalam mematuhi regulasi di bidang sosial dan ekonomi membuahkan hasil positif dengan tidak adanya sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang tersebut pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Jamkrindo berhasil menjalankan kegiatan bisnisnya dengan lancar dan tanpa hambatan hukum.

[GRI 2-27]

Based on age groups, individuals aged 26–35, 36–50, and 18–25 years demonstrate the highest financial literacy indices, recorded at 74.82%, 71.72%, and 70.19% respectively. Conversely, the age groups of 15–17 years and 51–79 years reflect the lowest levels of financial literacy, with indices of 51.70% and 52.51% respectively. In terms of financial inclusion, the age groups of 26–35, 36–50, and 18–25 years also exhibit the highest inclusion indices, at 84.28%, 81.51%, and 79.21% respectively. On the other hand, individuals within the 15–17 years and 51–79 years age categories register the lowest financial inclusion indices, amounting to 57.96% and 63.53% respectively.

As a form of compliance in fulfilling the obligations as attached in POJK Number 3 of 2023 concerning Improvement of Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and Public, and POJK Number 22 of 2023 concerning Protection of Consumers and Public in the Financial Services Sector, Jamkrindo has organized various activity programs for the implementation of financial literacy and inclusion throughout 2024. The programs are Financial Education titled MSME Business Class, Marketing Go Digital, and HR Management for MSMEs. The purpose of these activities is to increase knowledge for MSMEs about program planning for future financial goals, identification of financial health, taxation related to financial services products and/or services. During 2024, 1,127 MSMEs participated in the Financial Education program organized by Jamkrindo.

Social Economy Compliance

Jamkrindo has a strong commitment to complying with all socio-economic regulations in conducting its business. This reflects the company's ethical actions towards all stakeholders, including employees, customers, government, regulators, vendors, and society. As part of a State-owned Enterprise, Jamkrindo must uphold the law and comply with all applicable rules and regulations to gain trust and maintain the company's existence.

Jamkrindo's commitment to complying with social and economic regulations has yielded positive results with no sanctions or fines due to non-compliance with laws and regulations in these areas in 2024. This shows that Jamkrindo has successfully run its business activities smoothly and without legal impediments.

[GRI 2-27]

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1]

WRITTEN VERIFICATION BY AN INDEPENDENT PARTY [OJK G.1]

Laporan Keberlanjutan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Tahun 2024 belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (Assurance Services Provider) yang independen. Namun demikian, Perusahaan menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

The 2024 Sustainability Report of PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) has not been verified by an independent Assurance Services Provider. However, the Company guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate, and factual.

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

FEEDBACK SHEET [OJK G.2]

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah berkenan membaca Laporan Keberlanjutan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Tahun 2024. Untuk meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk memberi tanda silang pada pilihan jawaban yang tersedia dan mengisi titik-titik di Lembar Umpan Balik ini:

Thank you for agreeing to read The PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) 2024 Sustainability Report. To further enhance the quality of our future reports, we kindly request you to tick the appropriate answers and fill in the blanks on this Feedback Sheet:

- Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Jamkrindo:
This Sustainability Report provides clear information on the economic, social, and environmental performance carried out by Jamkrindo:
a. Setuju/Agree b. Tidak Setuju/Disagree c. Tidak tahu/Do not know
- Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan Jamkrindo:
This Sustainability Report provides clear information on Jamkrindo's fulfillment of social and environmental responsibilities:
a. Setuju/Agree b. Tidak Setuju/Disagree c. Tidak tahu/Do not know
- Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami.
The material and data in this Sustainability Report are easy to understand and comprehend.
a. Setuju/Agree b. Tidak Setuju/Disagree c. Tidak tahu/Do not know
- Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap.
The material and data in this Sustainability Report are sufficiently comprehensive.
a. Setuju/Agree b. Tidak Setuju/Disagree c. Tidak tahu/Do not know
- Desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus.
The design, layout, graphics and photos in this Sustainability Report are good.
a. Setuju/Agree b. Tidak Setuju/Disagree c. Tidak tahu/Do not know
- Informasi yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini.
Tell us about the most useful information from this Sustainability Report.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Informasi yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini.
Tell us about the least useful information from this Sustainability Report.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Informasi yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang

Tell us the information that is considered lacking in this Sustainability Report and needs to be added to the next one

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Identitas Pengirim:

Sender Identity:

Nama/Name :

Email :

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan (lingkari salah satu)

Identify by stakeholder category (circle one)

- Pelanggan/Konsumen/Customers
- Pemegang saham/Shareholders
- Pemerintah dan DPR/Government and House of Representatives
- Pegawai/Employee
- Serikat Pekerja/Labor Unions
- Mitra Kerja/*Supplier*/Business Partners/Suppliers
- Media massa/Mass Media
- Masyarakat, Komunitas Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Society, Local Community, Social Organizations, Non-Governmental Organizations (NGOs)
- Lain-lain, sebutkan...../Others, please specify.....

Mohon Lembar Umpan Balik ini dikirim ke:/Please send this Feedback Sheet to:

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Gedung Jamkrindo/Jamkrindo Building

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6

Kota Baru, Bandar Kemayoran

Jakarta Pusat 10610, Indonesia

Telepon/Phone : +62 21 6540335

Faksimile/Fax : +62 21 6540344, 6540348

Email : info@jamkrindo.co.id

Website : www.jamkrindo.co.id

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [OJK G.3]

RESPONSE TO FEEDBACK ON THE PREVIOUS YEAR'S REPORT

[OJK G.3]

Selama tahun 2024, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tidak menerima tanggapan spesifik terkait isi laporan keberlanjutan tahun 2023. Namun demikian, Perseroan berkomitmen untuk menyempurnakan isi laporan sesuai dengan panduan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, serta GRI Universal Standards 2021.

In 2024, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) did not receive any specific feedback regarding the content of the 2023 Sustainability Report. However, the Company is committed to improving the report's content in accordance with the guidelines of POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as well as the GRI Universal Standards 2021.

DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

LIST OF DISCLOSURES ACCORDING TO POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

No Indeks Index number	Nama Indeks Index Name	Hal. Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation on Sustainability Strategy	
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Overview of Sustainability Performance		
B.1	Aspek Ekonomi Economic Aspects	
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspects	
B.3	Aspek Sosial Social Aspects	
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Values of Sustainability	
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	
C.3	Skala Usaha Business Scale	
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities Conducted	
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in Associations	
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Material Changes in the Issuer and Public Company	
Penjelasan Direksi Explanation from the Board of Directors		
D.1	Penjelasan Direksi Explanation from the Board of Directors	
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan PIC for the Implementation of Sustainable Finance	
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment of the Implementation of Sustainable Financial	
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan Problems with the Implementation of Sustainable Finance	
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Sustainability Culture	
Kinerja Ekonomi Economic Performance		

No Indeks Index number	Nama Indeks Index Name	Hal. Page
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Targets and Performance: Production, Portfolio, Financing/Investment, Revenue, and Profit & Loss	
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing or Investment Targets in Financial Instruments or Projects Aligned with the Implementation of Sustainable Finance	
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
Aspek Umum General Aspects		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	
Aspek Material Material Aspects		
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan Utilization of Environmentally Friendly Materials	
Aspek Energi Energy Aspects		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Used	
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievements in Energy Efficiency and the Use of Renewable Energy	
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Use	
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts from Operational Areas that are Near or Located in Conservation Areas or Areas with Biodiversity	
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Actions	
Aspek Emisi Emission Aspects		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Amount and Intensity of Emissions Generated by Type	
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievements of Emission Reduction	
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Amount of Waste and Effluent Generated by Type	
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanism	
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) Spills That Occur (If Any)	
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Complaint Aspects Related to the Environment		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	
Kinerja Sosial Social Performance		

No Indeks Index number	Nama Indeks Index Name	Hal. Page
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen Commitment of FSI, Issuer, or Public Company to Provide Equal Services for Products and/or Services to Consumers	
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman Decent and Safe Working Environment	
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Capability Training and Development	
Aspek Masyarakat Community Aspects		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impact on Surrounding Communities	
F.24	Pengaduan Masyarakat Community Complaints	
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility Activities (TJSL)	
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility for Sustainable Product/Service Development		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan Innovation and Development on Sustainable Financial Product/Service	
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Products/Services That Have Been Evaluated For Their Safety For Customers	
F.28	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact	
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Product Recalls	
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Product and/or Services	
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada) Written Verification from Independent Party (if any)	
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Responses to Feedback on the Previous Year's Sustainability Report	
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik List of Disclosures in Compliance with POJK 51/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies	

INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2021

INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2021

Pernyataan penggunaan Statement of use	PT Jaminan Kredit Indonesia telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI ini untuk periode 1 Januari 2024-31 Desember 2024 sesuai dengan Standard GRI. PT Jaminan Kredit Indonesia has reported the information cited in the GRI content index for the period January 1, 2024, to December 31, 2024, in accordance with the GRI Standards.
GRI 1 GRI 1	GRI 1: Landasan 2021 GRI 1: Foundation 2021
GRI Sektor Standards GRI Sector Standards	GRI G4 Pengungkapan Sektor Layanan Keuangan 2013 GRI G4 Financial Services Sector Disclosure of 2013

Standard GRI GRI Standards		PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Pengecualian Exceptions		
				Persyaratan yang Dikecualikan Excepted Requirements	Alasan Reasons	Penjelasan Explanations
GRI Pengungkapan Umum 2021 GRI General Disclosures 2021	2-1	Detail Organisasi Organizational Details				
	2-2	Entitas yang tercakup dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting				
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak Reporting period, frequency and contact point				
	2-4	Pernyataan ulang informasi Restatements of information				
	2-5	Penjaminan eksternal External assurance				
	2-6	Kegiatan, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships				
	2-7	Karyawan Employees				
	2-8	Pekerja yang Bukan Pekerja Langsung Workers who are Not Employees				
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition				
	2-10	Nominasi dan seleksi untuk badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body				
	2-11	Pejabat tata kelola tertinggi Chair of the highest governance Body				
	2-12	Peran pejabat tata kelola tertinggi dalam memantau dampak manajemen Role of the highest governance body in overseeing the impacts of management				
	2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts				
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting				
	2-15	Konflik kepentingan Conflicts of interest				
	2-16	Komunikasi keprihatinan kritis Communication of critical concerns				
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body				

Standard GRI GRI Standards		PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Pengecualian Exceptions		
				Persyaratan yang Dikecualikan Excepted Requirements	Alasan Reasons	Penjelasan Explanations
	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body				
	2-19	Kebijakan Remunerasi Remuneration Policies				
	2-20	Proses penentuan remunerasi Process to determine remuneration				
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio				
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy				
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments				
	2-24	Komitmen dalam menanamkan kebijakan Embedding policy commitments				
	2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif Processes to remediate negative impacts				
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan menyampaikan kekhawatiran Mechanisms for seeking advice and raising concerns				
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations				
	2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations				
	2-29	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement				
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements				

TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS		Pengungkapan Disclosures	Hal. Page	Pengecualian Exceptions		
				Persyaratan yang Dikecualikan Excepted Requirements	Alasan Reasons	Penjelasan Explanations
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics				
	3-2	Daftar topik material List of material topics				

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPICS

KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 201: Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed				

TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS		Pengungkapan Disclosures	Hal. Page	Pengecualian Exceptions		
				Persyaratan yang Dikecualikan Excepted Requirements	Alasan Reasons	Penjelasan Explanations
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities due to climate change				
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans				
	201-4	Financial assistance received from government				
KEBERADAAN PASAR MARKET EXISTENCE						
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG INDIRECT ECONOMIC IMPACT						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impact	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investments and services supported				
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts				
ANTI-KORUPSI ANTI-CORRUPTION						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption				
GRI 205: Antikorupsi 2016 GRI 3: Material Topics 2021	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training about anticorruption policies and procedures				
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken				
PERILAKU ANTI-PERSAINGAN ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOUR						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 206: Perilaku Anti-Persaingan 2016 GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli Legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices				
TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL TOPICS						
MATERIAL MATERIALS						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 301: Material 2016 GRI 301: Materials 2016	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume Materials used by weight or volume				

TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS		Pengungkapan Disclosures	Hal. Page	Pengecualian Exceptions		
				Persyaratan yang Dikecualikan Excepted Requirements	Alasan Reasons	Penjelasan Explanations
	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan Recycled input materials used				
	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya Reclaimed products and their packaging materials				
ENERGI ENERGY						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 302: Energi 2016 GRI 302: Energy 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization				
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside of the organization				
	302-3	Intensitas energi Energy intensity				
	302-4	Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption				
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa Reductions in energy requirements of products and services				
AIR DAN EFLUEN WATER AND EFFLUENTS						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 303: Air dan Efluen 2018 GRI 303: Water and Effluents 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama Interactions with water as a shared resource				
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air Management of impacts related to water discharge				
	303-3	Pengambilan air Water intake				
	303-4	Pembuangan air Water discharge				
	303-5	Konsumsi air Water consumption				
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPICS						
KEPEGAWAIAN EMPLOYMENT						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 401: Kepegawaian 2016 GRI 401: Employment 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee hires and employee turnover				
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to fulltime employees that are not provided to temporary or parttime employees				
	401-3	Cuti melahirkan Parental leave				

TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS		Pengungkapan Disclosures	Hal. Page	Pengecualian Exceptions		
				Persyaratan yang Dikecualikan Excepted Requirements	Alasan Reasons	Penjelasan Explanations
HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMEN LABOR/MANAGEMENT RELATIONS						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen 2016 GRI 402: Labor/ Management Relations 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional Minimum notice periods regarding operational changes				
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Occupational health and safety management system				
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden Hazard identification, risk assessment, and incident investigation				
	403-3	Layanan kesehatan kerja Occupational health services				
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety				
	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Worker training on occupational health and safety				
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja Promotion of worker health				
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships				
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Workers covered by an occupational health and safety management system				
	403-9	Kecelakaan kerja Work-related injuries				
	403-10	Penyakit akibat kerja Work-related illness				

TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS		Pengungkapan Disclosures	Hal. Page	Pengecualian Exceptions		
				Persyaratan yang Dikecualikan Excepted Requirements	Alasan Reasons	Penjelasan Explanations
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TRAINING AND EDUCATION						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 GRI 404: Training and Education 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee				
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs				
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews				
MASYARAKAT LOKAL LOCAL COMMUNITIES						
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016 GRI 413: Local Communities 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs				
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities				
PEMASARAN DAN PELABELAN MARKETING AND LABELING						
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics				
	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa Requirements for product and service information and labeling				
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016 GRI 417: Marketing and Labeling 2016	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa Incidents of noncompliance concerning product and service information and labeling				
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran Incidents of noncompliance concerning marketing communications				

INDEKS GRI G4 PENGUNGKAPAN SEKTOR LAYANAN KEUANGAN 2013

INDEX GRI G4 DISCLOSURE OF FINANCIAL SERVICES SECTOR 2013

Pengungkapan Disclosure	Uraian Description	Halaman Page
Produk Portofolio Portfolio Product		
FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial yang spesifik yang diaplikasikan pada lini bisnis Policies with specific environmental and social components applied to business lines	
FS2	Prosedur untuk memeriksa dan menyaring risiko lingkungan dan sosial pada lini bisnis. Procedures to check and filter environmental and social risks in business lines.	
FS3	Proses untuk memonitor implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial Processes to monitor client implementation and compliance with environmental and social requirements	
FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan dan sosial serta prosedur yang diaplikasikan pada lini bisnis Process to improve staff competency in implementing environmental and social policies and procedures applied to business lines	
FS5	Interaksi dengan klien/penanam modal/mitra bisnis terkait risiko serta kesempatan terkait lingkungan dan sosial Interaction with clients/investors/business partners on environmental and social risks and opportunities	
FS6	Persentase portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, menurut ukuran (contoh: mikro/SME/besar), dan menurut sektor Portfolio percentage for business lines by region, by size (e.g. micro/SME/large), and by sector	
FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis Monetary value of products and services designed to deliver specific social benefits to each business line	
FS8	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan lingkungan yang spesifik untuk setiap lini bisnis Monetary value of products and services designed to deliver specific environmental benefits to each business line	
Audit Audit		
FS9	Cakupan dan frekuensi audit untuk menilai implementasi kebijakan lingkungan dan sosial serta prosedur penilaian risiko Scope and frequency of audits to assess implementation of environmental and social policies and risk assessment procedures	
Kepemilikan Aktif Active Ownership		
FS10	Persentase dan jumlah perusahaan yang dipegang dalam portofolio institusi tempat organisasi pelaporan berinteraksi dalam isu lingkungan atau sosial Percentage and number of companies held in the portfolio of institutions where the reporting organization interacts on environmental or social issues	
FS11	Persentase aset di mana dilakukan penyaringan lingkungan atau sosial secara positif dan negatif Percentage of assets where positive and negative environmental or social screening is conducted	
FS12	Kebijakan pemungutan suara diaplikasikan pada isu lingkungan atau sosial untuk saham di mana perusahaan memiliki hak untuk memberikan suara atau nasihat melalui pemungutan suara Voting policy is applied to environmental or social issues for shares in which the company has the right to vote or advise by voting	
FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi Access points in low-population or economically disadvantaged areas	
FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung/penyandang cacat Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged/disabled people	
Tanggung Jawab Produk Product Responsibility		
FS15	Kebijakan untuk rancangan dan penjualan produk dan layanan keuangan yang adil Policies for fair design and sale of financial products and services	
FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat Initiatives to improve financial literacy by type or recipient of benefits	

MEMPERKOKOH FONDASI SEBAGAI PREFERENSI UTAMA AKSESIBILITAS FINANSIAL UMKM

STRENGTHENING THE FOUNDATION AS THE PREFERRED
FINANCIAL ACCESSIBILITY FOR MSMEs



A member of **IFG**

PT Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo. Jl. Angkasa B-9
Kavling 6 Kota Baru Bandar - Kemayoran,
Jakarta Pusat, 10610

Telp : (021) 6540335
Email : contact@jamkrindo.co.id

